PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU

PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan mendasar untuk penyesuaian terhadap kebijakan;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan mendasar pada nomenklatur program dan kegiatan serta penambahan sub kegiatan berdasarkan kebijakan nasional;

c. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 07 Januari 2022
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 07 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR I
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (1/W.III/2022)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Perubahan kebijakan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan adanya perubahan pada nomenklatur struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta program-program pembangunan daerah yang wajib mengacu pada sub urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan pemetaan dan perubahan program, kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan program, kegiatan, serta adanya penambahan sub kegiatan yang baru.

Selain itu, Perubahan RPJMD dapat dilakukan mengingat penanganan dampak pasca merebaknya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), merupakan prioritas penanganan utama pemerintah pada masa-masa mendatang.

Perubahan RPJMD, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bisa terjadi karena bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3. Hubungan Antar Dokumen 9

1.4. Maksud dan Tujuan 19

1.5. Sistematika Penulisan 20

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **23**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 24

2.1.1. Kondisi Geografis 24

2.1.2. Kondisi Topografi 27

2.1.3. Kondisi Geologi 28

2.1.4. Kondisi Hidrologi 33

2.1.5. Kondisi Klimatologi 37

2.1.6. Penggunaan Lahan 38

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah 42

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana 44

2.1.9. Kondisi Demografi 52

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 55

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 55

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 68

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 76
2.3. Aspek Pelayanan Umum 78
2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar 78
2.3.1.1. Pendidikan 78
2.3.1.2. Kesehatan 86
2.3.1.3. Pekerjaan Umum 92
2.3.1.4. Perumahan Rakyat 97
2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat 102
2.3.1.6. Sosial 109
2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib
Non pelayanan Dasar 110
2.3.2.1. Ketenagakerjaan 110
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak 111
2.3.2.3. Pangan 113
2.3.2.4. Pertanahan 114
2.3.2.5. Lingkungan Hidup 115
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 125
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa 126
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 128
2.3.2.9. Perhubungan 130
2.3.2.10. Statistik 131
2.3.2.11. Persandian 132
2.3.2.12. Komunikasi dan Informasi 132
2.3.2.13. Koperasi dan UKM 134
2.3.2.14. Penanaman Modal 138

2.3.2.15. Kepemudaan dan Olahraga 140
2.3.2.16. Kebudayaan 141
2.3.2.17. Kearsipan 146
2.3.2.18. Perpustakaan 147
2.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan 148
2.3.3.1. Perikanan..... 148
2.3.3.2. Pertanian 149
2.3.3.3. Pariwisata 154
2.3.3.4. Perdagangan 161
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 163
2.3.4.1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 163
2.3.4.2. Keuangan..... 166
2.3.4.3. Kebijakan Koordinasi Perangkat Daerah 167
2.4. Aspek Daya Saing Daerah..... 171
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 171
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur..... 174
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 182
2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban 182
2.4.3.2. Kemudahan Perijinan..... 183
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia..... 186
2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja..... 187
2.4.4.2. Tingakat Ketergantungan 188

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 273
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 275
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD..... 276
3.1.2. Neraca Daerah 280
3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu 288
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran..... 288

3.2.2. Analisis Pembiayaan 289
3.3. Kerangka Pendanaan 293
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 293
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan 299

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 304
4.1. Permasalahan Pembangunan 305
4.1.1. Permasalahan terkait program pembangunan daerah 305
4.1.2. Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 322
4.2. Isu Strategis 336
4.2.1. Isu Strategis Nasional dan Internasional 336
4.2.2. Isu Strategis Kota Kotamobagu 360

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 377
5.1. Visi 380
5.2. Misi 382
5.3. Tujuan Dan Sasaran 387

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 391

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 421

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 466

BAB IX PENUTUP 525

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perubahan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
    a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
    d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
    e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat serta RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka dokumen–dokumen perencanaan termasuk RPJMD Kota Kotamobagu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian, dengan tidak merubah Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu 2018-2023, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 2)
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. RPJMN

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah dengan arah, kebijakan, umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-

bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kota Kotamobagu.

2. RPJMD Provinsi

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah dengan arah, kebijakan, umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kota Kotamobagu wajib dilakukan penyelarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

3. RPJPD

RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2005–2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan jangka panjang "**MEWUJUDKAN KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA YANG AMAN, ASRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA".**

RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Penyusunan RPJMD selain memuat visi misi dan program walikota dan wakil walikota Kota Kotamobagu periode 2018–2023, juga berpedoman pada visi dan misi Kota Kotamobagu beserta arah pembangunannya.

Pada tahap ketiga RPJMD Kota Kotamobagu fokus pembangunan masing– masing misi ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Kotamobagu disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian terutama di sektor jasa.

Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia antara lain meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian. Kondisi ini didukung pula oleh pengembangan jaringan insfrastruktur transportasi. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Rancangan Perubahan RTRW Tahun 2014-2034

Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rancangan Perubahan RTRW Kota Kotamobagu melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Kotamobagu

Tabel 1.1

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Kotamobagu

Tujuan Penataan Ruang :

"Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan lokal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan berdaya saing".

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi antara PPK, SPPK dan PPL secara berjenjang dan merata di seluruh wilayah kota	Strategi Pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara PPK, SPPK dan PPL secara berjenjang dan merata di seluruh wilayah kota meliputi ; a. Menetapkan pusat dan sub pusat pelayanan di seluruh kota kotamobagu yang saling terintegrasi secara berjenjang dan merata; b. Mengembangkan PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; c. Mengembangkan SPPK sebagi pusat pelayanan ekonomi yang melayani sub wilayah kota; d. mengembangkan PPL yang menyediakan sarana dan prasarana penunjang wilayah permukiman kota.

Tujuan Penataan Ruang :

"Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan lokal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan berdaya saing".

No	Kebijakan	Strategi
		e. mengembangkan fungsi ekonomi di wilayah perbatasan antara wilayah Kota Kotamobagu dengan kabupaten sekitarnya; dan f. mendorong pusat-pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan inovatif sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.
2	Peningkatan aksesibilitas dan sistem prasarana wilayah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah berbasis daya dukung lingkungan	Strategi peningkatan aksesibilitas dan sistem prasarana wilayah dalam rangka menunjang pengembangan wilayah berbasis daya dukung lingkungan meliputi; a. menghubungkan antara PPK, SPPK dan PPL melalui sistem jaringan transportasi darat; b. membangun dan meningkatkan jaringan jalan kota untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur evakuasi bencana; c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga seluruh kawasan; d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga seluruh kawasan; e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga seluruh kawasan;

Tujuan Penataan Ruang :

"Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan lokal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan berdaya saing".

No	Kebijakan	Strategi
		f. mengembangkan sistem jaringan irigasi yang terhubung dan mengaliri seluruh kawasan pertanian lahan pangan unggulan dan berkelanjutan; dan g. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.
3	Strategi pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan	Strategi pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan meliputi: a. membatasi pertumbuhan pemukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perlindungan setempat; b. mengendalikan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung; c. mewujudkan pemenuhan ruang terbuka hijau; d. melindungi dan melestarikan cagar alam; e. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.
4	Perwujudan dan peningkatan keterpaduan	Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:

Tujuan Penataan Ruang :

"Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan lokal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan berdaya saing".

No	Kebijakan	Strategi
	dan keterkaitan antarkegiatan budi daya	a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis; b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya untuk mendorong peningkatan perekonomian wilayah kota; dan c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5	Pengendalian dan pengembangan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan	Strategi pengendalian dan pengembangan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan meliputi: a. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; b. mengembangkan fasilitas penunjang mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana; c. mengembangkan sarana pengelolaan limbah pada sentra industri kecil menengah dan usaha lainnya; d. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi dan sumber daya di kawasan perkotaan; dan

Tujuan Penataan Ruang :

"Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan lokal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan berdaya saing".

No	Kebijakan	Strategi
		e. mengarahkan penggunaan energi terbarukan dalam mendukung aktivitas di kawasan perkotaan.
6	Peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing pada perekonomian regional dan nasional	Strategi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing pada perekonomian regional dan nasional meliputi: a. mengembangkan sumber daya manusia yang potensial, unggul dan berdaya saing; b. mengembangkan kawasan Pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi; c. mengembangkan fasilitas atau sarana penunjang pendidikan formal dan informal; dan d. mengintensifkan promosi peluang investasi.
7	Perwujudan pengembangan wilayah berbasis nilai-nilai kebudayaan lokal	Strategi perwujudan pengembangan wilayah berbasis nilai-nilai kebudayaan lokal meliputi : a. mendukung iklim investasi yang kondusif dan berpegang pada nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat;

Tujuan Penataan Ruang :

"Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada sektor Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan lokal dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan berdaya saing".

No	Kebijakan	Strategi
		b. melindungi, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata budaya; c. mempromosikan kegiatan kebudayaan; dan d. melestarikan nilai-nilai dan simbol kebudayaan sebagai ciri khas kota.

5. RKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

6. RENSTRA OPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA OPD RENSTRA merupakan RENJA 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, serta RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti target pencapaian *Suistainable Development Goals* (SDGs), RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Daerah Sekitar.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

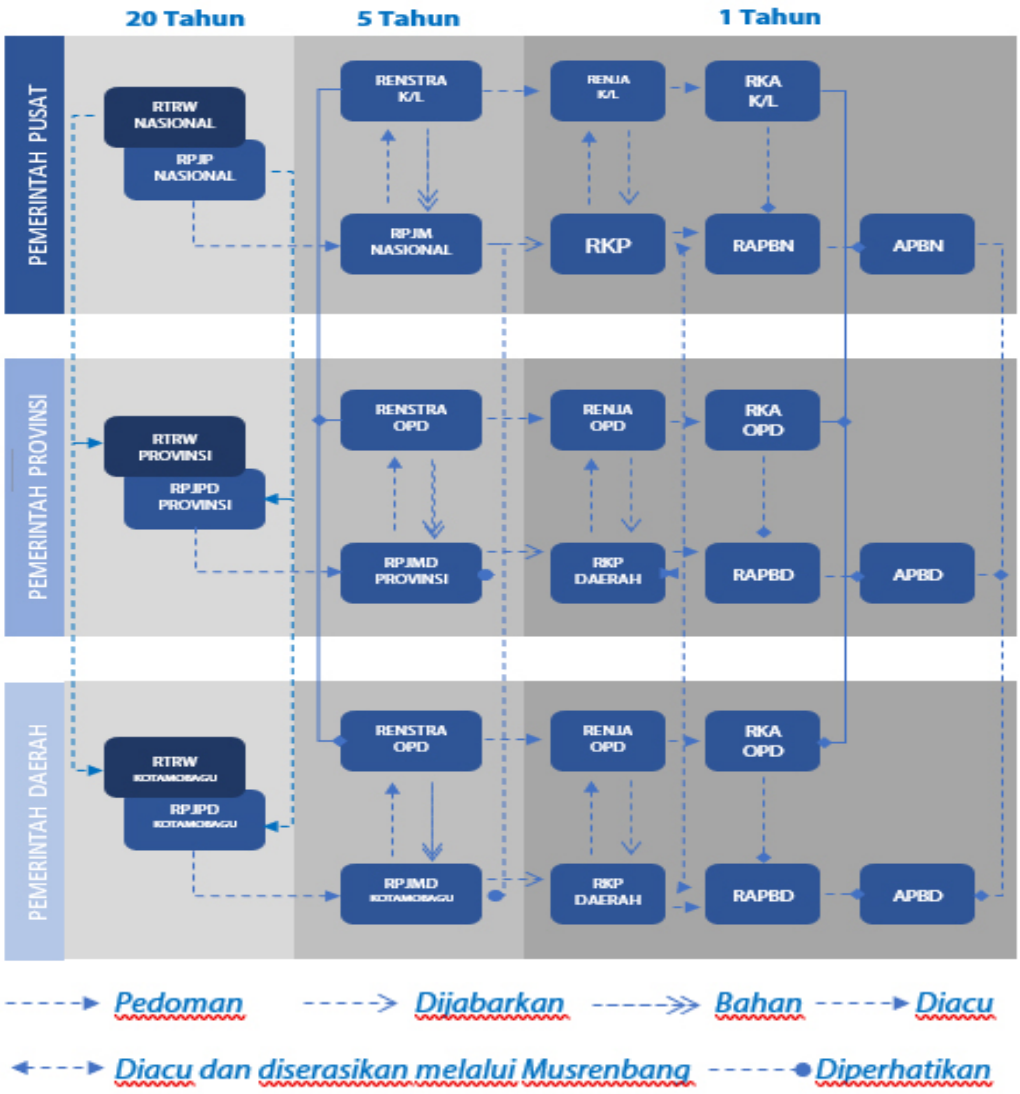

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah, guna

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Kotamobagu secara berkesinambungan.

Tujuan Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu dan DPRD Kota Kotamobagu dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Kotamobagu;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
4. Menciptakan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan jangka menengah antara Daerah dan Pusat;
5. Mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN 2020-2024;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
7. Menetapkan Perubahan IKU dan IKK serta target untuk Tahun 2018-2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023 pada intinya adalah skema penjabaran visi misi Walikota terpilih yang

dijabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan yang merupakan goals dari visi misi tersebut yang selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran pembangunan beserta target-target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas dan indikator outcome dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun format penulisan penjabaran visi misi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kodisi Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Pembangunan di Kotamobagu selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disampaikan gambaran umum sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geofrafis

Kota Kotamobagu terletak pada jarak ± 180 km di selatan ibu kota Provinsi (kota manado) berada pada posisi geografis antara 0^0 41’ 16,29” dan 0^0 46’ 14,88” Lintang Utara, serta antara 124^0 15’ 9,56” dan 124^0 21’ 1,93” Bujur Timur dengan keseluruhan luas wilayah 108,89 km^2.

Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu secara Administrasi terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki luas 62,97 km^2; Kecamatan

Kotamobagu Timur dengan luas 23,69 km²; Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas 12,20 km²; Kecamatan Kotamobagu Utara dengan luas 10,04 km².

Tabel 2.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)
(1)	(2)	(3)
Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar	62,97
Kotamobagu Timur	Kotobangon	23,69
Kotamobagu Barat	Mongkonai Barat	12,20
Kotamobagu Utara	Bilalang I	10,04
Kota Kotamobagu		**108,89**

Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan

pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modoinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Kotamobag

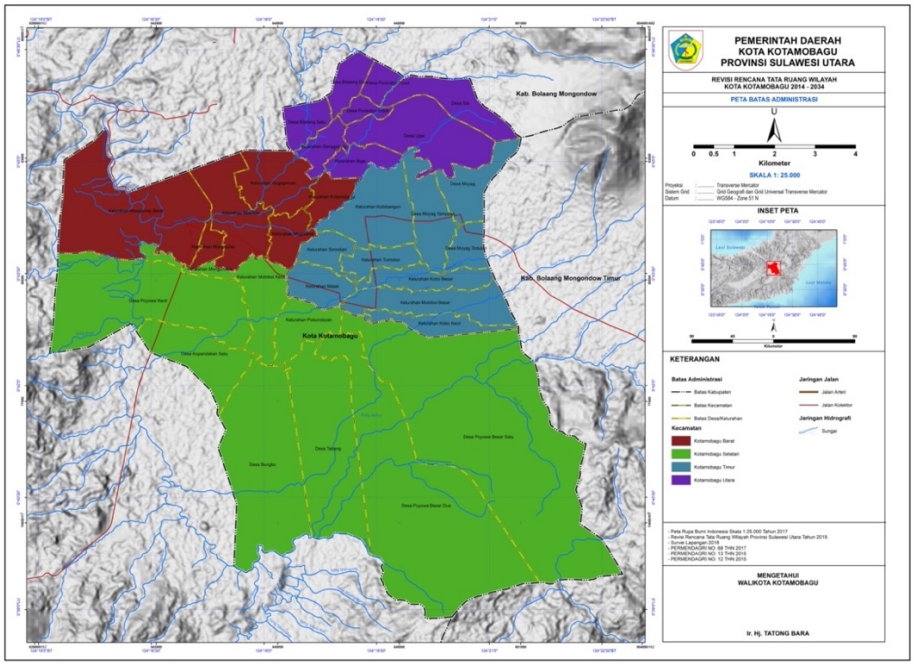

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.2. Kondisi Topografi

Topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in bakid yang terletak di desa pontodon serta bukit disekitar Gogagoman yang menjadi lokasi kuburan bogani, merupakan dua bukit yang sangat di kenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur Bolaang Mongondow.

Gambar 2.2

Peta Topografi

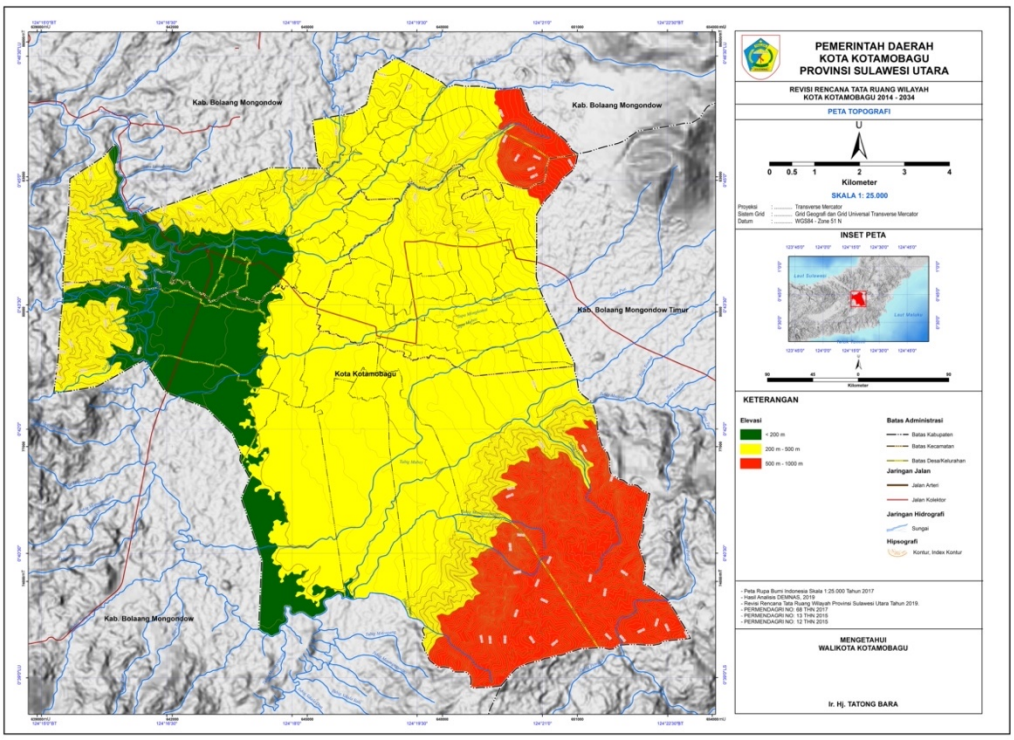

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi, Kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan ketinggian ±952 m DPL, dan yang terendah adalah Kecamatan Kotamobagu Barat dengan ketinggian 180 M DPL

Tabel 2.2

Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
(1)	(2)
Kotamobagu Selatan	272
Kotamobagu Timur	287
Kotamobagu Barat	180
Kotamobagu Utara	310

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2021

Gambar 2.3

Peta Kelas Lereng

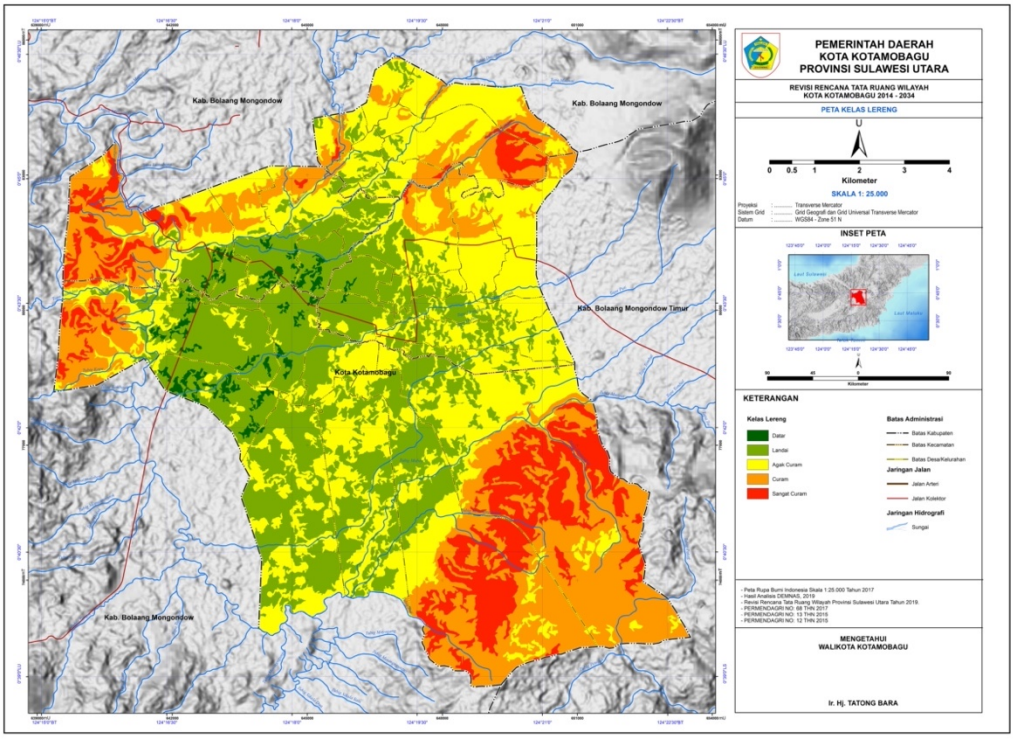

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.3. Kondisi Geologi

Secara geologi regional daerah kajian merupakan bagian dari kawasan Indonesia Timur, yang secara geologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan rumit bila dibandingkankan

dengan kawasan Indonesia Barat. Kondisi Ini dikarenakan kawasan timur Indonesia merupakan tempat pertemuan dari lempeng-lempeng litosfera.

Sulawesi terletak pada pertemuan Lempeng besar Eurasia, Lempeng Pasifik, serta sejumlah lempeng lebih kecil (Lempeng Filipina) yang menyebabkan kondisi tektoniknya sangat kompleks. Kumpulan batuan dari busur kepulauan, batuan bancuh, ofiolit, dan bongkah dari mikrokontinen terbawa bersama proses penunjaman, tubrukan, serta proses tektonik lainnya (Van Leeuwen, 1994). Berdasarkan keadaan litotektonik, Sulawesi dibagi tiga mandala, yaitu: Mandala barat sebagai jalur magmatik yang merupakan bagian ujung timur Paparan Sunda; Mandala tengah berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia; dan Mandala timur berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen.

Van Leeuwen (1994) menyebutkan bahwa mandala barat sebagai busur magmatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utara dan barat. Bagian utara memanjang dari Buol sampai sekitar Manado, dan bagian barat dari Buol sampai sekitar Makassar. Batuan bagian utara bersifat riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada Miosen-Resen dengan batuan dasar basaltik yang terbentuk pada Eosen-Oligosen. Busur magmatik bagian barat mempunyai batuan penyusun lebih bersifat kontinen yang terdiri atas batuan gunung api hingga sedimen berumur Mesozoikum-Kuarter dan batuan malihan berumur Kapur. Batuan tersebut diterobos granitoid bersusunan terutama granodioritik sampai granitik yang berupa batolit, stok, dan retas.

Dilihat dari kondisi geologisnya maka formasi batuan yang terdapat di Kota Kotamobagu dan sekitarnya terdiri atas batuan vulkanik

dengan komposisi terdiri dari breksi, tuff dan lava bersusunan andesit, dasit dan rhyolit. Tuff umumnya bersifat dasitan, agak kompak dan berlapis buruk pada beberapa tempat. Tebal satuan formasi ini diperkirakan lebih dari 1.000 m sedangkan umurnya berdasarkan kandungan fosil dalam sisipan batu gamping adalah Miosen bawah-Miosen akhir. Di bagian atas dari batuan volkanik Bilungala terdapat Batuan Volkanik Pinogu (TQpv) yang lebih muda umurnya, yang terdiri dari tuff, tuff lapili, breksi dan lava. Satuan ini umumnya termampatkan lemah sampai sedang. Umur formasi batuan ini diperkirakan Pliosen-Plistosen (John dan Bird, 1973).

Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i) Early Eocene–MiddleEocene; dikarakterisktikan oleh lapisan tebal yang didominasi oleh vulkanik basalt dengan komposisi tholeiitic dan berasosiasi dengan sedimen laut dalam (Trail et al.,1972; van Leeuwen and Muharjo, 2005); ii) Miocene; diwakili oleh calk alkaline vulkanic yang diterobos oleh batuan intrusi comagmaticgranitoid. Batuan intrusive tersebut menjari dengan batuan sedimen laut dangkal. iii) Pliocene – recent, terdiri dari sub aerial vulkanik dengan komposisi andesit dan dasit and high level intrusive (Carlile at al.,1996; Kavalieris et al., 1992; Person and Caira, 1999). Peristiwa geologi yang terjadi meliputi dua (2) peristiwa magmatic: i) miocene dikarakteristikan dengan intrusive diorite di dalam lava andesit dan batuan sedimen ii) Plio Pleistocene volcanic yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dasitik piroklastik dan berasosiasi dengan alterasi asam sulfat.

Gambar 2.4

Peta Geologi

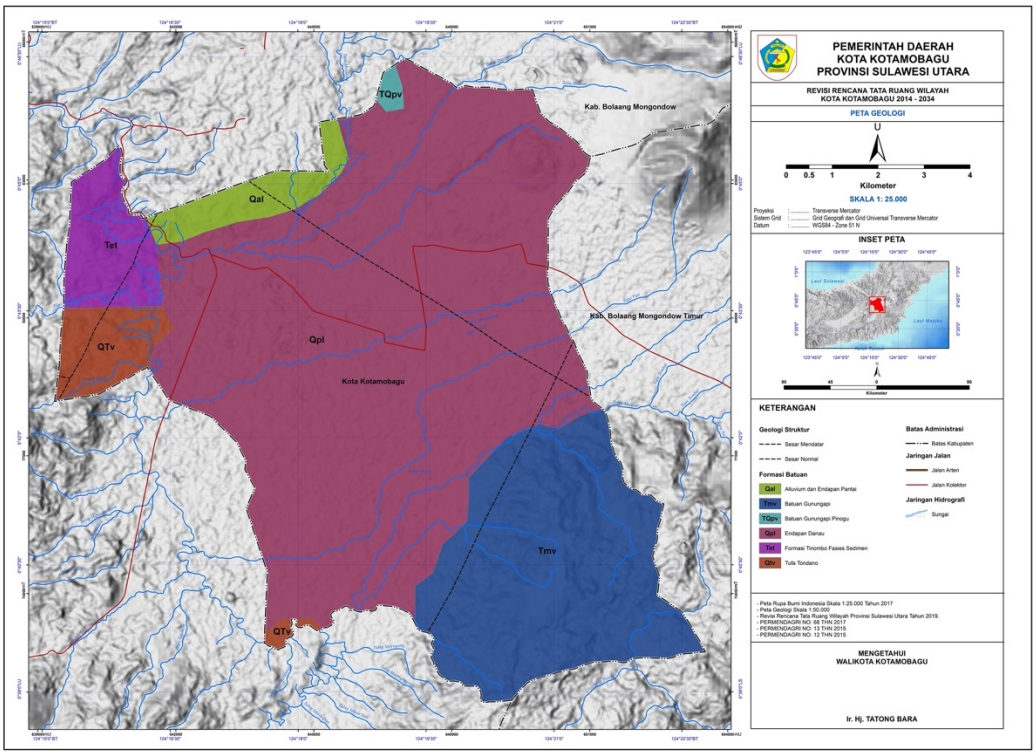

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Berdasarkan formasinya, maka wilayah pusat Kota Kotamobagu sebagian besar merupakan formasi Qpl atau dikenal sebagai formasi Endapan Danau yang memiliki ciri: tersusun atas batulempung, batupasir dan kerikil. endapan ini pada umumnya didominasi oleh batulempung yang berwarna abu-abu kecoklatan; setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus hingga kasar, serta kerikil. Pada batupasirnya setempat terdapat struktur silang siur berskala kecil. Umumnya satuan ini masih belum padu. Umurnya diperkirakan plistosen sampai holosen. Sebaran batuan ini terutama menempati daerah lembah Paguyaman dan di sekitar danau Limboto. Ketebalannya mencapai 94 m, dialasi oleh batuan diorit (Trail, 1974).

Berdasarkan kondisi geologi-nya, daerah pengamatan dipisahkan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer, yaitu sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui ruang antar butir, sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan dan ruang antar butir, serta sistem akuifer bercelah atau sarang. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, potensi air tanah di Cekungan Kotamobagu dibagi menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, yang terdiri dari pasir, lumpur, dan kerikil. Kedudukan muka air tanah dangkal berkisar antara 0,20 - 1,30 m bmt setempat;
2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, celahan, rekahan, dan saluran yang terdapat pada lapisan pasir, lumpur, kerikil, batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan batu gamping;
3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan, rekahan, dan ruang antar butir yang terdapat pada batuan hasil gunungapi berupa batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan breksi. Terdapat pula pada batu pasir, greuwake, serpih, dan rijang. Banyak dijumpai pula mata air dengan debit 0,1-4 l/dtk, kedudukan muka air tanah dangkal lebih dari 5 m bmt setempat;
4. Wilayah Potensi Air Tanah Langka atau Tidak Berarti, menempati daerah punggungan dan puncak bukit/gunung. Setempat-setempat dijumpai mata air dengan debit kecil, kurang dari 1 l/dtk dan rembesan-rembesan. Kedudukan muka air tanahnya bervariasi dengan kedalaman 9 m bmt setempat.

Berdasarkan kenampakan geologi, sistem akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanahnya serta kemudahan dalam cara pengambilan air tanah, di Cekungan Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona prospek pengembangan air tanah, yaitu: Zona pengembangan air tanah yang diprioritaskan dari sumur gali, mata air yang berdebit besar, dan sumur bor.

Gambar 2.5

Peta Kawasan Pertambangan

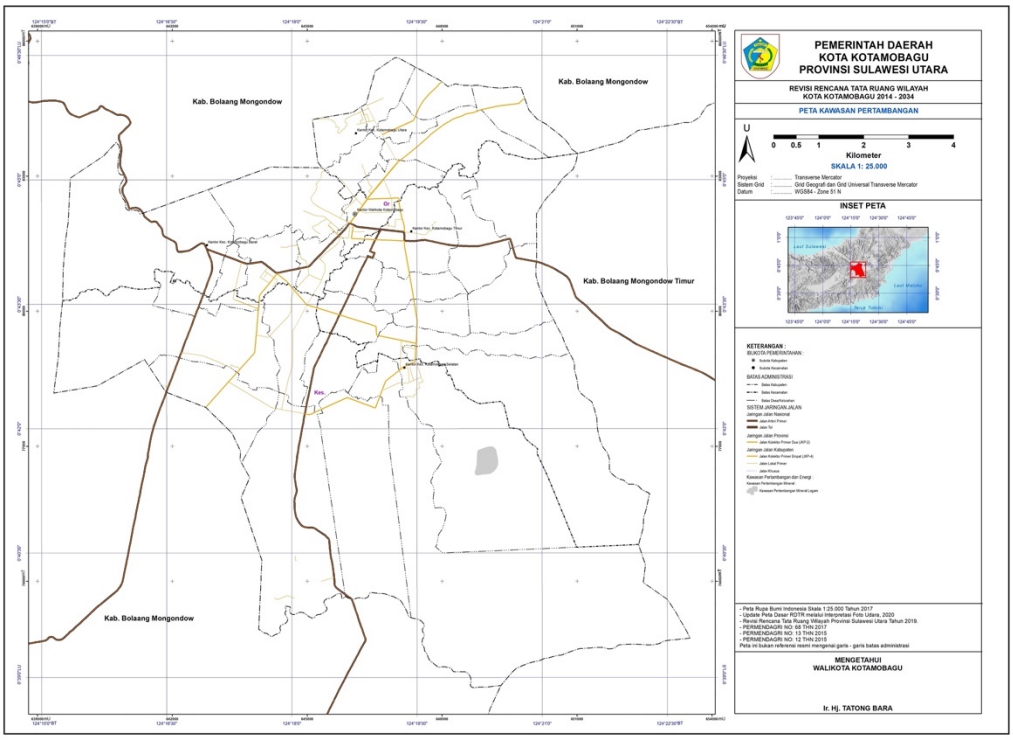

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.4. Kondisi Hidrologi

Terdapat sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Kotamobagu diantaranya yang terbesar adalah Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Ongkag Dumoga. Sungai-sungai lain adalah Sungai Kotobangon,sungai Gogagoman,sungai Moayat (Irigasi Moayat di Desa Poyowa Besar) dan beberapa sungai kecil lainnya. Oleh karena itu memiliki sumber

daya air yang melimpah,untuk kebutuhan air baku,kolam dan berbagai usaha lainnya. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Kotamobagu sebagai sarana dan usaha perikanan serta sumber air baku bagi PDAM. Keberadaan air tanah di Kota Kotamobagu kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu terjadi cukup tinggi yang diikuti dengan laju perubahan penutupan lahan oleh pembangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang berakibat pada tingginya *run off*, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau. Berikut daftar nama sungai dirinci menurut kecamatan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu.

Iklim di Kota Kotamobagu memilik curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei, dan terendah pada bulan Februari. Suhu udara berada di kisaran 18° C – 28°C. Sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian, diikuti pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Tabel 2.3

Sungai yang melintas menurut kecamatan

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (m)
(1)	(2)	(3)
Kotamobagu Utara	Bilalang	13.200
	Dayanan	10.300
	Kotobangon	10.500
Kotamobagu Selatan	Yantaton	13.000
	Kopek	15.000

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (m)
Kotamobagu Timur	Bonodon	13.000
	Yoyak	13.000
	Motoboi Besar	13.500
Kotamobagu Barat	Mongkonai	20.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 2.6

Peta Batas Daerah Aliran Sungai

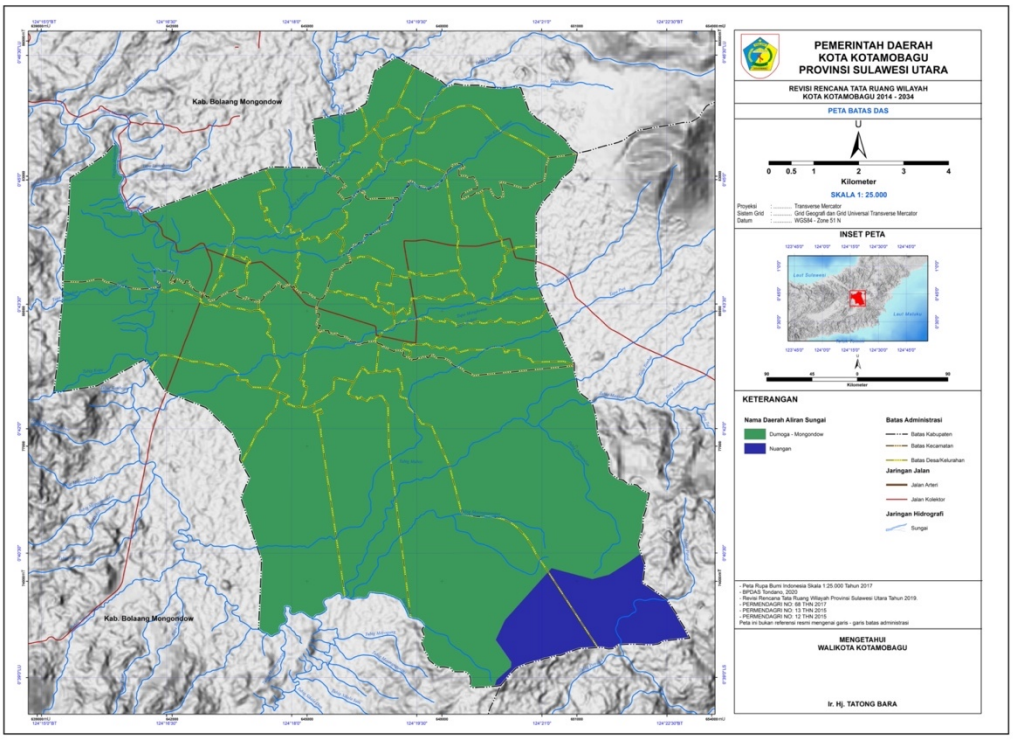

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem

dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen. Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November samapai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei (369 mm^3) dan terendah jatuh pada bulan Februari. Jumlah hari hujan 10 - 224 hari.

Gambar 2.7

Peta Curah Hujan

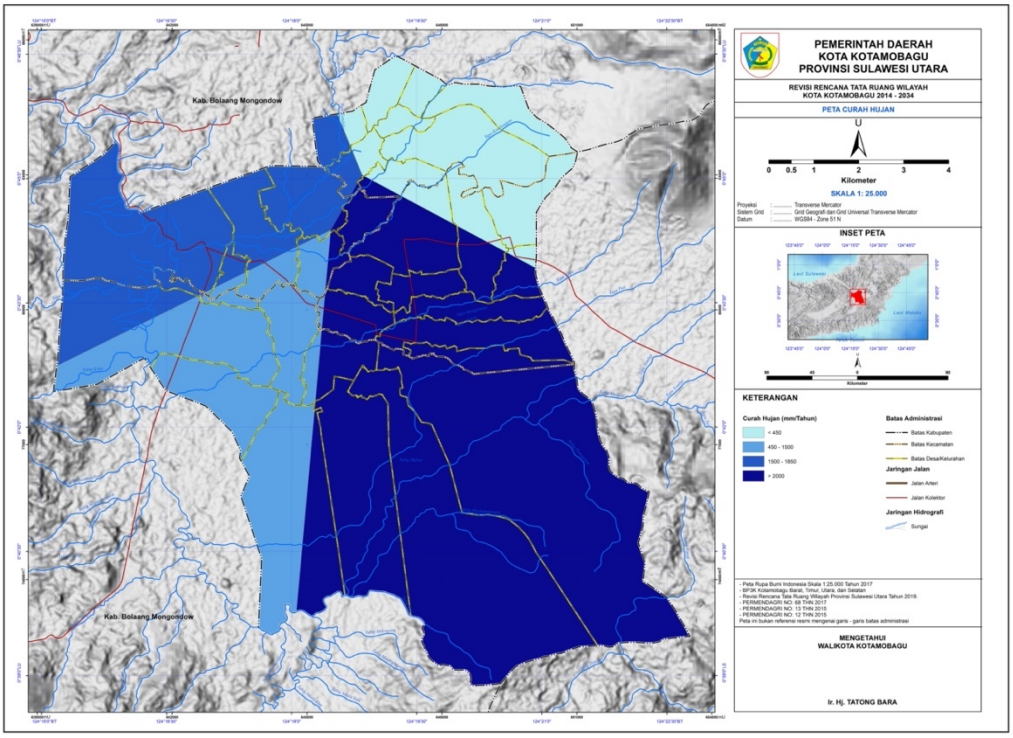

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen.

Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Sebagai wilayah hasil pemekaran baru, Kota Kotamobagu belum memiliki catatan curah hujan pada setiap wilayah kecamatannya. Dalam buku Kota Kotamobagu dalam angka, data curah hujan tidak tercantum dan belum tersajikan karena ketidakadaan data

akibat tidak adanya stasiun pencatat hujan. Kondisi ini perlu diperbaiki dengan membangun stasiun pencatat hujan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. Mengingat pentingnya data curah hujan dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan maka disarankan untuk dapat segera merealisasikan pembangunan stasiun pencatat hujan tersebut.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan saat ini (present landuse) merupakan cerminan tingkat penggunaan lahan dan penerapan teknologi masyarakat setempat saat ini. Berdasarkan analisis cita World view komposit warna sesungguhnya liputan bulan Oktober 2010, daerah penelitian dapat dikelompokan menjadi 7 (tujuh) satuan tutupan lahan, yaitu: sawah (sw), tegalan (tg), ruang terbuka hijau (rth), permukiman (pm), hutan (ht), badan air (ba), dan kebun/perkebunan (kb)

Gambar 2.8

Peta Penggunaan Lahan

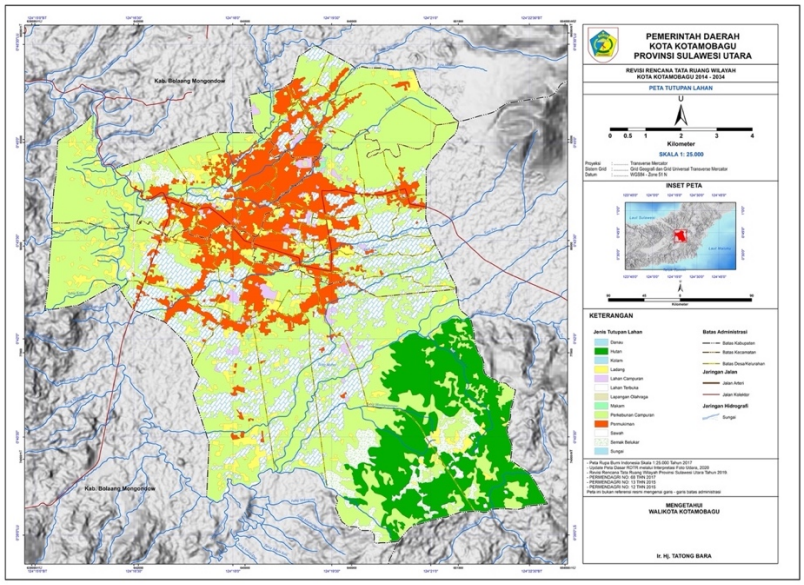

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.6.1. Sawah (sw)

Satuan tutupan lahan ini meliputi sawah irigasi. Persawahan di daerah kajian berada pada dataran aluvial, pada musim kemarau lahan sawah di wilayah ini masih dapat ditanami padi sawah karena masih mendapat pasokan air yang memadai. Sawah irigasi ini, dapat ditanam padi dua kali setahun dan bahkan dapat tiga kali setahun. Total Luas lahan area persawahan sampai dengan tahun 2018 adalah ± 1.691,55 Ha. Melihat perkembangan Kota Kotamobagu, perlu dipikirkan upaya untuk mempertahankan areal persawahan di wilayah ini untuk tetap menjaga kemampuannya berswasembada pangan. Jika melihat laju pertumbuhan permukiman bukan tidak mungkin akan terjadi konversi lahan yang cukup besar dari pemanfaatan lahan sebagai sawah menjadi lahan terbangun.

2.1.6.2. Tegalan (tg)

Satuan tutupan lahan ini termasuk di dalamnya ladang yang terdapat pada lereng-lereng perbukitan dan daerah dataran. Di beberapa tempat, penduduk membuka perladangan pada lereng-lereng bukit tanpa usaha konservasi, sehingga mempercepat kerusakan lahan. Secara umum tutupan lahan berupa tegalan merupakan pemanfaatan lahan peralihan yang digunakan untuk pertanian lahan kering dengan komoditas pertanian berupa tanaman semusim. Berdasarkan citra satelit, sebagian satuan tutupan lahan berupa tegalan merupakan areal semak atau lahan yang belum dimanfaatkan atau merupakan lahan yang telah selesai dimanfaatkan/panen.

2.1.6.3. Ruang Terbuka Hijau (rth)

Ruang terbuka hijau merupakan satuan tutupan lahan yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseimbangan ekosistem kota, umumnya bentuk dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu adalah berupa lapangan olah raga, median jalan, pemakaman umum, sempadan sungai, sempadan mata air, kawasan resapan air, jalur hijau dan taman kota. Pemanfaatan ruang lainnya yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau adalah hutan kota yang saat ini luasnya ± 4,3 Ha

2.1.6.4. Permukiman (pm)

Satuan tutupan lahan permukiman merupakan wilayah terbangun yang ada di Kota Kotamobagu. Satuan tutupan lahan ini umumnya mengikuti pola jalan yang ada di Kota Kotamobagu. Pola pemanfaatan ruang permukiman umumnya berselang seling atau bercampur dengan areal pertanian yang ada. Kepadatan areal permukiman umumnya berfariasi dengan tingkat kepadatan sedang hingga jarang. Kepadatan permukiman paling tinggi berada pada jalur-jalur jalan utama. Pesatnya perkembangan permukiman di Kota Kotamobagu selanjutnya harus direncanakan lebih rinci untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan daya dukung lingkungan setempat.

Gambar 2.9

Peta Kawasan Permukiman

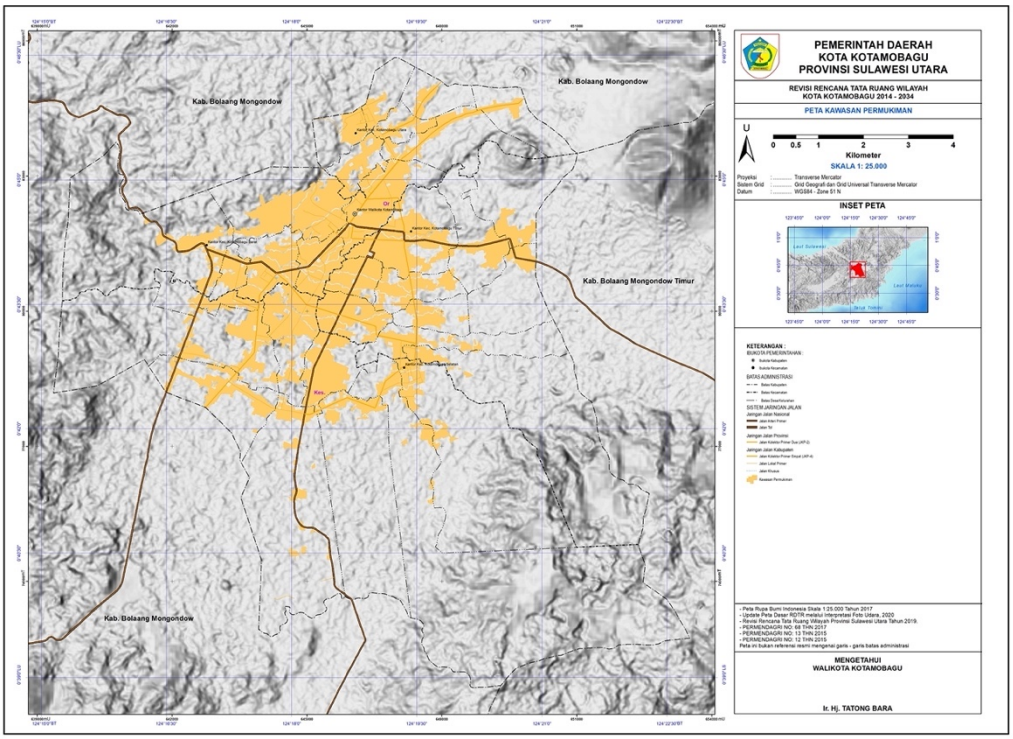

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.6.5. Badan Air (ba)

Tutupan lahan berupa badan air umumnya merupakan areal rendah yang terisi oleh air dan bersifat permanen sepanjang waktu. Sebagai contoh bentu-bentuk tutupan lahan berupa badan air adalah; sungai, embung, situ, danau, rawa, kolam dan tambak yang keberadaan dan suplai airnya relatif selalu tetap.

2.1.6.6. Kebun/Perkebunan (kb)

Keberadaan kebun ataupun perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu dipahami karena kota ini memiliki potensi di sektor pertanian. Keberadaan kebun campuran maupun perkebunan yang membudidayakan satu atau lebih jenis tanaman produktif sangat

banyak terdapat disini. Jenis tanaman yang umumnya dapat dijumpai di wilayah Kota Kotamobagu diantaranya adalah: tanaman kopi, kelapa, kakao dan tanaman buah seperti rambutan, nanas dan komoditas tanaman tahunan lainnya.

Kebun atau perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu diusahakan secara perorangan dan tradisional. Laju pertumbuhan perkebunan nampaknya cukup pesat jika melihat masih luasnya dan banyaknya areal kebun atau perkebunan yaitu 2.462,2 Ha yang dapat diamati pada citra satelit yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perlu perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan pada waktu mendatang.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (hinterland), melalui pembudayaan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Tujuan utama dari kawasan andalan adalah mempercepat pembangunan.

Kota Kotamobagu yang berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis. Kota Kotamobagu terletak pada simpul jalur perdagangan, jasa dan transportasi regional Bolaang Mongondow Raya, dimana daerah Kawasan Bolaang Mongondow Raya tersebut sedang berkembang, terutama Kota Kotamobagu yang menjadi kawasan andalan bagi daerah sekitarnya.

Kota Kotamobagu akan berperan sebagai kota transit bagi para pelaku perjalanan antara Kotabunan, Molibagu, Lolak dan Boroko. Dengan demikian akan mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa terutama dalam distribusi produk dan potensi lokal.

Kota Kotamobagu berperan sebagai terminal (pusat) perdagangan hasil pertanian bagi daerah sekitarnya, penyedia alat-alat dan input bagi kegiatan pertanian, serta sebagai pusat industri pengolahan pertanian. Peran ini didukung oleh keberadaan wilayah sekitar yang sangat potensial bagi pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, buah, sayuran, dan hasil kebun lainnya. Keberhasilan peran ini akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Kota Kotamobagu dan Kabupaten di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

Kota Kotamobagu telah di tetapkan sebagai calon ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya dengan melalui analisa dan kajian indikator penilaian calon ibukota suatu Provinsi dan sesuai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktifitas ekonomi, maka Kota Kotamobagu dinilai memenuhi persyaratan sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Selain itu pula dari sisi kajian administrasi, Kota Kotamobagu sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, telah mendapat Surat Keputusan dari Bupati dan DPRD se Bolaang Mongondow Raya tentang persetujuan penetapan Kota Kotamobagu sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Sebagai calon Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya maka di pandang perlu adanya pengembangan wilayah Kota Kotamobagu, meliputi PASSI dan LOLAYAN, merupakan wilayah yang ideal sebagai calon Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, guna peningkatkan pelayanan dan kesejahteran kepada masyarakat serta memperkokoh basis ekonomi rakyat. Secara historis, kultur dan budaya, Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4 (empat) wilayah adat masing-masing: Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang.

Passi dan Lolayan merupakan satu wilayah mongondow, yang disatukan dengan bahasa mongondow, serta secara historis, kultur dan budaya menyatu dengan masyarakat Kota Kotamobagu.

Salah satu tujuan pemekaran wilayah yaitu pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteran masyarakat; Passi dan Lolayan, ditinjau dari geoposisi strategis menyatu dengan wilayah Kota Kotamobagu.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

1. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
2. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas + 628 ha
3. Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas ± 273 Ha
4. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan Kelurahan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas ± 322 Hektar.
5. Kawasan rawan bencana banjir wilayah Kota Kotamobagu meliputi Kelurahan Molinow, Mogolaing, Kotamobagu, Kotobangon, Matali, Kopandakan, Motoboi Kecil, Biga.

Tabel 2.4

Wilayah Rawan Bencana Kota Kotamboagu

No	Desa/Kelurahan	Titik Rawan Bencana	Jenis Bencana
1	Gogagoman	1	Longsong Tebing/Gunung
	Kotobangon	1	Longsong Tebing/Gunung
	Mongkonai Barat	1	Longsong Tebing/Gunung
2	Moyag	4	Banjir
	Kotobangon	4	Banjir
	Tumobui	2	Banjir
	Kobo Kecil	2	Banjir
	Matali	1	Banjir
	Sinindian	1	Banjir
	Poyowa Besar I	1	Banjir
	Tabang	1	Banjir
	Kopandakan I	1	Banjir
	Mongondow	1	Banjir
	Motoboi Kecil	2	Banjir
	Poyowa Kecil	1	Banjir
	Pobundayan	2	Banjir
	Gogagoman	2	Banjir
	Kotamobagu	2	Banjir
	Mogolaing	1	Banjir
	Molinow	1	Banjir
	Mongkonai Barat	2	Banjir
	Biga	1	Banjir
	Genggulang	1	Banjir
	Pontodon	1	Banjir
	Upai	1	Banjir
3	Mogolaing	1	Pohon Tumbang
	Kobo Besar	1	Pohon Tumbang
	Motoboi Besar	1	Pohon Tumbang
	Matali	1	Pohon Tumbang
	Bungko	1	Pohon Tumbang
	Kopandakan	1	Pohon Tumbang
	Poyowa Kecil	1	Pohon Tumbang
	Molinow	1	Pohon Tumbang
	Gogagoman	1	Pohon Tumbang
4	Kotamobagu	1	Kebakaran
	Gogagoman	1	Kebakaran
5	Kobo kecil	1	Puting Beliung
6	Sia	1	Erupsi Jalur I
	Pontodon	1	Erupsi Jalur I
	Genggulang	1	Erupsi Jalur I
	Gogagoman	1	Erupsi Jalur I
	Tumobui	1	Erupsi Jalur I
	Kobo Besar	1	Erupsi Jalur I
	Motoboi Besar	1	Erupsi Jalur I
	Moyag	1	Erupsi Jalur I

Sumber: BPBD Kota Kotamobagu

Terdapat daerah patahan di Kota Kotamobagu yang melintas dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun untuk peta rawan longsor yang ada di Kota Kotamobagu bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10

Peta Rawan Longsor di Kota Kotamobagu

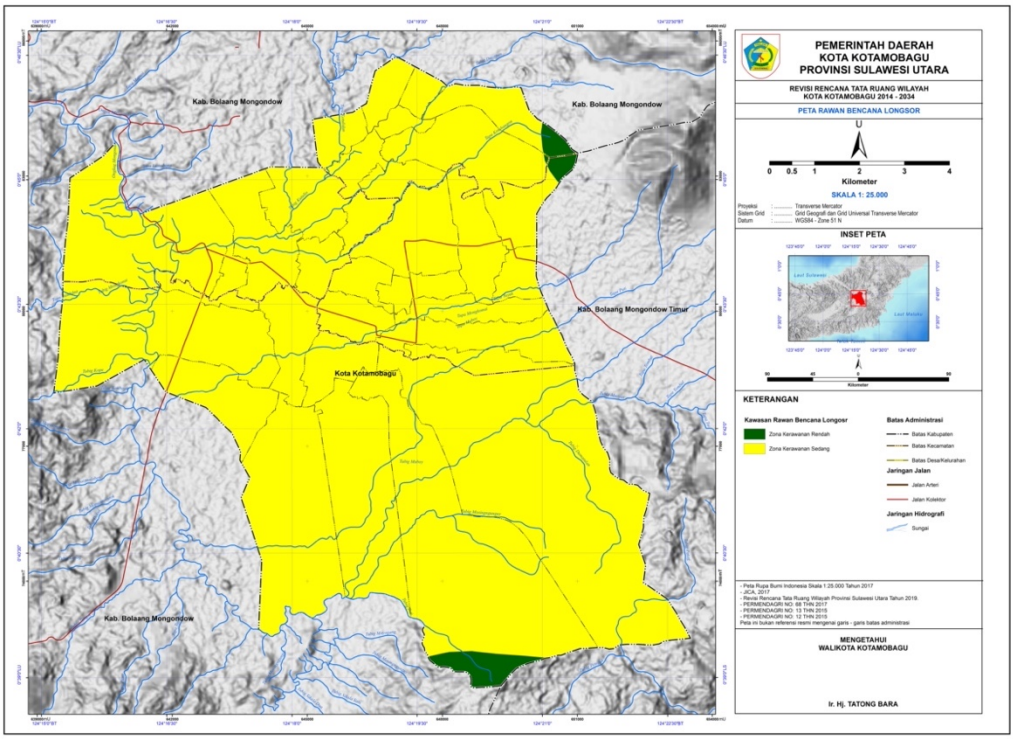

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Adapun untuk wilayah yang msuk dalam kategori lereng gunung bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.11

Peta Kelas Lereng

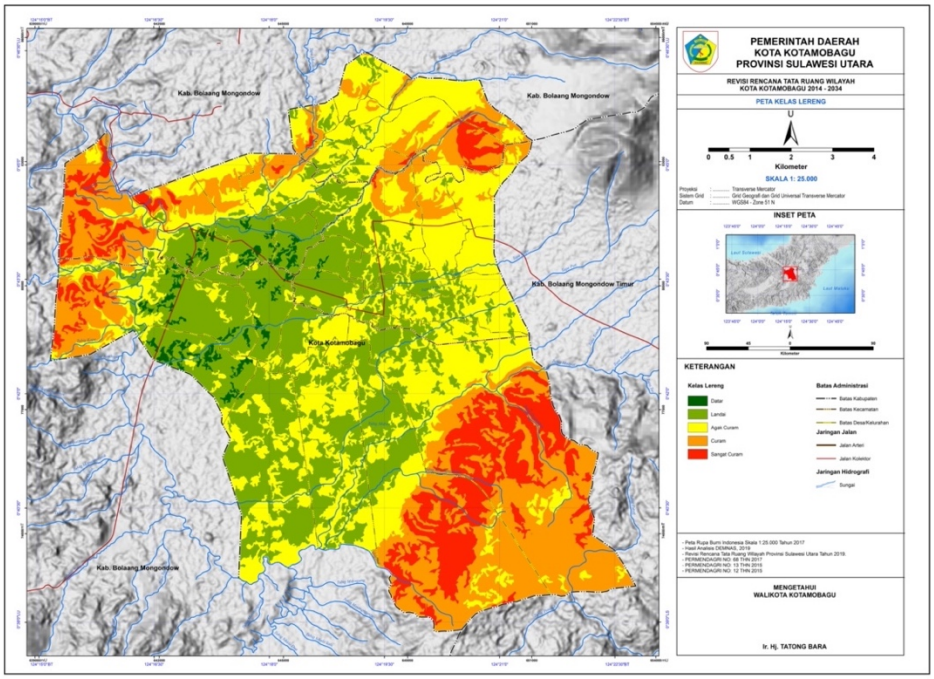

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Gambar 2.12

Peta Bencana Banjir Bandang

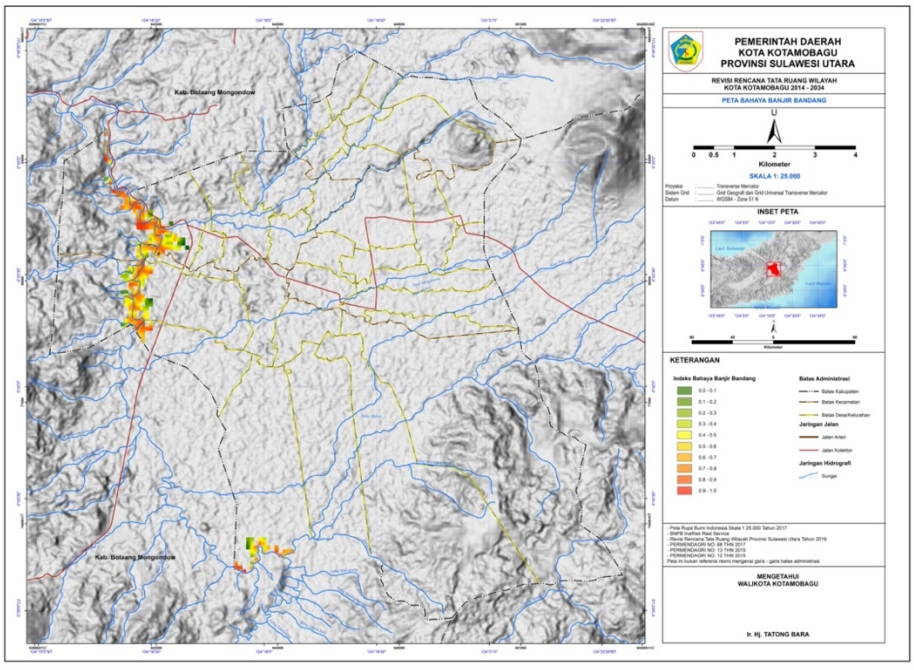

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Gambar 2.13

Peta Bencana Banjir

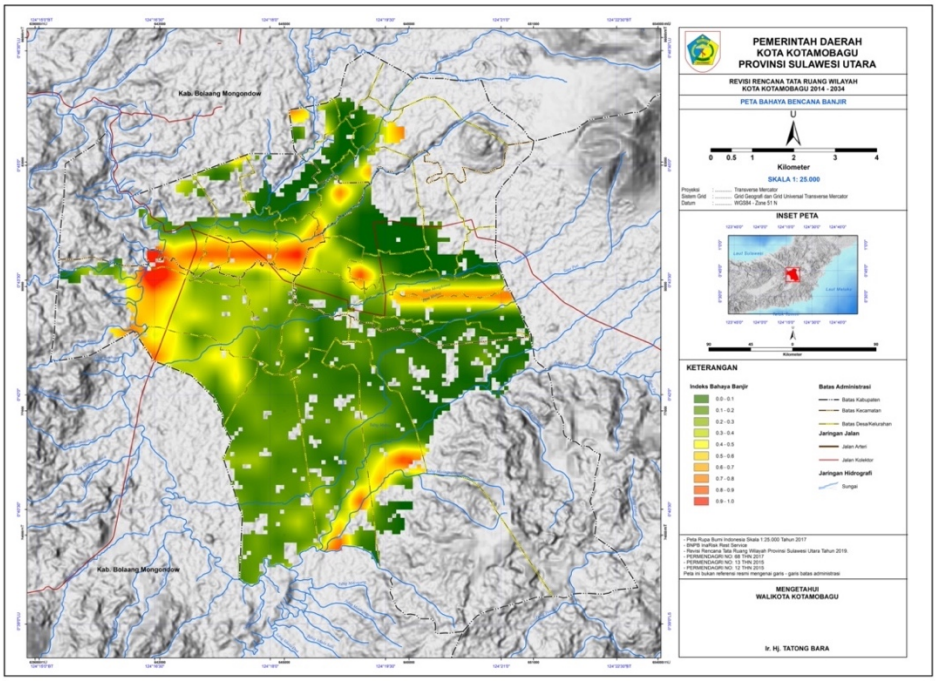

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Gambar 2.14

Peta Gempa Bumi

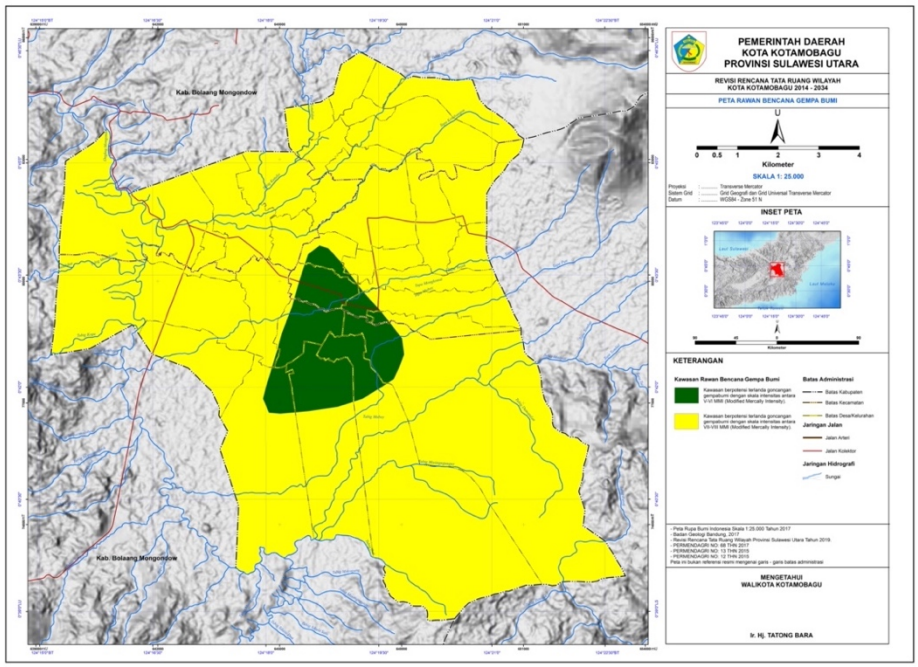

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Gambar 2.15

Peta Gunung Api

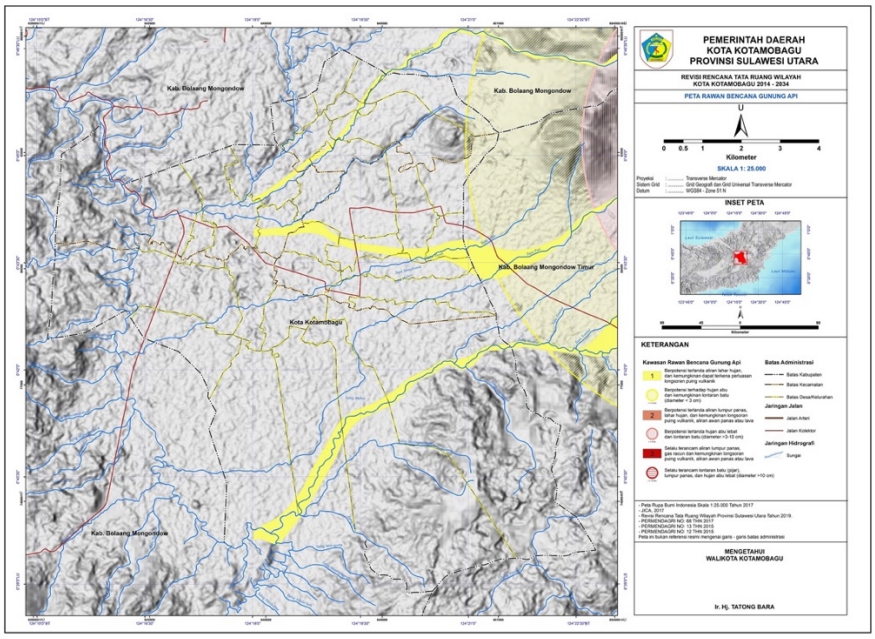

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Gambar 2.16

Peta Kebaran Hutan dan Lahan

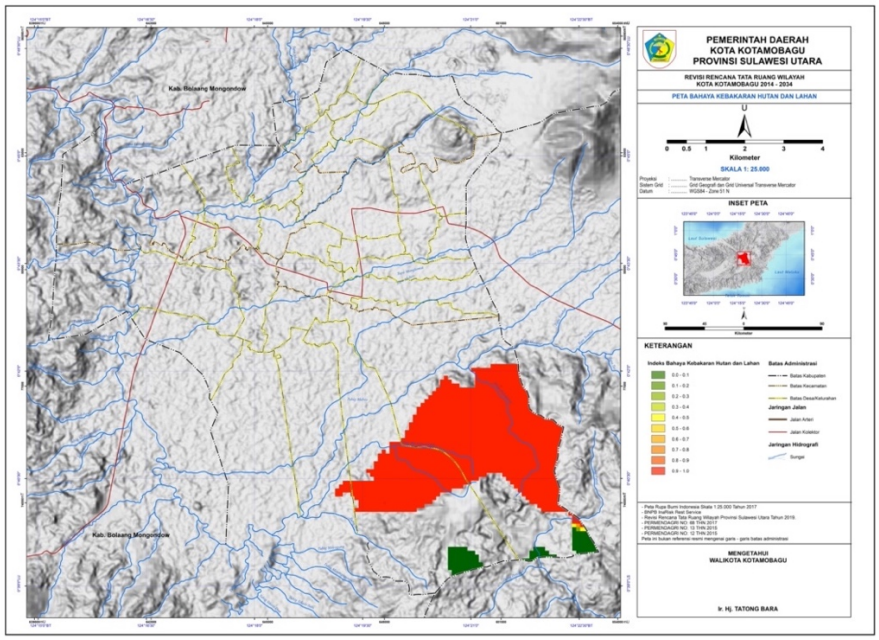

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Gambar 2.17

Peta Bencana Longsor

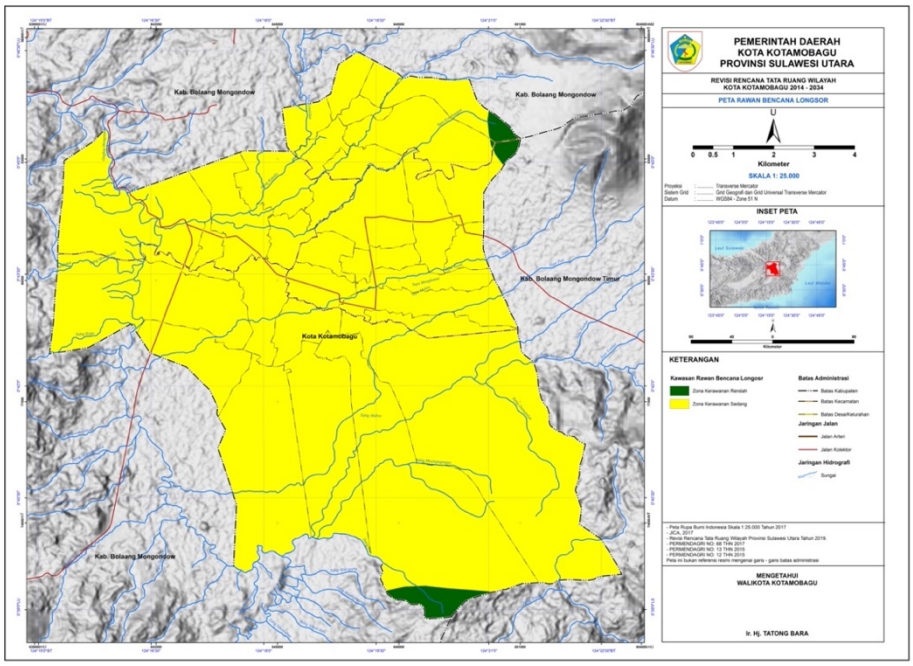

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.9. Kapasitas Daya Tampung dan Daya Lingkungan

2.1.9.1. Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai supply, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai demand. Idealnya, nilai demand tidak melebihi kemampuan supply. Jika nilai demand lebih besar dari supply, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian. Ketersediaan di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 2.18

Peta Status Daya Dukung Air

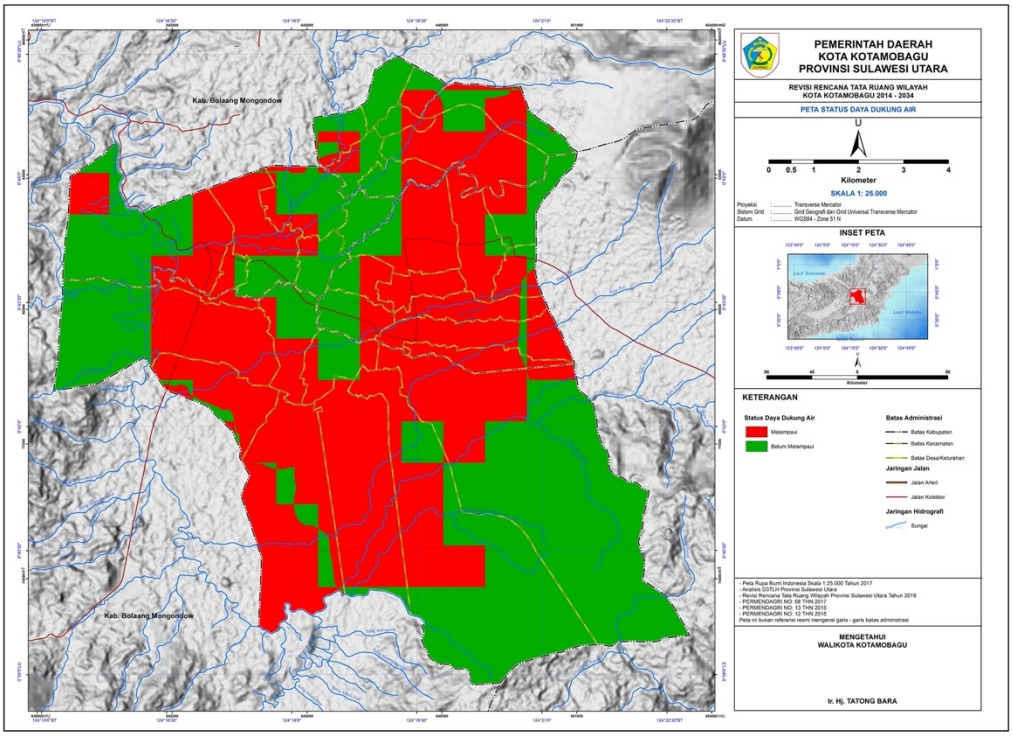

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.9.2. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. Semakin besar persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian di suatu wilayah, semakin besar pula daya dukung pangan di wilayah tersebut. Kondisi ketersediaan pangan di Kota Kotamobagu disajikan dalam peta berikut ini

Gambar 2.19

Peta Status Daya Dukung Pangan

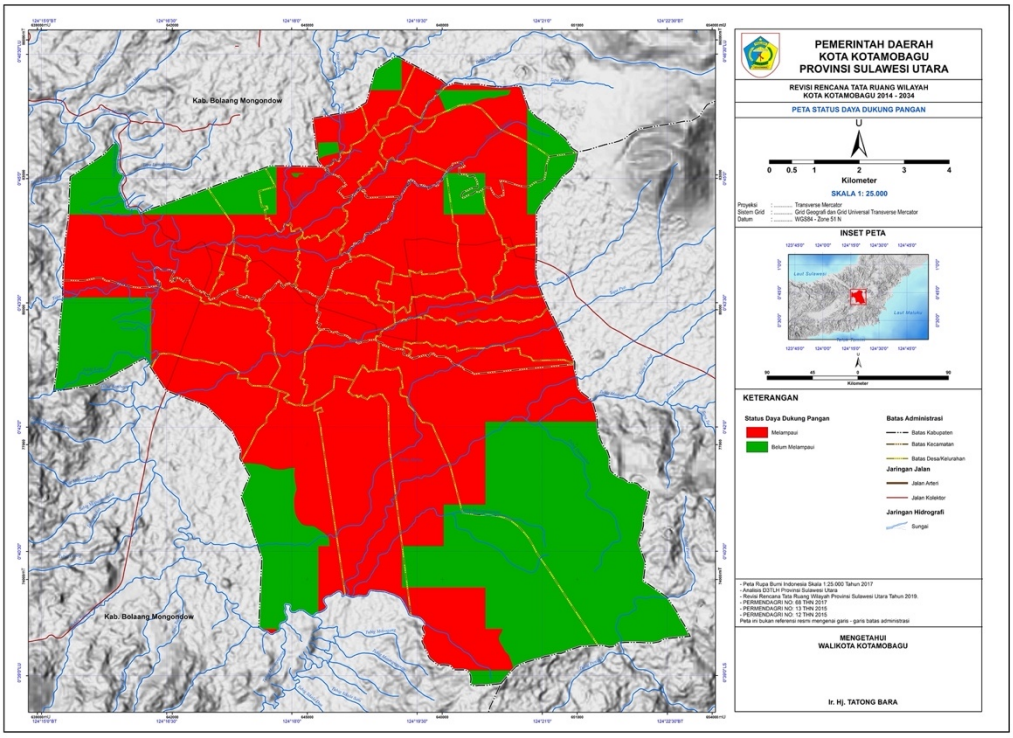

Sumber: Revisi RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

2.1.10. Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, jumlah penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2020 mencapai 123.498 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar -0,13 persen.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	121.699	123.872	125.835	123.653	123.498

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	n/a	1,23	1,19	1,19	-0,13
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km^2)	1.117	1.137	1.155	1.135	1.134
Sex Ratio (L/P) (%)	104,23	103,74	103,42	105,54	105,58

Sumber: Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Penduduk terbanyak pada tahun 2020 berada di Kecamatan Kotamobagu Barat, yaitu 42.385 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Kotamobagu Selatan sebanyak 32.924 jiwa dan Kecamatan Kotamobagu Timur sebanyak 30.539 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Kotamobagu Utara sebanyak 17.650 Jiwa.

Tabel 2.6

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kota Kotamobagu Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM^2)		Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (orang/Km^2)
		Km^2	% Terhadap Luas Kota Kotamobagu	Jumlah	% Terhadap Penduduk Total Kota Kotamobagu	
1	Kotamobagu Utara	10,04	9,22	17.650	14,29	1.758
2	Kotamobagu Timur	23,69	21,76	30.539	24,73	1.289
3	Kotamobagu Selatan	62,97	57,83	32.924	26,66	523
4	Kotamobagu Barat	12,20	11,20	42.385	34,32	3.474
	Kota Kotamobagu	**108,89**	**100**	**123.498**	**100**	**1.134**

Sumber: Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di Tahun 2020, angka tertinggi berada di Kecamatan Kotamobagu Barat, 3.474 orang/km^2, dan terendah di Kecamatan Kotamobagu Selatan, 523 orang/km^2. Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka

penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2020 paling banyak berumur 15-19-4 tahun yaitu 11.611 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 10.457 jiwa.

Gambar 2.20

Piramida Penduduk Kota Kotamboagu

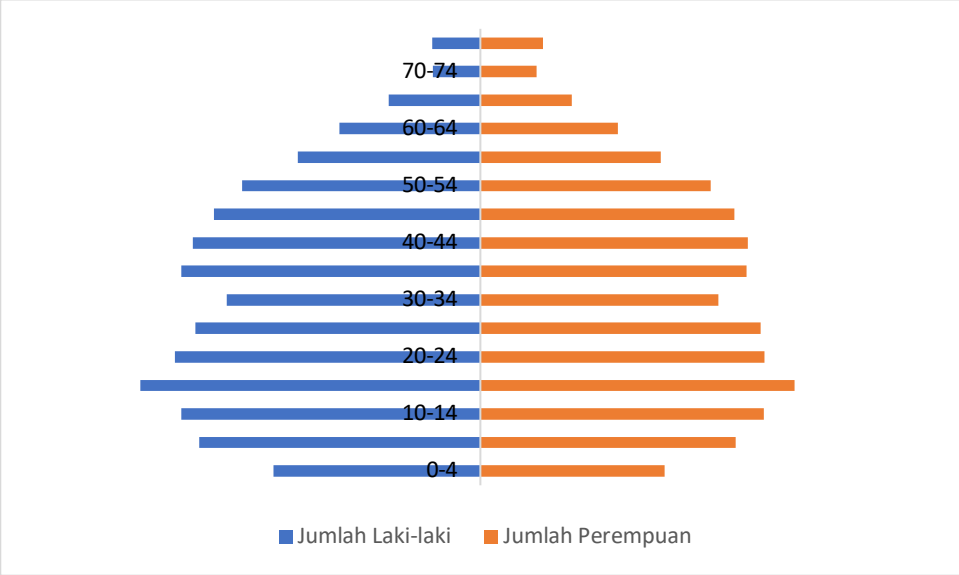

Sumber: Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Kota Kotamobagu secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha.

Perekonomian Kota Kotamobagu Tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.397.215,30 triliun. Dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020 sebesar 0,20 persen, berarti melambat dibanding Tahun 2019 yaitu 6,18 persen diakibatkan adanya Pandemi Covid-19.

Tabel 2.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	144.459,40	151.995,40	160.463,30	168.981,40	180.385,20	180.216,00
B	Pertambangan dan Penggalian	57.318,30	60.746,10	64.615,70	69.479,40	75.418,50	73.173,80
C	Industri Pengolahan	76.983,80	75.010,70	80.863,60	89.439,60	92.838,40	95.442,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.155,20	6.104,30	6.170,80	6.244,00	6.889,10	7.368,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	3.054,30	3.118,10	3.123,20	3.236,20	3.393,20	3.381,40
F	Konstruksi	258.421,90	275.610,30	299.261,60	321.163,90	338.749,80	324.681,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	275.788,60	291.372,60	310.226,90	331.164,70	362.254,30	358.267,00
H	Transportasi dan Pergudangan	79.604,50	85.631,60	91.586,10	99.562,50	108.344,20	98.175,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.210,30	33.147	35.834	38.765	41.768	41.864
J	Informasi dan Komunikasi	47.411,20	52.045,00	56.583,90	62.046,50	68.052,60	74.060,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	166.646,60	195.285,00	209.971,80	213.916,40	217.403,40	232.723,10
L	Real Estate	60.231,00	64.196,70	69.681,60	75.501,60	81.006,40	80.432,20
M,N	Jasa Perusahaan	1.348,30	1.440,90	1.554,70	1.709,30	1.879,30	1.809,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	350.513,00	362.543,20	373.408,60	383.005,30	382.948,60	376.672,30
P	Jasa Pendidikan	80.852,50	85.774,40	91.107,80	100.156,50	110.011,40	112.466,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180.601,30	195.294,00	215.600,70	240.659,80	264.540,40	285.465,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	37.363,30	39.791,10	43.354,80	49.120,80	56.500,50	51.015,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.855.963,50	1.979.106,10	2.113.409,30	2.254.152,80	2.392.383,30	2.397.215,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		1.855.963,50	1.979.106,10	2.113.409,30	2.254.152,80	2.392.383,30	2.397.215,30

Sumber: BPS Sulut

Perekonomian Kota Kotamobagu Tahun 2020 melambat sebesar 0,20 persen. Pertumbuhan melambat oleh hampir semua lapangan usaha yang paling tinggi perlambatannya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar -9,39 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yakni -9,71 persen. Pertubuhan yang mengalami kenaikan yaitu di sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai 7,05 persen atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 1,63 persen.

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kotamobagu

Komponen PDRB	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,12	5.22	5.57	5.43	6,75	-0,09
B. Pertambangan dan Penggalian	7,16	5.98	6.37	7.53	8,55	-2,98
C. Industri Pengolahan	2,9	-2.56	7.8	10.61	3,80	2,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15,56	18.41	1.09	1.19	10,33	6,96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,95	2.09	0.16	3.62	4,85	-0,35
F. Konstruksi	9,7	6.65	8.58	7.32	5,48	-4,15
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	5.65	6.47	6.75	9,39	-1,10
H. Transportasi dan Pergudangan	7,37	7.57	6.95	8.71	8,82	-9,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	9.72	8.11	8.18	7,75	0,23
J. Informasi dan Komunikasi	9,24	9.77	8.72	9.65	9,68	8,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	17.19	7.52	1.88	1,63	7,05
L. Real Estate	7,42	6.58	8.54	8.35	7,29	-0,71
M,N. Jasa Perusahaan	5,77	6.87	7.89	9.94	9,95	-3,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,78	3.43	3	2.57	-0,01	-1,64
P. Jasa Pendidikan	7,08	6.09	6.22	9.93	9,84	2,23

Komponen PDRB	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,88	8.14	10.4	11.62	9,92	7,91
R,S,T,U. Jasa lainnya	7,41	6.5	8.96	13.3	15,02	-9,71
Produk Domestik Regional Bruto	6,52	6.63	6.79	6.67	6,13	0,20
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	6,52	6.63	6.79	6.67	6,13	0,20

Sumber: BPS Sulut

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020, Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 8,83 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,91 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu selama periode 2013-2020 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional maupun LPE Provinsi. Pola pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi dan Kota Kotamobagu hampir mirip sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah. LPE Kota Kotamobagu pada Tahun 2013 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Posisi Tahun 2020 dimana terjadi pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan perlambatan yang signifikan terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020 sebesar 0,20 persen masih ;lebih tinggi daeri LPE Provinsi dan LPE Nasional yaitu masing-masing sebesar -0,99 persen dan -2,07 persen.

Gambar 2.21

Laju Pertubuhan Ekonomi Kota Kotamobagu, Provinsi dan Nasional Tahun 2013-2020

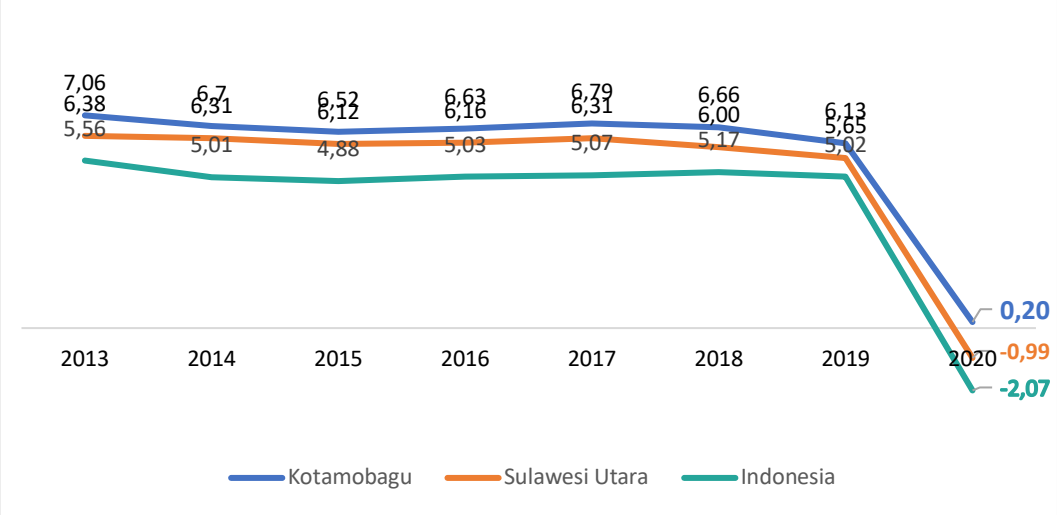

Sumber: BPS Sulut

Nilai PDRB Kota Kotamobagu atas dasar harga berlaku dari tahun 2013- 2018 selalu mengalami kecenderungan peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 mencapai 1.788,38 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,29 triliun rupiah dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 1.786,09 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2.9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2020 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	201.822,20	231.055,90	257.157,20	283.760,40	313.485,10	323.802,50
B	Pertambangan dan Penggalian	73.222,70	82.944,10	86.288,20	96.017,00	108.249,20	107.549,10
C	Industri Pengolahan	94.651,70	96.586,80	110.943,50	129.416,60	141.090,30	150.684,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.457,00	6.311,30	7.224,00	7.606,80	8.486,20	9.425,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	3.742,10	4.005,80	4120,8	4.532,80	5.048,50	5.130,90
F	Konstruksi	300.220,00	326.543,40	363.540,30	418.676,80	460.308,10	449.957,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	359.126,30	388.588,00	427.213,60	483.315,00	562.618,80	587.233,00
H	Transportasi dan Pergudangan	120.773,30	135.385,90	150.266,40	169.638,00	188.293,10	177.463,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37.990,40	43.284,30	48.710,20	56.231,30	61.797,10	61.502,30
J	Informasi dan Komunikasi	53.870,60	60.630,80	68.730,80	76.853,90	87.522,80	95.109,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	218.149,50	265.837,40	299.739,00	319.975,20	334.842,20	356.977,30
L	Real Estate	73.982,60	80.834,30	89.392,30	100.681,60	115.995,40	116.236,90
M,N	Jasa Perusahaan	1.660,80	1.877,10	2.093,90	2.503,20	2.895,80	2.875,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	531.883,80	574.447,60	602.407,00	645.647,70	678.989,10	681.870,80
P	Jasa Pendidikan	119.549,60	130.625,30	141.888,20	163.077,00	186.372,80	196.393,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	213.239,80	238.359,50	267.898,60	306.538,50	351.428,60	388.226,60
R,S,T,U	Jasa lainnya	46.267,10	51.681,50	58.345,40	70.180,00	86.920,70	80.836,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**2.455.609,40**	**2.718.998,70**	**2.985.959,50**	**3.334.652,00**	**3.694.344,00**	**3.791.274,80**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**2.455.609,40**	**2.718.998,70**	**2.985.959,50**	**3.334.652,00**	**3.694.344,00**	**3.791.274,80**

Sumber: BPS Sulut

Laju pertumbuhan ekonomi di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2015-2020 menunjukkan pencapaian yang variatif.

Tabel 2.10

Laju Pertubuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (Persen)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	5,89	6,56	6,67	7,49	7,59	0,80
2	Minahasa	6,17	6,06	6,07	6,10	5,77	-1,03
3	Kepulauan Sangihe	6,07	6,08	5,45	5,50	5,43	0,50
4	Kepulauan Talaud	5,23	5,28	5,10	5,02	4,69	0,43
5	Minahasa Selatan	6,30	5,09	6,53	6,09	5,97	-0,77
6	Minahasa Utara	7,03	7,05	6,51	6,41	6,18	-0,93
7	Bolaang Mongondow Utara	5,80	6,16	6,28	6,18	6,17	0,71
8	Kepulauan Sitaro	7,01	7,00	6,99	6,73	6,65	1,03
9	Minahasa Tenggara	6,29	6,32	6,36	6,00	5,98	-0,64
10	Bolaang Mongondow Selatan	5,96	6,13	6,24	6,56	6,39	0,63
11	Bolaang Mongondow Timur	6,48	5,57	5,71	5,06	4,80	0,18
12	Kota Manado	6,39	7,18	6,74	6,65	6,03	-3,13
13	Kota Bitung	3,54	5,21	6,18	6,01	4,06	1,37
14	Kota Tomohon	6,03	4,19	8,84	6,12	6,76	-0,41
15	Kota Kotamobagu	6,52	6,63	6,79	6,66	6,13	0,20
	Sulawesi Utara	**6,12**	**6,16**	**6,31**	**6,00**	**5,65**	**-0,99**

Sumber: BPS Sulut

Struktur perekonomian Kota Kotamobagu menurut lapangan usaha pada Tahun 2020 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu: Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,99 persen; Perdagangan Besar Eceran; Reparasi

Mobil-Sepeda Motor sebesar 15,49 persen; dan Konstruksi sebesar 11,87 persen. Dengan demikian, ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Kota Kotamobagu. Jika dirasiokan, nilai kontribusi tersebut menunjukkan struktur ekonomi Kota Kotamobagu yakni perekonomian yang bercirikan Jasa.

Tabel 2.11

Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,22%	8,50%	8,61%	8,51%	8,49%	8,54%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,98%	3,05%	2,89%	2,88%	2,93%	2,84%
C	Industri Pengolahan	3,85%	3,55%	3,72%	3,88%	3,82%	3,97%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22%	0,23%	0,24%	0,23%	0,23%	0,25%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
F	Konstruksi	12,23%	12,01%	12,17%	12,56%	12,46%	11,87%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	14,62%	14,29%	14,31%	14,49%	15,23%	15,49%
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92%	4,98%	5,03%	5,09%	5,10%	4,68%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55%	1,59%	1,63%	1,69%	1,67%	1,62%
J	Informasi dan Komunikasi	2,19%	2,23%	2,30%	2,30%	2,37%	2,51%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,88%	9,78%	10,04%	9,60%	9,06%	9,42%
L	Real Estate	3,01%	2,97%	2,99%	3,02%	3,14%	3,07%
M,N	Jasa Perusahaan	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	21,66%	21,13%	20,17%	19,36%	18,38%	17,99%

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P	Jasa Pendidikan	4,87%	4,80%	4,75%	4,89%	5,04%	5,18%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,68%	8,77%	8,97%	9,19%	9,51%	10,24%
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,88%	1,90%	1,95%	2,10%	2,35%	2,13%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber: BPS Sulut

2.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi bila naik dan deflasi bila terjadi sebaliknya.

Laju inflasi Kotamobagu bulanan 2 (tahun) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2021 inflasi Kota Kotamobagu bulan januari sebesar 0,23 persen, bulan februari melambat menjadi -0,21 persen, dan pada bulan maret menjadi -0,33 persen.

Gambar 2.22

Inflasi Kota Kotamobagu

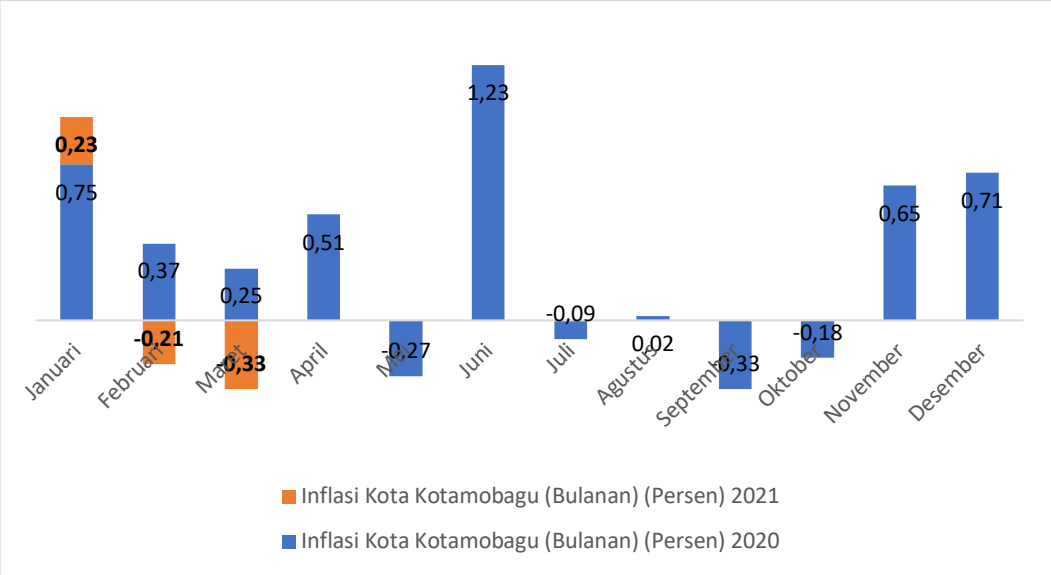

Sumber: BPS Sulut

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB

Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 22.342 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2020 mencapai Rp. 29.012 juta. PDRB per kapita ADHK Tahun 2020 mencapai Rp. 18.344 juta menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 18.634 Juta pada Tahun 2019.

Tebel 2.12
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kota Kotamobagu
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita ADHB	22.342	24.105	26.424	28.775	29.012
PDRB Per Kapita ADHK	16.262	17.061	17.862	18.634	18.344

Sumber: BPS Sulut

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* menggambarkan komposit indikator Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2015 IPM Kota Kotamobagu sebesar 70,7, meningkat dari keadaan 71,68 tahun 2016 dan 72,93 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk

Kota Kotamobagu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 2.13

Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup	69,64	69,69	69,72	69,97	70,33	70,47
2	Rata-rata lama sekolah	9,75	9,97	9,98	10,04	10,09	10,10
3	Harapan lama sekolah	12,33	12,67	12,68	12,75	12,78	12,79
4	Pengeluaran per kapita	9.743	10.088	10.366	10.663	11.098	10.744
	IPM	**70,7**	**71,68**	**72**	**72,55**	**73,22**	**72,93**

Sumber: BPS Sulut

2.2.1.5. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Angka kemiskinan Kotamobagu pada posisi Tahun 2015 tercatat 6,950 jiwa (5.85 persen), tahun 2016 naik menjadi 7,240 jiwa (6.01 persen), tahun 2017 mencapai 7,280 jiwa (5.90 persen), tahun 2018 mencapai 7,490 jiwa (5.96 persen), tahun 2019 mencapai 7.310 jiwa. Lalu tercatat bahwa sampai dengan Tahun 2020, secara makro penduduk miskin Kota Kotamobagu menurun menjadi 7,060 jiwa atau turun sebesar 5.42 persen dari total penduduk Kota Kotamobagu. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.23
Indikator Kemiskinan Kota Kotamobagu 2013-2020

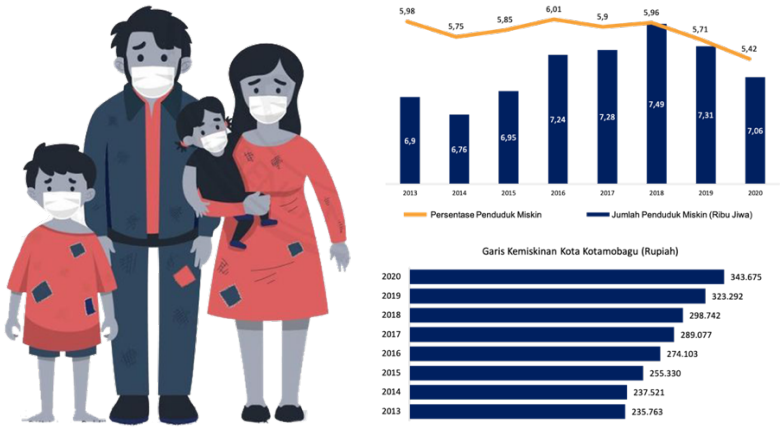

Sumber: BPS Sulut

Tabel 2.14

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kota Kotamobagu

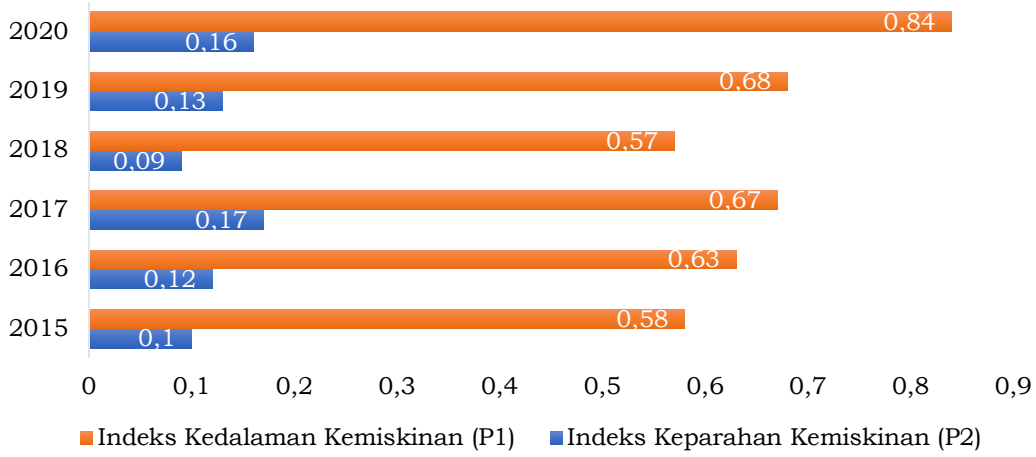

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperandalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Kotamobagu sebesar 99,67 persen pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2019 dan

tahun 2020. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Kotamobagu disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.24

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Kotamobag

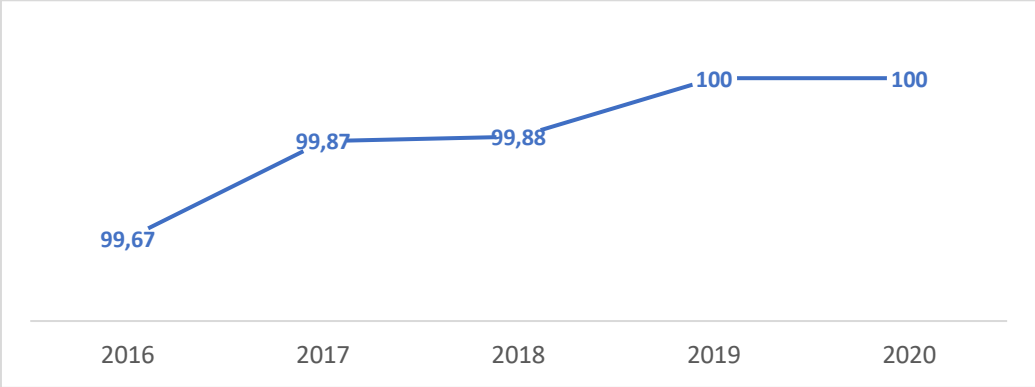

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Dari data pada gambar diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menunjukkan bahwa penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2019 seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 74,69 persen, jenjang SMP/MTs sebesar 81,97 persen. APM pada tahun 2018 jenjang SD/MI sebesar 76,36 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 86,16 persen. APM pada tahun 2019 jenjang SD/MI sebesar 80,95 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 76,6 persen. Sedangkan pada tahun 2020 APM jenjang SD/MI sebesar 61,78 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 61,78 persen Khusus APM jenjang

SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kota Kotamobagu tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.25

Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Kotamobagu

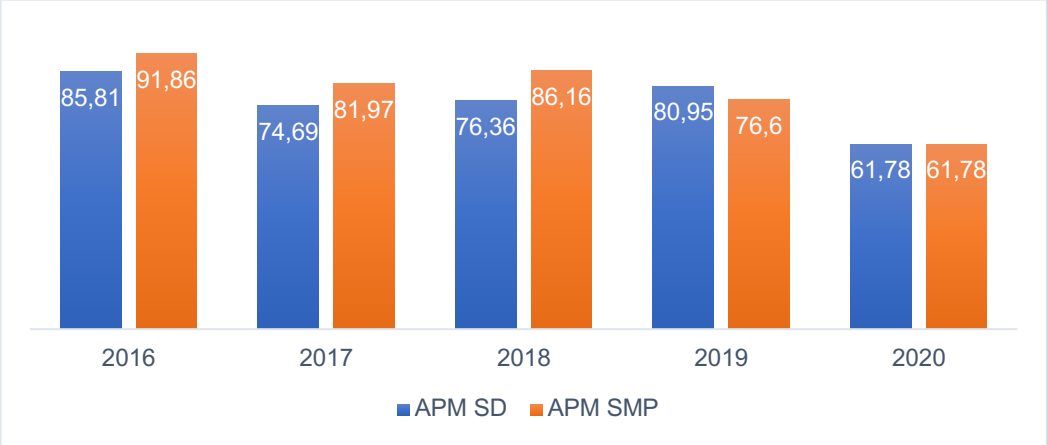

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2015-2020 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.26

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Kotamobagu

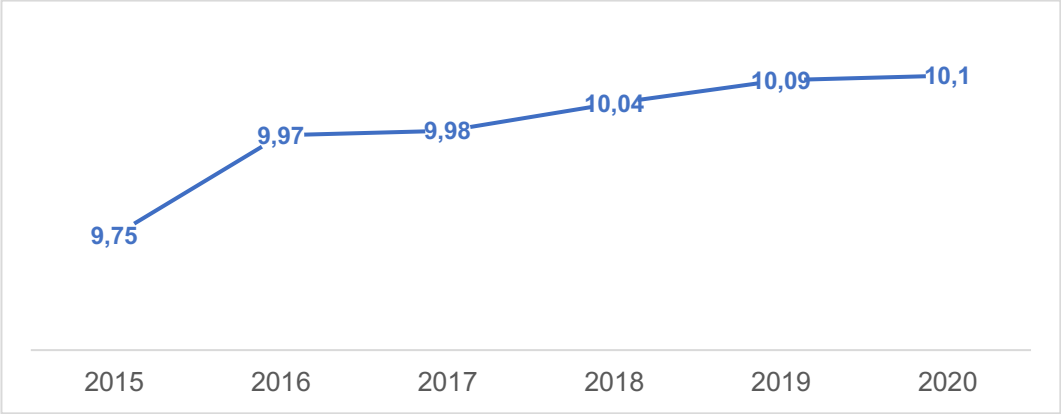

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Kotamobagu tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut:

Gambar 2.27

Perkembangan Angka Harapan lama sekolah Kota Kotamobagu

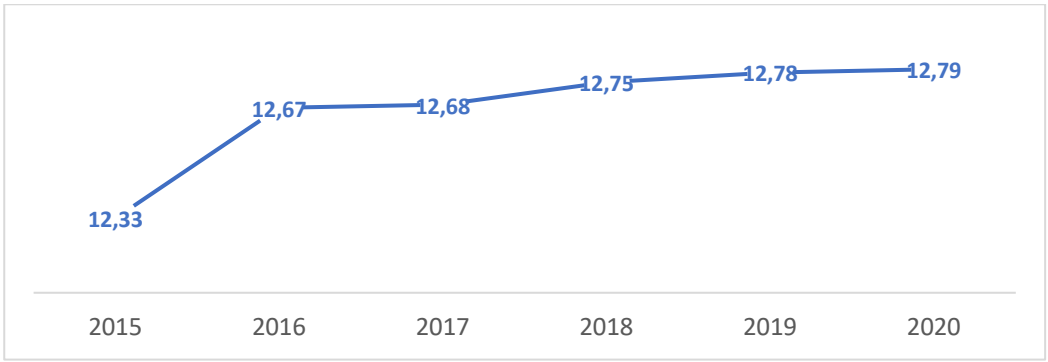

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Dari data diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Kotamobagu berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

Aspek lain yang menjadi fokus Pemerintah Kota Kotamobagu dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat adalah pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehingga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Gambar 2.28
Kualifikasi Tenaga Pendidik Kota Kotamobagu

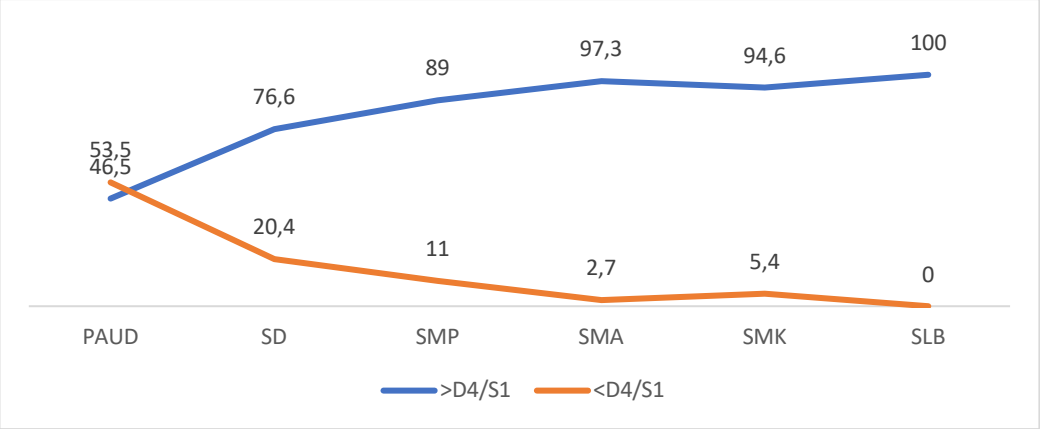

Sumber: Data Verifikasi PDSPK 2019

Adapun Persentase pendidik yang sudah tersertifikasi dan yang belum yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.29

Persentase Tersertifikasi Kota Kotamobagu

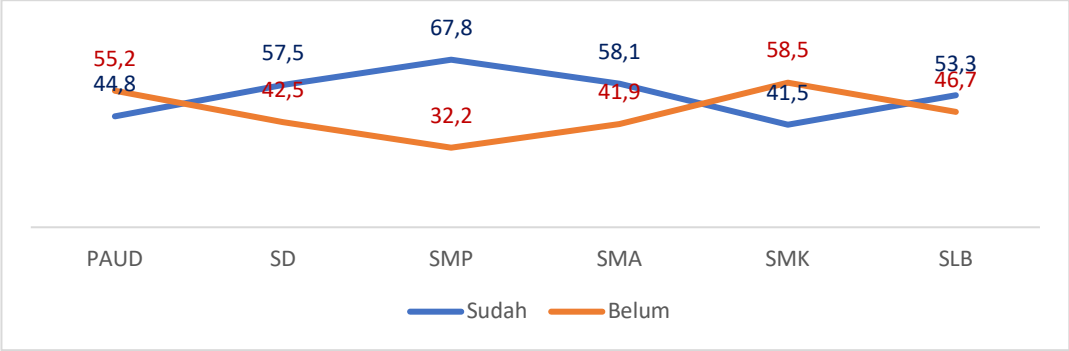

Sumber: Ditjen GTK 2019

2.2.2.2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Kotamobagu disajikan pada gambar 2.17

Gambar 2.30

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Kotamobagu

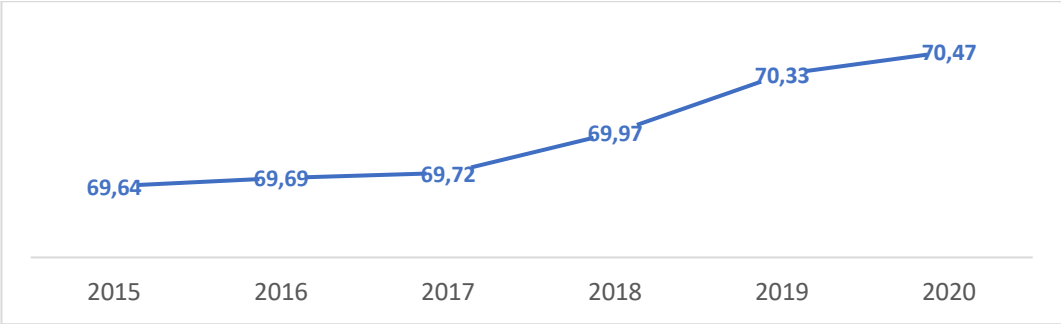

Sumber: BPS Sulut

AHH penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2019 sebesar 70,33 tahun dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 70,47 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Kotamobagu secara umum belum menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan masih adanya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 meningkat menjadi 0,05 persen kemudian pada tahun 2020 menurun 0,03 hal ini menunjukan adanya upaya perbaikan pelayanan kesehatan. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang tahun 2016- 2019.

Gambar 2.31
Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Kota Kotamobagu

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Corona virus atau sekarang kita kenal dengan Covid-19 merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona virus yang baru ditemukan, yang sudah masuk keindonesia sejak 2 Maret 2020 yang lalu. Ternyata virus ini tidak hanya menyerang manusia tetapi juga menyerang perekonomian Indonesia sehingga membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini

menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dengan sebab banyaknya PHK di masa pandemic ini menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 memiliki pengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran, bahkan di prediksi akan terus bertambah jika pandemi ini tidak segera berlalu atau diselesaikan. Adapun penyebab utama meningkatnya angka pengangguran di masa pandemi ini ialah banyaknya PHK, adanya aturan pemerintah tentang lock down, PSBB, dan social distanching

Adapun yang mungkin bisa dilakukan agar angka pengangguran tidak meningkat pesat ialah mengoptimalkan kartu Pra-Kerja oleh pemerintah, mendorong dunia usaha agar memberikan insentif bukan PHK, mengusahakan dan mengupayakan agar pandemic ini cepat berlalu, percayakan kepada pemerintah, dan meningkatkan jiwa kewirausahaan terutama yang berbasis online.

Tahun 2020, dari total penduduk Kota Kotamobagu yang berada dalam kelompok usia kerja 15 tahun keatas, sebanyak 66,48 persennya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut 92,56 persen berstatus bekerja, sedangkan sekitar 7,44 persennya menganggur ini menunjukkan kenaikan pengangguran dari tahun sebelumnya yakni 5,62 Persen pada tahun 2019.

Tabel 2.32

Statistik Ketenagakerjaan Kota Kotamobagu

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	62,66	n.a	57.96	64,87	63,5	66,48
Tingkat Pengangguran (%)	10,17	n.a	5,71	5,73	5,62	7,44
Bekerja (%)	89,83	n.a	94,29	94,27	94,38	92,56

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Kotamobagu mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah dilestarikan di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun meningkat menjadi 10 jenis pada tahun 2018 dan tata nilai budaya lokal hasil inovasi dari masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun menjadi 6 jenis pada tahun 2018.

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kota kotamobagu telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, prestasi yang dicapai dari tahun ke tahun terus menujukan peningkatan, tercatat kota Kotamobagu telah mendapat prestasi dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan tingkat nasional 2 cabang olahraga pada tahun 2013 meningkat menjadi 16 cabang pada tahun 2018 antara lain Cabang olahraga catur, karate, taekwondo, silat, selam, billyard, tinju, basket,

bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja.

Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kota Kotamobagu sampai tahun 2018 adalah sebanyak 24 organisasi.

Gambar 2.33
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Kota Kotamobagu

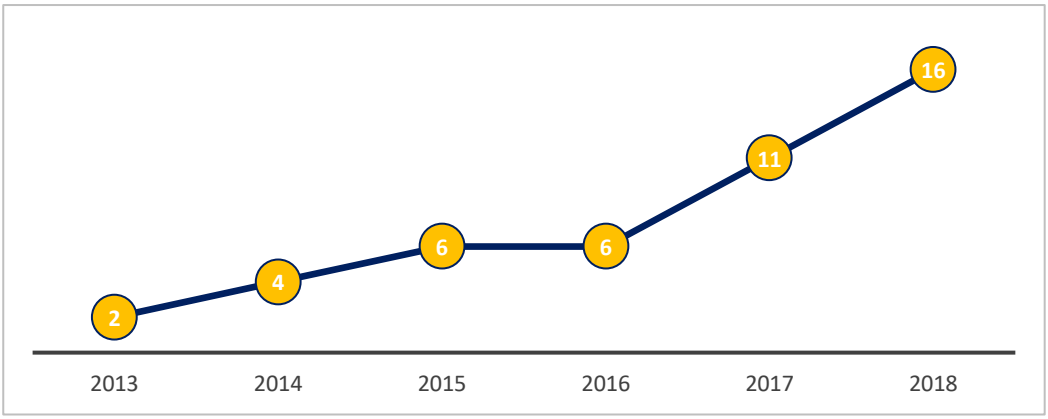

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.3.1.1. Pendidikan

Untuk mewujudkan Kotamobagu sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

1. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM dan APK Kota Kotamobagu Tahun 2015-2020 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.15

Perkembangan APM Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	11.802	12.039	9.623	9.958	9.960	7.591
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	13.785	13.981	12.884	13.040	12.305	12.288
	APM SD/MI	**85,61**	**86,11**	**74,69**	**76,36**	**80,95**	**78,54**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	6.378	6.785	6.229	6.614	5.862	4.211
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	6.455	7.386	7.599	7.677	6.755	6.817
	APM SMP/MTS	**98,81**	**91,86**	**81,97**	**86,16**	**86,78**	**61,78**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Tabel 2.16

Perkembangan APK Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**APK SD/MI**	**85,78**	**92,30**	**95,27**	**95,45**	**89,35**	**95,81**
2	**APK SMP/MTS**	**98,81**	**111,62**	**103,30**	**105,07**	**111,55**	**105,27**

Tabel diatas menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan masih perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kotamobagu. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Kotamobagu menunjukkan penurunan pada tahun 2020.

2. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2015 mencapai angka 99,24 persen, 96,80 persen pada tahun 2016, naik mencapai angkat 99,13 persen dan 99,76 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 98,27 persen, pada tahun 2020 AL

SD/MI mencapai 100 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2015 sebesar 94,19 persen, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 98,83, tahun 2017 turun menjadi 97,82, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 98,36 lalu pada tahun 2019 turun menjadi 98,69 persen, sedangkan pada tahun 2020 AL SMP/MTs meningkat menjadi 99,34 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Kotamobagu disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 2.17

Perkembangan AL Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	1.954	2.238	2.062	2.047	1.985	
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	1.969	2.312	2.080	2.052	2.020	
	AL SD/MI	**99,24**	**96,80**	**99,13**	**99.76**	**98,27**	**100**
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	1.801	2.287	2.379	2.695	2.570	
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	1.912	2.314	2.432	2.740	2.604	
	AL SMP/MTs	**94,19**	**98,83**	**97,82**	**98,36**	**98,69**	**99,34**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing.

3. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak- anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2016 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,33% dan konsisten turun sebesar 0,06% sampai dengan tahun 2019. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 1,11% dan konsisten turun sebesar 0,25% sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Kotamobagu relative kecil. Perkembangan

Angka Putus Sekolah (APS) Kota Kotamobagu Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18

Perkembangan APS Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	-	42	11	20	7	7
2	Jumlah siswa SD/MI	13,641	12,847	12,884	11,315	10,994	7.591
	APS SD/MI	**-**	**0.33**	**0.09**	**0.18**	**0.06**	**0,09**
1	Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	77	67	45	56	19	19
2	Jumlah siswa SMP/MTs	6,910	6,785	7,850	7,806	7,535	4.211
	APS SMP/MTs	**1.11**	**0.99**	**0.57**	**0.72**	**0.25**	**0,45**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

4. Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 119.48 persen menjadi 131.79 persen sampai dengan tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami

penurunan menjadi 119,18 persen. Pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 165.97% menjadi 173.50 sampai dengan tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 165,78 persen. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Kotamobagu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19

Perkembangan AM Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMP/MTS	2.331	2.776	2.624	2.589	2.616	
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	1.951	2.238	2.062	2.047	1.985	
	AM SD/MI	**119,48**	**124,04**	**127,26**	**126,48**	**131,79**	**119,18**
1	Jumlah Siswa Baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	3.024	3.253	3.275	3.363	3.444	
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya	1.822	2.287	2.379	2.695	1.985	
	AM SMP/MTs	**165,97**	**142,24**	**137,66**	**124,79**	**173,50**	**165,78**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan begitu besarnya siswa yang melanjutkan.

5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.20

Data Ketersediaan Sekolah Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	**SD/MI**						
1	Jumlah sekolah SD/MI	75	75	75	75	75	75
2	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 thn	13,758	13,981	12,884	13,040	12,305	12.288
	Rasio	**1:183**	**1:186**	**1:172**	**1:174**	**1:164**	**1:163**
B	**SMP/MTs**						
1	Jumlah sekolah SMP/MTs	18	18	18	19	19	19
2	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 thn	6,455	7,386	7,599	7,677	6,755	6,817
	Rasio	**1:359**	**1:410**	**1:422**	**1:404**	**1:356**	**1:358**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

6. Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel 2.21

Perkembangan Rasio Guru Berbanding Murid Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	**SD/MI+SMP/MTs**						
1	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)	1,403	1,203	1,128	825	1,155	721
2	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	18,180	21,148	20,124	19,121	18,529	14,786
	Rasio	**77.17**	**56.88**	**56.05**	**43.15**	**62.33**	**48.8**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.22
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	**SD/MI+SMP/MTs**						
1	Jumlah guru berijasah	733	1121	752	867	806	975

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	kualifikasi S1/D-IV						
2	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs,	1.403	1.203	1.128	1.091	943	1.116
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	**52,25**	**93,18**	**66,67**	**79,47**	**85,47**	**87,37**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kotamobagu telah menunjukkan pencapaian yang positif.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, salah satunya melalui cakupan layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi yang mendapat perawatan yang dapat dilihat berikut ini.

Gambar 2.34
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas dan Kunjungan Bayi Kota Kotamobagu

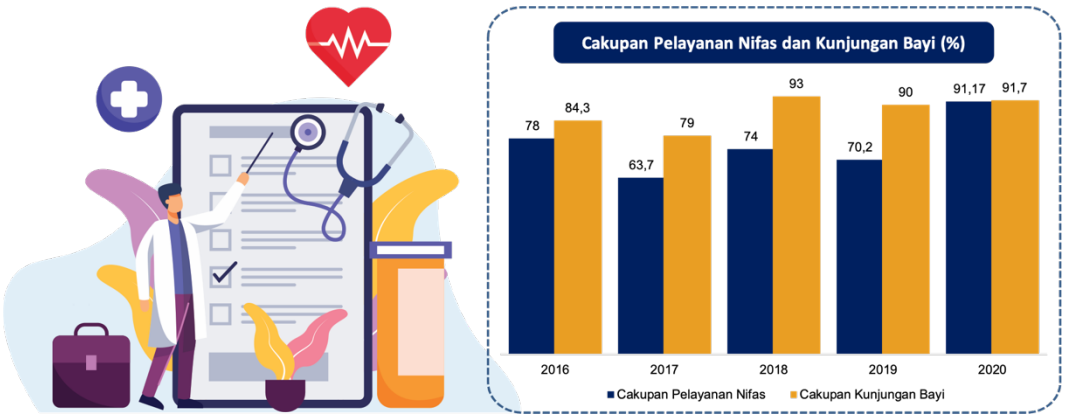

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

b. Stunting

Salah satu fokus pemerintah Kota Kotamobagu saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Berikut dapat dilihat data capaian stunting Per Kecamatan tahun 2020.

Tabel 2.23
Data Stunting Per Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH BALITA	BALITA STUNTING	PREVALENSI
KOTAMOBAGU SELATAN	244	20	8,20

KECAMATAN	JUMLAH BALITA	BALITA STUNTING	PREVALENSI
KOTAMOBAGU BARAT	1.601	23	1,44
KOTAMOBAGU TIMUR	1.387	85	6,13
KOTAMOBAGU UTARA	919	77	8,38
TOTAL	4.151	205	4,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

c. Fasilitas Kesehatan

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2016 rasio Posyandu persatuan balita adalah 3,8, pada tahun 2017 dan 2018 serta tahun 2019 dan 2020 rasio posyandu per satuan balita mengalami kenaikan sebesar 3,93 dan 4,48 serta 6,44 dan 6,44. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita dan rasio puskesmas poliklinik pustu persatuan penduduk dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.24

Rasio Posyandu per Satuan Balita dan Rasio Puskesmas Poliklinik Pustu Per Satuan Penduduk Kota Kotamobagu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio posyandu per satuan balita	3,8	3,93	5,48	6,44	6,44
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	10,06	10,04	10,04	0,12	0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan

keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan Fasilitas, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Tabel 2.25

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik / Balai Kesehatan	Polindes
1	Kotamobagu Timur	1	1	1	11	-	5
2	Kotamobagu Selatan	1	2	1	10	-	9
3	Kotamobagu Barat	2	1	1	10	1	2
4	Kotamobagu Utara	-	1	2	11	-	4
Kota Kotamobagu		4	5	5	42	1	20

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu

Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama Rumah Sakit, puskesmas, posyandu, dan polindes. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah Rumah Sakit Umum di Kotamobagu sebanyak 4 (empat) unit, Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit dengan kapasitas 258 tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Swasta berjumlah 3 unit. Rumah Bersalin 5 (lima) unit. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai tahun 2020 mencapai 5 unit. Terdiri dari 3 unit Puskesmas telah dilengkapi dengan Fasilitas Rawat Inap 2 unit, rawat bersalin (RB) 1 unit dan 2 unit Puskesmas Rawat Jalan. Dalam pencegahan gizi buruk juga telah disediakan fasilitas pelayanan pemulihan untuk balita penderita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding Center (TFC) di 4 (empat) Puskesmas Kecamatan. Berikut beberapa fasilitas yang terdapat di RSUD Kota Kotamobagu seperti yang ditampilkan pada table berikut.

Tabel 2.26

Jumlah Fasilitas Kesehatan RSUD Kota Kotamobagu

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Instalasi Farmasi	1
2	IGD	1
3	Gedung ICU/ ICCU	1
4	Gedung Bedah Sentral	1
5	Gedung Maternal – Neonatal	1
6	Laboratorium	1
7	BDRS	1
8	Instalasi Gizi	1
9	Radiologi	1
10	Ruang Inap Kelas III	1
11	Ruang Inap Kelas II	1
12	Ruang Inap Kelas I	1
13	Ruang Inap VIP	1
14	Klinik Umum	1
15	Klinik Mata	1
16	Klinik Kandungan	1
17	Klinik Rehab Medik	1
18	Klinik Gigi	1
19	Klinik Anak	1
20	Klinik Interna	1
21	Klinik THT	1
22	Klinik Bedah	1
23	Klinik Jantung	1
24	Klinik Syaraf	1
25	Klinik Psikologi	1
26	Gedung IPSRS	1

Sumber: RSUD Kota Kotamobagu

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2020 jumlah Dokter di Kota Kotamobagu sebanyak 50 orang yang terdiri dari dokter umum 20 orang, dokter spesialis 17 orang dan dokter gigi 3 orang.

d. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir diseluruh dunia termasuk di Indonesia merupakan wabah yang dikategorikan bencana non alam. Di indonesia khusunya Kota Kotamobagu Kejadian pandemic *COVID-19* memiliki dampak sangat luas di berbagai sektor yang berimplikasi pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Data Kasus COVID-19 per 28 Desember 2021 di Kota Kotamobagu adalah 0 (nol) total kasus positif, dengan rincian 1,465 jiwa kasus sembuh dan 42 jiwa kasus meninggal dunia. data Sebaran *COVID-19* per 28 Desember 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.35

Peta Sebaran Covid-19 Kota Kotamobagu

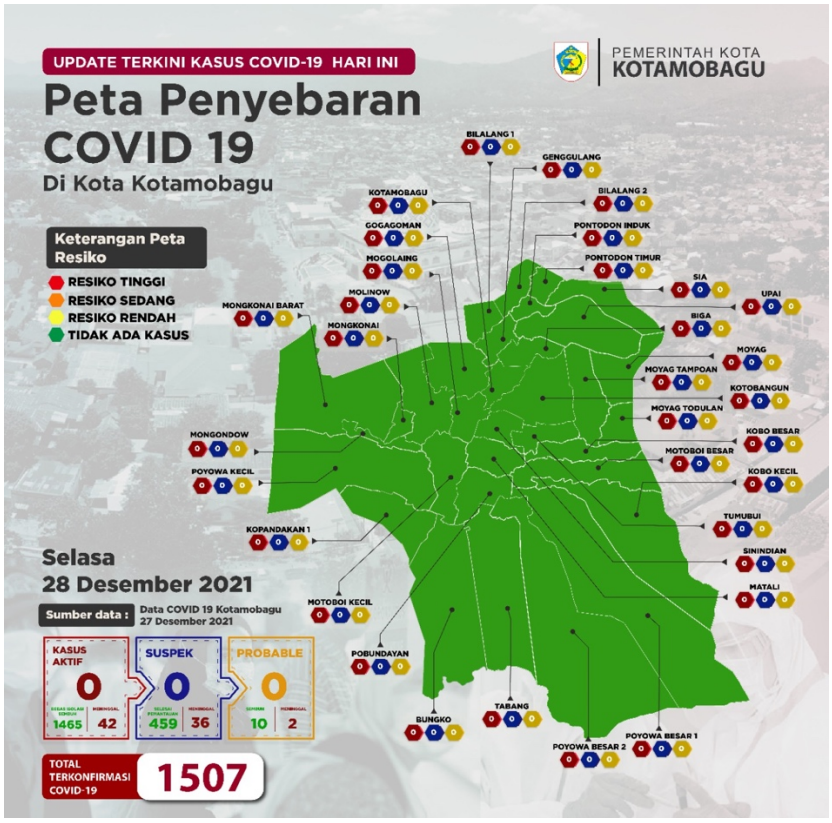

e. Vaksinasi

Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Satgas Covid-19 Kota Kotamobagu terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga lanjut usia atau lansia. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

Kondisi Per-tanggal 28 Desember 2021 total suntikan yang sudah diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 3 di Kota Kotamobagu telah mencapai 120.573 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27

Update Vaksin Covid-19 Kota Kotamobagu

Sasaran							Vaksinasi Hari Ini			Kumulatif			
Kesehatan	Publik	Lansia	Umum & Rentan	Remaja	Anak	Ttoal	Dosis I	Dosis II	Dosis III	Dosis I	Dosis II	Dosis III	Total
1.256	9.801	9.532	64.735	11.889	0	97.253	276	543	1	76.816	42.905	852	120.573

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

1. Pekerjaan Umum

Salah satu penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal kondisi penunjang transpotasi yaitu jalan yang memadai menjadi salah satu dasar dalam menunjang kemajuan suatu daerah.

Dalam peningkatan jaringan jalan Pemerintah Kota Kotamobagu membangunan infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara optimal.

Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2020 persentase panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 72.96 % atau 195.41 km, kondisi sedang 22.51 % atau 60.334 km, kondisi rusak ringan 2.06 % atau 5.511 km dan kondisi rusak berat 2.47 % atau 6.608 km. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami bottle neck di Kota Kotamobagu yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Gambar 2.36

Persentase Kondisi Jalan Tahun 2020 di Kota Kotamobagu

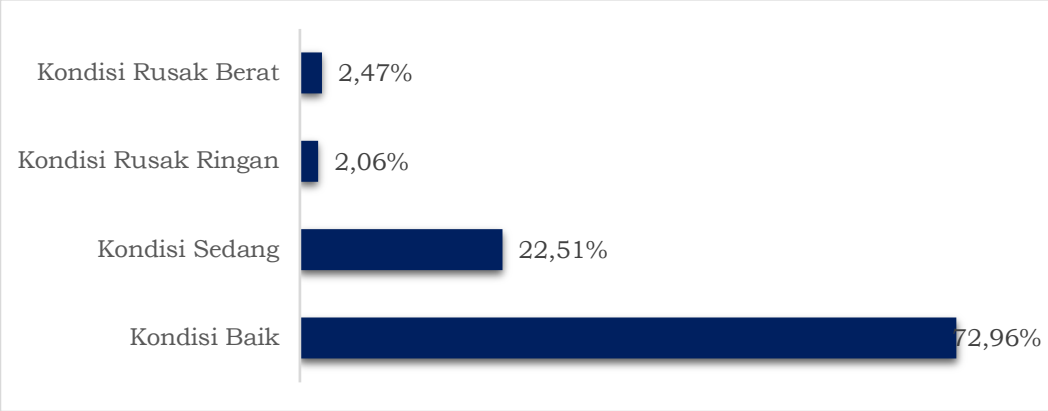

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk Panjang jalan menurut kondisi jalan kategori baik di Kota Kotamobagu dari tahun 2013 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Dimana jalan dengan kondisi baik terus meningkat dilihat sesuai data pada tahun 2017 sepanjang 186.324 km atau 69.53 % dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 195.541 km atau

72.96 %. adapun data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km) di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.28

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Kotamobagu

Uraian	2017		2018		2019		2020	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	186.324	69.53	196.392	73.28	193.442	72.18	195.541	72.96
Sedang	39.899	4.89	37.309	13.92	57.323	21.39	60.334	22.51
Rusak Ringan	35.773	13.35	29.483	11	12.539	4.68	5.511	2.06
Rusak Berat	5.998	2.24	4.81	1.79	4.69	1.75	6.608	2.47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

Untuk Panjang jalan menurut kondisi jenis permukaan di Kota Kotamobagu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 didominasi oleh jenis permukaan yang sudah diaspal. Sesuai data tahun 2020 panjang jalan yang sudah diaspal sepanjang 168.855 km. Adapun data Panjang Jalan Menurut jenis permukaan (Km) di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kota Kotamobagu

Uraian	2017	2018	2019	2020
Aspal / Penetrasi / Macadam	177.656	174.391	172.236	168.855
Perkerasan Rigid / Beton	42.029	43.865	41.445	41.406
Telford / Kerikil	26.879	48.44	52.223	53.563
Tanah / Belum Tembus	9.097	1.298	2.09	4.17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

Panjang jalan menurut kewenangan pengelola di Kotamobagu pada tahun 2018 untuk kewenangan Pemerintah Kotamobagu sepanjang 267,99 KM, kewenangan Propinsi sepanjang 1.734 KM dan

Kewenangan Negara sepanjang 19.812 KM. Di Kotamobagu sepanjang 18.93 KM ruas jalan berstatus non status.

Tabel 2.30

Panjang Jalan Menurut Pemerintah yang berwenang

Tahun	Pemerintah yang Berwenang Mengelola				
	Negara	Provinsi	Kota	Non Status	Jumlah Total
2017	19.812				
2018	19.812	1.734	267.994	18.93	308.47
2019	19.812	1.734	267.994	18.93	308.47
2020	19.812	1.734	267.994	18.93	308.47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

Kondisi jaringan irigasi di Kota Kotamobagu pada tahun 2019 didominasi oleh jaringan irigasi sekunder dengan panjang 24,728.2 meter dengan jumlah daerah irigasi (DI) 13 D.I atau 818 m sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 tentang penetapan status daerah irigasi.

Tabel 2.31

Rasio Jaringan Irigasi

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan			
		2017	2018	2019	2020
1	Jaringan Primer (m)	-	-	-	-
2	Jaringan Sekunder (m)	24,728.2	24,728.2	24,728.2	24,728.2
3	Jaringan Tersier (m)	-	-	-	-
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	818	818	818	818
5	Rasio	30.23	30.23	30.23	30.23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Kotamobagu

2. Penataan Ruang

Pola ruang dan struktur ruang Kota Kotamobagu memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (to live), bekerja (to work), dan bermain (to play), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), belum terealisasi.

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, namun masih ada tahapan yang belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Prioritas pemanfaatan ruang dikembangkan berdasarkan pertimbangan upaya untuk mengantisipasi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan kawasan strategis kota maka prioritas pemanfaatan ruang di Kota Kotamobagu secara umum adalah sebagai berikut:

a. Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang atas dinamika pengembangan wilayah bagi secara internal maupun secara regional yang menuntut Kota Kotamobagu menyediakan lahan untuk kebutuhan tersebut.

b. Upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan perkotaan Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan-jasa.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota
b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang
c. Meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
d. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna

memberi pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu secara optimal. Khusus untuk Kota Kotamobagu sampai dengan saat ini mengalami kesulitan dalam persoalan data perumahan rakyat, sehingga sulit untuk melihat perkembangan perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Untuk itu diperlukan solusi penanganan dari pemerintah Kota Kotamobagu yang akan menjadi stimulan untuk MBR. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu kemudian bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Berikut adalah data BSPS Kota Kotamobagu.

Gambar 2.37
Data BSPS Kota Kotamobagu

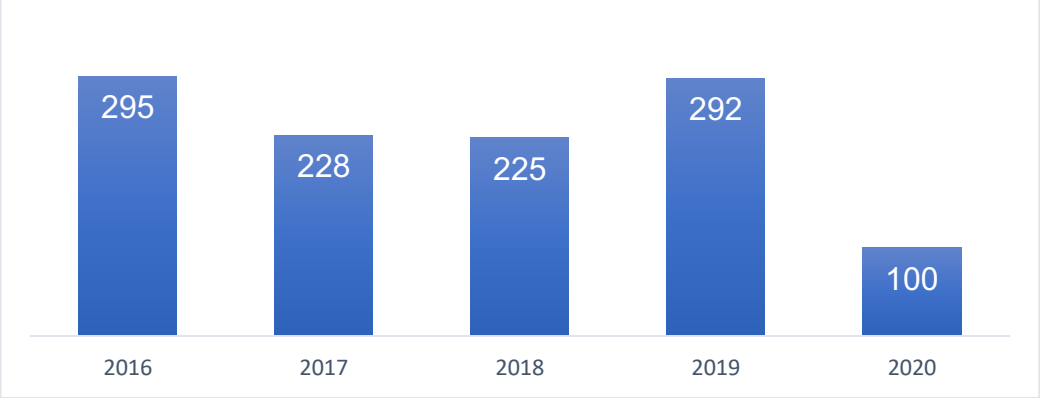

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Sampai saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki rumah yang tidak layak huni sebanyak 4.450 unit rumah. Kota Kotamobagu juga memiliki Rumah Susun Sederhana yang tercatat sebanyak 2 Unit masing-masing di kelurahan Gogagoman dengan 68 Kamar dan di kelurahan Pobundayan dengan 90 Kamar. Rumah susun sewa di Kotamobagu, diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Adapun jumlah

data kepemilikan rumah pada tahun 2020 sebanyak 25.676 rumah tangga memiliki rumah, dan 14.405 rumah tangga non miliki rumah (backlog kepemilikan rumah). Sampai saat ini data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu terkait backlog kepemilikan rumah adalah tahun 2020 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32

Jumlah Backlog Dan RTLH Di Kota Kotamobagu, Tahun 2020

NO	KECAMATAN (KELURAHAN/DESA)	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK/RT	JUMLAH RTLH	JUMLA BACKLOG
Kotamobagu Utara					
1	Kelurahan Upai	762	786	125	24
2	Kelurahan Genggulang	495	982	95	487
3	Kelurahan Biga	1.139	1.336	92	197
4	Desa Sia	74	101	40	27
5	Desa Pontodon	451	699	160	248
6	Desa Bilalang Satu	562	817	142	255
7	Desa Bilalang Dua	480	785	115	305
8	Desa Pontodon Timur	172	284	100	112
JUMLAH		**4.135**	**5.790**	**869**	**1.655**
Kotamobagu Selatan					
1	Desa Kopandakan Satu	846	1.308	111	462
2	Desa Bungko	347	538	15	191
3	Desa Tabang	668	981	105	313
4	Desa Poyowa Besar Satu	838	1.278	115	440
5	Desa Poyowa Besar Dua	604	904	130	300
6	Kelurahan Pobundayan	1.277	1.833	150	556
7	Kelurahan Motoboi Kecil	1.233	1.820	125	587
8	Kelurahan Mongondow	264	692	110	428
9	Desa Poyowa Kecil	831	1.244	98	413
JUMLAH		**6.908**	**10.598**	**959**	**3.690**
Kotamobagu Barat					
1	Kelurahan Mongkonai	375	774	114	399
2	Kelurahan Molinow	1.154	1.959	184	805
3	Kelurahan Mogolaing	1.681	2.821	397	1.140
4	Kelurahan Gogagoman	2.893	4.658	659	1.765
5	Kelurahan Kotamobagu	1.164	2.383	262	1.219

NO	KECAMATAN (KELURAHAN/DESA)	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK/RT	JUMLAH RTLH	JUMLA BACKLOG
6	Kelurahan Mongkonai Barat	519	900	101	381
JUMLAH		**7.786**	**13.495**	**1.717**	**5.709**
Kotamobagu Timur					
1	Kelurahan Matali	1.358	1.782	215	424
2	Kelurahan Motoboi Besar	573	873	152	300
3	Desa Kobo Kecil	651	1.015	176	364
4	Desa Moyag	508	791	67	283
5	Kelurahan Kobo Besar	349	543	37	194
6	Kelurahan Tumobui	644	874	105	230
7	Kelurahan Sinindian	590	894	30	304
8	Kelurahan Kotobangon	1.467	2.372	83	905
9	Desa Moyag Tampoan	321	512	20	191
10	Desa Moyag Todulan	386	542	20	156
JUMLAH		**6.847**	**10.198**	**905**	**3.351**
TOTAL JUMLAH		**25.676**	**40.081**	**4.450**	**14.405**

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Permukiman kumuh di kota kotamobagu pada tahun 2014 teridentifikasi terdapat 8 lokasi dengan luas 36,07 Ha, pada tahun 2016 teridentifikasi melalui penyusunan RP2KP seluas 282,315 Ha, dimutakhirkan pada baseline KOTAKU pada tahun 2017 seluas 56,29 Ha dan tertangani seluas 40,61 Ha, pada tahun 2018 permukiman kumuh di kota kotamobagu seluas 15,68 Ha. Dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pemukiman kumuh di kota ktoamobagu 0 (nol) Ha. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33

Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu

Uraian	2017	2018	2019	2020
Kawasan Permukiman Kimuh (Ha)	56.29	15.68	0	0

Sarana perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, pesemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan rumahnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Kawasan kumuh serta rasio bangunan ber IMB yang belum maksimal menjadi persoalan permukiman dimana kaum miskin menanggung konsekwensi terbesar dari kerusakan lingkungan dengan berbagai alasan seperti:

a. Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dll.
b. Keluarga miskin terkadang memiliki tingkat akses terendah ke jasa dan manfaat sumber daya yang ada seperti air minum, masalah sanitasi yang sehat, dan sumber energy lainnya.
c. Terkadang pula bahwa rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap bencana alam karena mereka tinggal pada wilayah yang beresiko tinggi.
d. Kaum miskin pada umumnya memiliki mata pencaharian yang erat kaitannya dengan keberadaan lahan, hutan, dan lain-lain. Kehilangan hutan atau kerusakan lingkungan akan memperlemah kaum miskin dalam hal mata pencaharian terutama bagi kaum petani.

e. Selanjutnya terkait dengan rumah tangga miskin umumnya menjadi isu lingkungan terkait dengan adanya pemukiman kumu di perkotaan dengan sistem sanitasi yang tidak layak.

Kondisi yang terjadi di Kota Kotamobagu tidak seperti apa yang dialami di Kota-Kota kecil lainnya. Masyarakat Kotamobagu yang hidup dari hasil pertanian, dimana pola hidupnya justru lebih terjamin. Persediaan lahan pertaniaan masih cukup dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, belum ternodai dengan berbagai macam penyemprotan pestisida maupun sistem pemupukan, karena rata-rata jenis tanahnya mengandung unsure hara yang tinggi. Dari aspek permukiman rata-rata tidak ada masalah, persiapan lahan bahkan ruang terbuka hijau di masing-masing halaman bangunan rumahnya menjadi salah satu budaya masyarakat dari pendahulunya atau sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menjaga kondisi lahan yang ada.

2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Kotamobagu mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta

upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

1. Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Rasio Jumlah POLPP Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah POLPP	127	81	87	101
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Rasio Jumlah POLPP per 10.000 penduduk	10.25	6.44	7.04	8.18

Sumber: Dinas SATPOLPP Kota Kotamobagu

Kota Kotamobagu memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Pada tahun 2017, jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah

127 orang yang patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan yaitu sejumlah 81 orang yang patroli dalam 24 jam/setiap harinya, tahun 2019 jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 87 orang dan pada tahun 2020 jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 meningkat sebanyak 101 orang.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, PKL, PSK dan Perda lainnya. kesemuanya telah dapat diselesaikan.

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Kotamobagu pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 24 personil Linmas. Pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 20 personil Linmas, pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 8 personil Linmas, dan pada pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 20 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.35

Rasio Jumlah Linmas Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Linmas	300	260	108	254
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	24.22	20.66	8.73	20.57

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2. Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Kotamobagu. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.36

Cakupan Pelayanan Kebakaran Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Mobil DAMKAR	4	4	4	4
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Managemen Kebakaran	100	100	100	100

Sumber: Dinas SATPOLPP Kota Kotamobagu

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota Kotamobagu dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2020, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.37

Rincian tingkat waktu tanggap kebakaran Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	25	16	17	18

Sumber: Dinas SATPOLPP Kota Kotamobagu

Sepanjang tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 25 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan. Pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 16 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan. Pada tahun 2019, jumlah kejadian kebakaran yaitu 17 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran menjadi 18 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan, sebagaimana tampak pada table di atas.

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

1. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
2. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).

3. Terdapat WMK dengan jumlah kejadian kebakaran, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

3. Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam medukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38

Jumlah Ormas Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ormas Aktif	52	52	52	52
2	Jumlah Ormas Terdaftar	52	52	52	52

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu

2.3.1.6. Sosial

Pemerintah Kota Kotamobagu telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, lanjut usia miskin dan terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel 2.39

Penanganan PMKS Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang ada	6.108	2,040	2.103	1.670
2	Jumlah PMKS yang ditangani	449	499	1.033	311
3	PMKS yang ditangani (%)	7,35	24,46	49,12	18,62

Sumber: Dinas Sosial Kota Kotamobagu

Secara umum, jumlah PMKS fluktuatif dari tahun 2017-2019 sebanyak 1.670 orang pada tahun 2020. Presentase yang ditangani semakin meningkat, namun pada tahun 2020 Jumlah yang ditangani menurun. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota

Kotamobagu. Pengentasan PMKS dilakukan melalui bantuan dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Kotamobagu perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penangan PMKS.

2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Tahun 2020, dari total penduduk Kota Kotamobagu yang berada dalam kelompok usia kerja 15 tahun keatas, sebanyak 66,48 persennya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut 92,56 persen berstatus bekerja, sedangkan sekitar 7,44 persennya menganggur ini menunjukkan kenaikan pengangguran dari tahun sebelumnya yakni 5,62 Persen pada tahun 2019.

Tabel 2.40
Statistik Ketenagakerjaan Kota Kotamobagu

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK	62,66	n.a	57.96	64,87	63,5	66,48
Tingkat Pengangguran (%)	10,17	n.a	5,71	5,73	5,62	7,44

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bekerja (%)	89,83	n.a	94,29	94,27	94,38	92,56

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

Perekonomian Kotamobagu beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembiarakan. Meskipun Perekonomian Kotamobagu sebesar 7,06 persen pada tahun 2013, kemudian turun sebesar 6,69 persen pada tahun 2014, lalu turun lagi pada tahun 2015 sebesar 6.5 persen, namun pertumbuhan Ekonomi Kotamobagu menunjukan tren positif sehingga pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 6.63 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2017 meningkat menjadi 6.79 persen.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

A. Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu

Pada pada tahun 2018 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebanyak 1.876 orang, pada tahun 2019, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu terdiri dari 2.280 orang. Pada tahun

2020 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebanyak 2.476 orang. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja Perempuan	n/a	3.882	4.115	22.748
2	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	n/a	1.871	2.280	2.476
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n/a	48,20	55,41	10,88

Sumber: Dinas PPPA Kota Kotamobagu

Dari data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja diluar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

B. Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.42

Capaian Kasus KDRT Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	n/a	30.615	39.371	40.081
2	Jumlah KDRT	9	8	7	7
3	Rasio KDRT	n/a	0.0002	0.0001	0.0001

Sumber: Dinas PPPA Kota Kotamobagu

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel di atas jumlah KDRT menurun dari tahun 2017-2020. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Forum Anak serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

2.3.2.3 Pangan

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah Kota Kotamobagu. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman Pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kota kotamobagu diarahkan pada tersediaanya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui penganekaragaan bahan pangan, peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan ketersedian dan keanekaragaman pangan dimasyarakat.

Tabel 2.43

Capaian Indikator Ketahana Pangan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama (ton)	n/a	210	211,323	251
2	Cakupan Pola Pangan Harapan	n/a	-	92,05	93,20
3	Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	n/a	5	5	5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

2.3.2.4 Pertanahan

Pemerintah Kota Kotamobagu tidak lagi menangani urusan pertanahan karena semua sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan infrastruktur strategis Kota Kotamobagu memerlukan ketersediaan lahan. Untuk itu, fokus utama Pemerintah Kota Kotamobagu adalah menyediakan lahan untuk pembangunan fasilatas umum. Data pertanahan yang dapat disajikan adalah luasan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka untuk mendukung pembangunan jalan lingkar Kota Kotamobagu yang menghubungkan 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow.

Tabel 2.44

Luas Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Kota Kotamobagu

No	Uraian	Tahun 2020
1	Luas Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Kepentingan Umum	199,82 Ha

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamboagu

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Kotamobagu, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Perhitungan produksi sampah di suatu daerah ditentukan berdasarkan SNI. Sesuai SNI 3242:2008 yang merupakan revisi atas SNI 03-3242-1994 tentang 'Pengelolaan sampah di permukiman', bahwa bila pengamatan/kajian lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran produksi sampah, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah kota besar = 2– 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari.
2. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari.

Dengan menggunakan rumusan SNI diatas, hasil perhitungan Produksi sampah Kota Kotamobagu sampai dengan akhir Tahun 2020 sebesar 31.553.000 kg/tahun

Dari jumlah produksi sampah tersebut yang tertangani/ masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 22.531.000 dengan Perentase Penanganan Sampah / yang masuk di TPA dibandingkan dengan Produksi Sampah adalah sebesar 71,41% dan dengan Persentase Pengurangan Sampah sebesar +/- 27,69% yang dikelola secara 3R antara lain melalui Pengomposan dan Bank Sampah.

Tabel 2.45

Volume Sampah dan Sampah yang tertangani Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Volume Produksi Sampah (Kg/Tahun)	22.721.000	22.520.340	22.567.000	31.553.000
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (Kg/Tahun)	15.696.100	16.284.070	17.877.700	22.531.000
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	69,08	72,31	78,44	71,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Sistem pengumpulan, penyimpanan dan penampungan sampah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah ditempatkan pada pewadahan (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada viber plastic yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastic dan karung. Namun beberapa komponen masyarakat yang tanpa menyadari langsung membuang sampahnya ke sungai sehingga hal ini sangat berbahaya. Namun dari hasil pengamatan dan survey lokasi bahwa sebenarnya pihak Pemda sudah menyiapkan beberapa

pewadahan sampah terutama di pusat-pusat kota, pasar dan lain-lain, namun hal ini masih sangat kurang dimana penyediaan pewadahan / penyimpanan sementara yang terbuat dari sistem baru mencapai sekitar 30%, sehingga hal ini dianggap masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi masalah adalah partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat, adanya tangan-tangan jahil sampai mencuri tempat-tempat pewadahan yang melalui pengadaan seperti Viber termasuk standnya sebagai tempat penyanggah yang terbuat dari besi yang juga ikut dicuri.

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan bidang persampahan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir adalah sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana termasuk personil yang tersedia dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah tersebut. Personil petugas kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2020 yang tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46

Jumlah Personil petugas kebersihan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	pengawas 4 kecamatan	4 Orang
2	penyapu	110 Orang
3	penyapu lapangan kota	3 Orang
4	supir dump truck	17 Orang
5	supir pick up	7 Orang
6	kenek dump truck	52 Orang
7	kenek pick up	14 Orang
8	petugas penghitung volume dan pengadministrasi kompos skala kota	2 Orang
9	petugas penghitung volume sampah tps, bank sampah dan potensi pad	2 Orang
10	operator alat rumah kompos skala kota	2 Orang
11	petugas pemilah kompos skala kota	3 Orang
12	penjaga tpa	1 Orang
13	pengecek volume sampah	2 Orang

NO	JABATAN	JUMLAH
14	operator alat berat	2 Orang
15	penjaga tps 3r matali	1 Orang
16	petugas pemilah/pengelola sampah & kompos tps 3r matali	2 Orang
17	sopir motor sampah tps 3r matali	1 Orang
18	kenek motor sampah tps 3r matali	1 Orang
JUMLAH		**226 Orang**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Sesuai amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa singkatan TPA yang dulunya disebut "Tempat Pembuangan Akhir" maka saat ini diganti menjadi "Tempat Pemrosesan Akhir" dimana titik beratnya adalah sudah tidak dibenarkan lagi yang metode Open Dumping, akan tetapi sudah harus ada proses pengolahan di lokasi TPA minimal metode "Sanitary Landfill", dan harus ada kebijakan pengurangan sampah pada sumbernya dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Di Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan system Sanitary Landfill, luas lahan yang dimiliki ± 2,8 Ha berlokasi dekat sekali dengan sungai. Untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terlalu besar maka perlu perluasan dan/atau relokasi lahan TPA yang layak atau sesuai kriteria lahan TPA (Standar SNI).

Udara memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dunia ini sehingga kualitasnya harus dijaga. Sebagaimana tersirat dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran udara , maupun yang ada pada Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam udara ambien oleh

kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedang kan udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Di Kota Kotamobagu yang hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 33 Kelurahan dan desa secara fisik wilayah masih dalam kondisi normal, keberadaan industry-industri yang menghasilkan sumber sumber gas pencemar belum ada, terkecuali adalah beberapa jenis kendaraan roda 4 dan roda 2, akan tetapi belum padat dan daya dukung lingkungan kotanya masih sehat. Kondisi Kota Kotamobagu juga di untungkan dengan vegetasi kota atau ruang terbuka hijau yang masih sangat menguntungkan.

Tabel 2.46

Capaian Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6	14	20
2	Jumlah lokasi target pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	15	15	15
3	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	40	93.33	133.33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Secara umum status Daya Dukung dan Daya Tanpung Pangan di Kota Kotamobagu sudah melampaui lebih dari setengah luas Kota Kotamobagu yakni 7.397 Ha untuk itu di perlukan, telah terlampaui sehingga permasalahan-permasalahan seperti bencana banjir, longsor, penurunan muka tanah serta intruksi air laut di wilayah pesisir. Selain itu, kemacetan lalulintas menjadi isu yang tidak dapat dihindari kemungkinan akan terjadinya hal ini akan diakibatkan oleh hal-hal tersebut diatas oleh karena itu di perlukan upaya pengendalian pemanfataan ruang agar supaya lingkungan tetap terjaga

Tabel 2.47
Luas Wilayah yang sudah memiliki daya dukung lahan terlampaui dan tidak terlampaui Untuk Pangan

Kecamatan	Kelurahan	Status		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kotamobagu Barat	Gogagoman	89.55	291.75	381.30
	Kotamobagu	-	97.31	97.31
	Mogolaing	-	107.85	107.85
	Molinow	-	160.09	160.09
	Mongkonai	1.38	56.00	57.38
	Mongkonai Barat	746.93	31.73	778.66
Kotamobagu Barat Total		837.86	744.73	1582.59
Kotamobagu Selatan	Bungko	811.24	-	811.24
	Kopandakan Satu	51.31	229.03	280.34
	Mongondow	32.04	73.49	105.53
	Motoboi Kecil	15.45	199.82	215.27
	Pobundayan	17.02	145.03	162.05
	Poyowa Besar Dua	1746.77		1746.77
	Poyowa Besar Satu	772.89	142.98	915.87
	Poyowa Kecil	550.40	209.06	759.46
	Tabang	489.47	162.04	651.51
Kotamobagu Selatan Total		4486.58	1161.45	5648.03
	Kobo Besar	18.54	90.97	109.51

Kecamatan	Kelurahan	Status		Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	761.98	115.90	877.88
	Kotobangon	45.56	252.76	298.32
	Matali	2.25	133.04	135.29
	Motoboi Besar	92.18	140.04	232.22
	Moyag	183.89	133.28	317.17
	Moyag Tampoan	164.92	59.19	224.11
	Moyag Todulan	153.09	85.80	238.88
	Sinindian	0.06	87.21	87.27
	Tumubui		128.39	128.39
Kotamobagu Timur Total		1422.45	1226.59	2649.04
Kotamobagu Utara	Biga	18.47	92.13	110.60
	Bilalang Dua	25.40	75.01	100.42
	Bilalang Satu	56.30	49.06	105.36
	Genggulang	11.73	81.98	93.71
	Pontodon	7.50	59.82	67.32
	Pontodon Timur	78.73	35.22	113.95
	Sia	157.14	2.25	159.39
	Upai	176.89	78.78	255.67
Kotamobagu Utara Total		532.15	474.26	1006.41
Grand Total		7279.04	3607.03	10886.07

Sumber : Analisis, 2020

Secara umum status Daya Dukung dan Daya Tanpung Pangan di Kota Kotamobagu sudah melampaui lebih dari setengah luas Kota Kotamobagu yakni 5.725 Ha untuk itu di perlukan, telah terlampaui sehingga permasalahan-permasalahan seperti bencana banjir, longsor, penurunan muka tanah serta intruksi air laut di wilayah pesisir. Selain itu, kemacetan lalulintas menjadi isu yang tidak dapat dihindari kemungkinan akan terjadinya hal ini akan diakibatkan oleh hal-hal tersebut diatas

oleh karena itu di perlukan upaya pengendalian pemanfataan ruang agar supaya lingkungan tetap terjaga.

Tabel 2.48
Luas Wilayah yang sudah memiliki daya dukung lahan terlampaui dan tidak terlampaui untuk Air

Kecamatan	Kelurahan	Status		
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Luas (Ha)
Kotamobagu Barat	Gogagoman	200.15	181.14	381.30
	Kotamobagu	26.80	70.51	97.31
	Mogolaing	19.86	87.99	107.85
	Molinow	43.66	116.43	160.09
	Mongkonai	16.58	40.80	57.38
	Mongkonai Barat	354.84	423.81	778.66
Kotamobagu Barat Total		661.91	920.68	1582.59
Kotamobagu Selatan	Bungko	670.52	140.72	811.24
	Kopandakan Satu	103.40	176.94	280.34
	Mongondow	35.31	70.22	105.53
	Motoboi Kecil	47.29	167.99	215.27
	Pobundayan	93.16	68.89	162.05
	Poyowa Besar Dua	1372.40	374.37	1746.77
	Poyowa Besar Satu	553.07	362.80	915.87
	Poyowa Kecil	590.41	169.06	759.46
	Tabang	651.51		651.51
Kotamobagu Selatan Total		4117.05	1530.98	5648.03
Kotamobagu Timur	Kobo Besar	72.88	36.63	109.51
	Kobo Kecil	485.81	392.07	877.88
	Kotobangon	94.14	204.18	298.32
	Matali	44.00	91.29	135.29
	Motoboi Besar	76.28	155.94	232.22
	Moyag	130.30	186.87	317.17
	Moyag Tampoan	131.00	93.11	224.11
	Moyag Todulan	134.65	104.24	238.88
	Sinindian	87.27		87.27
	Tumubui	128.39		128.39

Kecamatan	Kelurahan	Status		
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Luas (Ha)
Kotamobagu Timur Total		1384.71	1264.33	2649.04
Kotamobagu Utara	Biga	77.99	32.61	110.60
	Bilalang Dua	89.86	10.56	100.42
	Bilalang Satu	87.35	18.01	105.36
	Genggulang	46.03	47.67	93.71
	Pontodon	24.95	42.37	67.32
	Pontodon Timur	43.12	70.83	113.95
	Sia	159.39		159.39
	Upai	255.67		255.67
Kotamobagu Utara Total		784.35	222.06	1006.41
Grand Total		6948.02	3938.05	10886.07

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel 2.49

Perhitungan Air Untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Kotamobagu

NO	DESA/KELURAHAN	MODEL DENSITAS POPOLASI		KETERSEDIAAN AIR (m^3/Tahun)	KEBUTUHAN AIR LAHAN (m3/Tahun)	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK (m3/Tahun)	TOTAL KEBUTUHAN AIR (m3/Tahun)	SELISIH (m3/Tahun)	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	SELISIH AMBANG BATAS (Jiwa)	STATUS
		LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)								
1	Biga	111	4,123	1,192,032	603,810	356,227	960,038	231,995	6,808	2,685	BELUM TERLAMPAUI
2	Bilalang Dua	100	2,424	1,122,949	298,927	209,434	508,361	614,588	9,537	7,113	BELUM TERLAMPAUI
3	Bilalang Satu	105	2,548	1,093,757	308,951	220,147	529,098	564,659	9,083	6,535	BELUM TERLAMPAUI
4	Bungko	811	1,589	7,380,188	3,553,804	137,290	3,691,094	3,689,095	44,287	42,698	BELUM TERLAMPAUI
5	Genggulang	94	3,080	1,167,235	901,444	266,112	1,167,556	(321)	3,076	(4)	TERLAMPAUI
6	Gogagoman	381	15,139	3,522,415	2,221,612	1,308,010	3,529,621	(7,206)	15,056	(83)	TERLAMPAUI
7	Kobo Besar	110	1,552	1,262,410	1,057,547	134,093	1,191,640	70,770	2,371	819	BELUM TERLAMPAUI
8	Kobo Kecil	878	3,037	9,319,667	8,844,914	262,397	9,107,311	212,355	5,495	2,458	BELUM TERLAMPAUI
9	Kopandakan Satu	280	4,077	2,862,376	3,084,392	352,253	3,436,645	(574,269)	(2,570)	(6,647)	TERLAMPAUI
10	Kotamobagu	97	7,320	1,043,202	1,140,908	632,448	1,773,356	(730,154)	(1,131)	(8,451)	TERLAMPAUI
11	Kotobangon	298	7,091	2,761,962	3,521,145	612,662	4,133,807	(1,371,845)	(8,787)	(15,878)	TERLAMPAUI
12	Matali	135	5,129	1,309,945	1,652,091	443,146	2,095,236	(785,291)	(3,960)	(9,089)	TERLAMPAUI
13	Mogolaing	108	8,949	1,089,555	1,402,781	773,194	2,175,974	(1,086,419)	(3,625)	(12,574)	TERLAMPAUI
14	Molinow	160	6,135	1,709,556	1,733,916	530,064	2,263,980	(554,424)	(282)	(6,417)	TERLAMPAUI
15	Mongkonai	57	2,357	691,444	741,006	203,645	944,650	(253,207)	(574)	(2,931)	TERLAMPAUI
16	Mongkonai Barat	779	2,753	7,041,518	8,448,098	237,859	8,685,957	(1,644,439)	(16,280)	(19,033)	TERLAMPAUI
17	Mongondow	106	2,204	1,351,113	1,685,191	190,426	1,875,617	(524,503)	(3,867)	(6,071)	TERLAMPAUI
18	Motoboi Besar	232	2,678	2,656,350	3,653,949	231,379	3,885,328	(1,228,977)	(11,546)	(14,224)	TERLAMPAUI
19	Motoboi Kecil	215	5,489	2,182,311	2,889,398	474,250	3,363,648	(1,181,336)	(8,184)	(13,673)	TERLAMPAUI
20	Moyag	317	2,360	2,932,852	3,582,574	203,904	3,786,478	(853,626)	(7,520)	(9,880)	TERLAMPAUI
21	Moyag Tampoan	224	1,529	2,307,448	2,497,953	132,106	2,630,058	(322,611)	(2,205)	(3,734)	TERLAMPAUI
22	Moyag Todulan	239	1,673	2,514,774	2,748,693	144,547	2,893,240	(378,466)	(2,707)	(4,380)	TERLAMPAUI
23	Pobundayan	162	5,845	1,691,055	1,633,389	505,008	2,138,397	(447,342)	667	(5,178)	TERLAMPAUI
24	Pontodon	67	2,129	850,433	844,993	183,946	1,028,939	(178,506)	63	(2,066)	TERLAMPAUI
25	Pontodon Timur	114	864	1,199,300	1,378,950	74,650	1,453,600	(254,300)	(2,079)	(2,943)	TERLAMPAUI
26	Poyowa Besar Dua	1,747	2,661	18,175,266	11,646,723	229,910	11,876,633	6,298,632	75,562	72,901	BELUM TERLAMPAUI
27	Poyowa Besar Satu	916	3,821	8,921,667	7,247,265	330,134	7,577,400	1,344,268	19,380	15,559	BELUM TERLAMPAUI
28	Poyowa Kecil	759	4,037	7,059,049	2,784,064	348,797	3,132,861	3,926,188	49,479	45,442	BELUM TERLAMPAUI
29	Sia	159	311	1,507,567	-	26,870	26,870	1,480,696	17,449	17,138	BELUM TERLAMPAUI
30	Sinindian	87	2,786	929,013	-	240,710	240,710	688,303	10,752	7,966	BELUM TERLAMPAUI
31	Tabang	652	3,026	5,822,624	-	261,446	261,446	5,561,177	67,391	64,365	BELUM TERLAMPAUI
32	Tumubui	128	2,746	1,505,306	-	237,254	237,254	1,268,051	17,423	14,677	BELUM TERLAMPAUI
33	Upai	256	2,325	2,620,904	-	200,880	200,880	2,420,024	30,335	28,010	BELUM TERLAMPAUI
	Grand Total	**10,886**	**123,787**	**108,797,243**	**82,108,489**	**10,695,197**	**92,803,686**	**15,993,558**	**308,898**	**185,111**	**BELUM TERLAMPAUI**

Adapun hasil rekomendasi dari data-data diatas adalah sebagai berikut:

1 Dimasa yang akan datang, layanan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Kotamobagu sangat ditentukan oleh peran penggunaan lahan yang diterapkan, khususnya terhadap penggunaan lahan yang berpotensi dalam memproduksi hasil pangan. Dalam perencanaan pembangunan ke depannya, khususnya di sektor pertanian agar lebih mempertimbangkan karateristik bentanglahan agar lahan-lahan yang secara struktur dan sifatnya sangat baik untuk mendukung produksi pangan bisa dimaksimalkan.

2 Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan berada pada daerah bertopografi tinggi seperti pegunungan di Kota Kotamobagu agar tetap dipertahankan untuk menjaga sistem pengaturan iklim yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim.

3 Belum terlampauinya status daya dukung daya tampung lingkungan hidup penyedia pangan dan air di Kota Kotamobagu tetap harus menjadi perhatian mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, fluktuatif kondisi ketersediaan pangan dan air serta derasnya alih fungsi lahan yang terjadi sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit.

4 Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu muatan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap proses

perencanaan untuk pengambilan keputusan yang optimal dalam perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk secara Nasional. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	90,788	91,828	91,097	
2	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	82,546	86,512	88,874	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Dari data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya
   Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.
2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

   Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Tabel 2.51

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Data	n/a	45.45	100	100

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
	dan Informasi Keluraha/Desa				
2	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	n/a	-	13.33	20
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	100	100	100
4	Persentase PKK Aktif	n/a	-	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kotamobagu secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya capaian program KB dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.52

Capaian Indikator KB

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	n/a	9.3	10.45	4,3
2	Persentase pengunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP)	n/a	34.65	35.4	36,5
3	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	n/a	78.73	80.52	80,16
4	Ratio Aseptor KB	n/a	78.73	80.66	80,16

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Kotamobagu dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.53

Total Fertility Rate (TFR)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	n/a	2.38	2.17	15

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu

2.3.2.9 Perhubungan

Kota Kotamobagu sendiri belum memiliki angkutan kota yang resmi, oleh karenanya pemerintah Kota Kotamobagu belum mengeluarkan izin trayek angkutan sehingga angkutan yang tersedia saat ini adalah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang kewenangannya berada pada Dinas Perhubungan Provinsi. Berikut capaian urusan perhubungan disajikan dalam table berikut.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani.

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan disajikan pada table berikut.

Tabel 2.54

Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n/a	6.88	5.14	2,60

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Kotamobagu, Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan penyediaan dan pemeliharaan

perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu pemerintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Kotamobagu selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 100 unit, sebagaiman dapat dilihat pada Tabel berikut. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel 2.55

Jumlah Pemasangan Rambu-rambu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	n/a	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

2.3.2.10 Statistik

Indikator keberhasilan kinerja urusan statistik tergantung pada ketersediaan data statistik yang komprehensif, sistem data dan produk data di masing-masing daerah, serta ketersediaan buku PDRB yang di sediakan oleh BPS Kota Kotamobagu sebagai badan pelayanan publik yang menyediakan data informasi statistik.

Tabel 2.56

Ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Kota Kotamobagu	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kotamobagu Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kominfo Kota Kotamobagu

2.3.2.11 Persandian

Untuk urusan bidang Persandian capaian indikator diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Sehubungan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020 dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2018-2023.

2.3.2.12 Komunikasi dan Informasi

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang lebih baik, perlu ditekankan akan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK harus dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring

komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat http://www.kotamobagukota.go.id Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel 2.57

Website milik pemerintah Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
1	Website milik pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kominfo Kota Kotamobagu

Untuk urusan Statistik Pemerintah Kota Kota kotamobagu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kotamobagu untuk menyusun buku PDRB Kota Kotamobagu dan Informasi Data Pokok Kotamobagu sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Kotamobagu Dalam Angka.

2.3.2.13 Koperasi dan UKM

a. Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Berdasarkan data 2020, jumlah koperasi aktif 26 unit.

Tabel 2.58

Jumlah Koperasi Aktif enurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	Kotamobagu Selatan	17	17	17	6
2	Kotamobagu Timur	22	22	23	10
3	Kotamobagu Barat	27	31	34	8
4	Kotamobagu Utara	10	10	9	2
	Kota Kotamobagu	**76**	**80**	**83**	**26**

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Ini merupakan program prioritas. Tidak lagi kepada jumlah kelembagaannya yang banyak, tapi bagaimana agar kelembagaan koperasi yang ada harus bisa memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.

Undang-Undang Koperasi yang baru Nomor 17 tahun 2012, fungsi dan tugas koperasi hampir sama seperti unit usaha swasta yang ada saat ini. Hanya saja, apabila unit usaha swasta dimiliki satu atau dua orang, koperasi justru dimiliki banyak orang. Koperasi diwajibkan membuat perencanaan usaha dan target usaha yang akan dicapai. Karena itu, orang yang duduk menjadi pengurus

koperasi kedepan tak cukup dengan jujur dan demokratis, tapi juga harus orang yang memiliki interpreneur tinggi dalam bidang bisnis dan jasa usaha.

Usulan pembentukan sebuah kelembagaan koperasi ke depan tidak lagi semata atas dasar untuk menerima bantuan kredit atau peralatan dari pemerintah, tetapi harus atas dasar keinginan yang kuat dari sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah kelembagaan usaha bersama yang kuat yang bisa menopang hidup orang banyak.

Tabel 2.59

Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kota Kotamobagu, Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Koperasi					
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
Kotamobagu Selatan	2	-	-	-	-	2
Kotamobagu Timur	1	-	-	-	1	2
Kotamobagu Barat	2	-	1	-	-	3
Kotamobagu Utara	-	-	-	-	-	-
Kota Kotamobagu	**5**	**-**	**1**	**-**	**1**	**7**

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tidak bisa dipungkiri, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Maka tak heran jika sektor UMKM terganggu maka ekonomi nasional juga terganggu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Selama pandemi Corona Covid-19 ini, sektor UMKM paling terdampak. Banyak dari pengusaha tersebut yang harus gulung tikar karena permintaan jatuh. beberapa pelaku UMKM sudah mulai bangkit dikarenakan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti relaksasi KUR, subsidi bunga, modal kerja, serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dalam bentuk hibah.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat setidaknya sejak pandemi terjadi, penjualan di *e-commerce* naik hingga 26 persen atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya mendorong dan mempercepat UMKM agar *go digital*. Program-program pelatihan dan pendampingan terus dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan berbagai *marketplace* besar seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, Grab dan lainnya. Alasan kerja sama tersebut, dari 64 juta UMKM yang ada, ternyata baru 13 persen atau

8 juta UMKM yang hadir dalam platform digital. Data UKM no BPR/LKM di Kota Kotamobagu seperti tergambar di dalam tebel berikut ini.

Tabel 2.60

Jumlah UKM non BPR/LKM

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Seluruh UKM	1.500	2.750	3.500	7.457
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

c. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel 2.61

Jumlah BPR/LKM

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR	4	4	4	4
2	Jumlah LKM	-	-	-	-
3	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Dengan adanya BPR dan LKM, hal ini berdampak positif bagi perekonomian di Kota Kotamobagu. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Perkembangan sektor UMKM di Kota Kotamobagu perlu terus di tingkatkan dan menjadi perhatian karena terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

2.3.2.14 Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.62

Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Proyek PMDN	495	439	291	223
2	Jumlah Proyek PMA	-	-	-	-
	Total	495	439	291	223

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.63

Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	**Persetujuan**				
1	Jumlah Proyek	495	439	291	223
2	Nilai Infestasi	343.824.903.652	703.533.796.097	116.640.320.280	100.116.917.750
B	**Realisasi**				
1	Jumlah Proyek	495	439	291	223
2	Nilai Investasi	343.824.903.652	703.533.796.097	116.640.320.280	100.116.917.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.3.2.15 Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Kotamobagu bersifat terbuka (outdoor) maupun tertutup (indoor) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kotamobagu. Dari tahun 2017 - 2020, jumlah lapangan olahraga sebanyak 33 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.64

Jumlah Lapangan Olahraga Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lapangan Olahraga	33	33	33	33
2	Jumlah Penduduk	123.872	125.835	123.653	123.498
3	Rasio Lapangan Olahraga	0,0002	0,0002	0,0002	0,00026

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kota kotamobagu telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, prestasi yang dicapai dari tahun ke tahun terus menujukan peningkatan, tercatat kota Kotamobagu telah mendapat prestasi dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan tingkat nasional 2 cabang olahraga pada tahun 2013 meningkat menjadi 16 cabang pada tahun 2018 antara lain Cabang olahraga catur, karate, taekwondo, silat, selam, billyard, tinju, basket, bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja.

Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kota Kotamobagu sampai tahun 2018 adalah sebanyak 24 organisasi.

Gambar 2.38

Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi

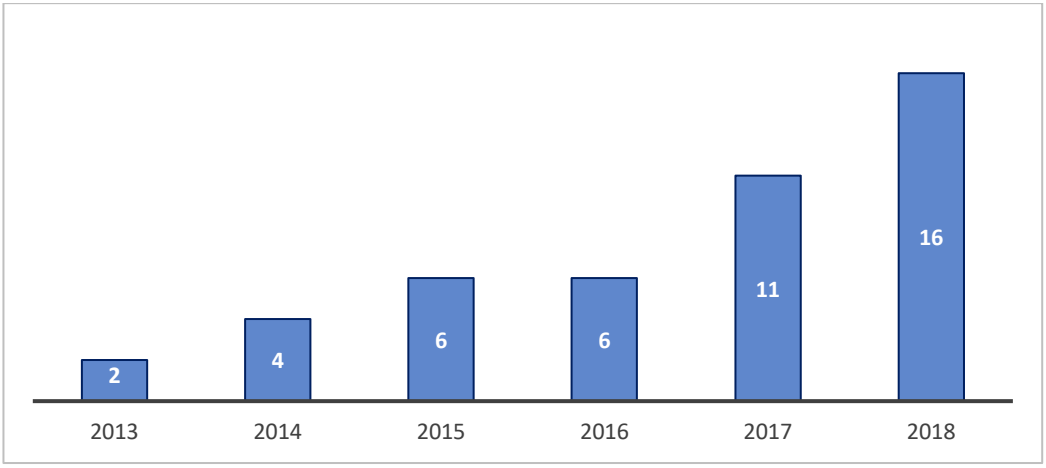

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.3.2.16 Kebudayaan

Budaya masyarakat Kota Kotamobagu sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan etnis yakni Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, suku Bugis dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi beberapa bahasa dan tradisi dengan semangat ***Mototabian, Mototanoban bo Motompiaan***. Dapat dilihat gambaran beberapa data kebudayaan yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.65

Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Kotamobagu

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Tradisi Lisan	12 Objek
2	Manuskrip	0 Objek
3	Adat Istiadat	10 Objek
4	Ritus	4 Objek
5	Pengetahuan Tradisional	39 Objek
6	Teknologi Tradisional	46 Objek
7	Seni	24 Objek
8	Permainan Rakyat	10 Objek
9	Olahraga Tradisional	2 Objek
10	Bahasa	6 Objek
11	Cagar Budaya	1 Objek
Jumlah		154 Objek

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Di Kota Kotamboagu telah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Setingkat SMU/SMK Sederajat untuk menambahkan kegiatan yang berhubungan dengan Kebudayaan seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.66

Lembaga Pendidikan setingkat SMU/SMK yang berhubungan dengan Kebudayaan

No	Nama Sekolah	Jurusan	Alamat
1.	SMAN 1 Kotamobagu	Jurusan Bahasa	Jl A.R. Hakim No. 91 Kotamobagu
2.	SMAN 2 Kotamobagu	Jurusan Bahasa	Jl. Amal No. 39 Kotamobagu
3.	SMAN 4 Kotamobagu	Jurusan Bahasa	Jl. Ksatria
4.	SMK N 2 Kotamobagu	1. Usaha Perjalanan Pariwisata 2. Tata Busana	Jl. Raya Bubak

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Kotamobagu memiliki Sumber Daya Manusia di Bidang Kebuayaan dan Lembaga Kebudayaan. Berikut data budayawan terdapat dalam tabel berikut.

Tabel. 2.67

Data Budayawan

No	Identifikasi SDM	Keterangan
1	Z. A. Lantong	
2	Drs. Hamri Manoppo, M.Pd	
3	Saad Mokoagow, BA	
4	Chairun Mokoginta, SE	
5	Sumitro Tegela	
6	Drs. Hi. Zainul Armyn Lantong	
7	Uwin Mokodongan	
8	Drs. Hamim Ambaru	
9	Fauzi A, Permata, SE	
10	Drs Wahid Raupu	
11	Murdiono Mokoginta	
12	Meyscke E. Kinontoa, S.Pd	
13	Taha Dadu Mokoginta	
14	Hamdi Mokoginta, S.Pd	
15	Ola Dondo	
16	Arifin Damopolii	
17	Nasrun Gilalom, S.Pd	
18	Marham Mokodompit	
19	Mesdy S. Hamim	
20	Siswani Mokoginta	
21	Dra. Ritha Kinontoa	
22	Erland Mokodongan	
23	Amri Mokodompit	
24	Oktavianti M. Darusalam	
25	Meyske Elen Kinontoa	
26	Sutrisno, S.Pd	
27	Rahmi Kobandaha	
28	Sri Rejeki	
29	Santi Mokoagow	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Tabel. 2.68

Lembaga Kebudayaan

No	Lembaga/ Komunitas/ Grup/Sanggar	Keterngan
1	Lembaga Adat Desa/Kelurahan	
2	Aliansi Masyarakat Bolaang Mongondow (AMABOM)	
3	Laskar Bogani	
4	Historia Mongondow	
5	Ikatan Seniman Artis Totabuan (IKASTO)	
6	Lembaga Riset PS2BMR	
7	Sanggar Seni Budaya Tiara Fitra	
8	Sanggar Manduru	
9	Sanggar Kibata	
10	Sanggar Pongayo	
11	Sanggar Inaton	
12	Sanggar Silangodo	
13	Sanggar Mobata'	
14	Sanggar Gogaluman	
15	Sanggar Kayu Bulan	
16	Sanggar Totabuan	
17	Sanggar Bulawan	
18	Sanggar Dinondon	
19	Sanggar Uswatun Khasanah	
20	Sanggar Musik Irama Bogani	
21	Sanggar Yudis Art	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

Tabel 2.69

Sarana dan Prasarana Kebudayaan

No	Sarana/Prasarana	Alamat	Keterangan
1.	Gedung Bobakidan	Kelurahan Kotobangon	Bobakidan merupakan rumah adat yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sekaligus tempat pertunjukan budaya. Bangunan ini diresmikan oleh Bupati

No	Sarana/Prasarana	Alamat	Keterangan
			Drs. Hi. Jambat Arsyad Damopolii pada tahun 1986
2.	Rumah Adat Komalig	Ds. Kopandakan I	Rumah adat Komalig merupakan replika dari rumah adat khas Bolaang Mongondow yang difasilitasi oleh Direkorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KemenDikbud) RI tahun anggaran 2019. Komalig sekarang ini berfumgsi sebagai museum mini sekaligus tempat pengembangan budaya daerah
3.	Kinuyungan in Adat	Kelurahan Motoboi Besar	Kiniyungan in adat (rumah adat) merupakan rumah adat khas Bolaang Mongondow yang terletak di Kelurahan Motoboi Besar yang pembangunannya difasilitasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2015 karena ditunjuk sebagai kelurahan berbudya
4.	Rumah Adat	Ds. Kobo Kecil	Rumah adat Kobo Kecil merupakan rumah adat yang difungsikan sebagai museum mini, rumah adat ini dubangun menggunakan Dana Desa Tahun 2018

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

2.3.2.17 Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsup merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (recorded of information) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik.

Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif yang sangat berguna dimasa yang akan datang. Untuk pemerintah kota kotamobagu sampai dengan tahun 2020 cakupan untuk kelestarian arsip daerah sudah mencapai 90%. Berikut uraian data dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

Tabel 2.70

Persentase Kelestarian Arsip di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kelestarian Arsip Daerah	80	85	90	90

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.2.18 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang bakuguna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Pemerintah Kota Kotamobagu sampai saat ini tahun 2019 memiliki 33 unit perpustakaan yang tersebar diseluruh kecamatan yakni kecamatan kotamobagu utara, kotamobagu timur, kotamobagu selatan dan kotamobagu barat. Selain itu minat baca masyarakat di Kota Kotamobagu tergolong rendah dilihat dari data pertahun yang dihimpun, dimana pada tahun 2017 jumlah kunjungan mencapai 1.130 orang dan terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai 1.679 orang. Pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 1.500 orang yang berkunjung keperpustakaan. Kemudian meningkat pada tahun 2020 yakni 1.645 orang yang mengunjungi perpustakaan.

Tabel 2.71

Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	33	33	33	33
2	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)	1.130	1.679	1.500	1.645

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1 Perikanan

Pembangunan sektor perikanan di Kota Kotamobagu secara umum memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. Berikut ini disajikan tabel capaian sektor perikanan Kota Kotamobagu.

Tabel 2.72

Produksi (ton), Harga dan Nilai Produksi (Juta rupiah) perikanan budidaya menurut jenis ikan di Kota Kotamobagu 2020

No	Jenis Ikan	Produksi	Harga	Nilai Produksi
1	Nilem	2,85	30.000	85.500
2	Bawal	6,82	50.000	341.000
3	Sidat	4,03	70.000	282.100
4	Tawes	2,34	30.000	70.200
5	Patin	15,20	60.000	912.000
6	Lele	48,20	25.000	1.205.000
7	Nila	391,95	30.000	11.745.000
8	Mas	276,30	80.000	22.104.000
9	Mujair	40,40	30.000	1.212.000

No	Jenis Ikan	Produksi	Harga	Nilai Produksi
10	Gurame	4,02	35.000	140.700
	Kota Kotamobagu	**792,11**	**440.000**	**39.363.800**

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

2.3.3.2 Pertanian

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pertanian, peternakan dan perikanan perlu membangun keselarasan antar sektor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlindungan dan pemberdayaan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Tentunya sumber daya manusia dan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tabel dibawah ini digambarkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan di Kota Kotamobagu selang tahun 2018 sampai 2020

Tabel 2.73

Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (Ha), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
	Sayuran			
1	Bawang Daun	2	-	-
2	Bawang Merah	2	36	61
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	1	1	-
5	Buncis	-	-	-
6	Cabai Besar	1	-	-
7	Cabai Rawit	9	2	2
8	Cabai	16	11	23
9	Jamur	-	-	-
10	Kacang Merah	-	1	-
11	Kacang Panjang	4	1	3
12	Kangkung	14	10	17
13	Kembang Kol	-	-	-
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	3	5	3
16	Kubis	-	-	-
17	Labu Siam	-	-	-
18	Lobak	-	-	-
19	Paprika	-	-	-
20	Petsai	-	-	-
21	Terung	2	-	-
22	Tomat	9	5	7
23	Wortel	-	-	-

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.74

Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (Kw), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
	Sayuran			
1	Bawang Daun	105	-	-
2	Bawang Merah	80	2.163	2.675
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	25	1	-
5	Buncis	-	-	-
6	Cabai Besar	25	-	-
7	Cabai Rawit	287	38	260
8	Cabai	374	298	824
9	Jamur	-	-	-
10	Kacang Merah	-	7	-
11	Kacang Panjang	85	50	370
12	Kangkung	642	204	180
13	Kembang Kol	-	-	-
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	127	530	1.020
16	Kubis	-	-	-
17	Labu Siam	-	-	-
18	Lobak	-	-	-
19	Paprika	-	-	-
20	Petsai	-	-	-
21	Terung	55	-	-
22	Tomat	726	970	1.268
23	Wortel	-	-	-

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.75

Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (M^2), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Jahe	603	754	2
2	Kencur	-	-	1
3	Kunyit	2	3	-
4	Laos	5	3	2

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.76

Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (kg), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Jahe	619	762	9
2	Kencur	-	-	3
3	Kunyit	8	8	-
4	Laos	36	32	8

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.77

Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (kw), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Alpukat	7	66	213
2	Belimbing	6	39	10
3	Duku	35	848	2.530
4	Durian	40	641	640
5	Jambu Air	14	7	13
6	Jambu Biji	15	13	411
7	Jeruk Besar	1	9	51

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
8	Jeruk Siam	28	17	65
9	Mangga	73	217	299
10	Manggis	3	33	44
11	Nangka	5	8	45
12	Nenas	22	205	8
13	Pepaya	55	102	500
14	Pisang	333	428	2.700
15	Rambutan	38	339	506
16	Sirsak	68	111	561

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.78

Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (ha), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Kelapa	-	1.181,50	1.057,10
2	Kopi	-	290	231,88
3	Kakao	-	783	631,90

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.79

Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (ton), 2018-2020

No	Jenis Tanaman	2018	2019	2020
1	Kelapa	-	1.500	1.350,5
2	Kopi	-	154,35	155,15

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.80

Populasi Ternak menurut kecamatan dan jenis ternak di Kota Kotamobagu 2020

No	Kecamatan	Sapi	Kambing	Babi
1	Kecamatan Kotamobagu Selatan	552	485	116
2	Kecamatan Kotamobagu Timur	538	370	715
3	Kecamatan Kotamobagu Barat	519	465	431
4	Kecamatan Kotamobagu Utara	181	74	-
	Kota Kotamobagu	**1.790**	**1.394**	**1.262**

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

Tabel 2.81

Populasi Ternak Unggas menurut kecamatan dan jenis ternak di Kota Kotamobagu 2020

No	Kecamatan	Itik	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Ayam Kampung
1	Kecamatan Kotamobagu Selatan	2.900	115.000	365.000	31.000
2	Kecamatan Kotamobagu Timur	600	9.300	68.000	18.000
3	Kecamatan Kotamobagu Barat	2.000	-	-	17.000
4	Kecamatan Kotamobagu Utara	500	-	50.000	23.000
	Kota Kotamobagu	**8.000**	**124.300**	**483.000**	**89.000**

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka 2021

2.3.3.3 Pariwisata

Destinasi pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan. Destinasi pariwisata terbentuk dari konstruksi ruang, sosial, budaya, lingkungan, dan sumber daya pariwisata yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka menciptakan pengalaman pariwisata. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan

geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibiltas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam analisis kepariwisataan Kota Kotamobagu dapat dipilah mana yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) di Kotamobagu, Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu (KSPK) serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).

Berdasarkan analisis kebijakan pariwisata provinsi yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan yaitu: (a). meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata; (b) Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata; (c) Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataan; dan (d) Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Inti dari kebijakan pariwisata provinsi Sulawesi Utara antara lain: Perlengkapan sarana prasana pariwisata, Pembentukkan koridor pariwisata dan Pemasaran pariwisata. Berikut ini daftar nama tempat wisata Provinsi yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.82
Kawasan Strategis Kota Kotamobagu

No	Uraian	Lokasi	Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Air Bersih	Parkir	Toilet	Jartelp	Listrik	Seluler	Akom resto
1	Air Terjun Molimpungan	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Lokasi	Jalan Arteri	Jalan Kolektor	Jalan Lokal	Air Bersih	Parkir	Toilet	Jartelp	Listrik	Seluler	Akom resto
2	Jumlah Penduduk	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Rasio Lapangan Olahraga	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Obyek wisata yang ada di Kota Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi. Obyek pariwisata tersebut selain dikunjungi oleh wisatawan domestik juga dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya kawasan pengembangan masing- masing jenis wisata yang ada di Kota Kotamobagu antara lain:

Tabel 2.83

Objek Pariwisata Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Air Terjun Molimpungan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Kobo Kecil	Alam
2	Air Terjun Mongkonai	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Alam
3	Air Terjun Boliangonan	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
4	Air Terjun Mobuya	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
5	Air Panas Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
6	Air Batu Putih	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
7	Kawasan Batu Putih Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
8	Gunung Sia	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Sia	Alam
9	Hutan Kota Bonawang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Buatan
10	Taman Kota	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
11	Kolam Renang Artabanyu	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Kobo Besar	Buatan

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
12	Kolam Renang Tirta Kencana	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Buatan
13	Kawasan Gelora Ambang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
14	Perkebunan Sibatuon Mobalang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Buatan
15	Rumah Adat Bobakidan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
16	Patung Bogani	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
17	Makam Raja Datu Cornelis Manoppo	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Matali	Budaya
18	Makam Raja Datu Binangkang	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Poyowa Besar I	Budaya
19	Makam Raja Abo Tadohe	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Upai	Budaya
20	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Molinow	Budaya
21	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Kopandakan I	Budaya
22	Masjid Tertua Al-Huda	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Kopandakan I	Budaya dan Religi
23	Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Budaya dan Religi
24	Klenteng Tian Shan Sheng Mu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Budaya dan Religi
25	Pura Jagatnata Kotamobagu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Budaya dan Religi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam upaya meningkatkan pariwisata Kota Kotamobagu maka aktivitas diarahkan pada pengembangan pemasaran, penataan wilayah, jalan dan jembatan, serta kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemasaran untuk wisatawan domestik maupun wisatawan asing masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan sarana prasarana, fasilitas penunjang lainnya serta peningkatan pemasaran, baik dalam pasar

domestik maupun pasar luar negeri. Sektor kepariwisataan perlu dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Obyek-obyek wisata yang sudah ada dipertahankan dan dikelola sebaik-baiknya, serta perlu adanya perluasan untuk kawasan wisata alam. Sementara itu, untuk kawasan wisata budaya/sejarah agar tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kota Kotamobagu.

Daya tarik lain yang terdapat di Kota Kotamobagu adalah berupa kesenian daerah Bolaang Mongondow dan penetapan desa wisata yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84

Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Tari *Kabela*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
2	Tari *Tuitan*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
3	Tari *Motobatu Mo Lintak Kon Totabuan*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
4	Tari *Mogama*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
5	Tari *Rambabo*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
6	Tari *Ronggo*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
7	Tari *Joke*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
8	Tari *Kalibombang*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
9	Tari *Mokosambe*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
10	Tari *Monugal*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
11	*Odenon*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
12	*Pinsikan*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisional
13	*Langkadan*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisional

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
14	*Mokalar*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisional
15	*Salamat*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
16	Bintang Vokalia/Lagu Adat	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
17	Tari *Mokuyut*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
18	Karnaval Budaya Tionghoa	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
19	Kerajinan *Kabela*	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Cindera Mata
20	Kerajinan rotan, ijuk, bambo, semen	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Biga	Kerajinan
21	Festival *Binarundak*	Kecamatan Kotamobagu Tmur	Kelurahan Motoboi Besar	Kuliner
22	Kue Kolombeng Selai	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Poyowa Besar	Kudapan Khas
23	Kacang Goyang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Motoboi Kecil	Kudapan Khas
24	Gula Aren	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Moyag	Kudapan Khas
25	Kopi Lokal	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Minuman Khas

Sumber: Dokumen RIPPDA Kota Kotamobagu

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.85

Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Makan	15	22	22	29
2	Restoran	5	7	7	7

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.86

Ketersediaan Penginapan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bintang 5	-	-	-	-
2	Bintang 4	1	1	1	1
3	Bintang 3	-	-	-	-
4	Bintang 2	-	-	-	-
5	Bintang 1	1	1	1	1
6	Melati	19	19	19	15

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
	Jumlah	**21**	**21**	**21**	**17**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah Kota Kotamobagu terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek- obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kotamobagu. Hal ini dapat dilihat pada Tabel mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kotamobagu.

Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Kotamobagu sebanyak 50.308 wisatawan. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Kotamobagu sebanyak 115.346 wisatawan. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Kotamobagu sebanyak 60.532 wisatawan, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77.211 wisatawan mancanegara maupun domestik.

Tabel 2.87

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Wisatawan Mancanegara	150	321	532	5
2	Wisatawan Domestik	50.158	115.025	60.000	77.206
	Jumlah	**50.308**	**115.346**	**60.532**	**77.211**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3.3.4 Perdagangan

Sektor perdagangan memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu. Perkembangan sektor perdagangan

tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor seperti pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Berikut data infrastruktur pasar kota kotamobagu.

Tabel 2.88

Informasi Pasar di Kota Kotamobagu

No	Lokasi Pasar	Uraian	Total	Keterangan
1	Pasar 23 Maret	Ruko	60	
		Kios	84	
		Lapak	101	
		Pedagang Kaki Lima	96	
		Kios Semi Permanen	10	
2	Pasar Poyowa	Kios	170	
		Lapak	50	
3	Pasar Serasi	Kios	20	
		Kios Semi Permanen	235	
		Lapak Kayu	183	
		Pedagang Kaki Lima	157	
4	Pasar Genggulang	Kios	105	
5	Pasar Ikan	Kios	33	
		Lapak	52	
6	Pasar Jajan	Pedagang Kaki Lima	45	
7	Pasar Buah	Pedagang Buah	8	

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.4.1 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

a. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Kotamobagu telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 tahun 2019. Dan di tahun 2019 pula, disusun dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	RPJPD	-	-	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kota Kotamobagu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 178 program, tahun 2018 sebanyak 160 program dan pada tahun 2019 serta tahun 2020 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 167 program. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Kotamobagu telah menetapkan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.90

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	178	160	167	167
2	Jumlah Program RKPD	178	160	167	167
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kota Kotamobagu

b. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai salah satu strategi utama dalam sistem Inovasi nasional untuk mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan system inobvasi. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Kotamobagu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 187 tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Walikota Kotamobagu Nomor : 81A/W-KK/VII/2019 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan

Melaksanakan Inovasi Daerah (Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi) dan Surat Edaran Walikota Nomor 241.a/W-KK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) Kota Kotamobagu tahun 2020

Dengan adanya Kegiatan IGA Kota Kotamobagu tahun 2021 telah meningkatkan indikator pembangunan daerah, salah satunya adalah berdasarkan Kepmendagri Nomor 100–4672 tahun 2020 tentang indeks inovasi daerah, kota kotamobagu meraih skor indeks 656 poin, dengan kategori sebagai kota inovatif. Kami terus berupaya agar kotamobagu dimasa yang akan datang menjadi kota "sangat inovatif". Tentunya dengan kolaborasi dan kerja cerdas antar pihak, apa yang kita diharapkan bisa tercapai.

2.3.4.2 Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarakan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Kotamobagu dan Perwa tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2.3.4.3 Kebijakan Koordinasi Perangkat Daerah

2.3.4.3.1 Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.91

Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi SAKIP	63,30	65,10	66,16	66,83

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Kotamobagu

Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Kotamobagu menunjukkan perkembangan yang positif dilihat dari pencapaian dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terus meningkat. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu dengan nilai 63,30 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu meningkat yaitu 65,10 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Pada tahun 2019, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Kotamobagu meningkat yaitu 66,16 dengan

tingkat akuntabilitas kinerja B. Sedangkan di tahun 2020, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 66,83 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada standard operational procedure (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 dan. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di

level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian Tahun 2018 menunjukkan LPPD Kota Kotamobagu menempati peringkat ke-2 (dua) dari 15 KabupatenKota di Provonsi Sulawesi Utara dengan skor se-Indonesia dengan Prestasi Sangat Tinggi (ST) skor 3,3551.

2.3.4.3.2 Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mengurangi jumlah tindak lanjut temuan. Tabel berikut menunjukkan jumlah tindak lanjut temuan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal telah sesuai ketentuan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.92

Jumlah Tindak Lanjut Temuan

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	90.06	89.60	85.25	On Progres
2	Jumlah Temuan BPK	6	n/a	12	On Progres

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

2.3.4.3.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel berikut menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel 2.93

Persentase Pejabat yang mengikuti Diklat Struktural

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pejabat Struktural	566	560	564	562
2	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat structural	184	184	200	200
3	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti DIklat Struktural	32.50	32.85	35.46	36

Sumber: BKPP Kota Kotamboagu

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Nilai Tukar Petani

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Dapat diikuti bahwa nilai tukar petani berada pada posisi masih dibawah 100 terlihat bahwa pada tahun 2017 NTP berada pada posisi 95.16 naik menjadi 95.38 pada tahun 2018 kemudian turun menjadi 95,06 pada tahun 2019 dan tampaknya fluktuasinya sangat kecil. Capaian tahun 2020 NPT mencapai angka diatas 100 yakni 102,11. Nilai tukar petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu yang pertama sisi pendapatan petani yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya. Sisi yang kedua adalah sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Tabel 2.94

Nilai Tukar Petani

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	NTP Provinsi Sulawesi Utara	95.16	95.38	95,06	102,11

Sumber: BPS Sulawesi Utara

Fluktuatifnya perkembangan NTP menunjukkan hargaharga komoditas pertanian yang sangat kental dengan faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau, musim angin barat saat gelombang laut meningkat produksi ikan menurun. Sebaliknya, harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen.

2. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran koansumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Gambar 2.39

Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2020

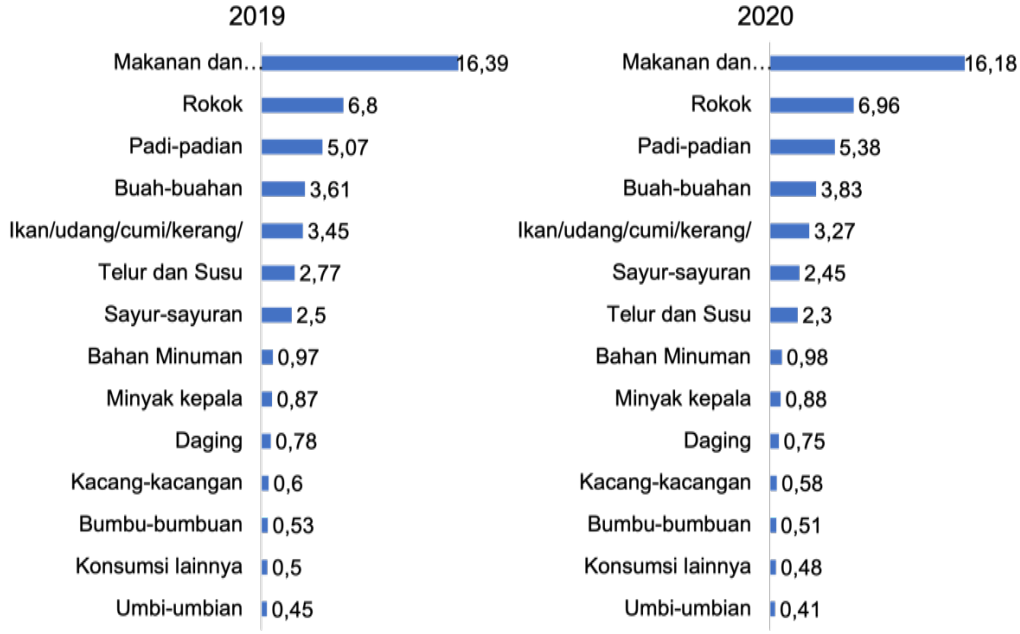

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2021

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Gambar 2.40
Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Non Makanan Kota Kotamobagu Tahun 2019-2020

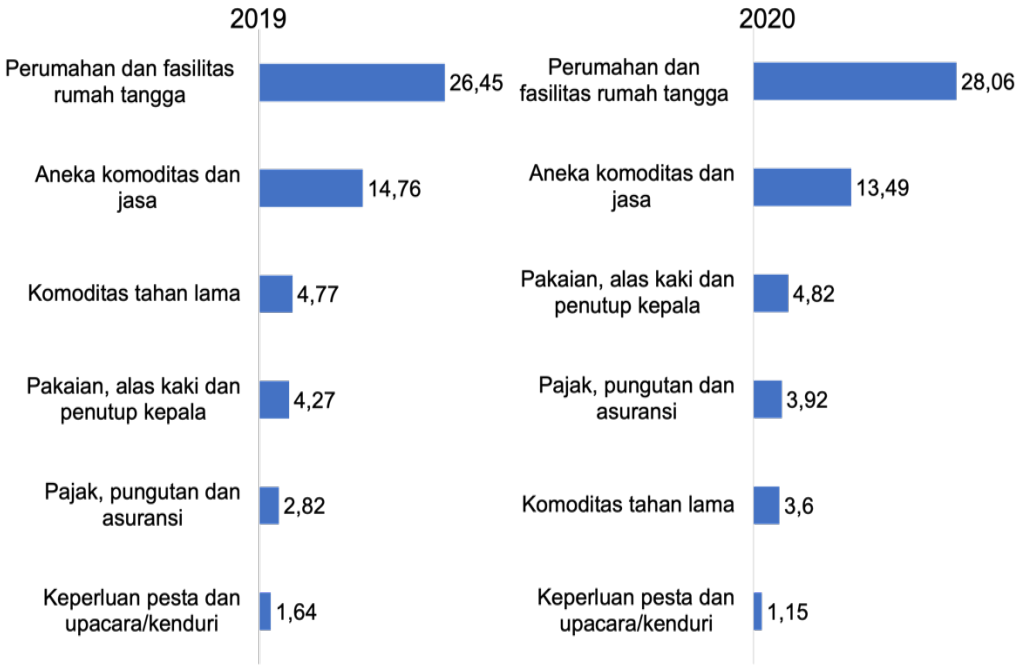

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kotamobagu kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, nilai IKLH Tahun 2018 adalah 75. Sedangkan pada Tahun 2019 IKLH Kota Kotamobagu mencapai 83,45. Kemudian pada tahun 2020 IKLH Kota Kotamobagu 66,90.

2.4.2.2. Penataan Ruang

Pada tahun 2019, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Kotamobagu adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 20.44 persen. Wilayah produktif di Kota Kotamobagu antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, dan industri

Tabel 2.95

Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	n/a	n/a	5898.164
2	Luas Wilayah Produktif (Ha)	n/a	n/a	1206.142
3	Persentase Luas Wilayah Produktif	n/a	n/a	20.44

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Tabel 2.96

Rasio Luas Wilayah Industri Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	n/a	n/a	5898.164
2	Luas Wilayah Industri (Ha)	n/a	n/a	0.7
3	Rasio Luas Wilayah Industri	n/a	n/a	0.00004

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Kotamobagu memiliki satu kawasan industri berlokasi di Jl. AKD, Desa Kopandakan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Luas wilayah industri pada tahun 2019 adalah sebesar 0.27 Ha dari keseluruhan wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.97

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	n/a	n/a	5898.164
2	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	n/a	n/a	6806
3	Rasio Luas Wilayah Perkotaan	n/a	n/a	86.66

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Kotamobagu adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Kotamobagu adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 86,66 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Kotamobagu.

2.4.2.3. Perhubungan

Di Kota Kotamobagu Terminal terdapat 2 terminal yang aktif beroperasi sampai saat ini. yakni Terminal Bonawang yang terdapat di Kel. Mongkonai dan Terminal Serasi yang terdapat di Kel. Gogagoman. Selain itu, ada juga pelataran Pasar 23 Maret yang menjadi tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan yang akan menuju beberapa tempat seperti Komangaan, Passi, Tudu Aog, Popoo, Insil, Modoinding, dan Sinsingon. Tempat tersebut sampai saat ini berfungsi sebagai terminal bayangan atau yang dikenal masyarakat Kotamobagu sebagai Terminal 23 Maret.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan yang ada di Kota Kotamobagu saat ini tercatat sebanyak ±44.424 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi yakni sebanyak 42.928 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan umum hanya sebanyak 277 kendaraan. Sisanya sebanyak 1.219 kendaraan adalah kendaraan dinas milik pemerintah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.98

Jumlah dan Jenis Kendaraan Kota Kotamobagu

Jenis Kendaraan	Pelat Hitam	Pelat Kuning	Pelat Merah	Total
Sedan	87	0	6	93
Jeep	226	0	7	233
Bus	4	6	13	23
Mini Bus	4,141	36	229	4,406
Mikrolet	0	194	0	194
Ambulance	8	0	14	22
Truck/ L Truck/ Dump Truck	480	19	24	523
Tangki	4	0	0	4
Pick Up	1,999	2	31	2,032
Box	34	0	0	34
Double Cabin	110	0	10	120
Tronton	8	20	0	28
Pemadam Kebakaran	0	0	4	4
Crane	1	0	1	2
Sepeda Motor	35,826	0	880	36,706
Total	**42,928**	**277**	**1,219**	**44,424**

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

Dari diagram persentase di bawah, dapat dilihat bahwa kendaraan pribadi mendominasi kendaraan yang ada di Kota Kotamobagu yakni sebesar 96.63%, kendaraan dinas sebesar 2.74%, sedangkan untuk kendaraan umum 0.62%. Kendaraan pribadi yang paling banyak ada jenis sepeda motor dengan jumlah sebanyak 35,826 kendaraan.

Gambar 2.41

Diagram Jumlah Kendaraan di Kota Kotamobagu

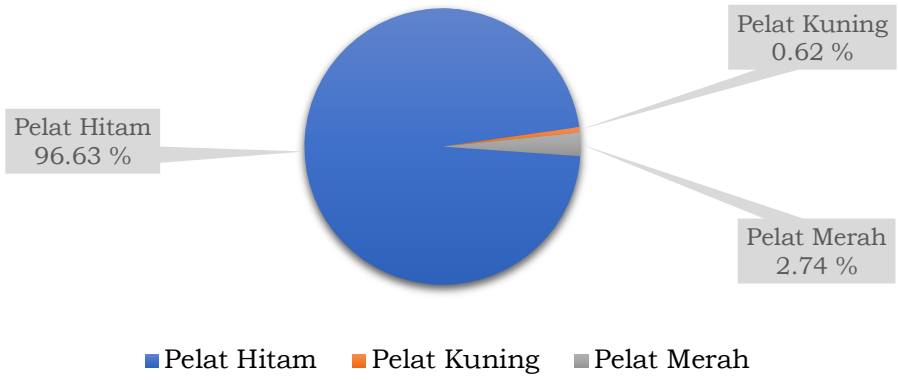

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

2.4.2.4. Drainase

Pemerintah Kota Kotamobagu mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Kotamobagu yang relatif miring sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh air kiriman dari daerah tetangga.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Kotamobagu mengalami penurunan. Pada tahun 2017, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 150,98 menit dan pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Kotamobagu sebesar 90,03 menit. Pada tahun 2019, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Kotamobagu sebesar 60,22 menit, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Kotamobagu sebesar 60 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.99

Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama terjadinya genangan (menit)	150.98	90.03	60.22	60,00

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Rata-rata tinggi genangan Kota Kotamobagu mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan sebesar 20 cm. Pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Kotamobagu sebesar 15 cm. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, rata-rata tinggi genangan Kota Kotamobagu sebesar 15 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.100

Rata-rata Lama Tinggi Genangan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2019
1	Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	20	15	15	15

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Berdasarkan Tabel berikut dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Kotamobagu mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 2.21 ha dan pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Kotamobagu belum berubah masih sebesar 2,21 ha. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020, luasan wilayah genangan Kota Kotamobagu berkurang masing-masing menjadi sebesar 1,78 ha dan 1,77 ha.

Tabel 2.101

Luas Wilayah Genangan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Genangan (Ha)	2,21	2,21	1,78	1,77

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

2.4.2.5. Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan.Rincian peningkatan cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.102

Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Total Jumlah Penduduk terlayani Air bersih	69.068	70.728	77.000	77.788
2	Jumlah Penduduk	123.872	126.198	123.653	123.498
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	55,76	56,06	62,27	62,99

Sumber: *Dinas PUPR Kota Kotamobagu*

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM Bolaang Mongondow telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Kotamobagu hingga tahun 2017 telah mencapai 55,76 persen. Begitupun pula di tahun 2018 sebesar 56,96 persen dan tahun 2019 dimana capaiannya telah mencapai 62,27 Persen. Walaupun belum mencapai target 100 persen, namun

pelayanan tetap terus dioptimalkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

2.4.2.6. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Kotamobagu terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel 2.103

Penerangan Jalan Umum Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PJU terpasang (titik)	1.789	1.955	1.953	966
2	Jumlah Panel yang ditingkatkan (Unit)	57	50	-	n/a
3	Jumlah Jaringan yang di Pasang (Gawang)	-	282	960	n/a

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang menggunakan system kontrak daya dengan PLN sebesar 872 VA. Hal ini dianggap masih bisa diefisiensi melalui peningkatan sistem utilitas PJU existing dengan dirubah sistem jaringan dan pemasangan meter pada masing-masing wilayah sehingga diharapkan dapat mengurangi pemakaian beban daya dan tagihan listrik yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

Tabel 2.104

Jumlah Titik Lampu Kota Kotamobagu

NO	LOKASI / WILAYAH	JUMLAH TITIK LAMPU PJU						TEGANGAN
		2017	2018	2019	2020	TAMBAH (TITIK BARU)	KURANG (TITIK HILANG)	(VA)
1	KOTAMOBAGU UTARA	160	159	158		-	1	76,600
2	KOTAMOBAGU BARAT	801	777	753		15	39	369,200
3	KOTAMOBAGU SELATAN	426	578	621		96	53	223,900
4	KOTAMOBAGU TIMUR	402	441	421		22	42	203,100
	JUMLAH TOTAL	**1,789**	**1,955**	**1,953**	**966**	**133**	**135**	**872,800**

Sumber: Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Hampir setiap tahun Pemerintah Kota Kotamobagu terus melakukan peningkatan kualitas jaringan PJU di seluruh Kota Kotamboagu secara merata. Selain melakukan pemeliharaan mata lampu PJU tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu juga melakukan kegiatan dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Kotamobagu maka beban tagihan rekening listrik PJU semakin berkurang.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Kotamobagu perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai

sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Tabel 2.105

Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	4	2	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-
3	Pemogokan Kerja	-	-	-	-
4	Sosail Budaya	-	-	-	-
5	Jumlah Unjuk Rasa	4	2	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu

2.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain seperti pada tabel berikut

Tabel 2.106

Jenis Perijinan di Kota Kotamobagu

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
2.	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
3.	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
4.	IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
5.	IZIN LOKASI (ILOK)	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
6.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
7.	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
8.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
9.	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
10.	IZIN RUMAH MAKAN (IRM)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
11.	SURAT IZIN REKLAME (SIR)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
12.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	35 Menit	16	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
13.	IZIN TRAYEK	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
14	IZIN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
15.	IZIN USAHA PERIKANAN	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
16.	SURAT IZIN REKLAME KENDARAAN (SIRK)	35 Menit	3	Tidak Ada Biaya
17.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGARAKAN OLEH MASYARAKAT (ISPNF)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
18.	TANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA (TDUP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
19.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
20.	SURAT RESI GUDANG (SRG)	35 Menit	13	Tidak Ada Biaya
21.	IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
22.	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN SWASTA/LEMBAGA PELATIHAN KERJA (ILPK)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
23.	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
24.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
25.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU SUMBER AIR (MEDIA LINGKUNGAN) (IPAL)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
26.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK (IPALD)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
27.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN KEDELAI (IPALUK)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
28.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
29.	IZIN LINGKUNGAN UKL/UPL (ILH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
30.	IZIN LINGKUNGAN AMDAL (AMDLH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
31.	IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI (SIP)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
32.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA APOTEKER (SIPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
33.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA BIDAN (SIPB)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
34.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP/SIKP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
35.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA PERAWAT GIGI (SIPPG/SIKPG)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
36.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENANGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
37.	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
38.	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
39.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA FISIOTERAPIS (SIPF/SIKF)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
40.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA OKUPASI TERAPIS (SIPOT/SIKOT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
41.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TERAPIS WICARA (SIPTW/SIKTW)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
42.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA RADIOGRAFER (SIKR)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
43.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA ORTOSIS PROSTESIS (SIPOP/SIKOP)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
44.	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
45.	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
46.	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
47.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIPPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
48.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENAGA GIZI (SIPTGz/SIKTGz)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
49.	SERTIFIKAT/REKOMENDASI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
50.	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAHSAKIT (IORS)	35 Menit	15	Tidak Ada Biaya
51.	SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK (SIOK)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
52.	SURAT IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
53.	SURAT IZIN OPERASIONAL APOTEK (SIA)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
54.	SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK (SIO)	35 Menit	12	Tidak Ada Biaya
55.	SURAT IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT (SITO)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

Sumber: Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan

menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan SMA sederajat/Diploma/S1/S2/S3 Kota Kotamobagu sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.107
Rasio Lulusan D4/S-1/S-2/S-3 Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Lulusan SMA/Sederajat	384	384	384
2	Jumlah Lulusan Diploma I/II/III	408	408	408
3	Jumlah Lulusan S1/S-2/S3	1,453	1,453	1,453
4	Rasio Lulusan	100	100	100

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2020

2.4.4.2. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.108

Rasio Ketergantungan Kota Kotamobagu

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia <15Tahun	31,921	32,113	25,231
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun	5,846	6,191	7,476
3	Jumlah usia tidak produktif	37,768	38,304	32,707
4	Jumlah Penduduk usia 15-64	86,116	87,530	90,496
5	Rasio Ketergantuangan	43.86	43.76	36.14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Kotamobagu pada tahun 2019 antara lain kelompok usia non produktif usia (15< th) sebesar 25,231 orang (20,40%), dan usia (>64 th) sebesar 7,476 orang (6,05%), sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64th) sebesar 90,496 orang (73.55%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 36 persen yaitu pada 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 36 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel. 2.109

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	'%	6,79	6,18	0,2	6,96	belum tercapai
2	PDRB per kapita (ADHB)	Milyar Rupiah	23,68	28,78	29,01	30,73	belum tercapai
3	PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17,06	18,64	18,34	19,41	belum tercapai
4	Nilai Investasi (Dalam Juta)	Nilai	3.928.588	116.640.320.280		7.000.000.000.000	belum tercapai
5	Persentase Penduduk Kemiskinan	%	5,96	5,71	5,42	5,88	belum tercapai
6	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio	94,04			94,12	belum tercapai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72	73,22	72,97	72,25	melampaui
8	Angka melek Huruf	%	99,87	95,70	100,00	99,93	melampaui
9	Angka rata-rata lama Sekolah	%	9,97	10,09	10,10	11,07	belum tercapai
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,72	70,33	70,47	69,8	melampaui
11	persentase balita gizi buruk	%	0,04	0,05	0,03	1	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
12	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,26	1,50	0,09	1,78	belum tercapai
13	Presentase Destinasi yang di Kembangkan	%	5	0,00		100	belum tercapai
14	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	100,00	100,00	100	sesuai
15	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,71	5,62	7,44	5	Belum tercapai
16	Keluarga pra sejahtera	Jumlah	1.343			789	belum tercapai
17	cakupan penanganan bencana	%	100	100	100	100	sesuai
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,78	94,78		94,88	belum tercapai
19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,48	57,48		57,52	belum tercapai
20	persentase Peningkatan PAD	%	0	0,23		50	belum tercapai
21	opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai
22	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91	92,13	93,2	91	melampaui
23	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	60	60	35	60	belum tercapai
24	Penanganan daerah Rawan Pangan	Skor	5	5	5	5	sesuai
25	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	'%	7,5	6		7,06	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
26	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	'%	28,17	54		28,880	belum tercapai
27	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	'%	19,01	9		19,110	belum tercapai
28	Ketersediaan energi	Kkal/Kap/Hari	2150	2694	2762	2150	melampaui
29	Ketersediaan Protein	Gram/kap/Hari	57	72,74	73,55	57	melampaui
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Nilai Tukar Petani	Nilai	95,16	95,41		95,41	belum tercapai
2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	63,7	66,16	*On Progres*	80	melampaui
3	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Kategori	pratama	pratama	Tidak dilaksanakan Pusat/daerah	nindya	melampaui
4	Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi	'%	18,18	51,49		100	belum tercapai
5	Persentase Penanganan Konflik Sosial	'%	100	100		100	belum tercapai
6	Persentase penegakan peraturan daerah	'%	100	100	95	100	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
7	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	74,37	67,52		95	belum tercapai
8	Persentase Rumah Layak Huni	'%	96,58	97,29	98,22	100	belum tercapai
9	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	'%	22,08	65,33	70,11	32	melampaui
10	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	'%	85	34,41	35,37	100	belum tercapai
11	Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional	'%	42,14	56,66	0	75	belum tercapai
12	Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional	'%	0	0	0	50	belum tercapai
13	Persentase Kesesuaian Ruang	'%	0	100	100	100	sesuai
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86,8	83,57		87,27	belum tercapai
15	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	'%	69,26	93,57		82	belum tercapai
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	**Pendidikan**						
1.1	Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi	'%	94,79	0,00	85,75	98,64	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	Pendukung di bidang pendidikan						
1.2	Persentse Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	'%	53,21	56,57	70,04	66,99	melampaui
1.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	'%	79,47	85,47	87,36	82,05	melampaui
1.4	Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	'%	66,67	78,57	86,67	100,00	belum tercapai
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	'%	86,16	86,78	61,78	89,20	belum tercapai
1.6	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	'%	72,86	84,06	87,14	86,42	melampaui
1.7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	'%	1,62	1,61	1,64	1,71	belum tercapai
1.8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	'%	98,36	98,69	99,34	99,80	belum tercapai
1.9	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,09	0,16	62,37	0,09	melampaui
1.10	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	'%	85,41	93,30	97,55	88,01	melampaui
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	'%	76,36	80,95	61,78	79,47	belum tercapai
1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	'%	100	173,50	165,78	100	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
1.13	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	'%	105,07	111,55	111,27	105,57	melampaui
1.14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	'%	99,76	98,27	100,00	99,91	melampaui
1.15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	46,61	49,32	51,25	46,48	melampaui
1.16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	'%	0,18	0,06	0,02	0,08	belum tercapai
1.17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	'%	86,19	93,59	96,11	94,22	melampaui
1.18	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	'%	2,13	2,08	1,97	2,29	belum tercapai
1.19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	'%	100,00	131,79	119,18	100,00	melampaui
1.20	Angka partisipasi kasar SD/MI	'%	95,45	89,35	89,88	96,32	belum tercapai
1.21	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	'%	0,72	0,25	0,16	0,52	belum tercapai
1.22	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	43,15	62,33	62,37	72,78	belum tercapai
1.23	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	'%	86,16	113,77	94,44	89,20	melampaui
1.24	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	'%	99,87	100,00	100,00	99,93	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2	**Kesehatan**						
2.1	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	'%	75	65,04	65,04	90	belum tercapai
2.2	Persentase Apotik dan IRTP yang di awasi	'%	70	70,00	70,00	100	belum tercapai
2.3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.4	Cakupan prevalensi gizi kurang	'%	1,26	1,50	1,50	1,78	belum tercapai
2.5	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.6	Cakupan prevalensi gizi buruk	'%	0,04	0,05	0,03	0,10	belum tercapai
2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	'%	80	82,00	47,32	90	belum tercapai
2.8	Penderita diare yang ditangani	'%	81	57,54	32,51	83	belum tercapai
2.9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	'%	71,6	70,76	52,72	95	belum tercapai
2.10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	'%	0,005	0,08	0,09	0,030	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.11	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	0,8	1,56	4,86	1,5	melampaui
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	'%	100	100	100	100	sesuai
2.13	Angka kejadian Malaria	per 100.000 penduduk	4	0	4,05	0,80	melampaui
2.14	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	'%	1,5	1,37	0,57	2,40	belum tercapai
2.15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	'%	60,6	60,6	69,7	95	belum tercapai
2.16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	'%	34	0,35	6,25	100	belum tercapai
2.17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	'%	85	97,71	47,32	90	belum tercapai
2.18	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	5	100	100,00	0,00	100	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	penyelidikan epidemiologi < 24 jam						
2.19	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	330	266,00	200,00	348	belum tercapai
2.21	Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyekit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun	'%	27	31,94	51,85	60	belum tercapai
2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	'%	83	93,61	93,38	93	melampaui
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	6,53	36,96	5,11	9,49	belum tercapai
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	'%	53,93	31,95	68,82	56,92	melampaui
2.25	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita	5,48	6,44	6,44	4,40	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.26	Cakupan puskesmas	'%	100	125,00	125,00	100	melampaui
2.27	Cakupan jumlah organisasi UKBM	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.28	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	10,04	0,12	0,12	11,80	belum tercapai
2.29	Cakupan pembantu puskesmas	'%	33	21,21	21,21	33,000	belum tercapai
2.30	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	2,42	4,55	0,03	3,160	belum tercapai
2.31	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	140	153,00	2,63	196	belum tercapai
2.32	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terkualifikasi sesuai standar	'%	100	89,00	58,94	100	belum tercapai
2.33	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	23	30,00	0,36	37	belum tercapai
2.34	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	'%	19	16,06	103,82	30,00	melampaui
2.35	Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.36	Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	'%	0	40,00	40,00	100	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.37	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	'%	90	90,00	60,00	100	belum tercapai
2.38	Cakupan peserta BPJS KIS JKN	'%	75	50,33	95,39	100	belum tercapai
2.39	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1000 kelahiran hidup	993	0,99	-0,81	990	belum tercapai
2.40	Angka Kematian Neonatal per 1000 KH	Bayi	11	6,40	1,81	10	belum tercapai
2.41	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Orang	11	7,50	1,81	10	belum tercapai
2.42	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	'%	181,5	115,00	100,00	95	melampaui
2.43	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	'%	100	100,00	0,00	100	belum tercapai
2.44	Cakupan pelayanan anak balita	'%	36	58,00	93,03	95	belum tercapai
2.45	Angka Kematian Balita per 1000 KH	Orang	10	8,70	3,02	10,0	belum tercapai
2.46	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	'%	80,7	75,70	93,05	95	belum tercapai
2.47	Cakupan pelayanan nifas	'%	74	70,20	91,17	95	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.48	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	'%	98	119,00	100,00	95	melampaui
2.49	Cakupan kunjungan bayi	'%	93	90,00	91,07	95	belum tercapai
2.50	Angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH	167	231,00	301,39	167	melampaui
2.51	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	'%	70,2	72,50	81,91	95	belum tercapai
2.52	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	'%	85	86,00	52,34	90	belum tercapai
2.53	Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan	'%	0	75,97	75,97	100	belum tercapai
2.54	Persentase Pemenuhan Gizi Pasien	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.55	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	'%	22,22	11,32	80,06	62,95	melampaui
2.56	persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	'%	0	65,42	77,61	22,58	melampaui
2.57	Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.58	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	'%	31,18	60,85	49,52	17,97	melampaui
2.59	Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat	'%	90	85,00	0,00	100	belum tercapai
2.60	Persentase Sekolah Sehat	'%	7,14	2,68	0,00	10,72	belum tercapai
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	**Pekerjaan Umum**						
3.1.1	Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
3.1.2	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	'%	87,75	88,26	88,33	100	belum tercapai
3.01.03	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Nilai	0,002	0,002	0,002	0,002	sesuai
3.1.4	Persentase Konektifitas Jalan dan Jembatan	'%	1,61	11,81	33,47	9,10	melampaui
3.1.5	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Jumlah	0,73	0,72	0,73	0,75	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
3.1.6	Persentase data jalan dan jembatan yang update	'%	90	100,00	100,00	100	sesuai
3.1.7	Presentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan	'%	0	11,50	11,50	100	belum tercapai
3.1.8	Persentase Panjang talud yang terbangun	'%	65	70,00	70,00	90,00	belum tercapai
3.1.9	Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik	'%	78	78,31	78,31	88,00	belum tercapai
3.1.10	Persentase Data Base Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	'%	0	0,00	0,00	0,00	sesuai
3.1.11	Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir	'%	15	n/a	n/a	50	melampaui
3.1.12	Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia	'%	50	50,00	50,00	100	belum tercapai
3.1.13	Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan	'%	70	71,08	71,08	82	belum tercapai
3.1.14	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil	'%	0	31,60	64,00	300	belum tercapai
3.1.15	Persentase jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas	'%	0	0,00	0,00	57,50	belum tercapai
3.1.16	Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi	'%	28,49	34,41	35,37	100	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
3.1.17	Persentase jumlah KK yang terlayani Air Minum	'%	60	65,33	70,11	81	belum tercapai
3.1.18	Persentase terbangunnya Jalan Paving	'%	60	69,89	69,89	100	belum tercapai
3.1.19	Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang di rehabilitasi	'%	0,0	0,00	3,40	80	belum tercapai
3.1.20	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana	'%	0,0	0,00	8,60	77,78	belum tercapai
3.2	**penataan ruang**						
3.2.1	rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0	0,00	0,00	0,02	belum tercapai
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	'%	0	85,00	7,03	94	belum tercapai
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,105	0,48	0,15	0,236	belum tercapai
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	'%	0	0,00	0,00	6	belum tercapai
3.2.5	ketaatan terhadap RTRW	'%	50	60,00	20,69	83	belum tercapai
3.2.6	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	'%	75	80,00	14,29	98	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
3.2.7	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	'%	20	20,00	20,00	60	belum tercapai
3.2.8	Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang	'%	0	100,00	100,00	100	sesuai
4	**Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman**						
4.1	Persentase rumah layak huni	'%	96,58	97,29	98,22	100	belum tercapai
4.2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	'%	0	15,30	15,30	100	belum tercapai
4.3	Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	'%	0	n/a	n/a	100	melampaui
4.4	Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Akibat Relokasi Program Pemerintah	'%	0	0	20	20	sesuai
4.5	Persentase Dokumen pengembangan perumahan	'%	70	100	100	100	sesuai
4.6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	'%	91,98	100	92,08	95	belum tercapai
4.7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	'%	0	100,00	92,08	62,79	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik Bernilai Baik	'%	40	75	75	100	belum tercapai
5.2	Persentase pelayanan publik	%	100	100	100	100	sesuai
5.3	Cakupan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan	'%	0	0	0	90	belum tercapai
5.4	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	'%	100	100	100	100	sesuai
5.5	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	'%	100	83,30	83,30	100	belum tercapai
5.6	Persentase Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	'%	0	11,11	11,11	77,75	belum tercapai
5.7	Persentase Penyelengaraan Kegiatan ke agamaan	'%	100	82,61	16,67	100	belum tercapai
5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	'%	88,01	100	100	100	sesuai
5.9	Persentase Penegakan PERDA	'%	100	100	95	100	belum tercapai
5.10	Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa	'%	0	100	100	20	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
5.11	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	'%	100	100	100	100	sesuai
5.12	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan Bencana	'%	0	50	50	90	belum tercapai
5.13	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	'%	100	100	100	100	sesuai
5.14	Persentasi Laporan Kejadian Bencana	'%	0	0	100	100	sesuai
5.15	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Kebencanaan	'%	100	0	0	100	belum tercapai
6	**Sosial**						
6.1	Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar	'%	0	0	0	100	belum tercapai
6.2	Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan	'%	100	100	150	100	melampaui
6.3	Persentase Peningkatan kualitas PSKS	'%	43,55	57,35	21,79	100	belum tercapai
6.4	persentase korban bencana yang menerima	'%	100	100	61	100	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	bantuan sosial selama masa tanggap darurat						
6.5	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	'%	11,31	20,91	26,16	92,25	belum tercapai
6.6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	'%	25,03	1,52	17,77	84,36	belum tercapai
6.7	persentase PMKS yang tertangani	'%	53	49,12	17,77	100	belum tercapai
6.8	Persentase perumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
6.9	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	'%	0	68,16	68,16	100	belum tercapai
Layanan Urusan Wajib Non dasar							
1	**Tenaga kerja**						
1.1	Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	'%	38	49,69	1,33	47,00	belum tercapai
1.2	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	'%	41	80,00	80,00	66,00	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
1.3	Persentasi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	'%	79	66,66	29,76	85,00	belum tercapai
1.4	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	'%	54,05	87,19	10,00	57,14	belum tercapai
1.5	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatiahan kewirausahaan	'%	0	0	0	50	belum tercapai
2	**Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**						
2.1	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	'%	5	32	32	137	belum tercapai
2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	'%	38,51	41,48	50,96	38,61	melampaui
2.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	'%	58,65	55,41	55,41	58,85	belum tercapai
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	'%	100	100	100	100	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	'%	100	100	100	100	sesuai
2.6	Rasio KDRT	'%	0,05	0,045	0,045	0,035	melampaui
2.7	Proporsi Kursi yang dididuduki Perempuan di DPRD	%	12	-	-	16	melampaui
2.8	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,91	-	-	52,5	melampaui
2.9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	Kelompok	13	29,00	29,00	78	belum tercapai
2.10	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	'%	100	100,00	35,00	100	belum tercapai
2.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun	'%	1,57	1,5700	1,4200	1,57	belum tercapai
2.12	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2,38	2,1700	15,0000	2,04	melampaui
2.13	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	'%	0,35	81,00	50,00	0.19	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
2.15	Cakupan Keluarga yang Mempuyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	'%	71,03	97,00	100,00	80	melampaui
2.16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	Orang	80,86	75,82	70,00	81	belum tercapai
2.17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB	Persentasi	69,51	63,08	81,00	70	melampaui
2.18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB	Persentasi	79,71	80,52	777,00	80	melampaui
2.19	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	'%	90	N/a	N/a	95	melampaui
2.20	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	'%	0,03	0,02	0,02	0,01	melampaui
3	**Pangan**						

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
3.1	Cakupan Ketersediaan pangan utama	Ton	210	211.323	250	255	belum tercapai
3.2	Cakupan Pola Pangan Harapan	Skor	0	92,05	93,02	90	melampaui
3.3	Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5,00	5,00	5	sesuai
3.4	Cakupan Konsumsi Protein	Gram/kap/Hari	57	67,04	73,55	57	melampaui
3.5	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	'%	90	90	90	90	sesuai
3.6	Cakupan Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari	2150	2.286	2.762	2.150	melampaui
3.7	Penguatan cadangan pangan	'%	15	10,50	35,00	60	belum tercapai
4	**Pertanahan**						
4.1	Presentase Penyelesaian Izin Lokasi	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
4.2	Persentase luas lahan bersertifikat	'%	0	0,00	0,00	0,50	belum tercapai
4.3	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
4.4	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
5	**Lingkungan Hidup**						

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
5.1	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	'%	72,31	78,44	71,68	72	belum tercapai
5.2	Operasionalisasi TPA di Kota Kotamobagu	Nilai	75,56	n/a	n/a	78	melampaui
5.3	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	'%	100	133	126	100	melampaui
5.4	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	'%	100	50	100	100	sesuai
5.5	Persentase Ketersediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	'%	95	67,81	87,14	84	melampaui
5.6	Persentase Dokumen Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	'%	58,33	33,33	42,86	81,25	belum tercapai
5.7	Persentase Institusi / Kelompok / Individu yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama	'%	32	30	30	56,67	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	Pengelolaan Lingkungan Hidup						
5.8	Persentase Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup	'%	100	142	170	100	melampaui
5.9	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	'%	20	20	20	60	belum tercapai
5.10	hasil pengukuran indeks kualitas air	Angka	0,75	n/a	*	0,75	melampaui
5.11	hasil pengukuran indeks kualitas udara	Angka	92	n/a	n/a	94,5	melampaui
5.12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	73	n/a	n/a	73,8	melampaui
5.13	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH D yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu	%	44,44			100	belum tercapai
5.14	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi	%	27,69			28	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)						
5.15	Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan	%	72,31			90	belum tercapai
6	**Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil**						
6.1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	'%	90	83,13	83,13	100	belum tercapai
6.2	Presentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih	'%	0	81,88	98,92	95	melampaui
6.3	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0,93	0,98	1,37	0,98	melampaui
6.4	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	'%	5	35,00	26,46	100	belum tercapai
6.5	Cakupan penerbitan Akta kematian	'%	82,67	100,00	183,50	93,78	melampaui
6.6	Rasio Anak berakte kelahiran	Rasio	0,89	1,00	1,47	0,94	melampaui
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	'%	88,21	100,00	100,00	94	melampaui
6.8	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,46	1,00	5,58	0,90	melampaui
6.9	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	'%	88,21	153,85	153,85	89,20	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
6.10	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	'%	93	97,56	137,33	98	melampaui
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rasio	0	0,00	0,89	1,00	belum tercapai
7.2	persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	75	0,00	100,00	100	sesuai
7.3	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	'%	66,67	19,09	80,00	100,00	belum tercapai
7.4	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Keluraha/Desa	'%	45,45	54,55	100,00	100	sesuai
7.5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	100	0,00	100,00	100	sesuai
7.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
7.7	Persentase LPM berprestasi	'%	0	37,89	4,00	20	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
7.8	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	'%	0	112,53	20,00	100	belum tercapai
7.9	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rasio	0	57,81	1,92	1,95	belum tercapai
7.10	persentase PKK aktif	'%	0	100,00	100,00	100	sesuai
7.11	Persentase aparatur pemerintah desa yang kompeten	'%	90	100,00	100,00	100	sesuai
7.12	Presentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
7.13	Persentase Aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang kompeten	'%	90	95,80	95,80	95	melampaui
7.14	Presentase Penyelengaraan Kegiatan Lomba	'%	0	100,00	100,00	100	sesuai
7.15	Persentase Retribusi sampah	'%	51	98,31	98,31	100	belum tercapai
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
8.1	Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang berkerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai	'%	38,3	40	50	72	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	dengan standarisasi pelayanan						
8.2	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	'%	0	31,81	31,81	32,06	belum tercapai
8.3	Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	orang	2,8	1,35	1,89	1,23	melampaui
8.4	Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	14	22	28	34	belum tercapai
8.5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	0	1	7	1	melampaui
8.6	Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	'%	44	10	27	19	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
8.7	Cakupan PKB / PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	'%	100	100	100	100	sesuai
8.8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	'%	100	100	100	100	sesuai
8.9	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanakan program pembangunan	Sektor	7	7	7	8	belum tercapai
8.10	rata-rata usia kawin pertama wanita	'%	22,98	22,00	22,00	22,98	belum tercapai
8.11	Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	'%	52,3	52,27	52,27	58,10	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
8.12	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	'%	41,26	91	65	44	melampaui
8.13	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	'%	25	125	125	125	sesuai
8.14	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu	'%	100	100	100	100	sesuai
8.15	Ratio Aseptor KB	'%	78,73	80,66	80,16	78,92	melampaui
8.16	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	'%	9,3	10,45	4,30	9,30	belum tercapai
8.17	Persentase pengunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP)	'%	34,65	35,40	36,50	37,70	belum tercapai
8.18	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	'%	78,73	81	80	79	melampaui
8.19	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	'%	27	10	20	25	belum tercapai
8.20	Presentase Sarana dan Prasarana penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Kecamatan	0	100	100	500	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
9	**Perhubungan**						
9.1	presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara	'%	55,56	66,66	100,00	100	sesuai
9.2	Persentase titik kemacetan yang teratasi	'%	67	67	75	92	belum tercapai
9.3	Presentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	'%	100	0	100	100	sesuai
9.4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan	'%	0	36,36	36,36	100	belum tercapai
9.5	jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1623	179	179	2.959	belum tercapai
9.6	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	'%	100	0	0	100	belum tercapai
9.7	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	6,88	5,14	2,60	5,13	belum tercapai
9.8	pemasangan rambu-rambu	'%	26,67	12,47	19,20	88,85	belum tercapai
10	**Komunikasi dan informatika**						
10.1	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	'%	42,42	65,00	65,00	21	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
10.2	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	'%	24,44	0,00	0,00	41	belum tercapai
10.3	Persentase peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	'%	26,92	68,00	68,00	23	melampaui
10.4	Persentasi tindaklanjut layanan keluhan masyarakat	'%	100	n/a	n/a	100	melampaui
10.5	Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan e-Government	'%	23,26	100,00	62,79	100	belum tercapai
10.6	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
10.7	cakupan layanan telekomunikasi	'%	72	n/a	93,00	100	belum tercapai
10.8	Cakupan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	'%	56,58	66,21	85,08	100	belum tercapai
10.9	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	'%	77,05	n/a	94,00	70,49	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
10.10	persentase Kelurahan/Desa yang mengelola arsip secara baku	'%	0	0,00	0,00	39,27	belum tercapai
10.11	Persentase Laporan Pelaksanaan SPM	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
10.12	Persentase Standarisasi LPSE	'%	50	55,56	55,56	100	belum tercapai
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
11.1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	'%	0	7,68	17,00	28,55	belum tercapai
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	'%	433	796,51	175,60	557	belum tercapai
11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
11.4	Persentase pelaku usaha yang di promosikan	'%	0	n/a	n/a	100	melampaui
11.5	Persentase Koperasi Aktiv	'%	82	81,37	81,37	87	belum tercapai
11.6	Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar	'%	0	n/a	n/a	99,98	melampaui
12	**Penanaman modal**						
21.1	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah	'%	0	n/a	n/a	10	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
21.2	persentase pelayanan penerbitan perizinan	'%	100	175.960,00	162,00	100	melampaui
21.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3334	4.378,00	913,00	5.000	belum tercapai
21.4	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	439	291,00	223,00	550	belum tercapai
13	**Kepemudaan dan Olah raga**						
13.1	persentase wirausaha muda	'%	59,52	51,14	51,14	100	belum tercapai
13.2	presentase prestasi olahraga	'%	61,54	65,38	99,99	80,77	melampaui
13.4	Persentase organisasi pemuda yang aktif	'%	82,76	86,20	85,68	100	belum tercapai
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	'%	75	53,57	53,57	95,00	belum tercapai
13.6	Persentsae atlet berprestasi	'%	53,33	56,67	56,67	70	belum tercapai
13.7	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	'%	70,18	87,71	100,00	100	sesuai
13.8	Cakupan pembinaan olahraga	'%	73,08	76,92	76,92	92,30	belum tercapai
14	**Statistik**						
14.1	Persentase Data Statistik Daerah	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
14.2	Persentase Pengendalian Laju Inflasi daerah	Nilai	3,83	3,52	3,52	3,30	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
15	**Persandian**						
15.1	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	'%	56,58	n/a	n/a	100	melampaui
16	**Kebudayaan**						
16.1	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	'%	25	25,00	25,00	62,50	belum tercapai
16.2	Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan	'%	85,18	75,00	100,00	85,18	melampaui
16.3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	'%	0	0,00	0,00	20	belum tercapai
16.4	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
17	**Perpustakaan**						
17.1	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	0,05	0,01	0,09	0,25	belum tercapai
17.2	rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,29	0,29	1,48	0,30	melampaui
17.3	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	1596	3.742	3.742	3.096	melampaui

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
17.4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	10851	15.151	16.862	22.851	belum tercapai
17.5	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Jumlah	796	941	1.590	1.275	melampaui
18	**Kearsipan**						
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen Arsip Dinamis	'%	0	0,00	100,00	100	sesuai
17.2	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	'%	2,33	2,33	2,33	48,85	belum tercapai
Layanan Urusan Pilihan							
1	**Pariwisata**						
1.1	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	'%	0	0,00	100,00	100	sesuai
1.2	lama kunjungan wisata	Hari	2	2	2	2	sesuai
1.3	Persentase Kunjungan Wisata	'%	100	101,98	90,92	93,33	belum tercapai
2	**Pertanian**						

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.1	Persentase Peningkatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani	'%	0	0,00	24,24	100	belum tercapai
2.2	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	'%	0	0,00	83,30	90,90	belum tercapai
2.3	Persentase Produk Pertanian / Perkebunan yang dipromosikan	'%	100	0,00	50,00	100	belum tercapai
2.4	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan	'%	100	100,00	101,20	100	melampaui
2.5	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Ternak	'%	32,71	20,00	98,00	100	belum tercapai
2.6	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	'%	7,5	6,00	6,00	7,06	belum tercapai
2.7	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	'%	0,36	0,90	5,50	0,42	melampaui
2.8	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	'%	19,01	9,00	9,00	19,11	belum tercapai
2.9	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	'%	28,17	54,00	54,00	28,88	melampaui
2.10	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Agribisnis	'%	0	n/a	12,00	66,64	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.11	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	'%	100	100,00	100,04	100	melampaui
2.12	Cakupan bina kelompok petani	'%	0	10,89	10,50	57,40	belum tercapai
2.13	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Inseminator PKB, ATR	'%	50	0,00	100,00	100	sesuai
3	**Energi dan Sumber Daya Alam**						
3.1	Persentase Ketersediaan LPG	'%	100	99,74	99,74	100	belum tercapai
4	**Perdagangan**						
4.1	Persentase barang yang diawasi	'%	35	100	100	55	melampaui
4.2	Persentase Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perdangan	'%	75	75	75	95	belum tercapai
4.3	Persentase Pedangan Kaki Lima dan Asongan yang dibina	'%	0	640	640	80	melampaui
5	**Perindustrian**						
5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	'%	0	12,90	21,09	50,99	belum tercapai
5.2	Prosentase Peningkatan Kualitas Produk	'%	0	1,7	1,7	7,7	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
5.3	Prosentase Sentra yang Dikembangkan	'%	0	10	10	100	belum tercapai
6	**Kelautan dan Perikanan**						
6.1	Persentase peningkatan pengetuan dan ketrampilan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	'%	0	0,00	62,50	100	belum tercapai
6.2	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	'%	26,51	20,63	35,96	100	belum tercapai
6.3	produksi perikanan	'%	99,48	n/a	n/a	100	melampaui
Penunjang Urusan							
1	**Perencanaan Pembangunan**						
1.1	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
1.3	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang terselesaikan	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
1.4	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	'%	90	100,00	100,00	100	sesuai
1.5	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi	'%	15	15,00	60,00	100	belum tercapai
1.6	Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air	'%	0	20,00	20,00	100	belum tercapai
1.7	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana	'%	70	75,00	75,00	100	belum tercapai
1.8	Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government	'%	25	81,00	81,00	23	melampaui
1.9	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	'%	0	0,00	0,00	100	belum tercapai
1.10	Persentase Penataan Wilayah Administrasi Daerah	'%	0	0,00	100,00	100	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
1.11	Persentase perencanaan kota-kota menengah dan besar	'%	70	100,00	100,00	100	sesuai
1.12	Persentase peningkatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	'%	100	100,00	100,00	100	sesuai
1.13	Predikat Nilai Sakip	Nilai	63,54	66,16	66,16	80	belum tercapai
1.14	Presentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	'%	90	4,07	4,07	100	belum tercapai
2	**Keuangan**						
2.1	Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	'%	90	100	100	100	sesuai
2.2	perbandingan antara belanja tidak langsung	'%	43,42	45,25	47,67	41,92	melampaui
2.3	persentase belanja kesehatan (10%)	'%	10	18,31	36,25	10	melampaui
2.4	Persentase SILPA	'%	3,02	4,24	2,47	1,73	melampaui
2.5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	'%	0,21	0,18	1,09	0,73	melampaui
2.6	persentase belanja pendidikan (20%)	'%	19	18,82	18,56	20	belum tercapai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
2.7	perbandingan antara belanja langsung	'%	56,58	54,75	52,33	59,51	belum tercapai
2.8	Persentase pemilihan sangadi	'%	0	0	0	100	belum tercapai
2.9	Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik	persen	40	100	100	100	sesuai
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**						
3.1	Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)	'%	100	90	100	100	sesuai
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	'%	33	36	36	59	belum tercapai
3.3	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	'%	0	97,00	97,00	100	belum tercapai
3.4	Persentase PNS Alih status dari CPNS ke PNS	'%	0	n/a	100,00	100	sesuai
3.5	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Manejerial	'%	0	n/a	n/a	100	melampaui
3.6	Persentase Penyelenggaraan Administrasi	'%	100	100	100	100	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
	Kepegawaian Tepat Waktu						
3.7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	'%	1,85	1,79	0,34	1,11	belum tercapai
3.8	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	'%	100	100	100	100	sesuai
3.9	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	n/a	n/a	3	melampaui
3.10	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	35	n/a	n/a	35	melampaui
3.11	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1006	n/a	n/a	1006	melampaui
3.12	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	1209	n/a	n/a	1209	melampaui
3.13	rasio kebutuhan PNS	Persen	51,65	100	100	80	melampaui
4	**Penelitian dan Pengembangan**						
4.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	'%	0	100	100	100	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
4.2	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah	'%	100	7,69	59,52	100	belum tercapai
5	**Pengawasan**						
5.1	Persentase pelanggaran pegawai	'%	6,12	n/a	n/a	4,000	melampaui
5.2	Persentase tindak lanjut temuan	'%	89,6	85,65	89,81	87,000	melampaui
5.3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	17	12	12	13	belum tercapai
5.4	Persentase peningkatan kapabilitas aparat pengawas	'%	20	73,81	100,00	100,0	sesuai
5.5	persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	'%	0	100,00	100,00	100,0	sesuai
6	**Sekretariat Dewan**						
6.1	Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	'%	98,99	83,00	97,00	90	melampaui
6.2	Presentase Fasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD	'%	100	46,00	100,00	100,0	sesuai

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Standar	Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
				2019	2020		
7	**Sekretariat Daerah**						
7.1	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	'%	90	300,00	700,00	90,000	melampaui
7.2	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	'%	90	326,00	388,00	90,000	melampaui
7.3	Persentase laporan capaian serapan anggaran OPD	'%	97	93,76	93,76	98,000	belum tercapai
7.4	Persentase peningkatan adminstrasi dan pelaporan desa/kelurahan	'%	100	100,00	100,00	100,000	sesuai
7.5	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	'%	0	0,00	0,00	100,000	belum tercapai
7.6	Presentase Penyedia yang profesional	'%	100	100,00	100,00	100,000	sesuai
7.7	Persentase pengaduan sanggah dan sanggah banding lelang Barang/Jasa yang terlayani	'%	100	100,00	100,00	100,000	sesuai
7.8	Persentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi	persen	100	100,00	100,00	100,000	sesuai
7.9	Presentase pelaksanaan area Perubahan Reformasi Birokrasi	'%	0	0,00	0,00	100,000	belum tercapai

2.5. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kota Kotamobagu dan organisasi masyarakat, serta akademisi telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2021. Penyusunan RAD SDGs Kota Kotamobagu ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*, juga mengacu dan memperhatikan:

(1) Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2025;
(2) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
(3) RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023; dan
(4) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2021.

Pelaksanaan RAD SDGs Kota Kotamobagu tahun 2021 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Kota Kotamobagu tahun 2021 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.110

Capaian Indikator SDGs Kota Kotamobagu Tahun 2021

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan			
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.	5,42%	5,74%
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	NA	125 orang
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	PBI APBD : 29.607 & PBI APBN : 35.045	83.73
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	150 perusahaan	3.396
	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	50 orang	50 orang
	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat.(PKH)	10.715	2.980 KPM
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua	Persentase/jumlah Perempuan Pernah	1686 (93,05%)	1282

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.		
	Persentase/jumlah anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1.325	Meningkat dari thn sebelumnya
	Jumlah/Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang 15berstatus kawin.	13150 (62,62%)	86,08%
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	75,74%	76.52
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	40,59%	41.03
	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran.	92.67%	92,82%
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	NA	13 KK
	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	NA	13 KK

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah. (Tier II).	1 dokumen	1 dokumen
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	18,4%, 34 %, 1 %	20,06% 18,29% 2,7%
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan			
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	0,58%	0,38
	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	NA	12,3
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	NA	0,88
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	8 (0.3%)	0,8 %
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di	123 (5.9%)	2.62%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	bawah dua tahun/baduta.		
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Gizi Buruk 2 (0,03%) Kurus 44 (1.25%)	0.4%
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	20 (4.1%)	1,6%
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	34,01%	27.48
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	94.8 15.5 Gram	81,3
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian	Ketersediaan pangan	249.389 ton	250.099
Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang	Tersalurkannya sarana dan produksi	ya	ya

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan.		
Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	7	9
	Terselenggaranya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi	ya	Tersedia

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat di kecamatan.		
Tujuan 3 Kehidupan sehat dan Sejahtera			
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	54	5
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1686 (93,05%)	(a). 1283 org (b). 1282 org
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidupdan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0	0
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3 (1,81 KH)	5,7%
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0	0
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	16	23

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	112	118
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	287	224
	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Belum ada Kasus	Belum ada kasus
	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	0	2
	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	4 Kec	4 Kec
	Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati.	7 Kasus	0
	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%.	0	0
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Perlu Survey	0,11%
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	9064	6009
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	897	113
	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	4 Kecamatan	4 Kecamatan
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan	Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di	30	Perlu Survey

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
penggunaan alkohol yang membahayakan	fasilitas pelayanan kesehatan.		
	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	14.366 (0,7%)	Perlu Survey
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Jumlah Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.	83,16%	86,08%
	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	NA	32,54%
	Jumlah Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	107 ASFR	27%
	Jumlah Total Fertility Rate (TFR).	1,5%	1,5%
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	0	0
	Jumlah Cakupan Jaminan	95.96%	83.73%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Kesehatan Nasional (JKN).		
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Angka kematian akibat keracunan.	0	0
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Perlu Survey	0,11 %
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat,& khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	76,86%	80%
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Rasio Dokter : 0,336 Rasio tenaga kesehatan : 2,487	601 org
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas			

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SDSMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	79.73%	97,3%
	Persentase SMP/MTs berakreditasi min B.	45%	90%
	APK SD/MI/sederajat.	89.35%	96,01
	APK SMP/MTs/sederajat.	111.2%	111,27
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	10.09%	10.11%
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat	Perlu dihitung	SD=28147 Orang SMP=23549 SMA=37266
	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Perlu dihitung	PAUD= Tidak ada SD=90.38 SMP=75.2 SMA69.42
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	95,54%	95,64%
Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki,	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan	Perlu dihitung	Pendidikan sekolah -Laki-laki=2715

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin		- Perempuan=3496
Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Perlu Survey	10 orang
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	80.95%	90,38 %
	APM SMP/MTs/sederajat;	87.38%	112,8%
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja danproporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100%	100%
	Proporsi sekolah dengan akses ke listrik	100 %	100 %
	Proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran (SD/SMP)	98,68	98,68
	Proporsi sekolah dengan akses ke komputer untuk	93,33	93,33

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	tujuan pengajaran (SMP)		
	Proporsi sekolah dengan akses ke air minum layak.	100 %	100 %
	Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin (SD)	67,21	85,72
	Proporsi sekolah dengan akses ke fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	100 %	100 %
	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	19,81%	24,06%
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	45,25%	40,06%
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	49,77%	41,63%
Tujuan 5 Kesetaraan Gender			
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	4 kebijakan	4 kebijakan
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	28	0,04%
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami	9	0,21%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (ASFR)	28.49%	27%
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah (DPRD Kabupaten)	20%	20%
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Perlu Survey	24%
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual reproduksi, dan hak reproduksi yg telah disepakati sesuai dgn Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	6,55%	5,94 %
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam.	19127 org	Perlu survey
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak			
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	75.74%	76.52%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Jumlah rumah tangga /proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	21.078	47.93%
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Perlu Survey	Perlu Survey
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	40.59%	41.03%
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	33	33
	Jumlah kec yang terbangun air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan dan komunal.	3 Kecamatan	4 Kecamatan
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dgn mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	281 SR	Perlu dihitung

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
ulang yang aman secara global			
	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Dari 18 Titik Pantau sungai terdapat 11 Titik Pantau sungai yang kualitasnya Cemar Ringan, 6 titik cemar sedang, 1 titik tidak tercemar	17 titik sampel pengujian air sungai
	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Nilai Indeks Kualitas Air = 75,85 (Baik)	Perlu dihitung
Pada tahun 2030, sec signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air, menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yg berkelanjutan utk mengatasi kelangkaan air, & mengurangi jmlh org yang menderita akibat kelangkaan air	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	0	0
	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Perlu survey	Perlu Survey
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Perlu dihitung	Perlu dihitung
	Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki	Perlu di survey	Perlu di survey

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	Perlu di survey	Perlu di survey
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau			
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Rasio elekrifikasi	99,98%	100%
	Konsumsi listrik per kapita	2,43 MWh	2,5 MWh

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Rasio penggunaan gas rumah tangga	123.498	123.682
Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Bauran energi terbarukan.	74,47%	74,47%
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat	Intensitas energi primer.	3.899.167	4.436,37
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi			
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dgn kondisi nasional dan, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB perkapita.	-1,55%	0.2%
	PDRB per kapita	Perlu dihitung	PDRB ADHB =29.012 PDRB ADHK =18.344
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, fokus sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Perlu dihitung	0,25
	Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Perlu di hitung	Perlu di hitung
Menggalakkan kebijakan pemb. yg mendukung keg. produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas,inovasi,mendorong formalisasi & pertumbuhan UMKM, melalui akses terhadap jasa keuangan	Persentase tenaga kerja informal	Perlu di hitung	61,47
	Persentase tenaga kerja formal	Perlu di hitung	38,53

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Persentase akses layanan keuangan formal UMKM	100%	100%
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	Upah rata-rata per jam pekerja	Rp. 19.137	Rp. 19.706,68
	Tingkat pengangguran terbuka	7.44%	7,32%
	Persentase setengah pengangguran	Perlu di hitung	11,05%
Melindungi hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perlu di hitung	Perlu di hitung
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	6.56%	0.23
	Jumlah wisatawan mancanegara	385 org	23031 orang
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	138.030 org	77.706 Orang
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	Perlu Survey	Perlu Survey

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	47%	47%
Pada tahun 2030, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the ILO	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	273 perusahaan
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur			
Mengembangkan infrastruktur yg berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Kondisi mantap jalan nasional	18.842 km	247.75 KM
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDRB.	3,83%	3.97%
	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	3.91%	2.81%
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	37.5%	7.4%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	8.73%	8.73%
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi rumah tangga terlayani mobile broadband	19.050 RT	19.127 RT
	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	57.381 org	Perlu dihitung
	Proporsi individu yang menggunakan Internet	11.476 org	Perlu dihitung
Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan			
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tkt yg lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini	0.37	0.322
	Tingkat kemiskinan	5,42%	5,74%
	Jumlah Desa Tertinggal	0	0
	Jumlah Desa Berkembang	0	0
	Jumlah Desa maju	15	15
	Jumlah Desa Mandiri	0	0
Menjamin kesempatan yg sama dan mengurangi kesenjangan hasil,	Indeks Kebebasan Sipil.	Perlu kajian	Perlu kajian
	Jumlah penanganan pengaduan	66	106

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
termasuk menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi & kebijakan tersebut.	pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	30	33
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Perlu di hitung	Perlu di hitung
Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Belum tersedia	Belum tersedia
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan			
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	24.090 RT	219

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.			
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	12,52%	Perlu Dihitung
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
Mempromosikan dan menjaga warisan	Jumlah belanja (publik dan swasta)	Perlu dihitung	Perlu dihitung

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
budaya dunia dan warisan alam dunia	per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanjaoperasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)		
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1 unit	1 unit
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani	Perlu dihitung	79,26%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	pengelolaan sampahnya.		
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Proporsi ruang terbuka hijau untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	3.17%	Perlu Dihitung
	Proporsi org yg menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, dan status disabilitas (12 bulan terakhir).	0,02%	0,03%
	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0,11%	0,06%
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab			
Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia & semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. g-ma	Perlu dihitung	Perlu dihitung
	Proporsi limbah berbahaya yg terkelola menurut jenis penanganannya.	70 : 30	Perlu dihitung
	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	51.4 ton	40.5 ton

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia & lingkungan.	sesuai peraturan (sektor industri).		
Pada tahun 2030, mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	293 ton	1.153
Mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	7 usaha keg	14 usaha keg
	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1 (PT.PLN Persero)	1 (PT.PLN Persero)
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat dmemiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Perlu survey	Perlu survey
Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan	1 Strategi	1 Strategi

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
kerja danmempromosikan budaya dan produk lokal.	evaluasi yang disepakati.		
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim			
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan ikim.	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Perlu survey	Perlu survey
Tujuan 15 Ekosistem Daratan			
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir.	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	0.5Ha/ 10.866 Ha	0
	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	1.37 Ha / 10866 Ha (CSR oleh PLN Manado, Korem 131 Santiago, dan Ormas Pecinta Alam Lokasi Penanaman diHutan Kota Bonawang)	0

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Perlu didata	Perlu didata
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan SD genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	NA	NA
Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan kehati dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi &penganggaran	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Perlu kajian	Perlu kajian
Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap	0	0
	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Belum ada laporan kasus	Belum ada laporan kasus
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh			
Secara signifikan mengurangi segala	Angka korban kejahatan	Perlu dihitung	

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.	pembunuhan per 100.000 penduduk		
	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan satu tahun terakhir.	Perlu di data	
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi anak 1-14 tahun yg mengalami hukuman fisik/ agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.	0	
	Prevalensi kekerasan terhadap anak L&P.	36	
	Proporsi L&P muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	
Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	30	
	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	0	
	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan	0	

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	pembebasan biaya perkara.		
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		3.70%
	Indeks Persepsi Korupsi (IPK).		Pelu Kajian
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Penilaian Opini WTP atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Daerah.		WTP
	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.		Perlu dihitung
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Pemerintah Daerah		54.13
	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Pemerintah Daerah.		67.52
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		20%
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di		17%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	lembaga eksekutif (Ess I & II).		
	Indeks Lembaga Demokrasi.		Perlu Kajian
	Indeks Aspek Kebebasan.		Perlu Kajian
	Indeks Hak-hak Politik.		Perlu Kajian
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.		7.707 Jiwa
	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		92.08% (blm terpilah)
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		92.22%
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM.		66
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.		30
	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun		1 (kominfo)

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	
Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan			
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Perlu dihitung	20,412%
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Perlu dihitung	4,233%
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Perlu dihitung	17%
Penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang thn 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi (teknologi informasi dan komunikasi).	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	11.476 org	Perlu dihitung
	Persentase kecamatan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	90%	95%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Perlu dihitung	0,20
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU.	0	0
	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek KPBU, transaksi proyek KPBU dan dukungan pemerintah.	0	0
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas utk negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100%	93,33%
	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	100%	96,77%

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Perlu dihitung	Perlu dihitung
	Review Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Perlu kajian	117
Meningkaltkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada PD.	0	0
	Persentase PD yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan atau Pranata Komputer.	0	0
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	4.391 Orang	4.519 org
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS.	100%	91,4%
	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia	Tersedia

TARGET	INDIKATOR	2020	EVALUASI 2021
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	25 Orang skripsi / thesis / desertasi : 2.78% Penelitian : 0% Perencanaan dan Evaluasi : 88.89% Penyebaran Informasi : 8.33%	96,15%
	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer PD.	0	0

Berdasarkan hasil analisis antara capaian indikator SDGS Tahun 2021 dengan target yang harus dicapai pada periode RPJMD Tahun 2018-2023 diperoleh fokus pembangunan Kota Kotamobagu seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.111

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan SDGs tahun 2021 di Kota Kotamobagu

TUJUAN	INDIKATOR	TERCAPAI	TDK TERCAPAI	TDK ADA DATA	NILAI (%)
1	17	17	0	0	100
2	13	12	0	1	92.31
3	30	23	5	2	76.6
4	23	23	0	0	100
5	8	5	2	1	62.50
6	17	8	0	9	47.05
7	5	5	0	0	100
8	17	14	0	3	82.35

TUJUAN	INDIKATOR	TERCAPAI	TDK TERCAPAI	TDK ADA DATA	NILAI (%)
9	8	6	0	2	75.00
10	11	8	0	3	73.00
11	11	6	0	5	55.00
12	10	6	0	4	60.00
13	3	3	0	0	100.00
14					
15	7	4	1	2	57.14
16	26	21	0	5	80.76
17	19	17	0	2	89.47
JUMLAH	225	178	8	39	79.11

2.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun capaian penerapan masing-masing jenis

pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada gambar dibawah.

Gambar 2.42

Capaian Penerapan SPM Kota Kotamobagu Tahun 2020

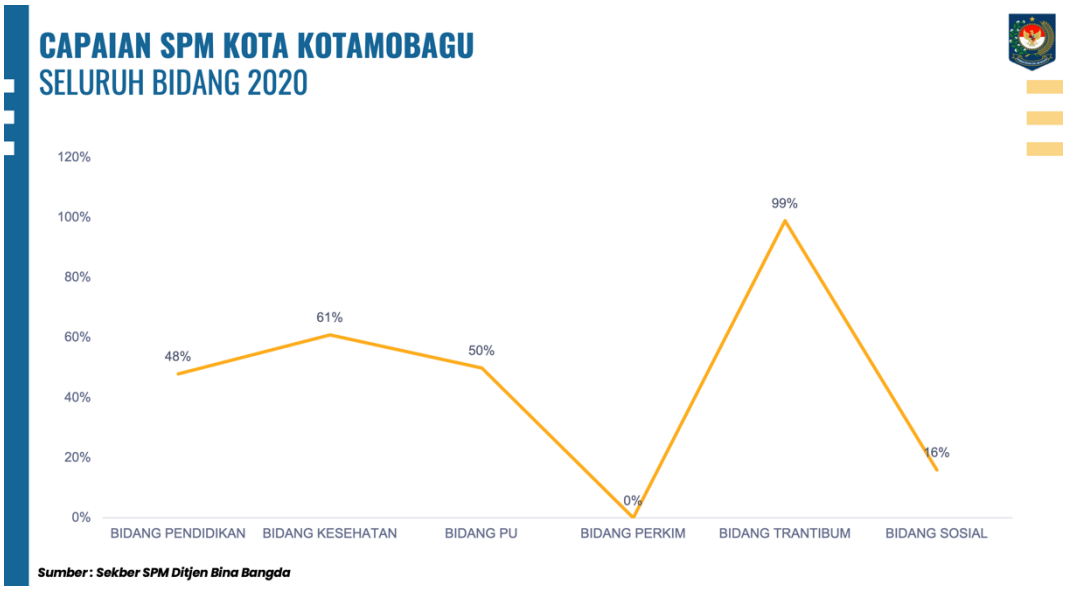

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus/Sease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD

merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Dinamika dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah merefleksikan kapasitas keuangan daerah melaksanakan dan mewujudkan kewenangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada bidang pelayanan dasar publik sebagai kewajiban pemerintah daerah (kota, kabupaten, dan provinsi) dalam mewujudkan makna dan substansi pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Struktur APBD Kota Kotamobagu terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah (2) Pengeluaran Daerah yang terdiri dari Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penyusunan gambaran keuangan daerah diperlukan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah telah dilaksanakan pada masa lalu dan kemudian dapat melakukan proyeksi atau perkiraan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai rencana pembangunan daerah kedepan.

Namun, dalam persiapan dan penyusunan perkiraan kebutuhan keuangan daerah, untuk mendanai kebutuhan pembangunan Kota Kotamobagu kedepan sampai akhir tahun 2023 masa berakhirnya RPJMD 2018-2023 diperhadapkan dengan keadaan pandemic COVID-19 yang belum dapat diperkirakan waktunya berakhir. Suatu keadaan yang belum pernah terjadi dialami oleh pemerintah daerah (kota, kabupaten, provinsi), sehingga perkiraan penerimaan Pemda kedepan tidak memiliki kepastian, sebab keadaan daerah dan negara dalam keadaan masa sulit menghadapi pandemic.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kota Kotamobagu, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Kotamobagu tahun 2019-2020. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan daerah masa lalu merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan daerah di masa depan. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam waktu lima tahun terakhir. Dari informasi tersebut bisa didapatkan trend pertumbuhan dan perkembangan untuk masing-masing item keuangan daerah, sehingga membantu untuk membuat prediksi selama periode lima tahun RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Kotamobagu dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada tabel berkut.

Tabel 3.1

Realisasi Rata-rata Pertubuhan APBD Tahun 2019-2020 Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2020
4	**PENDAPATAN - LRA**	**695.477.267.322,08**	**639.869.956.745,75**	**-8,00%**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**64.290.644.909,08**	**73.260.121.783,35**	**13,95%**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	20.438.853.849,00	18.431.840.673,00	-9,82%
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.971.555.055,05	45.056.500.525,00	50,33%
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.620.502.125,00	915.577.443,00	-43,50%
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	12.259.733.880,03	8.856.203.142,35	-27,76%
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**602.890.637.838,00**	**523.105.133.297,00**	**-13,23%**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	535.462.470.767,00	470.995.419.846,00	-12,04%
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak	7.215.876.872,00	10.462.345.133,00	44,99%
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.742.896.607,00	5.011.825.621,00	-35,27%
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.656.494.000,00	359.457.903.000,00	-9,61%
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	87.491.481.672,00	56.243.049.493,00	-35,72%
4 . 2 . 1 . 5	DAK Non Fisik	35.355.721.616,00	39.820.296.599,00	12,63%
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	46.701.634.000,00	43.895.205.000,00	-6,01%
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian	46.701.634.000,00	43.895.205.000,00	-6,01%
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	20.726.533.071,00	8.214.508.451,00	-60,37%

NO	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN 2020
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.726.533.071,00	8.214.508.451,00	-60,37%
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**28.295.984.575,00**	**43.504.701.665,40**	**53,75%**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	23.375.318.000,00	37.253.175.341,40	59,37%
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	4.920.666.575,00	6.251.526.324,00	27,05%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan pemerintah daerah melalui analisis likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kotamboagu

URAIAN	2019	2020	RATA - RATA PERTUMBUHAN
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	33.278.484.655,97	20.190.182.674,31	-39,33%
Kas di Bendahara Penerimaan	110.413.717,00	89.853.927,00	-18,62%
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.925.643,00	139.016,00	-98,44%
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00%
Kas di Bendahara FKTP	184.054.550,00	163.831.934,00	-10,99%
Kas di Bendahara BOS	1.072.439.343,00	260.645.792,00	-75,70%
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00%
Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00	0,00%
Setara Kas	0,00	0,00	0,00%
Kas Lainnya	0,00	333.750.000,00	0,00%
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00%

URAIAN	2019	2020	RATA - RATA PERTUMBUHAN
Piutang Pendapatan	10.712.955.205,48	15.808.178.343,03	47,56%
Piutang Lainnya	8.412.494.400,00	7.393.645.700,00	-12,11%
Penyisihan Piutang	(5.329.335.565,94)	(5.641.848.383,88)	5,86%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00%
Persediaan	6.865.316.859,73	7.744.728.425,34	12,81%
JUMLAH ASET LANCAR	55.315.748.808,24	46.343.107.427,80	-16,22%
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00%
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00%
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00%
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00%
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00%
Investasi Jangka Panjang Permanen			0,00%

URAIAN	2019	2020	RATA - RATA PERTUMBUHAN
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.001.000.000,00	0,01%
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	10.000.000.000,00	10.001.000.000,00	0,01%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	10.000.000.000,00	10.001.000.000,00	0,01%
ASET TETAP			
Tanah	60.637.931.602,52	60.681.381.602,52	0,07%
Peralatan dan Mesin	388.414.199.727,98	452.979.380.774,93	16,62%
Gedung dan Bangunan	446.982.345.007,00	545.214.245.597,49	21,98%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	722.776.873.251,58	747.723.788.884,36	3,45%
Aset Tetap Lainnya	36.322.753.774,95	37.719.394.674,47	3,85%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.377.732.285,26	10.090.687.508,51	-89,42%
Akumulasi Penyusutan	(603.868.160.045,95)	(712.094.878.622,96)	17,92%
JUMLAH ASET TETAP	1.146.643.675.603,34	1.142.314.000.419,32	-0,38%
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00%

URAIAN	2019	2020	RATA - RATA PERTUMBUHAN
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	4.904.018.381,74	4.972.160.806,96	1,39%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00%
Aset Tidak Berwujud	1.240.959.525,00	1.240.159.525,00	-0,06%
Aset Lain-lain	18.031.878.868,52	17.068.877.383,73	-5,34%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(9.204.538.315,49)	(8.432.817.341,26)	-8,38%
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(837.447.687,08)	(1.003.781.275,41)	19,86%
JUMLAH ASET LAINNYA	14.134.870.772,69	13.844.599.099,02	-2,05%
JUMLAH ASET	**1.226.094.295.184,27**	**1.212.502.706.946,14**	-1,11%
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.578.303,00	182.548.255,00	674,22%
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00%
Utang Beban	28.656.302.796,00	17.784.143.737,30	-37,94%

URAIAN	2019	2020	RATA - RATA PERTUMBUHAN
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	547.580.719,62	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.679.881.099,00	18.514.272.711,92	-35,45%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0,00%
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
EKUITAS	1.197.414.414.085,27	1.193.988.434.234,22	-0,29%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.226.094.295.184,27**	**1.212.502.706.946,14**	-1,11%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, berikut dijabarkan beberapa rasio keuangan selama tahun 2019-2020

Tabel 3.3

Analisis Rasio Keuangan Kota Kotamobagu tahun 2019-2020

RASIO	Tahun	
	2019	2020
RASIO LIKUIDITAS		
RASIO LANCAR	1,93	2,50
RASIO QUICK *(quick ratio)*	1,69	2,08
RASIO SOLVABILITAS		
RASIO TOTAL HUTANG TERHADAP TOTAL ASET	0,52	0,40
RASIO HUTANG TERHADAP MODAL	0,02	0,02

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio*, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai *Current Ratio* artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sebesar 2,50.
2. *Quick Ratio*, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih ikuid, dimana nilai yang baik

berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel diatas, tahun 2020 sebesar 2,08.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam emenuhi kewajibankewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2020 sebesar 0,40
2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur Tahun 2020 sebesar 0,02

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Kotamboagu Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	2019	2020	PROPORSI RATA-RATA
	TOTAL BELANJA	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1	**BELANJA OPERASI**	**82,69%**	**80,38%**	**81,54%**
1.1	Belanja Pegawai	37,92%	37,59%	37,76%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,80%	41,29%	40,55%
1,3	Belanja Hibah	2,79%	0,50%	1,64%
1,4	Belanja Bantuan Sosial	2,18%	1,00%	1,59%
2	**BELANJA MODAL**	**17,31%**	**17,07%**	**17,19%**
2.1	Belanja Modal Tanah	0,08%	0,01%	0,04%
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,42%	11,03%	8,72%
2,3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,77%	2,94%	3,86%
2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,56%	2,94%	4,25%
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,48%	0,15%	0,32%
3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**0,00%**	**2,55%**	**1,28%**
3.1	Belanja Tak Terduga	0,00%	2,55%	1,28%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2019	233.668.418.740,00	616.180.452.114,11	37,92%
2	Tahun anggaran 2020	227.964.218.914,00	606.404.845.816,41	37,59%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun, tahun 2019 sebesar 37,92 persen, tahun 2020 sebesar 37,59 persen.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Defisit Rill Anggaran Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	695.477.267.322,08	639.869.956.745,75
	Dikurangi realisasi:		
2	Belanja Daerah	616.180.452.114,11	606.404.845.816,41
3	Transfer	66.343.372.250,00	47.573.689.100,00
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
A	Defisit riil	12.953.442.957,97	-14.108.578.170,66
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	21.677.296.648,00	34.630.683.258,97
B	Dikurangi :		
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00
C	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.677.296.648,00	34.630.683.258,97

NO	Uraian	2019	2020
A+C	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	34.630.739.605,97	20.522.105.088,31

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3.7

Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Kotamobagu

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil	
		2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	21.677.296.648	20.522.105.088
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2019 hingga 2020.

Tabel 3.8

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Kotamobagu

No.	Uraian	2019	2020
		Rp	Rp
1	Jumlah SiLPA	34.630.739.606	20.522.105.088
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tahun 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Bertujuan untuk menguraikan proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi data.

Seperti kebanyakan daerah lainnya di Indonesia, dimana Kota Kotamobagu sumber penerimaan daerah sangat tergantung dari dana transfer TKDD dari pemerintah. Realita seperti ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Kotamobagu, menyiapkan strategi tersendiri sesuai dengan kondisi daerah menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan OPD yang mengelola sumber pendapatan dan manajemen alokasi penggunaan dana, perbaikan dan peningkatan system pengelolaan sumber-sumber pendapatan Kotamobagu, serta penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian, andal, dan kridibel. Menyiapkan SDM handal pada bidang tata kelola keuangan kota memerlukan waktu relatif panjang.

Pada tabel dibawah digambarkan tentang realisasi pendapatan Kota Kotamobagu 2019-2020 dan proyeksi 2021-2023, yang telah dilewati dan diperkirakan dapat direalisasikan dimasa datang sampai tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu ditargetkan mencapai titik tertinggi pada tahun 2021, dimana diasumsikan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu relatif sama walaupun dimasa terjadinya pandemic Covid-19.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan Pemerintah Kota Kotamobagu menjelaskan tentang kapasitas fiscal Kota Kotamobagu. Semakin besar share dari PAD terhadap total penerimaan Pemkot, menjelaskan tentang kapasitas keuangan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota yang dibayar oleh masyarakat terus meningkat. Kenyataan tersebut merefleksikan tentang kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat dan membangun fasilitas dan proyek fisik untuk kebutuhan masyarakat. Lebih jelasnya terkait realisasi pendapatan dan belanja tahun 2019-2020 dan proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 dan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2023 Kota Kotamobagu

NO		Pertumbuhan %	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
4	**PENDAPATAN**	**-0,20%**	**695.477.267.322,08**	**639.869.956.745,75**	**620.065.154.549,00**	**687.569.683.880,00**	**689.929.474.760,00**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6,38%**	**64.290.644.909,08**	**73.260.121.783,35**	**82.343.546.826,00**	**82.343.546.826,00**	**82.343.546.826,00**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	-0,07%	20.438.853.849,00	18.431.840.673,00	20.379.917.598,00	20.379.917.598,00	20.379.917.598,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	14,31%	29.971.555.055,05	45.056.500.525,00	51.165.243.228,00	51.165.243.228,00	51.165.243.228,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-1,91%	1.620.502.125,00	915.577.443,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	-6,68%	12.259.733.880,03	8.856.203.142,35	9.298.386.000,00	9.298.386.000,00	9.298.386.000,00
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**-0,36%**	**602.890.637.838,00**	**523.105.133.297,00**	**524.451.607.723,00**	**591.956.137.054,00**	**594.315.927.934,00**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-0,38%	535.462.470.767,00	470.995.419.846,00	461.956.275.000,00	525.081.094.032,00	527.440.884.912,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak	-100,00%	7.215.876.872,00	10.462.345.133,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00%	7.742.896.607,00	5.011.825.621,00	15.682.619.000,00	18.143.887.000,00	19.209.534.840,10
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,66%	397.656.494.000,00	359.457.903.000,00	364.720.632.000,00	406.474.511.566,44	408.337.597.896,72
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-12,12%	87.491.481.672,00	56.243.049.493,00	42.598.361.000,00	52.946.380.388,31	52.178.446.709,75
4 . 2 . 1 . 5	DAK Non Fisik	7,78%	35.355.721.616,00	39.820.296.599,00	38.954.663.000,00	47.516.315.077,26	47.715.305.465,43

NO		Pertumbuhan %	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-4,77%	46.701.634.000,00	43.895.205.000,00	34.026.548.000,00	38.406.258.299,00	38.406.258.299,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian	-4,77%	46.701.634.000,00	43.895.205.000,00	34.026.548.000,00	38.406.258.299,00	38.406.258.299,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8,26%	20.726.533.071,00	8.214.508.451,00	28.468.784.723,00	28.468.784.723,00	28.468.784.723,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	8,26%	20.726.533.071,00	8.214.508.451,00	28.468.784.723,00	28.468.784.723,00	28.468.784.723,00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**-17,25%**	**28.295.984.575,00**	**43.504.701.665,40**	**13.270.000.000,00**	**13.270.000.000,00**	**13.270.000.000,00**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	-13,20%	23.375.318.000,00	37.253.175.341,40	13.270.000.000,00	13.270.000.000,00	13.270.000.000,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya	-100,00%	4.920.666.575,00	6.251.526.324,00	0,00	0,00	0,00
5	**BELANJA**	**3,42%**	**616.180.452.114,11**	**606.404.845.816,41**	**638.065.154.549,00**	**702.569.683.880,00**	**704.929.474.760,00**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**2,48%**	**509.538.930.490,36**	**487.417.615.402,11**	**495.053.960.351,00**	**537.747.875.642,00**	**561.918.280.562,00**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2,97%	233.668.418.740,00	227.964.218.914,00	255.231.855.808,00	255.231.855.808,00	262.639.555.726,71
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3,89%	245.241.705.836,36	250.389.559.988,11	227.016.310.843,00	269.710.226.134,00	285.713.116.728,21
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	-20,79%	17.171.805.914,00	3.017.886.500,00	6.381.279.700,00	6.381.279.700,00	6.759.904.279,25
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	-15,67%	13.457.000.000,00	6.045.950.000,00	6.424.514.000,00	6.424.514.000,00	6.805.703.827,83
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**-8,21%**	**106.641.521.623,75**	**103.502.462.900,30**	**75.701.791.598,00**	**96.562.405.638,00**	**75.701.791.598,00**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	-100,00%	478.671.898,00	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00

NO		Pertumbuhan %	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-11,22%	39.536.159.874,80	66.877.024.039,40	20.531.068.113,00	31.331.068.113,00	24.562.540.392,01
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,61%	29.412.806.295,95	17.826.307.655,00	29.999.214.308,00	39.999.214.308,00	31.358.085.640,28
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-13,59%	34.238.193.905,00	17.817.058.905,90	24.351.734.077,00	24.351.734.077,00	19.090.969.057,44
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-30,60%	2.975.689.650,00	938.622.300,00	819.775.100,00	880.389.140,00	690.196.508,27
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-23,51%**	0,00	**15.484.767.514,00**	**5.300.000.000,00**	**6.250.000.000,00**	**5.300.000.000,00**
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	-23,51%	0,00	15.484.767.514,00	5.300.000.000,00	6.250.000.000,00	5.300.000.000,00
6	**TRANSFER**	**-1,67%**	**66.343.372.250,00**	**47.573.689.100,00**	**62.009.402.600,00**	**62.009.402.600,00**	**62.009.402.600,00**
6 . 1	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**-15,83%**	**1.300.000.000,00**	**521.387.500,00**	**652.447.500,00**	**652.447.500,00**	**652.447.500,00**
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-3,68%	500.000.000,00	200.533.750,00	430.341.300,00	430.341.300,00	430.341.300,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-27,41%	800.000.000,00	320.853.750,00	222.106.200,00	222.106.200,00	222.106.200,00
6 . 2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**-1,45%**	**65.043.372.250,00**	**47.052.301.600,00**	**61.356.955.100,00**	**61.356.955.100,00**	**61.356.955.100,00**
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00%	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-0,43%	62.416.064.500,00	47.052.301.600,00	61.356.955.100,00	61.356.955.100,00	61.356.955.100,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		627.307.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO		Pertumbuhan %	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
7	**PEMBIAYAAN**						
7 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-8,79%**	**21.677.296.648,00**	**34.630.683.258,97**	**18.000.000.000**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	-8,79%	21.677.296.648,00	34.630.683.258,97	18.000.000.000	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**-8,79%**	**21.677.296.648,00**	**34.630.683.258,97**	**18.000.000.000**	**15.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**34.630.739.605,97**	**20.522.105.088,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: APBD, Data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Kotamobagu 2018-2023

NO	URAIAN	Realisasi		Proyeksi		
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan	695.477.267.322,08	639.869.956.745,75	620.065.154.549,00	687.569.683.880,00	689.929.474.760,00
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3.	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	21.677.296.648,00	34.630.683.258,97	18.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Total Penerimaan	**717.154.563.970,08**	**674.500.640.004,72**	**620.065.154.549,00**	**702.569.683.880,00**	**704.929.474.760,00**
	Dikurangi					
1	Belanja Pegawai	233.668.418.740,00	227.964.218.914,00	255.231.855.808,00	255.231.855.808,00	262.639.555.726,71
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	483.486.145.230,08	446.536.421.090,72	364.833.298.741,00	447.337.828.072,00	442.289.919.033,29

Sumber: APBD, Data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja dengan proyeksi sebagai berikut.

1. **Prioritas I,** dialokasikan untuk pendanaan:
    a. **Program** prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
    b. **Program** prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

2. **Prioritas II,** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja seperti: tambahan penghasilan ASN, dan bantuan keuangan dan pemerintahan desa

Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi dan Kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Kapasitas riil kemapuan keuangan**	**483.486.145.230,08**	**446.536.421.090,72**	**364.833.298.741,00**	**447.337.828.072,00**	**442.289.919.033,29**
2	**Prioritas I**	**373.938.712.317,41**	**355.758.671.328,05**	**254.746.818.870,00**	**341.529.189.356,00**	**336.481.280.317,29**
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah	330.039.906.403,41	317.940.067.314,05	223.371.025.170,00	309.203.395.656,00	304.345.672.210,21
	Bantuan Hibah	30.441.805.914,00	16.287.886.500,00	19.651.279.700,00	19.651.279.700,00	20.029.904.279,25
	Bantuan Sosial	13.457.000.000,00	6.045.950.000,00	6.424.514.000,00	6.424.514.000,00	6.805.703.827,83
	Bantuan Tidak Terduga	0,00	15.484.767.514,00	5.300.000.000,00	6.250.000.000,00	5.300.000.000,00
3	**Prioritas II**	**109.547.432.912,67**	**90.777.749.762,67**	**110.086.479.871,00**	**105.808.638.716,00**	**105.808.638.716,00**
	Tambahan Penghasilan	43.204.060.662,67	43.204.060.662,67	48.077.077.271,00	43.799.236.116,00	43.799.236.116,00

NO	URAIAN	REALISASI		PROYEKSI		
		2019	2020	2021	2022	2023
	Bantuan Kepada Desa/lainnya	66.343.372.250,00	47.573.689.100,00	62.009.402.600,00	62.009.402.600,00	62.009.402.600,00

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Kota Kotamobagu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan, dan pembangunan kota terus dilanjutkan, semakin baik sesuai dengan harapan masyarakat kota, yang ditunjukan dengan semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Kotamobagu tetap menghadapi banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal, meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur dasar wilayah, daya dukung lingkungan, sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

4.1.1. Permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pada bagian ini dirumuskan berdasarkan telaahan capaian sasaran pokok RPJPD Kota Kotamobagu periode RPJMD sebelumnya, yang disinergikan dengan *platform kebijakan* atau janji politik Walikota dan Wakil WaliKota Kotamobagu kurun waktu

2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis dirumuskan permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah, meliputi:

4.1.1.1. Sistem Transportasi

Pembangunan transportasi di Kota Kotamobagu masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang belum mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan serta kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas.

Sistem dan jaringan transportasi multimoda belum optimal sehingga menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus belum optimal dikarenakan belum rampungnya infrastruktur penunjang.

Ketersediaan prasarana jalan lingkar (*RingRoad*) belum ada dalam tahap perencanaan, hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pusat kota dan luar kota menggunakan jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan yang dilewatinya.

Rendahnya tingkat kedisplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidakdisiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang

tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalulintas.

Selain itu, kondisi jalan di Kota Kotamobagu juga belum sepenuhnya baik. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat di Kota Kotamobagu. Hal ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah, karena jalan merupakan salah satu sarana prasarana fisik vital yang berpengaruh terhadap perekonomian kawasan.

4.1.1.2. Banjir dan Genangan

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Kotamobagu. Berdasarkan faktor penyebabnya, banjir yang terjadi di Kota Kotamobagu disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman. Bencana banjir terjadi apabila faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi, ini biasa mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi bagi warga Kota Kotamobagu.

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai yang mengalir ke Kota Kotamobagu. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran sungai meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain

itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Kotamobagu terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Beberapa bagian wilayah Kota Kotamobagu menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada daerah aliran sungai. Sebagaimana diketahui, terdapat 10 aliran sungai yang melewati Kotamobagu. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, bahwa Kota Kotamobagu sebagai daerah yang menjadi lintasan begitu banyak sungai, harus dapat melaksanakan pembangunannya dengan pendekatan yang ramah sungai. Dengan demikian aliran sungai tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan warga di saat tertentu.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan ancaman banjir adalah perilaku masyarakat yang belum tertib untuk tidak membuang sampah ke selokan/saluran air di Kota Kotamobagu, yang menjadi salah satu penyebab utama terganggunya aliran air di sungai dan saluran, serta kemudian menimbulkan genangan dan luapan air berlebih ke jalan dan permukiman warga.

4.1.1.3. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Kotamobagu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru.

4.1.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di Kota Kotamobagu masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di Kota Kotamobagu meliputi penyediaan dan penyebaran kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.

Peningkatan penyediaan RTH publik menghadapi masalah terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik mereka. Peran serta masyarakat dalam peningkatan RTH diwujudkan dalam pengembangan tajuk hijau terutama melalui penghijauan lingkungan dan bangunan. Permasalahan lain adalah belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah Kota Kotamobagu.

Selanjutnya untuk waktu ke depan pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu harus dapat mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai serta jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, gedung perkantoran, hotel, dan fasilitas publik. Di samping itu, diperlukan upaya identifikasi

ruang dan kawasan yang dapat difungsikan kembali dan berpotensi sebagai RTH serta upaya membebaskan lahan milik publik secara bertahap untuk dimanfaatkan sebagai RTH.

4.1.1.5. Kemiskinan Kota

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Kotamobagu. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

4.1.1.6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Kotamboagu sudah melakukan berbagai program dalam rangka

reformasi birokrasi, antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Aparatur Sipil Negar (ASN), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*), penyederhanaan sistem perizinan dan non-perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "*merit system*".

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (*mind set*) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antara lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

4.1.1.7. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kota Kotamobagu di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Kotamobagu dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

4.1.1.8. Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan, antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Penyelenggaraan kesehatan di Kota Kotamobagu dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi

warga Kota Kotamobagu khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawatdaruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran pelayanan kesehatan di Kota Kotamobagu adalah angka kematian bayi dalam 1000 kelahiran. Di Tahun 2017, angka kematian bayi tersebut mencapai 5 kematian, sedangkan di Tahun 2020 dapat diturunkan hingga menjadi 3 kematian. Di masa depan, diharapkan angka ini terus menurun hingga mencapai 0 kematian bayi.

4.1.1.9. Penataan Ruang

RTRW 2014-2034 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.

4.1.1.10. Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Kotamobagu merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat Kota Kotamobagu menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan

masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman, tentram dan tertib.

4.1.1.11. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi secara global memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan kelompok masyarakat miskin perkotaan. Faktor lain yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan Kota Kotamobagu adalah jumlah dan kepadatan penduduk serta persentase masyarakat miskin kota.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Kota Kotamobagu antara lain banjir dan kekeringan. Dampak lainnya adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumber daya lahan, serta terganggunya ketahanan pangan dan pada gilirannya akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah kemiskinan. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

4.1.1.12. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Kotamobagu, yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya timbulan sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat

pemrosesan akhir. Peningkatan timbulan sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma "membuang sampah" belum pada "mengolah sampah dari sumbernya". Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana. Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan *septic tank* yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana, penggunaan *septic tank* sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisikan tentang penggunaan *septic tank* yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit. Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

4.1.1.13. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring

dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih; ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah; iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah (*land subsidence*). Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup rumah tangga di Kota Kotamobagu, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air tanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.

4.1.1.14. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Kota Kotamobagu bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu yang berkelanjutan.

4.1.1.15. Stabilitas Ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Kotamobagu) seperti: sektor keuangan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan, sector pertanian dansektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sedangkan untuk nilai tukar dalam peranannya terhadap stabilitas ekonomi cenderung mengikuti dinamisasi dampak dari kebijakan Pemerintah melalui peran Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk Kondisi laju inflasi Kota Kotamobagu berada pada angka 3.83 pada tahun 2018. Kondisi ini meningkat 1.39 poin pada angka 2.44 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas makanan dan non makanan yang cenderung naik karena stok komoditas yang terbatas, cuaca yang tidak mendukung, maupun *event* hari besar keagamaan. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.

4.1.1.16. Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Kotamobagu diantaranya adalah belum maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu meskipun sudah banyak pembenahan di segala sektor, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh OPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah

mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

4.1.1.17. Perdagangan dan Jasa

Kota Kotamobagu sebagai kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota lain. Untuk mewujudkan fungsi kota jasa tersebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna menghadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar Kota terutama dalam menghadapi regionalisasi ekonomi. Dengan persiapan yang mantap maka kinerja Kota Kotamobagu dapat berkompetisi dalam konteks menghadapi AFTA (*Asean Free Trade Area*), ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*), dan kelompok perdagangan internasional lainnya. Untuk itu diperlukan persiapan secara terencana dan sistematis agar produk Kota Kotamobagu dapat berkompetisi dengan produk nasional maupun internasional, sehingga membanjirnya produk yang berasal dari luar di Kota Kotamobagu dapat diantisipasi secara profesional.

Posisi strategis Kota Kotamobagu terhadap perekonomian nasional dan internasional membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa keuangan dan jasa lainnya berskala nasional dan intenasional. Di masa yang akan datang, Kota Kotamobagu dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan SDA dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan.

4.1.1.18. Keuangan Daerah

Pembangunan Kota Kotamobagu perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.

Selain itu, Kota Kotamobagu sebagai calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan daerah lain. Sejalan dengan hal ini, Kota Kotamobagu harus mampu menyediakan prasarana dan sarana khusus yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kaitannya dengan hal ini maka permasalahannya adalah meningkatkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan dalam kerangka Kota Kotamobagu sebagai calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari desa, kelurahan dan kecamatan. Selain itu, peningkatan profesionalitas seluruh pegawai Pemerintah Kota Kotamboagu juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan Kota Kotamobagu menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan.

4.1.1.19. Kerjasama Antar Daerah

Pembangunan Kota Kotamobagu sangat terkait pemanfaatan sumber daya dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan

kerjasama antar daerah untuk menangani masalah yang bersifat regional seperti pengelolaan sampah, transportasi, polusi dan banjir. Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Bolaang Mongondow Raya. Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air bersih masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.

Dalam rangka kerjasama antar daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya maka perlu dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kerjasama antar Kabupaten/kota di dalamnya.

4.1.2. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan pemerintah daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa- masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Analisis permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan mengidentifikasi kinerja masing-masing urusan, dan relevansinya dengan kebijakan periode rencana. Dari hasil analisis diperoleh gambaran permasalahan umum terkait penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a) Terbatasan akses kelembagaan dan sarana prasarana PAUD;

b) Relatif rendahnya partisipasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang Pendidikan (dewan Pendidikan, Yayasan, komite, pemerintah, swasta, masyarakat);

c) Pemenuhan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus *(difabel);*

d) Belum tersedianya Universitas Negeri Kota Kotamobagu;

e) Masih kurangnya fasilitas Pendidikan berbasis teknologi informasi dan Pendidikan kearifan lokal;

2. Urusan Kesehatan

a) Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan

b) Masih tingginya jumlah kasus penyakit-penyakit menular dan tidak menular (HIV/AIDS, TB Paru, Gizi Buruk dan DBD)

c) Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat

d) Ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan reagensia laboratorium yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah kunjungan pasien

e) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan relatif rendah.

f) Pelayanan Puskesmas yang belum Optimal

g) Kurangnya ketersediaan Dokter Ahli

h) RSUD Kota Kotamobagu belum berstandar ISO 9001:2015

i) Kekurangan Ruang Isolasi pada saat kenaikan jumlah

kasus Covid-19

j) Belum ada alat PCR masih sehingga hasil pengambilan sampel di kirim ke BTKL manado, waktu tunggu hasil juga masih agak lama karena antri

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Belum adanya Konektifitas Jalan Lingkar *(ringroad)* antar wilayah tetangga

b) Integrasi Infrastruktur, Sarana Prasarana Publik, Penataan Bangunan dan Lingkungannya belum sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Kotamobagu

c) Belum adanya konsep pengembangan antar wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interaksi yang saling mendukung

d) Belum memadainya sistem drainase perkotaan

e) Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi

f) Penegakan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang belum optimal dilaksanakan

g) Masih kurangnya pemanfaatan ruang terbuka hijau

h) Masih adanya kondisi jalan yang mangalami kerusakan ringan sedang dan berat tersebar di wilayah Kota Kotamobagu

i) Belum Optimalnya Pemanfaatan Dokumen RDTR sebagai acuan dalam pembangunan wilayah

j) Perda RTRW tidak relevan lagi dengan kondisi Kota Kotamobagu

k) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kotamobagu

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat

b) Masih adanya kawasan kumuh perkotaan

c) Rendahnya akses infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, jamban)
d) Ketersediaan basis data perumahan yang akurat dan komprehensif
e) Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan
f) Kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
g) Belum adanya pemerataan pemasangan Penerangan Jalan Umum
h) Belum adanya penyediaan rehabilitasi dan falitasi RLH bagi warga yang terdampak program pemerintah

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

a) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana pada OPD belum memadai
b) Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal
c) Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
d) Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam.

6. Urusan Perhubungan

a) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan baik kuantitas maupun kualitasnya
b) Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas para pemakai jalan dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan angkutan
c) Belum terpenuhinya standar keselamatan alat transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat

d) Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan dan pengemudi melakukan pengujian kendaraan secara berkala.
e) Sistem transportasi antar wilayah belum tertata dengan baik

7. Urusan Lingkungan Hidup

a) Belum semua sungai yang ditetapkan status baku mutu lingkungannya
b) Menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan masih adanya pembangunan pemukiman di kawasana daerah aliran sungai
c) Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah
d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

8. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan
b) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Tingginya pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja
b) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam bidang

pembangunan, politik dan pemerintahan

c) Masih adanya tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas tenaga penyuluh KB dan KS (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)
b) Rendahnya peserta KB aktif dan KB mandiri
c) Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB, di tengah kecenderungan semakin meningkatnya jumlah PUS

11. Urusan Sosial

a) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
b) Kurang terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor
c) Belum tersediannya fasilitas penanganan PMKS yang resepresentatif

12. Urusan Ketenagakerjaan

a) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah.
b) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
c) Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja.
d) Belum optimalnya tingkat pengangguran terbuka
e) Kurangnya SDM yang berkualitas, terampil dan kreatif

13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi

b) Rendahnya sumberdaya kelembagaan koperasi dan akses pasar
c) Masih adanya koperasi tidak aktif dan belum berbadan hukum
d) Kurang optimalnya kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya
e) Rendahnya minat kewirausahaan dan pengembangan mutu produk UMKM
f) Terbatasnya sarana dan prasarana UMKM.

14. Urusan Penanaman Modal

a) Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata
b) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya
c) Jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha
d) Belum optimalnya penerapan Community Development (CD) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha
e) Belum adanya perda yang mengatur tentang investasi di Kota Kotamobagu
f) Daya dukung peluang-peluang investasi, terutama kesiapan lahan belum memadai.

15. Urusan Kebudayaan

a) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
b) Belum optimalnya pendayagunaan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat

c) Data-data bidang kebudayaan belum terinventarisasi secara akurat dan lengkap
d) Belum tersedianya informasi terkait kalender budaya tentang upacara - upacara adat yang diselenggarakan di perkampungan adat.
e) Kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya
f) Kurangnya promosi, *event* - *event* kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelesatarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
g) Belum optimalnya keragaman seni dan budaya

16. Urusan Pariwisata

a) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh *stakeholder* di bidang pariwisata secara holistik
b) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan yang menjadi ikon Kota Kotamobagu
c) Minimnya promosi pariwisata.

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga
b) Terbatasnya akses untuk menyalurkan minat, bakat dan kreatifitas generasi muda
c) Pembinaan organisasi kepemudaan masih terbatas.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a) Pendidikan politik masyarakat masih rendah
b) Masih terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (sengketa tanah, perkelahian, penganiyaan, kenakalan remaja, prostitusi, kumpul kebo, miras, dan pencurian)

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a) Masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antar organisasi perangkat daerah (OPD)
b) Belum semua desa/kelurahan menyelesaikan perselisian batas wilayah administrasi desa/kelurahan
c) Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur
d) Belum semua aset daerah (bergerak dan tidak bergerak) didata dan memiliki legalitas
e) Sistem pembinaan jenjang karir ASN belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan
f) Masih ada Perda yang belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya.
g) Kerjasama kemitraan dan jejaring kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan belum optimal
h) Belum optimalnya pelayanan publik di semua lini
i) Lemahnya penegakan supremasi hukum
j) Masih perlunya peningkatan kualitas APIP dalam melakukan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta

perubahannya melalui kegiatan review dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin.

k) Masih perlunya penguatan pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, review laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.

l) Perlunya peningkatan pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

m) Masih perlunya peningkatan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelanggaran pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

n) Perlunya peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019,

melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengeloalaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan.

o) Masih belum optimalnya pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

p) Perlunya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

q) Perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah tentang penggunaan dana kelurahan dan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa

b) Kapasitas sumber daya aparatur lembaga kemasyarakatan desa yang masih terbatas

c) Belum optimal kemitraan antar lembaga dan masyarakat di tingkat desa

d) Menurunnya modal sosial, budaya gotong royong, di tingkat masyarakat Desa
e) Belum Optimalnya Pemanfaatan DD dan ADD
f) Perlu adanya kajian peralihan status dari desa menjadi kelurahan

21. Urusan Komunikasi dan Informatika

a) Belum semua OPD memiliki sistem pendataan yang baik dan akurat
b) Belum ada sinkronisasi data antara OPD dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan bank data dalam perumusan kebijakan pembangunan
c) Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan belum optimal;
d) Pemanfaatan IPTEK dan TI di masyarakat masih kurang
e) Pemerataan akses internet gratis bagi masyarakat belum optimal
f) Pengendalian dan integrasi aplikasi pemerintah belum optimal
g) Pengembangan pelayanan public administrasi yang berbasis TI dan Komunikasi belum optimal

22. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

a) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan
b) Rendahnya minat baca masyarakat di perpustakaan
c) Terbatasnya ketersediaan perpustakaan dan bahan bacaan di Perpustakaan Desa/Kelurahan
d) Pengelolaan kearsipan di masing-masing OPD belum optimal
e) Kurangnya tenaga arsiparis di masing-masing OPD.

f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip secara Digital

23. Urusan Pertanian dan Perikanan

a) Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat;
b) Belum optimalnya pembangunan pertanian berbasis kawasan.
c) Belum optimalnya kelembagaan produksi dan pemasaran hasil perikanan
d) Terbatasnya akses pembudidaya terhadap permodalan
e) Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dibandingkan ketersediaan potensi lestarinya
f) Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
g) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian
h) Belum optimalnya penggunaan RPH
i) Masih terbatasnya tenaga penyuluh baik kuantitas dan kualitas (kompetensi penyuluh)
j) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Petani

24. Urusan Perdagangan

a) Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan/distribusi
b) Belum optimalnya kegiatan promosi komoditi perdagangan
c) Kurangnya akses sistem jaringan informasi perdagangan
d) Masih banyaknya pelanggaran dalam aktivitas perdagangan.

e) Perlindungan Konsumen belum optimal

25. Urusan Perindustrian

a) Masih rendahnya jumlah dan kompetensi aparatur dan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah
b) Rendahnya nilai tambah hasil produksi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan
c) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah
d) Penguasaan teknologi masih rendah

26. Pertanahan

a) Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan masih terdapat banyak penolakan dari masyarakat
b) Pengadaan tanah masih belum menggunakan harga NJOP terbaru

27. Urusan Ketahanan Pangan

a) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna harus lebih ditingkatkan
b) Pola Konsumsi Masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
c) Stabilitas harga masih fluktuatif

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Nasional dan Internasional

Dalam memetakan isu-isu strategis selain didasarkan kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah, juga harus dipetakan permasalahan dari analisis lingkungan eksternal yaitu permasalahan dari dunia internasional, kebijakan nasional serta kebijakan regional. Di samping itu analisis lingkungan eksternal ini harus mampu menciptakan peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

4.2.1.1. Kebijakan Nasional

4.2.1.1.1. Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Kota Kotamobagu merupakan bagian dari Wilayah Sulawesi. Berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah sasaran pengembangan di Wilayah Sulawesi yang meliputi:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan

memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 5 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 14 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 8,65 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,81 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,69.

3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi serta 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu.

4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya pengangguran dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.

5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 48 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (13)Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya system monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Sulawesi.

8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 24 kabupaten/kota sasaran (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makasar, Kota Palu, Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Terkait dengan sasaran pengembangan wilayah Sulawesi diatas, disusunlah sasaran pembangunan per provinsi yang terdapat di wilayah Sulawesi. Untuk sasaran pembangunan wilayah Sulawesi Utara, sebagaimana Kota Kotamobagu menjadi bagian di dalamnya, adalah sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi	7,1	7,2	7,8	7,8	8,3
Tingkat Kemiskinan	7,1	6,6	6,1	5,6	5,1
Tingkat Pengangguran	7,2	7,0	6,7	6,5	6,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2.1.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang disarikan menjadi Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Trisakti tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2018.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional (2015-2018) difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, dan kesembilan. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Terkait dengan potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi, maka Tema Pembangunan Wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

4.2.1.1.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 6 (enam) bidang SPM yakni:

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat; dan
6) Sosial.

Adapun rincian indikator pencapaian untuk setiap jenis pelayanan dasar menurut Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

   Jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian terdiri atas:

   1) **pendidikan anak usia dini** dengan indikator: jumlah Warga Negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
   2) **pendidikan dasar** dengan indikator: jumlah Warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
   3) **pendidikan kesetaraan** dengan indikator: jumlah Warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan

   Jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian terdiri atas:

   1) **Pelayanan kesehatan Ibu hamil** dengan indikator: Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2) **Pelayanan kesehatan Ibu bersalin** dengan indikator: Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
3) **Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir** dengan indikator: Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4) **Pelayanan kesehatan Balita** dengan indikator: Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
5) **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar** dengan indikator: Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
6) **Pelayanan kesehatan pada usia produktif** dengan indikator: Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
7) **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut** dengan indikator: Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
8) **Pelayanan kesehatan penderita hipertensi** dengan indikator: Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
9) **Pelayanan kesehatan penderita diabeter melitus** dengan indikator: Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
10) **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** dengan indikator: Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
11) **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** dengan indikator: Jumlah Warga Negara terduka tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
12) **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)** dengan indikator:

Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian terdiri atas:

1) **Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari** dengan indikator: Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari.
2) **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik** dengan indikator: Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian terdiri atas:

1) **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana** dengan indikator: Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2) **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota** dengan indikator: Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

e. Indikator capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian terdiri atas:

1) **Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum** dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.

2) **Pelayanan Informasi rawan bencana** dengan indikator: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana.
3) **Pelayanan pencegarah dan kesiapsiagaan terhadap bencana** dengan indikator: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
4) **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** dengan indikator: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5) **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** dengan indikator: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Sosial

Jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian terdiri atas:

1) **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar** di luar panti dengan indikator: Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitaso sosial di luar panti.
2) **Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti** dengan indikator: Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3) **Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti** dengan indikator: Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4) **Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan** indikator: Jumlah Warga Negara/gelandangan dan

pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5) **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kota** dengan indikator: Jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4.2.1.2. Isu Internasional

4.2.1.2.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goals (tujuan), 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Agenda pasca SDGs 2015 akan diputuskan pada sidang umum PBB yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara pada Bulan September 2015. Oleh karenanya isu berkenaan dengan hal tersebut harus sudah dijadikan perhatian oleh Kota Kotamobagu.

Adapun tujuan-tujuan dari SDGs adalah sebagai berikut:

1) Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat;
2) Tanpa kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
3) Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia;
4) Pendidikan berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5) Kesetaraan gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan;
6) Air bersih dan sanitasi layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua;
7) Energi bersih dan terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9) Industri, inovasi dan infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10) Berkurangnya kesenjangan: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara;
11) Kota dan komunitas berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan;
12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;

13) Penanganan perubahan iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
14) Ekosistem laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
15) Ekosistem daratan: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif;
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan;

4.2.1.3 Isu di Tingkat Provinsi

Dalam perencanaan wilayah di tingkat provinsi, Kota Kotamobagu merupakan bagian dari wilayah Klaster Bolaang Mongondow Raya yang meliputi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Utara 2021-2026 diterapkan ke seluruh wilayah klaster diarahkan untuk memperkuat dan mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia dengan memanfaatkan peluang pasar global/internasional di Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Philippines), dan wilayah Pasifik, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur bagian utara; mengembangkan industri logistik, industri berbasis perikanan dan kelapa dan sawit; mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan padi, jagung, kelapa, dan ikan; serta akselerasi dan penguatan ekonomi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya

perikanan, kelapa, berbasis industri pengolahan perikanan, produk turunan kelapa, dan industri pariwisata bahari.

Kondisi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam relatif beragam dan tinggi, juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara. Dimana kebijakan pembangunan daerah wajib memperhatikan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

Perencanaan pembangunan kabupaten/kota dalam Klaster Bolaang Mongondow Raya perlu selaras dengan strategi pembangunan wilayah Sulawesi Utara yang diprioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas (laut, darat, dan udara), mitigasi dan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan otonomi daerah serta penerapan *green economy* sebagai berikut;

(1) Peningkatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar publik, antara lain; (a) peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Vocational Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata; (b) percepatan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, dan daerah relatif lambat akselerasi pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis komoditi unggulan daerah yang memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapan terhadap resiko bencana alam; (c) pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola di kecamatan perbatasan dan kecamatan kepulauan; (d) penguatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi ekonomi desa, sosial, budaya; dan (e) pembangunan afirmasi pada daerah lambat perkembangan pembangunan dan daerah kepulauan dan perbatasan.

(2) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom, termasuk wilayah pengembangan industri pengolahan, industri pariwisata, dan pengembangan wilayah kepulauan;

(3) Penguatan konektivitas dilakukan melalui: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara, yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;

(4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten kepulauan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;

(6) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus

pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

(7) Penerapan ekonomi hijau pada beberapa sector ekonomi. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati serta mengutamakan keadilan sosial. Arahan penerapan *green economy* untuk Kota Kotamobagu adalah pada sector pertanian, energi, lapangan kerja ramah lingkungan, industry dan kota hijau mencakup:

a. Sector pertanian: memelihara dan meningkatkan produktivitas usaha tani, sekaligus menjamin ketersediaan pangan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan, mengurangi eksternalitas negative dan secara bertahap meningkatkan eksternalitas positif yang dapat menularkan kesejahteraan pada masyarakat, membangun dan memulihkan kekayaan (sumberdaya ekologis) dengan cara mengurangi polusi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, merestorasi dan meningkatkan kesuburan lahan melalui peningkatan penggunaan input alami, perubahan pola tanah dan terpadu dengan ternak, mengurangi erosi lahan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan cara menerapkan teknologi minimum tillage dan Teknik budidaya tanaman penutup, pengurangan penggunaan pestisida dan herbisida kimia melalui penerapan pengendalian hama penyakit secara terpadu serta mengurangi kehilangan hasil

produksi dengan cara perbaikan teknologi pengelolaan pasca panen.

b. Sector energi: konservasi dan efisiensi energi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan lewat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (Hidro), pengemb angan PLT skala kecil berbasis energi baru terbarukan (berbasis tenaga air, sinar matahari dan angin), pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai pengganti BBM, pengembangan dan pemanfaatan limbah yang diolah menjadi sumber energi (waste to energy), pengembangan desa mandiri energi.
c. Lapangan kerja ramah lingkungan/hijau (green jobs): perubahan dari perekonomian ke perekonomian hijau akan mengurangi pekerjaan pada sector/kegiatan yang tidak ramah lingkungan berkelanjutan tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, tergantikannya Sebagian pekerjaan dengan pekerjaan baru, transformasi profesi karena kriteria/kompetensi baru sudah menggunakan metode kerja "hijau/ramah lingkungan". Green jobs dapat berkembang di 8 sektor kunci ekonomi hijau yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, energi, manufaktur, daur ulang, property dan transportasi.
d. Sector industry: Menyusun rencana induk pengembangan industry hijau, konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sector industry, penggunaan mesin ramah lingkungan, menyiapkan standar industri hijau, menyiapkan Lembaga sertifikasi industry hijau, menyiapkan insentif bagi industry hijau, penerapan produksi bersih, penyusunan katalog material input ramah lingkungan, pengembangan sector industry unggulan berbasis teknologi tinggi

e. Perkotaan hijau/berkelanjutan: penerapan 8 atribut kota hijau yaitu perencanaan dan rancangan kota hijau (green planning), ruang terbuka (green space), pembuangan limbah (green waste), alat transportasi (green transportation), air bersih (green water), sumber energi (green energy), bangunan (green building) dan masyarakat peduli lingkungan (green community).

Strategi pembangunan klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
   a. peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal;
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan;
   e. percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.

2. Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
   b. pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
   c. pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
   d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
   e. pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan;
   f. pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan *Dry Port (DP)*;
   g. pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
   h. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
   i. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
3. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat

pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;

c. percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;

d. peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir

4. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
   b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
6. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (*mangrove*);
7. Pembangunan desa terpadu yang mencakup:
   a. peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;

b. penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa,
c. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
d. transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
e. perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan
f. pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 4.1
Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya

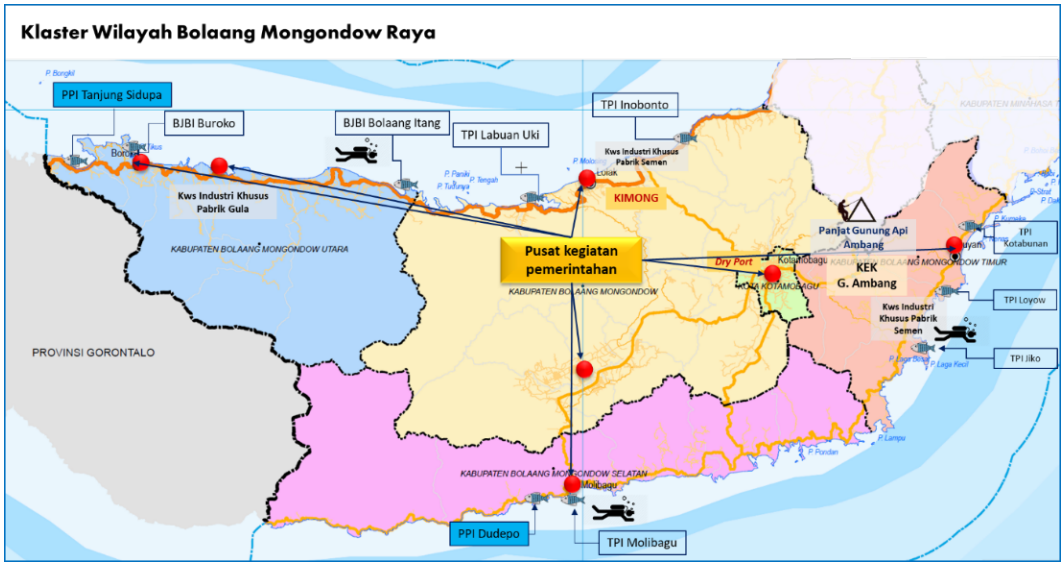

Tabel 4.1

Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan dan Pesisir, dan Perbatasan Darat dengan Provinsi Gorontalo di Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu (Ibukota Lolak, Buroko, Molibagu, Tutuyan)	1. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Lolak dan Dumoga/Doloduo; Buroko dan Bintauna; Molibagu; dan Tutuyan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan pengolahan buah Nenas dan Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; 3. Pengembangan Kawasan Industri Kimong, Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kimong; Pengembangan Kawasan *Dry Port* Kotamobagu dan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
		Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan *Dry Port*; 4. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Torosik dan Pelabuhan Lokal : Pelabuhan Tuntung (Bolmut); 5. Peningkatan TPI Inobonto dan TPI Labuan Uki (Bolmong), PPI Dodepo dan TPI Molibagu (Bolsel), PPI Tanjung Sidupa, BJBI Boroko, BJBI Bolangitang (Bolmut), TPI Jiko, TPI Loyouw dan TPI Kotabunan (Boltim) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Perikanan; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (Buroko, Bintauna; Lolak-Inobonto, Dumoga-Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka) 7. Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
		Berapi Ambang, Agro Wisata); Bahari (Pantai, Spots Diving, Snorkeling), dan Budaya. 8. Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP PANSELA, PANTURA, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang, Kompleks Keraton Boroko, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang

4.2.2. Isu-isu Strategis Kota Kotamobagu

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Kotamobagu dirumuskan berdasarkan

permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial budaya, ekonomi-keuangan dan legal kelembagaan, dan keberlanjutan, dengan memperhatikan isu di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Isu global, nasional dan Provinsi Sulawesi Utara

Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Sulawesi Utara
Pandemi Covid 19 dan adaptasi kebiasaan baru (new normal)	Implementasi OSS	Perwujudan Sulut sebagai Super Hub di Indonesia Timur
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Terbitnya UU Cipta Kerja	Penurunan kemiskinan dan pengangguran
Konvensi global perubahan iklim	Transformasi penanganan stunting	Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan
Industri 4.0	Penanggulanangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
	Penguatan struktur UKM dan UMKM	Perwujudan kedaulatan pangan
	Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Pembangunan Kawasan Perbatasan Kepulauan, dan pengembangan klaster wilayah
	Akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Optimalisasi pendapatan daerah
	Kota layak huni	Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak
	Pengembangan Super Hub sebagai pintu	Peningkatan moda transportasi dari pusat – pusat produksi

Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Sulawesi Utara
	gerbang untuk kawasan Asia Pasifik	
	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial dan budaya serta transformasi digital	Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi
		Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
		Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan
		Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
		Perencanaan pembangunan rendah karbon Low carbon Development Indonesia (LCDI)
		Transformasi digital
		Penanggulangan dan Pencegahan penyebaran CPVID-19

4.2.2.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana seperti Pembangunan Universitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta pembiayaan Pendidikan yang terjangkau untuk semua. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Demikian pula dengan peningkatan kualitas olahraga di Kota Kotamobagu perlu ditingkatkan, salah satunya dengan peningkatan kualitas tenaga pelatih di beberapa cabang olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga diantaranya pembangunan Gelanggang Olah Raga yang bertaraf nasional. Sehingga selain untuk menjadi sarana latihan bisa juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang ada di Kota Kotamobagu.

Mengingat kemajemukan warga Kota Kotamobagu, terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu di bangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

4.2.2.2. Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan

Meskipun telah banyak kemajuan, angka kematian ibu, bayi dan balita, Penyebaran virus HIV/AIDS, TB Paru, Gizi Buruk dan DBD, dan penyebaran COVID-19 masih merupakan isu yang harus terus mendapat perhatian utama. Selain isu jaminan kesehatan bagi penduduk miskin,masih tingginya permasalahan kesehatan di atas, tidak dapat dilepaskan dari kurangnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan, kinerja petugas kesehatan di fasiltas kesehatan baik di tingkat pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan masih kurang mengutamakan pelayanan prima, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat, serta kondisi lingkungan yang belum memadai yang tercermin antara lain dari kurangnya ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi dasar.

Ditinjau dari sisi penyediaan sarana pelayanan kesehatan, meskipun Kota Kotamobagu telah mempunyai cukup sarana

pelayanan kesehatan yang tersebar baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa namun masih perlu didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan fasilitas penunjang. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (secara fisik, sosial, dan ekonomi) juga masih perlu ditingkatkan.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, berbagai peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diantaranya adanya penerapan desentralisasi kesehatan yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengelola bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan berbasis sistim elektronoi at e-government pelayanan Kesehatan.

Di tingkat masyarakat, upaya pembangunan kesehatan perlu dilakukan secara lebih komprehensif, *cost-effective* dengan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Identifikasi sumber daya dan kekuatan-kekuatan lokal perlu dilakukan dan digunakan sebagai landasan pengembangan program. Berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti STMB, Posyandu dan lain-lain merupakan aset yang perlu terus ditingkatkan jumlah dan mutunya. Upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dimulai sejak usia dini melalui institusi pendidikan yang diiringi dengan penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai.

Dengan mendapatkan penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Padapa Tingkat Nasional pada tahun 2017 oleh Kementrian Dalam Negeri, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan kualitas Kesehatan baik sarana dan prasarana, regulasi yang menunjang peningkatan kualitas kesehatan di Kota Kotamobagu.

4.2.2.3. Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu pokok yang dihadapi Kota Kotamobagu. Keadaan sampai tahun 2020 masih terdapat penduduk miskin sebesar 5.42 % dan 7.44 % pengangguran terbuka. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan kualitas hidup menjadi masyarakat miskin diantaranya sulitnya lapangan pekerjaan, naiknya harga-harga kebutuhan pokok sementara pendapatan tidak meningkat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup standar sebagaimana layaknya sehingga mereka menjadi masyarakat golongan miskin. Dengan tingginya angka penduduk miskin maka program yang bersifat jaring pengaman sosial dipertahankan dan dilanjutkan. Di samping itu untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu ditindaklanjuti kegiatan atau program-program untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam berusaha melalui kegiatan bimbingan teknis, bantuan peralatan dan bantuan modal sehingga dapat memberi lapangan pekerjaan.

4.2.2.4. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah

Kota Kotamobagu memiliki potensi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata yang menjanjikan, namun belum dioptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan yang lebih produktif.

Sektor pertanian merupakan sektor produktivitas yang relatif rendah. Hal ini antara lain terjadi karena masih rendahnya tingkat pendidikan petani, penerapan teknologi belum sesuai anjuran serta sarana prasarana pendukung lainnya belum memadai. Produktifitas usaha tani lahan kering khususnya komoditi kopi relatif rendah akibat kurang memperhatikan kaidah konservasi

dan tingginya alih fungsi lahan serta tingkat kesuburan tanah yang rendah terutama fosfor. Sedangkan pada usaha tani lahan basah belum memberikan hasil yang optimal karena belum diterapkannya Panca Usahatani sesuai rekomendasi, serta jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kontinuitas ketersediaan produk pertanian baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan masyarakat.

Sektor ***Ketahanan Pangan*** dihadapkan pada perubahan pada perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi, harga pangan dan energi meningkat. Sehingga yang semula menjadi pengeksor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan untuk itu diperlukan upaya guna mengamankan produksi dan stok pangan, kemudian laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konvensi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Isu **sektor peternakan** berkaitan dengan pola pemeliharaan (budidaya) ternak yang belum dilakukan secara intensif. Disamping upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak yang belum optimal. Demikian juga pengetahuan dan ketrampilan peternak yang masih terbatas. Ke depan diharapkan adanya pola keterpaduan melalui integrasi di bidang pertanian dan peternakan, antara lain melalui pengembangan biogas dan sebagainya.

Sektor **perikanan** menjadi salah satu andalan Kota Kotamobagu, dimana didukung dengan potensi sumberdaya perikanan. Sektor perikanan dapat diarahkan menjadi sektor unggulan. Pemerintah perlu merencanakan upaya pemberdayaan antara lain melalui fasilitasi dalam penyediaan peralatan dan permodalan, kemitraan dengan perusahaan besar, penanganan pasca panen dan pemasaran.

Pengembangan **sektor perkebunan** juga menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu, karena didukung oleh karakteristik wilayah dan kesesuaian lahan. Namun demikian, peranan sub sektor perkebunan (perkebunan rakyat) terhitung masih kecil terhadap pembentukan PDRB Kota Kotamobagu, walaupun secara absolut nilai tambah yang diberikan oleh sub sektor ini meningkat terus menerus setiap tahunnya. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian antara lain: masih maraknya serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan (Kakao, Kopi). Peranan sub sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan dan diharapkan menjadi penghasil bahan mentah untuk menunjang agroindustri baik dalam skala kecil dan atau menengah. Selain itu sub sektor perkebunan juga diharapkan berperan dalam mendorong pemerataan, pertumbuhan dan dinamika ekonomi di Kelurahan/Desa.

Kebijakan nasional di bidang **pariwisata** yang tercantum dalam Master Plan Pariwisata Nasional kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah adalah Permasalahan mendasar yang ditemui beberapa obyek wisata yang belum dilakukan secara terintegrasi. Upaya pembangunan sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak terkait dan dikemas dalam konsep pengembangan wisata terkini. Selain itu pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi wisata harus diperhatikan, karena sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.

Pembangunan sektor **industri dan perdagangan** sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur perdagangan masih terbatas terutama aktifitas ketersediaan stok dan tingkat harga. Selain itu masih sering terjadi pelanggaran perdagangan seperti penjualan barang kadaluarsa,

dan praktik negatif perdagangan terutama kalangan pedagang eceran dan kaki lima. Pada sektor industri, optimalisasi industri mikro, kecil, dan menengah juga merupakan isu penting. Pembangunan industri mikro, kecil, dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga harus terus dibina agar menjadi usaha mandiri dan mempunyai daya saing, dan pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan **investasi dan penanaman modal** juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan ketersediaan infrastruktur baik prasarana darat, kepemilikan lahan yang masih didominasi oleh tanah persekutuan adat, pengurusan administrasi izin penanaman modal dan investasi, serta masih kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan peluang investasi kepada pihak investor baik melalui media cetak maupun elektronik ataupun kegiatan *expose* kerjasama dengan lembaga terkait baik berskala regional maupun nasional. Untuk itu, dalam rencana pembangunan jangka menengah, perlu memerhatikan akses terhadap promosi dan pemasaran produk, ketersediaan data-data perkembangan sektor ekonomi yang akurat dan terpilah sesuai kebutuhan para pengguna data (*user*) baik dalam bentuk data elektronik yang *on line* dan *off line* (leaflet, buklet, buku profil unggulan daerah) sehingga mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan potensi komoditi unggulan daerah dan sumber daya alam.

4.2.2.5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan, air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup

Kondisi infrastruktur masih merupakan isu yang harus mendapat perhatian pemerintah Kota Kotamobagu. Infrastruktur dasar dan strategis menjadi vital karena sangat berkaitan erat dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur dasar yang memadai menjamin kelayakan hidup masyarakat, serta dalam skala yang lebih luas menjamin kegiatan usaha produktif masyarakat. Infrastruktur dasar yang menjadi isu meliputi kondisi jalan (pembangunan dan pemeliharaan jalan, ketersediaan trotoar, jalur difabilitas), ketersediaan air bersih, irigasi dan pengolahan limbah rumah tangga (sanitasi).

Permasalahan lingkungan hidup, masih dihadapkan pada masih luasnya lahan kritis, penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan pelebaran badan sungai, penyediaan ruang-ruang publik yang memadai dan pemanfaatannya untuk kebutuhan rekreasi bagi masyarakat (taman kota/kecamatan). Selain itu dalam rangka pengelolaan persampahan dihadapkan pada persoalan keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

4.2.2.6. Tata kelola pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama,* reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua,* reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga,* reformasi pelayanan publik yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil

akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya dengan menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Kotamobagu. Selain menyusun roadmap Kota Kotamobagu termasuk Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui PMPRB on-line oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Sejak tahun 2016 dirintis juga tata kelola perencanaan dan penganggaran Kota Kotamobagu telah terintegrasi berbasis IT. Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah, namun hal ini tetap menyisakan berbagai kendala. Terkait dengan transparansi anggaran, diketahui bahwa Kota Kotamobagu termasuk daerah yang masih belum transparan, baik dalam proses pembahasan maupun penetapan APBD. Pada proses pembahasan APBD Kota Kotamobagu belum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya. Demikian juga setelah APBD ditetapkan, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui belanja dan pendapatan pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan

oleh masyarakat Kota Kotamobagu masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas. Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini diindikasikan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum. seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan kota.

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat.

Untuk merealisasikan pelayanan publik yang ideal, dibutuhkan kerjasama yang terorganisasi dan efektif antar komponen di dalam jajaran pemerintah kota. Satu bagian adalah sama pentingnya dibandingkan bagian lain, bahkan perlu ditumbuhkan perasaan bahwa bagiannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu dilakukan interaksi dan komunikasi intensif antara pemimpin dan warganya. Begitu pula antara pemimpin dan jajaran di bawahnya sehingga dapat dibuatkan evaluasi kinerja pemerintahan, serta dibuatkan ranking kinerja dan rangking pelayanan masyarakat. Hal-hal tersebut diharapkan pada gilirannya kelak dapat mendorong perbaikan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, adil dan efektif dengan tetap meningkatkan standar kualitas. Program yang intensif dan terarah sangat dibutuhkan agar berkualitas kinerja tinggi. Penghargaan secara adil perlu dilembagakan agar aparat terus termotivasi dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan yang integral dan mendidik, sebagai upaya menjadikan

tata kelola pemerintahan kota yang bersih.

Sebagai pelayan, pemerintah kota harus lebih memudahkan akses informasi pelayanan kepada masyarakat, misalnya informasi transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTR, layanan KTP, KK, dan surat-surat keterangan lainnya.

Selain itu untuk mendukung pelayanan publik dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, diantaranya pembangunan Kantor WaliKota Kotamobagu yang dilengkapi dengan sarana pendukungnya. Hal ini dikarenakan Kantor Walikota yang digunakan sekarang memanfaatkan bangunan lama dengan lahan yang tidak memenuhi standar pelayanan publik.

Salah satu agenda pembangunan nasional dan daerah adalah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance)* yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2.2.7. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, Pemberdayaan masyarakat serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengemdalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan ruang yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Salah satu isu penting adalah alokasi dana yang cukup besar kepada desa untuk mengelola anggaran dengan rata

rata 2 Miliar per desa. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, pemerintah Kota Kotamoabagu diharapkan melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik dan kemampuan pengelolaan keuangan desa. Demikian pula masyarakat desa perlu dipersiapkan untuk menjadi mandiri dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa, agar hasil-hasil pembangunan yang dilakukan dapat secara langsung mengatasi berbagai permasalahan dasar yang dialaminya selama ini.

Salah satu isu stategis penting yang dihadapi pemerintah Kota Kotamobagu adalah lebih meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Khusus Anak untuk menuju Indonesia Layak Anak 2030. Untuk menjadi Kota Layak Anak ada 6 (enam) tingkatan yaitu start, inisiasi, Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak.

Kota Kotamobagu sendiri saat ini sudah mencapai/menduduki tingkat ketiga yaitu Pratama. Untuk menuju ke tingkat selanjutnya menuju Indonesia Kota Layak Anak 2030 Kota Kotamobagu perlu mengadakan komitmen bersama untuk dapat mencapai hal tersebut.

Salah satu isu strategis dalam pengendalian Penduduk dan keluarga berencana adalah dengan meningkatkan Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk menekan tingkat pertumbuhan Penduduk.

4.2.2.8. Pengembangan Sistem Transportasi

Pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu kota, Kota Kotamobagu menghadapi berbagai permasalahan transportasi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta pertanian. Oleh karena itu, perlu dibangunnya prasarana jalan lingkar *(Ring Road)* untuk pengembangan sistem transportasi terpadu sehingga memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa pertanian serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Sistem Alat transportasi yang ada masih jauh dari standar keamanan, untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 perlu adanya alat transportasi masal yang aman, nyaman serta mudah diakses.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di Kota Kotamobagu. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di Kota Kotamobagu harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan kewilayah sekitar yang juga semakin meningkat.

4.2.2.9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota harus dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu, baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh

berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Sedangkan pada kawasan kumuh sedang perlu diupayakan peningkatan kualitas huniannya serta prasarana sarana lingkungannya.

Tumbuh dan berkembangnya kawasan pemukiman kumuh serta munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan pembangunan yang belum sepenuhnya terkendali mengakibatkan wajah perkotaan menjadi buruk dan kotor.

Untuk menjawab kondisi tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, pengawasan, pengendalian sesuai dengan atauran yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip urban management sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

4.2.2.10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota serta diprioritaskan pada peningkatan kualitas RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW 2014-2034.

Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH ini, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

4.2.2.11. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan *Suitanable Development Goals* (SDGs).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Kota Kotamobagu, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Untuk diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dimana RPJMD menjadi pedoman pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD). Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, RTRW Kota Kotamobagu tahun 2014-2034, dan visi misi kepala daerah terpilih.

Visi RPJMN untuk periode 2020-2024 adalah:

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, visi misi dalam RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD yaitu **"Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa yang Aman, Asri, dan Sejatera Berlandaskan Iman dan Taqwa"** dengan misi :

1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa yang ramah dan berdaya saing;

2. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjamin kenyamanan hidup masyarakat Kotamobagu;
3. Mewujudkan pembangunan Kota Kotamobagu yang asri dan hijau berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang sehat, cerdas dan sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang berbudaya luhur, berlandaskan iman dan taqwa.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut.

5.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah:

"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"

Visi dan misi yang akan dicapai pada lima tahun kedepan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu periode 2018-2023 adalah penjabaran dari RPJP Nasional sampai dengan RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, yang dimaksudkan untuk mewujudkan melalui sinkronisasi pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTA JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.

PERDAGANGAN, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

KEBUDAYAAN LOKAL yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip "*Moposad dan Pogogutat Motolu Adi*".

MASYARAKAT SEJAHTERA yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BERDAYA SAING yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kota Kotamobagu Periode 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas *Kesejahteraan* masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan dan penguatan masyarakat;
2. Meningkatkan *Daya Saing* daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
3. Meningkatkan *Pelayanan Dasar Publik, dan Pelayanan Administrasi Umum* yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokan ke dalam 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan aparatur yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

Misi pertama, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu, difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya Kota Kotamobagu

seperti penyelenggaraan *event* budaya bertaraf internasional dan nasional, serta kawasan budaya. Pengembangan area-area atau lokasi dalam kota untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat Kota dan sekitar dengan fungsinya yang beragam. Kota Kotamobagu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari pekerjaan dan tinggal di Kotamobagu, sehingga pertambahan penduduk Kota Kotamobagu akibat migrasi terus meningkat. Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Kotamobagu menjadi kota dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat, serta menambah tingginya persaingan antar individu. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif terbatas. Untuk memperkuat daya saing wilayah, pembangunan Kota Kotamobagu akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing wilayah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi Kedua: Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.

Untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada inovasi dan kreatifitas berbasis potensi ekonomi daerah yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan:

1. Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan perluasan lahan untuk kawasan kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa, serta industri pengolahan bahan makanan yang berkelanjutan dengan menerapkan inovasi dan kreatifitas;
2. Lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase, air bersih, dan pengolahan sampah untuk meningkatkan daya saing kota;

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula Kota Kotamobagu tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi daerah sekitarnya, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya Kota Kotamobagu harus berorientasi pada kota pintar (*smart city*) yang memperhatikan 3 (tiga) hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa perdagangan, industry pengolahan skala kecil, dan arus investasi; pembangunan kota memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan

yang kondusif serta penggunaan energi terbarukan yang bijak dan ramah lingkungan.

Pengembangan Kota Kotamobagu sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun Kota Kotamobagu dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan *positioning* kota, diferensiasi dan *branding* atas produk-produk yang dimiliki Kota Kotamobagu. Selain itu pembangunan Kota Kotamobagu harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan.

Misi Ketiga: Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Pada misi Ketiga, hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan berinvestasi, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan Kota Kotamobagu sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen) secara *online*, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Kota Kotamobagu masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara *online* melalui sistem informasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Bahwa tujuan umum pembangunan Kota Kotamobagu untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat kota yang lebih baik, yaitu:

1. Kota yang mampu meningkatkan posisi daya saing yang diukur berdasarkan tolok ukur aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, kekayaan budaya, dan kondisi politik;
2. Kota yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa;
3. Kota yang PDRB per kapita-nya tumbuh dan berkembang merata.
4. Kota dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang meningkat dan inflasi yang terkendali.
5. Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dan terus meningkat.
6. Kota yang tingkat toleransi warganya semakin baik

Untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik sebagaimana penjelasan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat

Tujuan:

1. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan;
3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak.

Misi Kedua: Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.

Tujuan:

1. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya Investasi Daerah;
3. Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan;

Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Tujuan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel. 5.1
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Kotamobagu

VISI: KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2021	2022	2023			2021	2022	2023
MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	72	72	72,50	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Pendidikan	0,69	0,7	0,7
							Angka Harapan Hidup	70,5	70,6	70,7
						Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	5,4	5,4	5,37
						Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak (Predikat)	MADYA	MADYA	MADYA
							Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95,37	95,37	95,40
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	5,5	5,6	Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK (juta rupiah)	2.526.665,03	2.665.631,61	2.814.906,98
						Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	170	343	343
						Meningkatnya Infrastruktur yang	Indeks Infrastruktur	54,99	55,01	55,09

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2021	2022	2023			2021	2022	2023
						Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	58,23	58,33	58,34
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	55	55	55	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	70	71	72
							Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP
							Indeks SPBE	2,5	2,75	2,85
							Indeks Pelayanan Publik	70	70	88

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi direalisasikan melalui langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sebagai Kota jasa, Kota Kotamobagu menetapkan strategi dirumuskan di bagian berikut sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan dalam rangka menciptakan nilai tambah dalam pembangunan sehingga dapat menarik investor dan stakeholder dalam meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi ini sejalan dengan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi pihak swasta dan masyarakat serta Pemkot sebagai regulator dalam menciptakan regulasi dan fungsi administrative. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel. 6.1

Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi

Kota Kotamobagu

Visi: "KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Pendidikan	Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan pendidikan PAUD dan Dasar	1. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar Pendidikan Paud dan Dasar 2. Melanjut kualitas belajar mengajar pendidikan dasar berbasis IT 3. Mempertahankan kualitas belajar mengajar berbasis IT serta kurangi anak putus sekolah		
				Angka Harapan Hidup	Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan pelayanan kesehatan dasar	1. Meningkatkan kualitas dan proses pelayanan kesehatan dasar dan penyelesaian penyebaran Covid-19. 2. Melanjutkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan Covid-19 3. Mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan Covid-19		
			Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin	1. Meningkatkan dan memperbaiki validitas		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
						data kesejahteraan masyarakat 2. Mengintegrasikan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 3. Perlindungan penduduk miskin dan rentan miskin lebih kuat dan mandiri terhadap kerentanan sosial ekonomi		
					Memperluas kesempatan kerja formal	Fasilitasi kerjasama lembaga pemberi kerja		
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak (Predikat)	Peningkatan dan penguatan fasilitas tempat bermain anak di taman kota terbuka dan di lokasi-lokasi PAUD	1. Pemeliharaan dan peningkatan taman bermain anak 2. Perluasan taman bermain anak di wilayah taman kota 3. Peningkatan mutu taman bermain anak di tempat terbuka dan dalam ruangan		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	Penguatan dan peningkatan peran perempuan dalam segala aspek	1. Mendorong serta pemberian ruang peran perempuan terlibat aktif dalam pembangunan kota 2. memperluas peran perempuan dalam		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
						proses perencanaan dan pembangunan kota 3. Mendorong dan memperkuat peran aktif perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik		
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK (juta rupiah)	Memperkuat dan meningkatkan struktur pilar penunjang ekonomi kota	1. Melanjutkan dan meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada bidang Pertanian/Perikanan, perindustrian, dan perdagangan. 2. Melanjutkan dan mengintegrasikan lembaga keuangan mendukung penguatan modal dan manajemen U/IMK 3. Menfasilitasi U/IMK mempromosikan produk keluar daerah serta Pemkot memudahkan mendapatkan izin usaha dan fasilitas lain		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
			Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Pemberdayaan dinas penanaman modal melayani investor dengan penggunaan ITK	1. Melanjutkan perbaikan pelayanan investasi dan memberikan kemudahan izin investasi bagi seluruh pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kotamobagu. 2. Promosi peluang investasi berbasi platform digital dan terus memperbaiki dan tingkatkan pelayanan investasi melalui OSS dan PTSP 3. Melanjutkan perbaikan pelayanan dan promosi investasi berbasis digital		
					Menumbuhkan wirausaha Baru	Pelaksanaan pelatihan wirausaha		
					Meningkatkan daya tarik wisata	1. Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Kotamobagu melalui promosi yang efektif 2. Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
						3. Mengembangkan kualitas Obyek Wisata		
			Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur	Penguatan infrastruktur dasar eksisting melalui Peningkatan dan penguatan perbaikan/perawatan	1. Perbaikan dan peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi, dan persampahan 2. Perawatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase 3. Peningkatan pemeliharaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, persampahan, jalan dan drainase)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	Perluasan dan peningkatan zona hijau dalam kota	1. Melanjutkan perawatan taman kota dan penghijauan wilayah sekitar sumber air 2. Melanjutkan program penghijauan dan mengontrol/batasi pemotongan pohon 3. Melanjutkan penghijauan kota dan objek wisata alam menjadi hutan kota		
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Percepatan pembenahan administrasi Pemkot berbasis e-gov untuk percepatan pencapaian nilai SAKIP tertinggi	1. memperbaiki dan meningkatkan administrasi Pemkot terintegrasi dalam sistim e-gov danterintegrasi 2. Integrasi dan terkoordinasi		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK						pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional dan daerah oleh setiap OPD terkait untuk pencapaian outcome maksimal 3. Melanjutkan koordinasi dan integrasi semakin baik memanfaatkan e-government		
				Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	Penguatan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah dan administrasi publik yang transparan	1. Meningkatkan disiplin administrasi, pengelolaan, dan pelaporan keuangan tepat waktu 2. Perencanaan dan penetapan RAPBD kota tepat waktu 3. Penyusunan dan penetapan anggaran kebutuhan program/kegiatan memanfaatkan SIKD		
				Indeks SPBE	Percepatan wujudkan penggunaan e-government dalam semua lingkup pemerintah Kota Ktamobagu	1. Meningkatkan pemanfaatan SPBE wujudkan pelayanan inovatif bagi setiap OPD 2. Mewujudkan pelayanan publik berbasis SPBE semakin baik 3. Peningkatan pelayanan publik terintegrasi melalui SPBE		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
						2021	2022	2023
				Indeks Pelayanan Publik	penguatan dan percepatan pelayanan publik berdasarkan SPM dan transparan berbasis SPBE	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemkot dan keuangan kota 2. Peningkatan penyelenggaraan pemkot berbasis digital menuju transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik 3. Melnjutkan dan meningkatkan pelayanan pemkot berbasis digital wujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik		

Sebuah strategi pembagunan daerah dapat diwujudkan melalui rangkaian perencanaan tahunan yang saling terkait. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah terdiri dari tema-tema pembangunan yang secara simultan terbentuk dari arah kebijakan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan prioritas pembangunan dan program kegiatan pemerintah daerah berdasarkan tema pembangunan tahunan. Dengan merujuk pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, pemerintah Kota Kotamobagu, kemudian merumuskan tema pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun yaitu: a) **meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan data dan informasi**; b) **meningkatkan daya saing melalui pendekatan data dan informasi**; c) **Peningkatan Pelayanan Publik, Percepatan Pemulihan Ekonomi serta Penguatan Sistem Kesehatan**; d) **Memantapkan Peningkatan Pelayanan Dasar Publik dan Pemulihan Ekonomi berdasarkan Hasil Evaluasi Pembangunan**; e) **memantapkan kinerja kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan local.**

Berdasarkan tema pembangunan diatas kemudian dirumuskan Prioritas pembangunan daerah yang akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Prioritas pembangunan kotamobagu yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur, akses air minum dan sanitasi layak, serta Pengembangan Kawasan *Dryport*, Pariwisata, Kebudayaan dan peningkatan Daya Saing Investasi
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6. Reformasi Birokrasi
7. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana
8. Keadilan dan Kesetaraan Gender

9. Pemantapan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung prioritas pembangunan kota disebutkan diatas, maka dijabarkan program prioritas dalam mendukung pencapaian janji-janji kepala daerah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Program Penurunan Angka Kemiskinan
3. Program Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan Lingkungan
4. Program Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman dan Perkotaan
5. Program Peningkatan Destinasi Periwisata Daerah
6. Program Peningkatan Investasi Daerah
7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif, akuntabel, dan berbasis e-Government
8. Program Peningkatan Kamandirian Keuangan Daerah
9. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kehidupan Bermasyarakat yang kondusif
10. Program Peningkatan Ketangguhan Terhadap Bencana
11. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pelindungan Anak
12. Program Peningkatan SDM yang sehat, Cerdas, Kompetitif dan Kreatif

Tabel 6.2

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Kotamobagu

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Misi-1	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat										
Tujuan-1	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (%)	- ,00	72,00		72,00		72,50		72,50	
Sasaran-1	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kualitas Pendidikan (Indeks)	- ,00	0,69		0,70		0,70		0,70	
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	- ,00	70,50		70,60		70,70		70,70	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	- ,00	86,67	35.531.658.491	93,33	49.168.363.461	95,01	43.399.182.461	95,01	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	- ,00	61,79		64,44		66,99		66,99	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	- ,00	87,99		88,59		89,20		89,20	
		Angka pendidikan yang ditamatkan (SD/MI) (%)	- ,00	1,67		1,69		1,71		1,71	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	- ,00	0,52		0,46		0,41		0,41	
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A (%)	- ,00	95,99		96,16		96,32		96,32	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	- ,00	99,83		99,93		99,97		99,97	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (%)	- ,00	86,97		87,49		88,01		88,01	
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	- ,00	90,92		92,55		94,22		94,22	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B (%)	- ,00	78,93		79,33		79,73		79,73	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	- ,00	78,23		78,85		79,47		79,47	
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (%)	- ,00	59,04		65,55		72,78		72,78	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	- ,00	0,07		0,05		0,04		0,04	
		Angka pendidikan yang ditamatkan (SMP/MTs) (%)	- ,00	2,23		2,26		2,29		2,29	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	- ,00	80,72		83,52		86,42		86,42	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	- ,00	87,99		88,59		89,20		89,20	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	- ,00	99,87		99,90		99,93		99,93	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah yang menerapakan Kurikulum Muatan Lokal (%)	- ,00	82,14	181.902.100	82,14	273.021.600	82,14	273.021.600	49,28	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	- ,00	81,01	475.367.900	81,53	400.000.000	82,05	400.000.000	82,05	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosesentase Sekolah/Lembaga Kursus yang dikelola Masyarakat yang memiliki Izin Operasional Aktif (%)	- ,00	-,,00	-	100,00	82.000.000	100,00	82.000.000	60,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Prosentase Sekolah yang aktif menerapkan Hari Khusus Berbahasa Daerah (%)	- ,00	46,62	-	46,62	167.877.830	46,62	175.000.000	46,62	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	- ,00	100,00	34.850.078.829	100,00	38.371.804.734	100,00	36.344.098.946	100,00	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	- ,00	0,42		0,42		0,42		0,42	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023			
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terkualifikasi sesuai standar (%)	- ,00	90,00	1.548.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Yang Memiliki Izin (%)	- ,00	100,00	222.426.000	100,00	378.668.600	100,00	416.535.460	100,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (%)	- ,00	90,00	585.715.200	90,00	602.000.000	90,00	697.000.000	90,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (%)	80,60	82,00	87.692.356.943	85,00	81.443.839.440	90,00	83.014.160.000	90,00	UPTD RSUD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit (%)	49,52	18,75	5.276.832.800	17,97	5.000.000.000	17,66	4.800.000.000	54,38	UPTD RSUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan serta Koordinasi tentang mutu obat (paket/kali)	- ,00	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	UPTD FARMASI
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan kerugian material dan korban bencana (Persen)	- ,00	90,00		90,00		90,00		90,00	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (%)	- ,00	100,00	57.458.000	100,00	238.636.960	100,00	2.191.812.500	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00	
		Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Anggota Linmas yang diberdayakan (%)	- ,00	100,00	600.000.000	100,00	-	100,00	-	60,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama ((%))	100,00	100,00	2.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	60,00	Dinas Ketahanan Pangan

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	91,00	91,00	958.489.920	91,00	1.442.686.800	91,00	2.071.475.000	54,60	Dinas Ketahanan Pangan
		Prosentase Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah ('%)	15,00	15,00		15,00		15,00		9,00	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan (Skor)	5,00	5,00	68.960.000	5,00	91.580.000	5,00	113.330.000	3,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (('%))	90,00	90,00	55.474.460	90,00	111.029.000	90,00	166.423.500	54,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Rata Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga (Jumlah)	2,38	2,10	189.905.800	2,07	644.016.400	2,04	552.016.400	1,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (Presentase)	25,00	75,00	2.291.638.090	75,00	2.387.574.300	75,00	2.434.574.300	45,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Anggota Kelompok Yang Ber-KB (Presentase)	68,25	68,50	137.105.600	68,75	3.357.000.000	69,00	3.357.200.000	41,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun (Jumlah Kunjungan)	- ,00	500,00	357.695.350	500,00	550.000.000	500,00	925.000.000	500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Koleksi Buku yang tersedia Di Perpustakaan Daerah (Koleksi Buku)	- ,00	18.351,00		19.851,00		21.351,00		21.351,00	
		Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun (Jumlah Pengunjung)	- ,00	118,00		118,00		118,00		118,00	
		Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (Jumlah Perpustakaan)	- ,00	37,00		37,00		37,00		37,00	
		Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (Jumlah Buku)	- ,00	2.496,00		2.796,00		3.096,00		3.096,00	
Sasaran-2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan ('%)	- ,00	5,40		5,40		5,37		5,37	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan ('%)	- ,00	3,15	278.971.700	5,26	304.000.000	7,36	628.400.000	7,36	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ('%)	- ,00	23,95	221.052.450	23,95	455.354.000	23,95	626.854.000	23,95	Dinas Sosial

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani melalui perlindungan dan jaminan sosial ('%)	- ,00	100,00	93.569.000	100,00	248.645.786	100,00	429.510.000	100,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat ('%)	100,00	100,00	151.973.600	100,00	138.340.500	100,00	72.152.000	100,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Pengelolaan Taman makam pahlawan ('%)	100,00	100,00	50.294.000	100,00	74.972.827	100,00	200.000.000	100,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja ('%)	- ,00	- ,00	-	90,00	30.000.000	90,00	30.000.000	90,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi ('%)	- ,00	3,75	100.000.000	6,00	300.000.000	8,00	500.000.000	8,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota ('%)	- ,00	3,71	150.000.000	3,71	400.000.000	3,71	750.000.000	3,71	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ('%)	- ,00	31,25	100.000.000	64,14	145.000.000	88,82	190.000.000	88,82	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penatan Desa ('%)	- ,00	- ,00	-	100,00	300.000.000	100,00	200.000.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa ('%)	- ,00	- ,00	-	33,33	300.000.000	46,67	450.000.000	80,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik ('%)	- ,00	100,00	1.061.901.777	100,00	2.289.222.752	100,00	1.250.000.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat yang diberdayakan ('%)	- ,00	18,64	43.241.150	59,32	835.000.000	59,32	775.000.000	59,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran-3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak (Predikat)		Madya		Madya		Madya		Madya	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	- ,00	95,37		95,37		95,40		95,40	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD ('%)	58,65	58,75	250.000.000	58,80	1.300.000.000	58,85	1.350.000.000	58,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan Korban kekerasan per 1000 orang	- ,00	0,10	708.710.000	0,09	738.010.000	0,08	775.510.000	0,08	Dinas Pemberdayaan

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		penduduk (usia 18 tahun ke atas) ('%)									Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG (Indeks Pembangunan Gender) ('%)	38,51	95,37	680.843.200	95,38	940.000.000	95,39	1.185.791.000	95,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rasio anak yang terdata di Kabupaten/Kota per 1000 anak (Usia kandungan -18 tahun) ('%)	- ,00	100,00	30.000.000	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA ('%)	- ,00	100,00	155.000.000	100,00	215.000.000	100,00	275.000.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1000 anak (usia kandungan - 18 tahun) ('%)	- ,00	0,11	607.375.200	0,12	802.500.000	0,14	730.000.000	0,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi-2	Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi dan Kreatifitas Yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berwawasan Lingkungan										
Tujuan-2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi ('%)	- ,00	5,40		5,50		5,60		5,60	
Sasaran-4	Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	- ,00	2.526.665,03		2.665.631,61		2.814.906,98		2.814.906,98	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas ('%)	- ,00	33,33	32.522.800	60,60	32.522.800	100,00	50.000.000	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ('%)	- ,00	69,69	172.985.400	84,84	172.985.400	100,00	207.582.480	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ('%)	- ,00	3,28	534.383.500	3,28	852.318.600	3,59	1.030.782.320	3,59	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil ('%)	- ,00	- ,00	-	0,79	112.500.000	0,79	112.500.000	0,79	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan ('%)	- ,00	- ,00	812.951.050	90,00	2.415.400.000	90,00	2.390.000.000	90,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah total produksi perikanan (budidaya) (Ton)	- ,00	791,00		801,00		813,00		813,00	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengendalian Sumber Daya Perikanan ('%)	- ,00	- ,00	-	80,00	50.000.000	80,00	60.000.000	80,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahun ('%)	- ,00	- ,00	1.484.220.150	0,13	2.830.000.000	0,13	2.825.000.000	0,13	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Tani ('%)	- ,00	90,00		90,00		90,00		90,00	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan ('%)	- ,00	85,00	963.077.650	85,00	4.126.000.000	85,00	1.450.000.000	85,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular ('%)	- ,00	100,00	274.228.500	100,00	955.000.000	100,00	941.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana ('%)	- ,00	100,00	37.227.650	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase gabungan kelompok tani yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas ('%)	- ,00	80,00	263.967.250	80,00	920.000.000	80,00	985.000.000	80,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Penunjang sarana dan Prasarana ('%)	- ,00	75,00	441.000.000	75,00	1.225.200.000	100,00	375.000.000	50,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku ('%)	- ,00	- ,00	-	2,11	83.200.000	5,28	106.292.000	5,28	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ambang Batas Kenaikan Harga ('%)	- ,00	- ,00	-	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk dalam Negeri yang dipromosikan dan dipasarkan ('%)	- ,00	100,00	102.583.750	100,00	102.583.750	100,00	102.583.750	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota ('%)	- ,00	- ,00	-	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait ('%)	- ,00	- ,00		20,00		20,00		20,00	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sasaran-5	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar)	- ,00	170,00		343,00		343,00		5.001,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	- ,00	85,00	1.773.620.000	85,00	4.049.825.000	90,00	3.599.825.000	52,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap respon time penanganan kebakaran (waktu)	- ,00	100,00	501.550.000	100,00	1.169.170.000	100,00	1.037.420.000	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	- ,00	62,79		62,79		62,79		62,79	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal ()	74,33	- ,00	-	91,66	550.000.000	100,00	400.000.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentasi Promosi Penanaman Modal ()	- ,00	14,29	15.000.000	42,86	200.000.000	42,86	200.000.000	42,86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ()	- ,00	33,07	322.573.000	49,41	322.573.000	100,00	322.573.000	36,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentasi Pelayanan Penerbitan Perizinan ()	- ,00	- ,00	-	100,00	215.000.000	100,00	215.000.000	60,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi (Nilai)	81,00	- ,00	-	85,00	35.000.000	86,00	35.000.000	84,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan budaya daerah (%)	- ,00	100,00	110.000.000	100,00	355.000.000	100,00	355.000.000	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM yang menguasai kesenian tradisional (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	35.000.000	- ,00	-	- ,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	- ,00	33,00	100.000.000	66,00	500.000.003	100,00	500.000.003	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman (%)	- ,00	- ,00	-	- ,00	-	100,00	100.000.000	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (%)	- ,00	100,00	54.000.000	93,00	875.000.000	93,00	175.000.000	93,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang di promosikan (%)	- ,00	- ,00	-	84,00	664.550.000	84,00	664.550.000	84,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	100,00	100,00	29.296.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	60,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang Dikembangkan (%)	70,87	16,51	650.000.000	27,23	1.350.000.000	27,13	2.050.000.000	27,13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi (%)	- ,00	- ,00	-	20,00	300.000.000	20,00	350.000.000	20,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi (%)	- ,00	- ,00		20,00		20,00		20,00	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (%)	- ,00	100,00	89.197.000	100,00	109.197.000	100,00	109.197.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik (%)	- ,00	100,00	715.717.850	100,00	715.717.850	100,00	715.717.850	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	- ,00	100,00	13.687.350	100,00	13.687.350	100,00	25.000.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat (%)	- ,00	100,00	97.351.300	100,00	97.351.300	100,00	97.351.300	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pencegahan Potensi Konflik (%)	- ,00	100,00	513.736.150	100,00	1.033.528.100	100,00	1.033.528.100	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran-6	Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur (Indeks)	- ,00	54,99		55,01		55,09		55,09	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	- ,00	58,23		58,33		58,44		58,44	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi kewenangan kota (Persen)	- ,00	83,00	1.552.811.213	83,00	6.571.543.470	85,00	8.612.040.000	85,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM (Persen)	50,00	80,00	6.425.136.909	90,00	7.434.661.909	100,00	9.900.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan fasilitas penanganan sampah di perkotaan (Persen)	- ,00	70,00	207.870.900	70,00	722.870.900	80,00	700.000.000	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Persen)	40,59	41,46	2.504.818.987	42,00	2.831.818.987	45,00	5.378.379.200	45,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (Persen)	80,00	95,79	1.720.989.850	98,42	3.807.154.075	100,00	8.300.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan paving dikawasan strategis daerah (Persen)	60,00	80,00	901.171.966	95,00	3.314.671.966	100,00	5.600.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata (Persen)	- ,00	60,00	89.676.200	70,00	2.353.186.425	70,00	3.600.000.000	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya (Persen)	- ,00	- ,00	-	- ,00	-	70,00	400.000.000	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN KOTA DALAM KONDISI BAIK (>40 KM/JAM) (Persen)	70,56	74,00	19.889.449.045	74,00	45.452.738.259	74,70	68.664.000.000	74,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen)	- ,00	70,00	49.766.800	70,00	200.000.000	80,00	400.000.000	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW (Persen)	20,69	39,43	578.159.400	39,43	2.416.007.100	39,58	4.803.567.500	39,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Persen)	- ,00	100,00	1.515.896.137	100,00	660.475.000	100,00	648.160.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota (Persen)	- ,00	23,08		38,46		38,46		38,46	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani (Persen)	93,80	100,00	6.528.451.700	100,00	3.812.315.000	100,00	2.062.315.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi kumuh (Persen)	- ,00	- ,00	-	26,62	1.750.000.000	40,00	2.500.000.000	40,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Persen)	17,81	19,35	8.628.012.102	27,06	8.231.675.000	39,94	8.159.175.000	39,94	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang yang Tersertifikasi dan teregistrasi (Persen)	- ,00	- ,00	-	14,29	54.700.000	28,57	109.400.000	42,86	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi (Persen)	- ,00	100,00	39.892.700	100,00	15.500.000	100,00	15.500.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (Persen)	- ,00	100,00	18.960.750	- ,00	-	- ,00	-	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola (Persen)	- ,00	100,00	56.933.300	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
											Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota (Persen)	- ,00	100,00	171.511.050	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Persen)	- ,00	100,00	147.485.000	- ,00	-	- ,00	-	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persen)	- ,00	100,00	76.648.800	- ,00	-	- ,00	-	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat (Persen)	- ,00	100,00	239.797.200	- ,00	-	- ,00	-	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASI PARAMETER PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN (Persen)	- ,00	100,00	241.392.200	100,00	351.000.000	100,00	470.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LOKASI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (persen)	- ,00	- ,00	-	100,00	500.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASI USAHA/KEGIATAN YANG MENDAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT USAHA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Persen)	- ,00	100,00	10.322.000	100,00	10.500.000	100,00	25.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional (Penghargaan)	- ,00	1,00	46.908.000	1,00	53.000.000	1,00	65.000.000	3,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI (Persen)	95,83	96,00	7.130.479.300	96,50	8.089.000.000	97,00	10.050.000.000	97,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASI USAHA KEGIATAN YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Persen)	- ,00	80,00	479.970.900	85,00	100.000.000	90,00	1.250.000.000	90,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Titik Pengawasan (Titik)	15,00	20,00	1.626.240.000	25,00	11.338.259.500	25,00	19.099.543.750	21,00	Dinas Perhubungan
		Prsentase Fasilitasi Keselamatan Berlalu lintas (Persentase)	- ,00	80,00		80,00		80,00		48,00	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Misi-3	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik										
Tujuan-3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	- ,00	55,00		55,00		55,00		55,00	
Sasaran-7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)		WTP		WTP		WTP		WTP	
		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	- ,00	70,00		70,00		88,00		88,00	
		Indeks SPBE (Indeks)	- ,00	2,50		2,75		2,85		2,85	
		Nilai SAKIP (Nilai)	- ,00	70,00		71,00		72,00		72,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	4.090.389.997	100,00	4.360.440.000	100,00	4.587.175.000	60,00	Kotamobagu Selatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	4.163.044.636	100,00	4.925.200.000	100,00	4.939.700.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	1.301.567.607	100,00	12.049.640.014	100,00	3.645.710.350	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	90,00	6.435.628.980	90,00	6.730.547.530	90,00	6.500.466.078	90,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	2.346.817.380	100,00	2.881.879.380	100,00	3.773.300.000	60,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	814.000.000	100,00	835.000.000	100,00	835.000.000	100,00	Bagian Hukum
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	95,00	2.223.044.012	95,00	2.697.914.150	95,00	3.356.024.250	95,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	3.009.901.604	100,00	3.344.488.104	100,00	3.834.488.104	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	2.083.917.096	100,00	12.775.388.546	100,00	2.625.388.546	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	2.491.482.000	100,00	2.647.255.950	100,00	2.646.440.250	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	4.708.970.112	100,00	4.709.970.112	100,00	4.709.970.112	100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	3.037.856.783	100,00	3.063.662.141	100,00	3.228.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023			
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	41.708.244.000	100,00	42.185.923.870	100,00	43.310.045.064	100,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	2.878.458.872	100,00	3.746.825.245	100,00	4.213.014.927	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	2.781.611.784	100,00	3.178.497.000	100,00	3.513.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	7.518.337.946	100,00	8.738.278.916	100,00	10.453.137.800	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	1.893.808.694	100,00	3.034.790.374	100,00	3.286.341.900	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	3.760.765.834	100,00	4.249.790.000	100,00	4.320.290.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	89.310.021.508	100,00	89.570.595.508	100,00	89.573.595.508	100,00	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	90,00	90,00	2.906.386.661	90,00	7.182.605.845	90,00	6.812.539.845	90,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	90,00	100,00	3.100.961.516	100,00	3.444.273.366	100,00	4.205.080.600	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	3.849.612.194	100,00	6.724.594.050	100,00	7.050.670.154	100,00	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	90,00	3.114.900.000	90,00	5.053.000.000	90,00	6.068.500.000	90,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	5.335.550.124	100,00	6.508.000.000	100,00	7.064.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	90,00	95,00	4.203.124.450	95,00	4.493.279.750	95,00	4.617.718.450	95,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	95,00	95,00	2.625.898.950	95,00	2.523.568.490	95,00	2.868.948.000	95,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	90,00	6.116.320.325	90,00	5.162.096.084	90,00	9.338.456.913	90,00	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	98,00	3.412.521.252	98,00	2.911.400.152	98,00	3.069.558.155	98,00	Satuan Polisi Pamong Praja

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	19.951.034.709	100,00	20.218.694.952	100,00	20.507.204.389	60,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	20.954.278.709	100,00	23.421.680.132	100,00	24.388.041.632	100,00	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	95,00	610.916.400	95,00	761.000.000	95,00	736.000.000	95,00	UPTD FARMASI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	7.434.032.358	100,00	7.712.291.518	100,00	7.772.579.268	100,00	Kotamobagu Barat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	6.260.813.786	100,00	6.986.554.000	100,00	7.382.554.000	60,00	Kotamobagu Timur
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	4.159.617.721	100,00	4.165.437.271	100,00	4.313.908.115	60,00	Kotamobagu Utara
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	2.706.212.550	100,00	3.211.261.750	100,00	3.677.500.000	100,00	UPTD RSUD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	317.661.350	100,00	506.319.200	100,00	548.352.000	60,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	933.252.150	100,00	909.652.150	100,00	914.652.150	100,00	Bagian Pemerintahan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	95,00	572.440.880	95,00	3.316.007.500	95,00	3.316.007.500	95,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	566.840.250	100,00	719.340.250	100,00	719.340.250	100,00	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Kinerja Organisasi (%)	- ,00	100,00	572.000.000	100,00	1.196.500.000	100,00	1.446.500.000	100,00	Bagian Organisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	321.387.650	100,00	1.565.100.000	100,00	838.200.000	100,00	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	3.968.499.300	100,00	4.923.999.300	100,00	4.923.999.300	100,00	Bagian Umum
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	- ,00	100,00	517.232.550	100,00	932.986.000	100,00	932.986.000	100,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)	- ,00	91,00	640.865.050	95,00	435.060.100	98,00	668.000.000	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil (%)	- ,00	91,00	97.522.650	95,00	195.806.714	98,00	240.000.000	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Sarana SIAK yang terpelihara (%)	- ,00	91,00	173.111.000	95,00	196.764.900	98,00	260.000.000	98,00	Dinas Kependudukan

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
											dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Kepemilikan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk ('%)	- ,00	91,00	8.769.300	95,00	79.300.400	98,00	100.000.000	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) ('%)	- ,00	100,00	5.683.000.000	100,00	7.460.470.000	100,00	7.015.126.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase diseminasi dan layanan infomasi publik yang dilaksanakan sesai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP yang telah ditetapkan ('%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerntah daerah kota yang menyebarkan infomasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota ('%)	- ,00	57,00		75,00		100,00		100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan Dinas Kominfo ('%)	- ,00	75,00	2.993.000.000	90,00	5.170.095.000	100,00	5.890.142.500	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ('%)	- ,00	45,00		90,00		100,00		100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ('%)	- ,00	22,00		90,00		100,00		100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase wirausaha muda ('%)	71,43	80,95	2.250.000.000	88,10	2.250.000.000	100,00	2.250.000.000	100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan atlet muda ('%)	57,14	60,71	66.404.000.000	64,29	66.404.000.000	67,86	66.404.000.000	38,57	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase pelatih yang berkualitas ('%)	91,23	94,74		98,25		100,00		58,60	
		Persentase pembinaan cabang olahraga ('%)	80,77	84,62		88,46		92,31		53,08	
		Persentase sarana dan prasarana olahraga ('%)	41,67	50,00		58,33		66,67		35,00	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023			
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik Sektoral	- ,00	100,00	30.000.000	100,00	535.000.000	100,00	365.000.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seuruh titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) pemerintah daerah yang ditetapkan ('%)	- ,00	- ,00	-	100,00	395.000.000	100,00	390.000.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan infomasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah ('%)	- ,00	- ,00	-	100,00		100,00		100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tercapainnya Pengelolaan Asip Dinamis Di OPD (Dokumen)	- ,00	43,00	36.542.200	43,00	790.000.000	43,00	200.000.000	43,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah Yang Mengelolah Arsip Secara baku (OPD)	- ,00	421,00	89.935.900	7.236,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah (Persentase)	- ,00	90,00	950.000.000	90,00	950.000.000	90,00	950.000.000	90,00	Bagian Hukum
		Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani (Persentase)	- ,00	90,00		90,00		90,00		90,00	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	- ,00	80,00	13.342.289.670	80,00	17.618.527.065	80,00	17.800.000.000	48,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	- ,00	100,00	1.355.000.000	100,00	2.235.000.000	100,00	2.450.000.000	100,00	Bagian Pemerintahan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD (Nilai)	- ,00	3,60	320.000.000	3,80	320.000.000	4,00	320.000.000	2,28	Bagian Pemerintahan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian pengawasan harga bahan pangan, migas bersubsidi dan kegiatan pembangunan daerah (Persen)	- ,00	100,00	374.640.000	100,00	374.640.000	100,00	374.640.000	100,00	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaaan Barang/Jasa ('%)	100,00	100,00	180.168.024	100,00	1.470.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD ('%)	- ,00	90,00	10.988.440.600	90,00	9.626.650.000	90,00	12.332.500.000	54,00	Sekretariat DPRD

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100,00	100,00	1.151.209.100	100,00	1.169.600.000	100,00	1.436.100.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terselesaikan (%)	100,00	100,00	700.246.000	100,00	1.370.000.000	100,00	1.445.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang Terselesaikan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah (%)	- ,00	90,00	80.494.281.123	90,00	88.016.701.335	90,00	92.640.127.548	90,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	- ,00	90,00	331.448.760	90,00	584.297.388	90,00	584.297.388	90,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian pendapatan asli daerah (%)	- ,00	90,00	2.398.491.007	90,00	2.872.910.412	90,00	3.253.493.692	54,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin (%)	- ,00	100,00	1.760.127.900	100,00	2.082.850.100	100,00	2.033.050.100	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase ASN yang lulus ujian dinas (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00	
		Persentase lembaga profesi yang terbentuk (%)	- ,00	- ,00		100,00		- ,00		- ,00	
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi (%)	- ,00	95,00		95,00		95,00		95,00	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	- ,00	0,22		0,36		0,36		0,36	
		Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik (%)	- ,00	- ,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT) (%)	- ,00	- ,00		95,00		95,00		95,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai (%)	- ,00	35,00	84.774.000	36,00	1.850.000.000	37,00	1.600.000.000	37,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase kebijakan penelitian dan pengembangan (persen)	- ,00	50,00	513.292.600	75,00	661.250.000	100,00	793.500.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Rekomendasi)	- ,00	35,00		30,00		30,00		30,00	
		Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Rekomendasi)	- ,00	40,00	772.898.825	35,00	469.157.675	30,00	1.968.176.904	30,00	Inspektorat Daerah
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (Kegiatan)	- ,00	15,00		15,00		15,00		15,00	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penanganan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ('%)	- ,00	100,00	51.711.900	100,00	216.711.900	100,00	458.017.994	100,00	Inspektorat Daerah
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP berkembang (Perangkat Daerah)	- ,00	10,00		10,00		10,00		10,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan ('%)	100,00	100,00	541.800.000	100,00	815.000.000	100,00	880.000.000	60,00	Kotamobagu Selatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan ('%)	85,00	90,00	606.750.000	90,00	3.185.000.000	90,00	3.187.500.000	54,00	Kotamobagu Selatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan ('%)	100,00	100,00	325.200.000	- ,00	-	100,00	30.000.000	40,00	Kotamobagu Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan ('%)	75,00	80,00	31.530.300	80,00	60.000.000	80,00	65.000.000	48,00	Kotamobagu Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan ('%)	- ,00	100,00	1.243.500.000	100,00	1.015.800.000	100,00	1.243.500.000	100,00	Kotamobagu Barat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan ('%)	- ,00	100,00	2.463.750.000	100,00	2.493.750.000	100,00	2.503.750.000	100,00	Kotamobagu Barat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan ('%)	- ,00	90,00	110.028.320	90,00	-	-,00	-	54,00	Kotamobagu Barat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu ('%)	- ,00	-,00	-	80,00	40.300.000	85,00	60.000.000	48,00	Kotamobagu Selatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan ('%)	90,00	100,00	1.088.683.200	100,00	1.394.300.000	100,00	1.396.800.000	60,00	Kotamobagu Timur

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2021		2022		2023			
			(Tahun)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan (%)	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	6.028.000.000	100,00	6.035.000.000	60,00	Kotamobagu Timur
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	480.000.000	- ,00	-	- ,00	-	20,00	Kotamobagu Timur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan (%)	75,00	-,00	-	90,00	46.807.900	90,00	50.000.000	54,00	Kotamobagu Timur
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu (%)	- ,00	-,00	-	90,00	162.500.000	90,00	162.500.000	54,00	Kotamobagu Timur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan (%)	90,00	95,00	46.873.000	100,00	46.873.000	100,00	46.873.000	59,00	Kotamobagu Utara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (%)	85,00	90,00	465.750.000	90,00	1.065.750.000	90,00	1.091.400.000	54,00	Kotamobagu Utara
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan (%)	- ,00	85,00	250.000.000	- ,00	-	- ,00	-	17,00	Kotamobagu Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan (%)	- ,00	- ,00	-	90,00	22.203.100	90,00	40.000.000	36,00	Kotamobagu Utara
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu (%)	- ,00	- ,00	-	90,00	35.340.000	90,00	75.000.000	36,00	Kotamobagu Utara

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021–2023 Kota Kotamobagu

NO	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
5	**BELANJA**	**616.180.452.114,11**	**606.404.845.816,41**	**638.065.154.549,00**	**702.569.683.880,00**	**704.929.474.760,00**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**509.538.930.490,36**	**487.417.615.402,11**	**495.053.960.351,00**	**537.747.875.642,00**	**561.918.280.562,00**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	233.668.418.740,00	227.964.218.914,00	255.231.855.808,00	255.231.855.808,00	262.639.555.726,71
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.241.705.836,36	250.389.559.988,11	227.016.310.843,00	269.710.226.134,00	285.713.116.728,21
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	17.171.805.914,00	3.017.886.500,00	6.381.279.700,00	6.381.279.700,00	6.759.904.279,25
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	13.457.000.000,00	6.045.950.000,00	6.424.514.000,00	6.424.514.000,00	6.805.703.827,83
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**106.641.521.623,75**	**103.502.462.900,30**	**75.701.791.598,00**	**96.562.405.638,00**	**75.701.791.598,00**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	478.671.898,00	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.536.159.874,80	66.877.024.039,40	20.531.068.113,00	31.331.068.113,00	24.562.540.392,01
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.412.806.295,95	17.826.307.655,00	29.999.214.308,00	39.999.214.308,00	31.358.085.640,28
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.238.193.905,00	17.817.058.905,90	24.351.734.077,00	24.351.734.077,00	19.090.969.057,44
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.975.689.650,00	938.622.300,00	819.775.100,00	880.389.140,00	690.196.508,27
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	0,00	**15.484.767.514,00**	**5.300.000.000,00**	**6.250.000.000,00**	**5.300.000.000,00**
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	0,00	15.484.767.514,00	5.300.000.000,00	6.250.000.000,00	5.300.000.000,00
6	**TRANSFER**	**66.343.372.250,00**	**47.573.689.100,00**	**62.009.402.600,00**	**62.009.402.600,00**	**62.009.402.600,00**
6 . 1	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	**1.300.000.000,00**	**521.387.500,00**	**652.447.500,00**	**652.447.500,00**	**652.447.500,00**
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	500.000.000,00	200.533.750,00	430.341.300,00	430.341.300,00	430.341.300,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	800.000.000,00	320.853.750,00	222.106.200,00	222.106.200,00	222.106.200,00
6 . 2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**65.043.372.250,00**	**47.052.301.600,00**	**61.356.955.100,00**	**61.356.955.100,00**	**61.356.955.100,00**
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	62.416.064.500,00	47.052.301.600,00	61.356.955.100,00	61.356.955.100,00	61.356.955.100,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	627.307.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, maka proyeksi Keuangan Daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja dengan proyeksi sebagai berikut.

1. **Prioritas I,** dialokasikan untuk pendanaan:
   a. **Program** prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
   b. **Program** prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

2. **Prioritas II,** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja seperti: tambahan penghasilan ASN, dan bantuan keuangan dan pemerintahan desa

Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi dan Kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.2

Indikasi Program Pembangunan Priorittas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Tahun 2021-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
SEMUA URUSAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	2.878.458.872	100,00	3.746.825.245	100,00	4.213.014.927	100,00	10.838.299.044	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	2.781.611.784	100,00	3.178.497.000	100,00	3.513.000.000	100,00	9.473.108.784	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	3.037.856.783	100,00	3.063.662.141	100,00	3.228.000.000	100,00	9.329.518.924	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	1.893.808.694	100,00	3.034.790.374	100,00	3.286.341.900	100,00	8.214.940.968	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	90,00	90,00	2.906.386.661	90,00	7.182.605.845	90,00	6.812.539.845	90,00	16.901.532.351	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	3.849.612.194	100,00	6.724.594.050	100,00	7.050.670.154	100,00	17.624.876.398	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kegiatan Layanan	'%	100,00	100,00	2.346.817.380	100,00	2.881.879.380	100,00	3.773.300.000	60,00	9.001.996.760	Dinas Penanaman Modal dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Perkantoran											Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	4.708.970.112	100,00	4.709.970.112	100,00	4.709.970.112	100,00	14.128.910.336	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	2.491.482.000	100,00	2.647.255.950	100,00	2.646.440.250	100,00	7.785.178.200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	2.083.917.096	100,00	12.775.388.546	100,00	2.625.388.546	100,00	17.484.694.188	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	5.335.550.124	100,00	6.508.000.000	100,00	7.064.000.000	100,00	18.907.550.124	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	90,00	100,00	3.100.961.516	100,00	3.444.273.366	100,00	4.205.080.600	100,00	10.750.315.482	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	90,00	3.114.900.000	90,00	5.053.000.000	90,00	6.068.500.000	90,00	14.236.400.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	19.951.034.709	100,00	20.218.694.952	100,00	20.507.204.389	60,00	60.676.934.050	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	3.968.499.300	100,00	4.923.999.300	100,00	4.923.999.300	100,00	13.816.497.900	Bagian Umum

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	933.252.150	100,00	909.652.150	100,00	914.652.150	100,00	2.757.556.450	Bagian Pemerintahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	814.000.000	100,00	835.000.000	100,00	835.000.000	100,00	2.484.000.000	Bagian Hukum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	517.232.550	100,00	932.986.000	100,00	932.986.000	100,00	2.383.204.550	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	317.661.350	100,00	506.319.200	100,00	548.352.000	60,00	1.372.332.550	Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	566.840.250	100,00	719.340.250	100,00	719.340.250	100,00	2.005.520.750	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	321.387.650	100,00	1.565.100.000	100,00	838.200.000	100,00	2.724.687.650	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Kinerja Organisasi	'%	- ,00	100,00	572.000.000	100,00	1.196.500.000	100,00	1.446.500.000	100,00	3.215.000.000	Bagian Organisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	20.954.278.709	100,00	23.421.680.132	100,00	24.388.041.632	100,00	68.764.000.473	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	4.163.044.636	100,00	4.925.200.000	100,00	4.939.700.000	100,00	14.027.944.636	Badan Perencanaan Penelitian dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
												Pengembangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	90,00	6.435.628.980	90,00	6.730.547.530	90,00	6.500.466.078	90,00	19.666.642.588	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	1.301.567.607	100,00	12.049.640.014	100,00	3.645.710.350	100,00	16.996.917.971	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	90,00	6.116.320.325	90,00	5.162.096.084	90,00	9.338.456.913	90,00	20.616.873.322	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	3.009.901.604	100,00	3.344.488.104	100,00	3.834.488.104	100,00	10.188.877.812	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	95,00	572.440.880	95,00	3.316.007.500	95,00	3.316.007.500	95,00	7.204.455.880	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	6.260.813.786	100,00	6.986.554.000	100,00	7.382.554.000	60,00	20.629.921.786	Kotamobagu Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	4.090.389.997	100,00	4.360.440.000	100,00	4.587.175.000	60,00	13.038.004.997	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	7.434.032.358	100,00	7.712.291.518	100,00	7.772.579.268	100,00	22.918.903.144	Kotamobagu Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kegiatan Layanan	'%	100,00	100,00	4.159.617.721	100,00	4.165.437.271	100,00	4.313.908.115	60,00	12.638.963.107	Kotamobagu Utara

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Perkantoran											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	89.310.021.508	100,00	89.570.595.508	100,00	89.573.595.508	100,00	268.454.212.524	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	41.708.244.000	100,00	42.185.923.870	100,00	43.310.045.064	100,00	127.204.212.934	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	2.706.212.550	100,00	3.211.261.750	100,00	3.677.500.000	100,00	9.594.974.300	UPTD RSUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	95,00	610.916.400	95,00	761.000.000	95,00	736.000.000	95,00	2.714.916.400	UPTD FARMASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	100,00	100,00	7.518.337.946	100,00	8.738.278.916	100,00	10.453.137.800	100,00	26.709.754.662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	90,00	95,00	4.203.124.450	95,00	4.493.279.750	95,00	4.617.718.450	95,00	20.444.682.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	98,00	3.412.521.252	98,00	2.911.400.152	98,00	3.069.558.155	98,00	9.393.479.559	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	95,00	2.223.044.012	95,00	2.697.914.150	95,00	3.356.024.250	95,00	8.276.982.412	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	95,00	95,00	2.625.898.950	95,00	2.523.568.490	95,00	2.868.948.000	95,00	8.018.415.440	Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran	'%	- ,00	100,00	3.760.765.834	100,00	4.249.790.000	100,00	4.320.290.000	100,00	12.330.845.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	'%	- ,00	87,99	35.531.658.491	88,59	49.168.363.461	89,20	43.399.182.461	89,20	128.099.204.413	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	'%	- ,00	0,52		0,46		0,41		0,41		
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	'%	- ,00	59,04		65,55		72,78		72,78		
	Angka pendidikan yang ditamatkan (SMP/MTs)	'%	- ,00	2,23		2,26		2,29		2,29		
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	'%	- ,00	95,99		96,16		96,32		96,32		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	'%	- ,00	99,83		99,93		99,97		99,97		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	'%	- ,00	86,97		87,49		88,01		88,01		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	'%	- ,00	90,92		92,55		94,22		94,22		
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	'%	- ,00	78,93		79,33		79,73		79,73		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	'%	- ,00	78,23		78,85		79,47		79,47		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	'%	- ,00	0,07		0,05		0,04		0,04		
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	'%	- ,00	80,72		83,52		86,42		86,42		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	'%	- ,00	87,99		88,59		89,20		89,20		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	'%	- ,00	99,87		99,90		99,93		99,93		
	Angka pendidikan yang ditamatkan (SD/MI)	'%	- ,00	1,67		1,69		1,71		1,71		
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	'%	- ,00	86,67		93,33		95,01		95,01		
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	'%	- ,00	61,79		64,44		66,99		66,99		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah yang menerapakan	'%	- ,00	82,14	181.902.100	82,14	273.021.600	82,14	273.021.600	49,28	727.945.300	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Kurikulum Muatan Lokal											
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	'%	- ,00	81,01	475.367.900	81,53	400.000.000	82,05	400.000.000	82,05	1.275.367.900	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosesentase Sekolah/Lembaga Kursus yang dikelola Masyarakat yang memiliki Izin Operasional Aktif	'%	- ,00	- ,00	0	100,00	82.000.000	100,00	82.000.000	60,00	164.000.000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Prosentase Sekolah yang aktif menerapkan Hari Khusus Berbahasa Daerah	'%	- ,00	46,62	0	46,62	167.877.830	46,62	175.000.000	46,62	342.877.830	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	'%	- ,00	100,00	34.850.078.829	100,00	38.371.804.734	100,00	36.344.098.946	100,00	109.565.982.509	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	kesehatan sesuai standar											
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	'%	- ,00	0,42		0,42		0,42		0,42		
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		10		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	pelayanan persalinan									0,00		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	'%	80,60	82,00	87.692.356.943	85,00	81.443.839.440	90,00	83.014.160.000	90,00	252.150.356.383	UPTD RSUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan serta Koordinasi tentang mutu obat	paket/kali	- ,00	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	45.000.000	95,00	135.000.000	UPTD FARMASI

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentasi tenaga kesehatan yang terkualifikasi sesuai standar	'%	- ,00	90,00	1.548.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	1.242.000.000	90,00	4.032.000.000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	'%	49,52	18,75	5.276.832.800	17,97	5.000.000.000	17,66	4.800.000.000	54,38	15.076.832.800	UPTD RSUD
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Yang Memiliki Izin	'%	- ,00	100,00	222.426.000	100,00	378.668.600	100,00	416.535.460	100,00	1.017.630.060	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	'%	- ,00	90,00	585.715.200	90,00	602.000.000	90,00	697.000.000	90,00	1.884.715.200	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi kewenangan kota	Persen	- ,00	83,00	1.552.811.213	83,00	6.571.543.470	85,00	8.612.040.000	85,00	16.736.394.683	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	Persen	50,00	80,00	6.425.136.909	90,00	7.434.661.909	100,00	9.900.000.000	100,00	23.759.798.818	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan fasilitas penanganan sampah di perkotaan	Persen	- ,00	70,00	207.870.900	70,00	722.870.900	80,00	700.000.000	80,00	1.630.741.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	40,59	41,46	2.504.818.987	42,00	2.831.818.987	45,00	5.378.379.200	45,00	10.715.017.174	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	80,00	95,79	1.720.989.850	98,42	3.807.154.075	100,00	8.300.000.000	100,00	13.828.143.925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan paving dikawasan strategis daerah	Persen	60,00	80,00	901.171.966	95,00	3.314.671.966	100,00	5.600.000.000	100,00	9.815.843.932	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	Persen	- ,00	60,00	89.676.200	70,00	2.353.186.425	70,00	3.600.000.000	70,00	6.042.862.625	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya	Persen	- ,00	- ,00	0	- ,00	0	70,00	400.000.000	70,00	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN KOTA DALAM KONDISI BAIK (>40 KM/JAM)	Persen	70,56	74,00	19.889.449.045	74,00	45.452.738.259	74,70	68.664.000.000	74,70	134.006.187.304	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	- ,00	70,00	49.766.800	70,00	200.000.000	80,00	400.000.000	80,00	649.766.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	20,69	39,43	578.159.400	39,43	2.416.007.100	39,58	4.803.567.500	39,58	7.797.734.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	- ,00	100,00	1.515.896.137	100,00	660.475.000	100,00	648.160.000	100,00	2.824.531.137	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	Persen	- ,00	23,08		38,46		38,46		38,46		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	Persen	93,80	100,00	6.528.451.700	100,00	3.812.315.000	100,00	2.062.315.000	100,00	12.403.081.700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi kumuh	Persen	- ,00	- ,00	0	26,62	1.750.000.000	40,00	2.500.000.000	40,00	4.250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi	Persen	17,81	19,35	8.628.012.102	27,06	8.231.675.000	39,94	8.159.175.000	39,94	25.018.862.102	Dinas Perumahan Rakyat dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)											Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Persen	- ,00	- ,00	0	14,29	54.700.000	28,57	109.400.000	42,86	164.100.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	'%	- ,00	85,00	1.773.620.000	85,00	4.049.825.000	90,00	3.599.825.000	52,00	9.423.270.000	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Anggota Linmas yang diberdayakan	'%	- ,00	100,00	600.000.000	100,00	0	100,00	0	60,00	600.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan kerugian material dan korban bencana	Persen	- ,00	90,00	57.458.000	90,00	238.636.960	90,00	2.191.812.500	90,00	2.487.907.460	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00		
	Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	'%	- ,00	62,79	501.550.000	62,79	1.169.170.000	62,79	1.037.420.000	62,79	2.708.140.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Waktu tanggap respon time penanganan kebakaran	waktu	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	'%	- ,00	3,15	278.971.700	5,26	304.000.000	7,36	628.400.000	7,36	1.211.371.700	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	yang diberdayakan											
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	'%	- ,00	23,95	221.052.450	23,95	455.354.000	23,95	626.854.000	23,95	1.303.260.450	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani melalui perlindungan dan jaminan sosial	'%	- ,00	100,00	93.569.000	100,00	248.645.786	100,00	429.510.000	100,00	771.724.786	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Pengelolaan Taman makam pahlawan	'%	100,00	100,00	50.294.000	100,00	74.972.827	100,00	200.000.000	100,00	325.266.827	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	'%	100,00	100,00	151.973.600	100,00	138.340.500	100,00	72.152.000	100,00	362.466.100	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	'%	- ,00	3,75	100.000.000	6,00	300.000.000	8,00	500.000.000	8,00	900.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	'%	- ,00	3,71	150.000.000	3,71	400.000.000	3,71	750.000.000	3,71	1.300.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	'%	- ,00	31,25	100.000.000	64,14	145.000.000	88,82	190.000.000	88,82	435.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	'%	- ,00	- ,00	0	90,00	30.000.000	90,00	30.000.000	90,00	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	'%	58,65	58,75	250.000.000	58,80	1.300.000.000	58,85	1.350.000.000	58,85	2.900.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan Korban kekerasan per 1000 orang	'%	- ,00	0,10	708.710.000	0,09	738.010.000	0,08	775.510.000	0,08	2.222.230.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	penduduk (usia 18 tahun ke atas)											Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	'%	38,51	95,37	680.843.200	95,38	940.000.000	95,39	1.185.791.000	95,39	2.806.634.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rasio anak yang terdata di Kabupaten/Kota per 1000 anak (Usia kandungan -18 tahun)	'%	- ,00	100,00	30.000.000	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	'%	- ,00	100,00	155.000.000	100,00	215.000.000	100,00	275.000.000	100,00	645.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	'%	- ,00	0,11	607.375.200	0,12	802.500.000	0,14	730.000.000	0,14	2.139.875.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	('%)	100,00	100,00	2.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	60,00	44.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	'%	15,00	15,00	958.489.920	15,00	1.442.686.800	15,00	2.071.475.000	9,00	4.472.651.720	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,00	91,00		91,00		91,00		54,60		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor	5,00	5,00	68.960.000	5,00	91.580.000	5,00	113.330.000	3,00	273.870.000	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	('%)	90,00	90,00	55.474.460	90,00	111.029.000	90,00	166.423.500	54,00	332.926.960	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	- ,00	100,00	147.485.000	- ,00	0	- ,00	0	100,00	147.485.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	Persen	- ,00	100,00	39.892.700	100,00	15.500.000	100,00	15.500.000	100,00	70.892.700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	- ,00	100,00	18.960.750	- ,00	0	- ,00	0	100,00	18.960.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap	Persen	- ,00	100,00	76.648.800	- ,00	0	- ,00	0	100,00	76.648.800	Dinas Perumahan Rakyat dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee											Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Persen	- ,00	100,00	56.933.300	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	156.933.300	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	- ,00	100,00	239.797.200	- ,00	0	- ,00	0	100,00	239.797.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persen	- ,00	100,00	171.511.050	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	211.511.050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASI USAHA KEGIATAN YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	- ,00	80,00	479.970.900	85,00	100.000.000	90,00	1.250.000.000	90,00	1.829.970.900	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASI PARAMETER PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	Persen	- ,00	100,00	241.392.200	100,00	351.000.000	100,00	470.000.000	100,00	1.062.392.200	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LOKASI PENGELOLAAN	persen	- ,00	- ,00	0	100,00	500.000.000	100,00	1.000.000.000	10	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									0,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASI USAHA/KEGIATAN YANG MENDAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT USAHA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	- ,00	100,00	10.322.000	100,00	10.500.000	100,00	25.000.000	100,00	45.822.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Penghargaan	- ,00	1,00	46.908.000	1,00	53.000.000	1,00	65.000.000	3,00	164.908.000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH PERKOTAAN YANG TERTANGANI	Persen	95,83	96,00	7.130.479.300	96,50	8.089.000.000	97,00	10.050.000.000	97,00	25.269.479.300	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	'%	- ,00	91,00	97.522.650	95,00	195.806.714	98,00	240.000.000	98,00	533.329.364	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	'%	- ,00	91,00	640.865.050	95,00	435.060.100	98,00	668.000.000	98,00	1.743.925.150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Sarana SIAK yang terpelihara	'%	- ,00	91,00	173.111.000	95,00	196.764.900	98,00	260.000.000	98,00	629.875.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Kepemilikan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk	'%	- ,00	91,00	8.769.300	95,00	79.300.400	98,00	100.000.000	98,00	188.069.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penatan Desa	'%	- ,00	- ,00	0	100,00	300.000.000	100,00	200.000.000	100,00	500.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	'%	- ,00	- ,00	0	33,33	300.000.000	46,67	450.000.000	80,00	750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	'%	- ,00	100,00	1.061.901.777	100,00	2.289.222.752	100,00	1.250.000.000	100,00	4.601.124.529	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat yang diberdayakan	'%	- ,00	18,64	43.241.150	59,32	835.000.000	59,32	775.000.000	59,32	1.653.241.150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Rata Rata Jumlah	Jumlah	2,38	2,10	189.905.800	2,07	644.016.400	2,04	552.016.400	1,24	1.385.938.600	Dinas Pengendalian Penduduk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Anak Dalam Keluarga											dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Presentase	25,00	75,00	2.291.638.090	75,00	2.387.574.300	75,00	2.434.574.300	45,00	7.113.786.690	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Anggota Kelompok Yang Ber-KB	Presentase	68,25	68,50	137.105.600	68,75	3.357.000.000	69,00	3.357.200.000	41,25	6.851.305.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prsentase Fasilitasi Keselamatan Berlalu lintas	Persentase	- ,00	80,00	1.626.240.000	80,00	11.338.259.500	80,00	19.099.543.750	48,00	32.064.043.250	Dinas Perhubungan
	Jumlah Titik Pengawasan	Titik	15,00	20,00		25,00		25,00		21,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	'%	- ,00	100,00	5.683.000.000	100,00	7.460.470.000	100,00	7.015.126.000	100,00	20.158.596.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase diseminasi dan layanan infomasi publik yang dilaksanakan sesai dengan strategi komunikasi	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	(Strakom) dan SOP yang telah ditetapkan											
	Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerntah daerah kota yang menyebarkan infomasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	'%	- ,00	57,00		75,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan Dinas Kominfo	'%	- ,00	75,00	2.993.000.000	90,00	5.170.095.000	100,00	5.890.142.500	100,00	14.053.237.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	'%	- ,00	45,00		90,00		100,00		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	'%	- ,00	22,00		90,00		100,00		100,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	'%	- ,00	33,33	32.522.800	60,60	32.522.800	100,00	50.000.000	100,00	115.045.600	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	'%	- ,00	69,69	172.985.400	84,84	172.985.400	100,00	207.582.480	100,00	553.553.280	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	'%	- ,00	3,28	534.383.500	3,28	852.318.600	3,59	1.030.782.320	3,59	2.417.484.420	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	'%	- ,00	- ,00	0	0,79	112.500.000	- ,00	112.500.000	- ,00	225.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		74,33	- ,00	0	91,66	550.000.000	100,00	400.000.000	100,00	950.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentasi Promosi Penanaman Modal		- ,00	14,29	15.000.000	42,86	200.000.000	42,86	200.000.000	42,86	415.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentasi Pelayanan Penerbitan Perizinan		100,00	- ,00	0	100,00	215.000.000	100,00	215.000.000	60,00	430.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		- ,00	33,07	322.573.000	49,41	322.573.000	100,00	322.573.000	36,50	967.719.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi	Nilai	81,00	- ,00	0	85,00	35.000.000	86,00	35.000.000	84,00	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase wirausaha muda	'%	71,43	80,95	2.250.000.000	88,10	2.250.000.000	100,00	2.250.000.000	100,00	6.750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pelatih yang berkualitas	'%	91,23	94,74	66.404.000.000	98,25	66.404.000.000	100,00	66.404.000.000	58,60	199.212.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase pembinaan cabang olahraga	'%	80,77	84,62		88,46		92,31		53,08		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase sarana dan prasarana olahraga	'%	41,67	50,00		58,33		66,67		35,00		
	Persentase pembinaan atlet muda	'%	57,14	60,71		64,29		67,86		38,57		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik Sektoral	%	- ,00	100,00	30.000.000	100,00	535.000.000	100,00	365.000.000	100,00	930.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seuruh titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) pemerintah daerah yang ditetapkan	'%	- ,00	- ,00	0	100,00	395.000.000	100,00	390.000.000	100,00	785.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan infomasi (SMKI)	'%	- ,00	- ,00	0	100,00		100,00		100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan budaya daerah	'%	- ,00	100,00	110.000.000	100,00	355.000.000	100,00	355.000.000	100,00	820.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM yang menguasai kesenian tradisional	'%	- ,00	- ,00	0	100,00	35.000.000	- ,00	0	- ,00	35.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	'%	- ,00	- ,00	0	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	'%	- ,00	33,00	100.000.000	66,00	500.000.003	100,00	500.000.003	100,00	1.100.000.006	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah Pengunjung	- ,00	118,00	357.695.350	118,00	550.000.000	118,00	925.000.000	118,00	1.832.695.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Koleksi Buku yang tersedia Di Perpustakaan Daerah	Koleksi Buku	- ,00	18.351,00		19.851,00		21.351,00		21.351,00		
	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	- ,00	2.496,00		2.7		3.0		3.0		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Buku				96,00		96,00		96,00		
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Jumlah Perpustakaan	- ,00	37,00		37,00		37,00		37,00		
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah Kunjungan	- ,00	500,00		500,00		500,00		500,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tercapainnya Pengelolaan Asip Dinamis Di OPD	Dokumen	- ,00	43,00	36.542.200	43,00	790.000.000	43,00	200.000.000	43,00	1.026.542.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah Yang Mengelolah Arsip Secara baku	OPD	- ,00	421,00	89.935.900	7.236,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	439.935.900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	Ton	- ,00	791,00	812.951.050	801,00	2.415.400.000	813,00	2.390.000.000	813,00	5.618.351.050	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	'%	- ,00	- ,00		90,00		90,00		90,00		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengendalian Sumber Daya Perikanan	'%	- ,00	- ,00	0	80,00	50.000.000	80,00	60.000.000	80,00	110.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	'%	- ,00	100,00	54.000.000	93,00	875.000.000	93,00	175.000.000	93,00	1.104.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang di promosikan	'%	- ,00	- ,00	0	84,00	664.550.000	84,00	664.550.000	84,00	1.329.100.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	'%	100,00	100,00	29.296.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	60,00	149.296.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	'%	- ,00	- ,00	1.484.220.150	0,13	2.830.000.000	0,13	2.825.000.000	0,13	7.139.220.150	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Cakupan Bina Kelompok Tani	'%	- ,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan	'%	- ,00	85,00	963.077.650	85,00	4.126.000.000	85,00	1.450.000.000	85,00	6.539.077.650	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	'%	- ,00	100,00	274.228.500	100,00	955.000.000	100,00	941.000.000	100,00	2.170.228.500	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	'%	- ,00	100,00	37.227.650	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	157.227.650	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase gabungan kelompok tani	'%	- ,00	80,00	263.967.250	80,00	920.000.000	80,00	985.000.000	80,00	2.168.967.250	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas											dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Penunjang sarana dan Prasarana	'%	- ,00	75,00	441.000.000	75,00	1.225.200.000	100,00	375.000.000	50,00	2.041.200.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Ambang Batas Kenaikan Harga	'%	- ,00	- ,00	0	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	50.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	'%	- ,00	- ,00	0	2,11	83.200.000	5,28	106.292.000	5,28	189.492.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk dalam Negeri yang dipromosikan dan dipasarkan	'%	- ,00	100,00	102.583.750	100,00	102.583.750	100,00	102.583.750	100,00	307.751.250	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IUI) kecil	'%	- ,00	- ,00	0	20,00	100.000.000	20,00	100.000.000	20,00	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait											
	persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota	'%	- ,00	- ,00		20,00		20,00		20,00		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang Dikembangkan	'%	70,87	16,51	650.000.000	27,23	1.350.000.000	27,13	2.050.000.000	27,13	4.050.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi	'%	- ,00	- ,00	0	20,00	300.000.000	20,00	350.000.000	20,00	650.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi	'%	- ,00	- ,00		20,00		20,00		20,00		
SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	- ,00	100,00	1.355.000.000	100,00	2.235.000.000	100,00	2.450.000.000	100,00	6.040.000.000	Bagian Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	Persentase	- ,00	90,00	950.000.000	90,00	950.000.000	90,00	950.000.000	90,00	2.850.000.000	Bagian Hukum
	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase	- ,00	90,00		90,00		90,00		90,00		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	- ,00	80,00	13.342.289.670	80,00	17.618.527.065	80,00	17.800.000.000	48,00	48.760.816.735	Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD	Nilai	- ,00	3,60	320.000.000	3,80	320.000.000	4,00	320.000.000	2,28	960.000.000	Bagian Pemerintahan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian pengawasan harga bahan pangan, migas bersubsidi dan kegiatan pembangunan daerah	Persen	- ,00	100,00	374.640.000	100,00	374.640.000	100,00	374.640.000	100,00	1.123.920.000	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaaan Barang/Jasa	'%	100,00	100,00	180.168.024	100,00	1.470.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	3.150.168.024	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
SEKRETARIAT DPRD												
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	'%	- ,00	90,00	10.988.440.600	90,00	9.626.650.000	90,00	12.332.500.000	54,00	32.947.590.600	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	'%	100,00	100,00	1.151.209.100	100,00	1.169.600.000	100,00	1.436.100.000	100,00	3.756.909.100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terselesaikan	'%	100,00	100,00	700.246.000	100,00	1.370.000.000	100,00	1.445.000.000	100,00	3.515.246.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang Terselesaikan	'%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
KEUANGAN												
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	'%	- ,00	90,00	80.494.281.123	90,00	88.016.701.335	90,00	92.640.127.548	90,00	261.151.110.006	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	'%	- ,00	90,00	331.448.760	90,00	584.297.388	90,00	584.297.388	90,00	1.500.043.536	Badan Pengelola Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian pendapatan asli daerah	'%	- ,00	90,00	2.398.491.007	90,00	2.872.910.412	90,00	3.253.493.692	54,00	8.524.895.111	Badan Pengelola Keuangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
KEPEGAWAIAN												
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase lembaga profesi yang terbentuk	'%	- ,00	- ,00	1.760.127.900	100,00	2.082.850.100	- ,00	2.033.050.100	- ,00	5.876.028.100	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi	'%	- ,00	95,00		95,00		95,00		95,00		
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	'%	- ,00	0,22		0,36		0,36		0,36		
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik	'%	- ,00	- ,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)	'%	- ,00	- ,00		95,00		95,00		95,00		
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase ASN yang lulus ujian dinas	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		60,00		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai	'%	- ,00	35,00	84.774.000	36,00	1.850.000.000	37,00	1.600.000.000	37,00	3.534.774.000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase kebijakan penelitian dan pengembangan	persen	- ,00	50,00	513.292.600	75,00	661.250.000	100,00	793.500.000	100,00	1.968.042.600	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
INSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Rekomendasi	- ,00	35,00	772.898.825	30,00	469.157.675	30,00	1.968.176.904	30,00	3.210.233.404	Inspektorat Daerah
	Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Rekomendasi	- ,00	40,00		35,00		30,00		30,00		
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan	Kegiatan	- ,00	15,00		15,00		15,00		15,00		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP berkembang	Perangkat Daerah	- ,00	10,00	51.711.900	10,00	216.711.900	10,00	458.017.994	10,00	726.441.794	Inspektorat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase penanganan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	'%	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
KECAMATAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	90,00	100,00	1.088.683.200	100,00	1.394.300.000	100,00	1.396.800.000	60,00	3.879.783.200	Kotamobagu Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	100,00	100,00	541.800.000	100,00	815.000.000	100,00	880.000.000	60,00	2.236.800.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	- ,00	100,00	1.243.500.000	100,00	1.015.800.000	100,00	1.243.500.000	100,00	3.502.800.000	Kotamobagu Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	90,00	95,00	46.873.000	100,00	46.873.000	100,00	46.873.000	59,00	140.619.000	Kotamobagu Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	'%	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	6.028.000.000	100,00	6.035.000.000	60,00	13.263.000.000	Kotamobagu Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	'%	85,00	90,00	606.750.000	90,00	3.185.000.000	90,00	3.187.500.000	54,00	6.979.250.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	'%	- ,00	100,00	2.463.750.000	100,00	2.493.750.000	100,00	2.503.750.000	100,00	7.461.250.000	Kotamobagu Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	'%	85,00	90,00	465.750.000	90,00	1.065.750.000	90,00	1.091.400.000	54,00	2.622.900.000	Kotamobagu Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	'%	100,00	100,00	480.000.000	- ,00	0	- ,00	0	20,00	480.000.000	Kotamobagu Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/ Kecamatan	'%	100,00	100,00	325.200.000	- ,00	0	100,00	30.000.000	40,00	355.200.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/ Kecamatan	'%	- ,00	90,00	110.028.320	90,00	0	- ,00	0	54,00	110.028.320	Kotamobagu Barat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/ Kecamatan	'%	- ,00	85,00	250.000.000	- ,00	0	- ,00	0	17,00	250.000.000	Kotamobagu Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	'%	75,00	- ,00	0	90,00	46.807.900	90,00	50.000.000	54,00	96.807.900	Kotamobagu Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	'%	75,00	80,00	31.530.300	80,00	60.000.000	80,00	65.000.000	48,00	156.530.300	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	'%	- ,00	- ,00	0	90,00	22.203.100	90,00	40.000.000	36,00	62.203.100	Kotamobagu Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	'%	- ,00	- ,00	0	90,00	162.500.000	90,00	162.500.000	54,00	325.000.000	Kotamobagu Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	'%	- ,00	- ,00	0	80,00	40.300.000	85,00	60.000.000	48,00	100.300.000	Kotamobagu Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran	'%	- ,00	- ,00	0	90,00	35.340.000	90,00	75.000.000	36,00	110.340.000	Kotamobagu Utara

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	yang diselesaikan tepat waktu											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	'%	- ,00	100,00	89.197.000	100,00	109.197.000	100,00	109.197.000	100,00	307.591.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	'%	- ,00	100,00	715.717.850	100,00	715.717.850	100,00	715.717.850	100,00	2.147.153.550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	'%	- ,00	100,00	13.687.350	100,00	13.687.350	100,00	25.000.000	100,00	52.374.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	'%	- ,00	100,00	97.351.300	100,00	97.351.300	100,00	97.351.300	100,00	292.053.900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	'%	- ,00	100,00	513.736.150	100,00	1.033.528.100	100,00	1.033.528.100	100,00	2.580.792.350	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah sebelum dan sesudah Perubahan RPJMD Kota kotamobagu Tahun 2018-2023 selanjutnya disajikan dalam Tabel sebagai berikut

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemeritah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitasi kinerja. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Pemeritah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2020 dan Target Tahun 2021-2023 seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Capaian	Target	Capaian
		2018	2019	2019	2020	2020
PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	23,68	25,09	28,78	26,5	29,01
Tingkat Pengangguran	%	5,71	5,68	5,62	5,6	7,44
PDRB Perkapita (ADHK	Juta Rupiah	17,06	17,53	18,64	18	18,34
Persentase penduduk miskin	%	5,96	5,94	5,71	5,92	5,42
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	69,26	73	93,57	75	59,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86,8	86,91	83,57	87,06	0
Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	100	100	100	100
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	22,08	24	65,33	26	70,11
Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	85	88,38	34,41	91,32	35,37
Persentase Rumah Layak Huni	%	96,58	97,33	97,29	98,06	98,22

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Capaian	Target	Capaian
		2018	2019	2019	2020	2020
Presentase Destinasi yang di Kembangkan	%	5	0	0,00	40	100
Nilai Investasi	Juta Rupiah	3.928.588	1.400.000	116.640	1.400.000	13.116.187
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	63,7	70	66,16	75	On Progres
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	74,37	81	67,52	90	
Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi	%	18,18	36,36	51,49	63,64	
Presentase Peningkatan PAD	%	10	10	0,23	10	
Persentase penegakan peraturan daerah	%	100	100	100	100	95
Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100
cakupan penanganan bencana	Indeks	100	100	100	100	100
Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Kategori	PRATAMA	PRATAMA	pratama	MADYA	Tidak dilaksanakan Pusat/daerah

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Capaian	Target	Capaian
		2018	2019	2019	2020	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,78	94,8	94,78	94,82	95,37
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,48	57,48		57,49	
Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional	%	42,14	45	56,66	47,5	0
Angka Rata-Rata lama sekolah	Tahun	9,97	10,19	10,09	10,41	10,10
Angka harapan hidup	Tahun	69,72	69,74	70,33	69,75	70,47
Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional	%	0	0		12,5	
Persentase Budaya yang dilestarikan	%	25	50		75	

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu
Tahun 2019-2023

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			target	target	target	target
Indeks Kualitas Pendidikan	INDEKS		0,69	0,7	0,70	0,70
Angka Harapan Hidup	TAHUN		70,50	70,60	70,70	70,70
Persentase Kemiskinan	PERSEN		5,4	5,4	5,37	5,37
Predikat Kota Layak Anak	PREDIKAT		MADYA	MADYA	MADYA	MADYA
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	INDEKS		95,37	95,37	95,40	95,40
PDRB ADHK	JUTA RUPIAH		2.526.665,03	2.665.631,61	2.814.906,98	2.814.906,98
Nilai Investasi	MILIAR RUPIAH		170	343	343	5.000
Indeks Infrastruktur	INDEKS		54,99	55,01	55,09	55,09
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	INDEKS		58,23	58,33	58,44	58,44

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			target	target	target	target
Nilai SAKIP	NILAI		70	71	72	72
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	OPINI		WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks SPBE	INDEKS		2,5	2,75	2,85	2,85
Indeks Pelayanan Publik	INDEKS		70	70	88	88

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja utama Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Berikut gambaran target IKU Perangkat Daerah seprti pada tabel berikut.

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
1	**DINAS PENDIDIKAN**				
	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	95,99	96,16	96,32
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	%	78,93	79,33	79,73
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	78,23	78,85	79,47
	Angka Partisipasi Murni(APM) SMP/MTs/Paket B	%	87,99	88,59	89,2
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	86,97	87,49	88,01
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	87,99	88,59	89,2
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,79	64,44	66,99
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,83	99,85	99,87
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,87	99,88	99,89
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,07	0,05	0,04

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,52	0,46	0,41
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,01	81,53	82,05
	Presentase Guru Tersertifikasi	%	61,2	61,22	61,24
2	**DINAS KESEHATAN**				
	Angka kematian bayi	Per 1000 Penduduk	7,8	7,64	7,49
	Angka kematian ibu	Per 100.000 Penduduk	296,43	290,5	284,69
	IKM Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Konversi	BAIK	BAIK	BAIK
	IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Konversi	BAIK	BAIK	BAIK
	Persentasi penurunan penderita penyakit tidak menular Hipertensi	%	6,97	6,62	6,29
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	4,89	4,69	4,51
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	190	180,5	171,48
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Kataatan Terhadap RTRW	%	39,43	39,43	39,58
	Persentase penurunan titik genangan air pada kawasan perkotaan	%	88	89	90
	Volume debit air irigasi	Liter/Detik	981,6	981,6	981,6
	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	80	81	82
	Persentase penduduk berakses air minum	%	77	78	80
	Persentase sambungan rumah (sr) yang berakses sanitasi	%	41,5	42,5	45
4	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Memiliki Rumah Layak Huni	%	99,7	99,84	100
	Persentase Perumahan Yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	19,35	27,06	39,94
	Presentase Penurunan Wilayah Kumuh	%	3,24	26,62	40
5	**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				
	Persentase Anggota Linmas Terlatih dan Dikukuhkan	%	80	80	80
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	%	5	5	5

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	%	70	70	70
	Respon Time Kebakaran	%	85	85	85
6	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	100	100	100
	Persentase Jumlah Bencana Yang Tertangani Sesuai SOP	%	100	100	100
	Persentase rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100
7	**DINAS SOSIAL**				
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	%	3,15	5,26	7,36
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Aktif	%	31,7	31,7	31,7
8	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya
	Jumlah penurunan Kekerasan Terhadap Anak	Kasus	80	75	70
	Jumlah penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan	Kasus	50	45	40

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	94,84	94,85	94,86
9	**DINAS KETAHANAN PANGAN**				
	Jumlah Ketersediaan Energi Perkapita	Energi perkapita	2.150	2.150	2.150
	Jumlah Ketersediaan Protein Perkapita	Protein perkapita	57	57	57
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	PPh	91	91	91
	Persentase Cadangan Pangan	%	15	15	15
10	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				
	Indeks Kualitas Air	Indeks	44	44,09	44,2
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	23	23,09	23,2
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,5	90,61	90,72
	Persentase Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk Ke TPA	%	74	73	72
	Presentase Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Mengelola Sampah	%	26	27	28
11	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,87	89,87	89,87
	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	96	96,5	97
	Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	%	96	96,5	97
12	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
	Persentase Menurunnya Jumlah Penganguran	%	36,6	31,72	31,68
13	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	1,55	1,50	1,45
	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	%	64	67	70
	Meningkatnya iBangga	Nilai	0	48	60
14	**DINAS PERHUBUNGAN**				
	Kendaraan Laik Jalan	Jumlah	1.650	1.814	1.995
	Menurunnya angka kecelakaan	Jumlah	72	62	52
15	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	54,55	7.727	100
	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi dan informatika	%	85	95	100
	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	81	83	85
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	25	35	40
16	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**				
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	4,1	7,95	7,36
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	84	85
17	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
	Jumlah pemuda berprestasi	Jumlah	34	37	4
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	94,74	98,25	100

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Presentase atlet yang berprestasi	%	63,33	66,67	70
	Presentase prestasi cabang olahraga	%	73,08	76,92	80,77
18	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**				
	Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan	%	10,39	14,29	18,18
	Jumlah Wisatawan	Orang	50.000	55.000	60.000
19	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**				
	Persentase Kunjungan Siswa	%	2	3	5
	Indeks Pengawasan Arsip	Indeks	25	30	52
20	**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**				
	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	Ton	791	801	813
	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	65,9	67,22	68,57
	Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	1.731,73	1.753,69	1.775,41
	Jumlah Produksi Peternakan Telur dan Daging	Ton	2.561	2.563,56	2.566,12

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	25.454,40	25.963,50	26.482,80
21	**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM**				
	Pengendalian Stabilitas Harga	%	95	95	95
	Presentasi koperasi yang sehat	%	45,45	51,52	57,58
	Prsentase Kenaikan Omset UMKM	%	2	2	2
22	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN**				
	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	5,09	5,09	5,09
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	3,98	3,99	4
23	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	%	80	95	100
	Persentase fasilitasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%	100	100	100
	Persentase kelembagaan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100
	Persentase kepastian hukum	%	100	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100
	Persentase pelayanan keprotokolan	%	100	100	100
	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kdh dan wkdh	%	100	100	100
	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah	%	100	100	100
	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan	%	100	100	100
24	**SEKRETARIAT DPRD**				
	Indeks kepuasan layanan terhadap anggota DPRD	%	95	95	95
25	**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				
	Persentase Keselarasan Program Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	%	95	95	95
	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	%	85	85	85
	Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	%	75	75	75
26	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	%	100	100	100
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10	10	10
	Ratio Penerimaan Daerah dari pusat dan daerah	Rasio	0,17	0,17	0,17
	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	%	90	90	90
	Persentase Penurunan Nilai Aset Rusak	%	8	10	15
27	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	BAIK	BAIK	BAIK
	Indeks Kualitas ASN	%	99	99	99
28	**INSPEKTORAT DAERAH**				
	Level kapabilitas APIP	Level	3	3	3
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2021	2022	2023
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal maupun eksternal	%	85	85	85
	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3
29	**KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT**				
	Persentase Lingkungan yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan	%	95	95	95
30	**KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN**				
	Persentase Dusun/RW yang memperoleh manfaat kegiatan pemberdayaan	%	87	87	87
31	**KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR**				
	Persentase Lingkungan/Dusun Yang Memperoleh Manfaat Kegiatan Pemberdayaan	%	95	95	95
32	**KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA**				
	Persentase Masyarakat yang menerima manfaat dalam kegiatan pemberdayaan Desa/Kelurahan	%	62	62	62
33	**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK**				
	Persentase kegiatan deteksi dini potensi konflik	%	83	90	95

Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Kotamobagu

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Pertubuhan Ekonomi	%	- ,00	5,4	5,5	5,6	5,6	
PDRB Per Kapita ADHK	Ribu Rupiah	- ,00	18,34	18,63	18.90	18.90	
PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	- ,00	29,01	28,78	30,97	30,97	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	- ,00	7,43	7,42	7,41	7,41	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	- ,00	72,00	72,00	72,50	72,50	
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	- ,00	10,11	10,12	10,13	10,13	
Rasio Gini	Rasio	- ,00	0,322	0,322	0,322	0,322	
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	- ,00	2.526.665,03	2.665.631,61	2.814.906,98	2.814.906,98	
Persentase Kemiskinan	%	- ,00	5,40	5,40	5,37	5,37	
Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	- ,00	0,69	0,70	0,70	0,70	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Angka Harapan Hidup	Tahun	- ,00	70,50	70,60	70,70	70,70	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	- ,00	95,37	95,37	95,40	95,40	
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0	0,89	1,00	1,00	1,00	
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	0,99	1,00	1,00	1,00	
Rasio PAD	Rasio	0	0,13	0,14	0,14	0,14	
Nilai Investasi	Milyar		170	343	343	5.000,00	
Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,00	91,00	91,00	91,00	54,60	
Prosentase Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	'%	15,00	15,00	15,00	15,00	9,00	
PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	0	7,52	7,53	7,54	7,54	
Ketersediaan Protein	Perkapita	0	57	57	57	57	
Ketersediaan Energi	Perkapita	0	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rasio	0	0,18	0,18	0	0,12	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	0	4,1	7,95	7,36	7,36	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Nilai SAKIP	Nilai	- ,00	70,00	71,00	72,00	72,00	
Predikat Kota Layak Anak	Predikat		Madya	Madya	Madya	Madya	
Indeks SPBE	Indeks	- ,00	2,50	2,75	2,85	2,85	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	- ,00	70,00	70,00	88,00	88,00	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	- ,00	58,23	58,33	58,44	58,44	
Indeks Infrastruktur	Indeks	- ,00	54,99	55,01	55,09	55,09	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	'%	- ,00	87,99	88,59	89,20	89,20	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	'%	- ,00	0,52	0,46	0,41	0,41	
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	'%	- ,00	59,04	65,55	72,78	72,78	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Angka pendidikan yang ditamatkan (SMP/MTs)	'%	- ,00	2,23	2,26	2,29	2,29	
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	'%	- ,00	95,99	96,16	96,32	96,32	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	'%	- ,00	99,83	99,93	99,97	99,97	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	'%	- ,00	86,97	87,49	88,01	88,01	
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	'%	- ,00	90,92	92,55	94,22	94,22	
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	'%	- ,00	78,93	79,33	79,73	79,73	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	'%	- ,00	78,23	78,85	79,47	79,47	
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	'%	- ,00	0,07	0,05	0,04	0,04	
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	'%	- ,00	80,72	83,52	86,42	86,42	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	'%	- ,00	87,99	88,59	89,20	89,20	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	'%	- ,00	99,87	99,90	99,93	99,93	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Angka pendidikan yang ditamatkan (SD/MI)	'%	- ,00	1,67	1,69	1,71	1,71	
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	'%	- ,00	86,67	93,33	95,01	95,01	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	'%	- ,00	61,79	64,44	66,99	66,99	
Prosentase Sekolah yang menerapakan Kurikulum Muatan Lokal	'%	- ,00	82,14	82,14	82,14	49,28	
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	'%	- ,00	81,01	81,53	82,05	82,05	
Prosesentase Sekolah/Lembaga Kursus yang dikelola Masyarakat yang memiliki Izin Operasional Aktif	'%	- ,00	- ,00	100,00	100,00	60,00	
Prosentase Sekolah yang aktif menerapkan Hari Khusus Berbahasa Daerah	'%	- ,00	46,62	46,62	46,62	46,62	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
pelayanan kesehatan sesuai standar							
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	'%	- ,00	0,42	0,42	0,42	0,42	
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	'%	80,60	82,00	85,00	90,00	90,00	UPTD RSUD
Terlaksananya Pemusnahan Obat Dan Perbekalan Kesehatan serta Koordinasi tentang mutu obat	paket/kali	- ,00	95,00	95,00	95,00	95,00	UPTD FARMASI

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentasi tenaga kesehatan yang terkualifikasi sesuai standar	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan
Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	'%	49,52	18,75	17,97	17,66	54,38	UPTD RSUD
Persentase Sarana Yang Memiliki Izin	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Persentase jaringan irigasi yang melayani daerah irigasi kewenangan kota	Persen	- ,00	83,00	83,00	85,00	85,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	Persen	50,00	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase ketersediaan fasilitas penanganan sampah di perkotaan	Persen	- ,00	70,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	40,59	41,46	42,00	45,00	45,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	80,00	95,79	98,42	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase panjang jalan paving dikawasan strategis daerah	Persen	60,00	80,00	95,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase bangunan gedung yang tertata	Persen	- ,00	60,00	70,00	70,00	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase kawasan yang tertata bangunan dan lingkungannya	Persen	- ,00	- ,00	- ,00	70,00	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PERSENTASE JALAN KOTA DALAM KONDISI BAIK (>40 KM/JAM)	Persen	70,56	74,00	74,00	74,70	74,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	- ,00	70,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketaatan terhadap RTRW	Persen	20,69	39,43	39,43	39,58	39,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	Persen	- ,00	23,08	38,46	38,46	38,46	
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	Persen	93,80	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi kumuh	Persen	- ,00	- ,00	26,62	40,00	40,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	17,81	19,35	27,06	39,94	39,94	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Pengembang yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Persen	- ,00	- ,00	14,29	28,57	42,86	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	'%	- ,00	85,00	85,00	90,00	52,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Anggota Linmas yang diberdayakan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan kerugian material dan korban bencana	Persen	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	60,00	
Persentase jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	60,00	
Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	'%	- ,00	62,79	62,79	62,79	62,79	Satuan Polisi Pamong Praja
Waktu tanggap respon time penanganan kebakaran	waktu	- ,00	100,00	100,00	100,00	60,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan	'%	- ,00	3,15	5,26	7,36	7,36	Dinas Sosial
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi	'%	- ,00	23,95	23,95	23,95	23,95	Dinas Sosial

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
kebutuhan dasarnya di luar panti							
Presentase PMKS yang tertangani melalui perlindungan dan jaminan sosial	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
Presentase Pengelolaan Taman makam pahlawan	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	'%	- ,00	3,75	6,00	8,00	8,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Presentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	'%	- ,00	3,71	3,71	3,71	3,71	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	'%	- ,00	31,25	64,14	88,82	88,82	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	'%	- ,00	- ,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	'%	58,65	58,75	58,80	58,85	58,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio Perempuan Korban kekerasan per 1000 orang penduduk (usia 18 tahun ke atas)	'%	- ,00	0,10	0,09	0,08	0,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	'%	38,51	95,37	95,38	95,39	95,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
							Perlindungan Anak
Rasio anak yang terdata di Kabupaten/Kota per 1000 anak (Usia kandungan -18 tahun)	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	'%	- ,00	0,11	0,12	0,14	0,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	('%)	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Dinas Ketahanan Pangan
Prosentase Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	'%	15,00	15,00	15,00	15,00	9,00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,00	91,00	91,00	91,00	54,60	Dinas Ketahanan Pangan
Skor Penanganan Daerah Rawan Pangan	Skor	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	Dinas Ketahanan Pangan
Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	('%)	90,00	90,00	90,00	90,00	54,00	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	- ,00	100,00	- ,00	- ,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	- ,00	100,00	- ,00	- ,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
							Kawasan Permukiman
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	- ,00	100,00	- ,00	- ,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	- ,00	100,00	- ,00	- ,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Persentase Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
PERSENTASI USAHA KEGIATAN YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	- ,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Dinas Lingkungan Hidup
PERSENTASI PARAMETER PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
PERSENTASE LOKASI PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persen	- ,00	- ,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
PERSENTASI USAHA/KEGIATAN YANG MENDAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT USAHA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	Penghargaan	- ,00	1,00	1,00	1,00	3,00	Dinas Lingkungan Hidup
PERSENTASE PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH	Persen	95,83	96,00	96,50	97,00	97,00	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
PERKOTAAN YANG TERTANGANI							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Presentase Kepemilikan Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	'%	- ,00	91,00	95,00	98,00	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	'%	- ,00	91,00	95,00	98,00	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase Sarana SIAK yang terpelihara	'%	- ,00	91,00	95,00	98,00	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Presentase Kepemilikan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk	'%	- ,00	91,00	95,00	98,00	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Persentase Peningkatan Penatan Desa	'%	- ,00	- ,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	'%	- ,00	- ,00	33,33	46,67	80,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat yang diberdayakan	'%	- ,00	18,64	59,32	59,32	59,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
Menurunnya Rata Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	Jumlah	2,38	2,10	2,07	2,04	1,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Presentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Presentase	25,00	75,00	75,00	75,00	45,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Presentase Anggota Kelompok Yang Ber-KB	Presentase	68,25	68,50	68,75	69,00	41,25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
Prsentase Fasilitasi Keselamatan Berlalu lintas	Persentase	- ,00	80,00	80,00	80,00	48,00	Dinas Perhubungan
Jumlah Titik Pengawasan	Titik	15,00	20,00	25,00	25,00	21,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase diseminasi dan layanan infomasi publik yang dilaksanakan sesai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP yang telah ditetapkan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerntah daerah kota yang menyebarkan infomasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan Dinas Kominfo	'%	- ,00	75,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	'%	- ,00	45,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	'%	- ,00	22,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	'%	- ,00	33,33	60,60	100,00	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	'%	- ,00	69,69	84,84	100,00	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	'%	- ,00	3,28	3,28	3,59	3,59	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	'%	- ,00	- ,00	0,79	- ,00	- ,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal		74,33	- ,00	91,66	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
							Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Presentasi Promosi Penanaman Modal		- ,00	14,29	42,86	42,86	42,86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Presentasi Pelayanan Penerbitan Perizinan		100,00	- ,00	100,00	100,00	60,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		- ,00	33,07	49,41	100,00	36,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi	Nilai	81,00	- ,00	85,00	86,00	84,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
							Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Presentase wirausaha muda	'%	71,43	80,95	88,10	100,00	100,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Persentase pelatih yang berkualitas	'%	91,23	94,74	98,25	100,00	58,60	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Persentase pembinaan cabang olahraga	'%	80,77	84,62	88,46	92,31	53,08	
Persentase sarana dan prasarana olahraga	'%	41,67	50,00	58,33	66,67	35,00	
Persentase pembinaan atlet muda	'%	57,14	60,71	64,29	67,86	38,57	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
Persentase Data statistik Sektoral	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seuruh titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) pemerintah daerah yang ditetapkan	'%	- ,00	- ,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan infomasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	'%	- ,00	- ,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
Persentase Pengembangan budaya daerah	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase SDM yang menguasai kesenian tradisional	'%	- ,00	- ,00	100,00	- ,00	- ,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Pengelolaan Permuseuman	'%	- ,00	- ,00	- ,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	'%	- ,00	33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah Pengunjung	- ,00	118,00	118,00	118,00	118,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Koleksi Buku yang tersedia Di Perpustakaan Daerah	Koleksi Buku	- ,00	18.351,00	19.851,00	21.351,00	21.351,00	
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah Buku	- ,00	2.496,00	2.796,00	3.096,00	3.096,00	
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Jumlah Perpustakaan	- ,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah Kunjungan	- ,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
Tercapainnya Pengelolaan Asip Dinamis Di OPD	Dokumen	- ,00	43,00	43,00	43,00	43,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Perangkat daerah Yang Mengelolah Arsip Secara baku	OPD	- ,00	421,00	7.236,00	100,00	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	Ton	- ,00	791,00	801,00	813,00	813,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	'%	- ,00	- ,00	90,00	90,00	90,00	
Cakupan Pengendalian Sumber Daya Perikanan	'%	- ,00	- ,00	80,00	80,00	80,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	'%	- ,00	100,00	93,00	93,00	93,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase destinasi pariwisata yang di promosikan	'%	- ,00	- ,00	84,00	84,00	84,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
Produktivitas pertanian perhektar pertahun	'%	- ,00	- ,00	0,13	0,13	0,13	Dinas Pertanian dan Perikanan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Cakupan Bina Kelompok Tani	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Persentase prasarana yang digunakan	'%	- ,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Persentase gabungan kelompok tani yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas	'%	- ,00	80,00	80,00	80,00	80,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
Persentase Peningkatan Penunjang sarana dan Prasarana	'%	- ,00	75,00	75,00	100,00	50,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Ambang Batas Kenaikan Harga	'%	- ,00	- ,00	1,00	1,00	1,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	'%	- ,00	- ,00	2,11	5,28	5,28	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Jenis Produk dalam Negeri yang dipromosikan dan dipasarkan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	'%	- ,00	- ,00	20,00	20,00	20,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
persentase jumlah hasil dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota	'%	- ,00	- ,00	20,00	20,00	20,00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Prosentase IKM yang Dikembangkan	'%	70,87	16,51	27,23	27,13	27,13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi	'%	- ,00	- ,00	20,00	20,00	20,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Presentase data perusahaan IKM yang terupdate dalam aplikasi	'%	- ,00	- ,00	20,00	20,00	20,00	
SEKRETARIAT DAERAH							
Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Pemerintahan
Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	Persentase	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Bagian Hukum
Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	- ,00	80,00	80,00	80,00	48,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Nilai LPPD	Nilai	- ,00	3,60	3,80	4,00	2,28	Bagian Pemerintahan
Persentase capaian pengawasan harga bahan pangan, migas bersubsidi dan kegiatan pembangunan daerah	Persen	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Persentase Pengadaaan Barang/Jasa	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
SEKRETARIAT DPRD							
Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	54,00	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN							
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Presentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terselesaikan	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Dokumen Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang Terselesaikan	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengembangan Daerah
KEUANGAN							
Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Persentase peningkatan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Persentase capaian pendapatan asli daerah	'%	- ,00	90,00	90,00	90,00	54,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN							
Persentase lembaga profesi yang terbentuk	'%	- ,00	- ,00	100,00	- ,00	- ,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi	'%	- ,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	'%	- ,00	0,22	0,36	0,36	0,36	
Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik	'%	- ,00	- ,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)	'%	- ,00	- ,00	95,00	95,00	95,00	
Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase ASN yang lulus ujian dinas	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	60,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai	'%	- ,00	35,00	36,00	37,00	37,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
persentase kebijakan penelitian dan pengembangan	persen	- ,00	50,00	75,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
INSPEKTORAT DAERAH							
Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Rekomendasi	- ,00	35,00	30,00	30,00	30,00	Inspektorat Daerah
Jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Rekomendasi	- ,00	40,00	35,00	30,00	30,00	
Jumlah pelaksanaan kegiatan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan	Kegiatan	- ,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP berkembang	Perangkat Daerah	- ,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Inspektorat Daerah
Persentase penanganan laporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
KECAMATAN							

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	90,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Kotamobagu Timur
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Kotamobagu Selatan
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kotamobagu Barat
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat pada kegiatan Perencanaan Pembangunan	'%	90,00	95,00	100,00	100,00	59,00	Kotamobagu Utara
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	'%	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	Kotamobagu Timur
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	'%	85,00	90,00	90,00	90,00	54,00	Kotamobagu Selatan
Persentase tingkat partisipasi Masyarakat yang akan diberdayakan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kotamobagu Barat
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	'%	85,00	90,00	90,00	90,00	54,00	Kotamobagu Utara

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	'%	100,00	100,00	- ,00	- ,00	20,00	Kotamobagu Timur
Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	'%	100,00	100,00	- ,00	100,00	40,00	Kotamobagu Selatan
Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	'%	- ,00	90,00	90,00	- ,00	54,00	Kotamobagu Barat
Perselisihan masyarakat yang berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan	'%	- ,00	85,00	- ,00	- ,00	17,00	Kotamobagu Utara
Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	'%	75,00	- ,00	90,00	90,00	54,00	Kotamobagu Timur
Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	'%	75,00	80,00	80,00	80,00	48,00	Kotamobagu Selatan
Persentase pegawai syari dan petugas agama yang mendapat pembinaan	'%	- ,00	- ,00	90,00	90,00	36,00	Kotamobagu Utara

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	'%	- ,00	- ,00	90,00	90,00	54,00	Kotamobagu Timur
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	'%	- ,00	- ,00	80,00	85,00	48,00	Kotamobagu Selatan
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	'%	- ,00	- ,00	90,00	90,00	36,00	Kotamobagu Utara
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
Persentase Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan

Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				PD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			target	target	target	target	
							Bangsa dan Politik
Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Pencegahan Potensi Konflik	'%	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IX
PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Implementasi P-RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 ini dengan sebaik-baiknya;

2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;

3. Peraturan Daerah tentang P-RPJMD Tahun 2018-2023 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Walikota/Wakil Walikota, PD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;

4. Walikota wajib untuk mempublikasikan P-RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Dengan demikian, masing-masing anggota DPRD dalam rangka

menjaring aspirasi/reses ke daerah pemilihannya, sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam P-RPJMD;

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan P-RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Kotamobagu berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);

6. Bappelitbangda Kota Kotamobagu berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil terhadap dokumen P-RPJMD 2018-2023.

P-RPJMD ini disusun sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Kota Kotamobagu.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA